

DISERTASI

**PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI JAWA TENGAH ERA OTONOMI DAERAH
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Muyassarrah - NIM: 2000029003



Otonomi daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua umat, sehingga penanggulangan kemiskinan lebih cepat. Namun realitas kemiskinan masih tinggi dan program penanggulangan kemiskinan berorientasi *pareto optimality*, sehingga kemiskinan belum terselesaikan secara komprehensif. Mengapa program bantuan pemerintah penting dalam penanggulangan masyarakat miskin di Jawa Tengah era otonomi daerah perspektif ekonomi Islam dan bagaimana peran *stakeholder* dalam program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah era otonomi daerah perspektif ekonomi Islam.

Persoalan ini diselesaikan melalui studi *field research* yakni penelitian lapangan dan dianalisa secara fenomenologi dan deskriptif menggunakan logika dan refleksi. Temuan penelitian ini yaitu *pertama*, program penanggulangan kemiskinan sangat lambat karena anggaran dan kebijakan pemerintah daerah masih bergantung pada pusat bahkan program penanggulangan kemiskinan hanya berorientasi penyerapan anggaran. *Kedua*, peran pemerintah menggenjot program penanggulangan kemiskinan belum mampu mewujudkan perubahan kemandirian masyarakat miskin, karena kebijakan pemerintah bersifat *paretooptimality*, karena bantuan tidak disesuaikan kondisi dan penyebab kemiskinan serta mengabaikan keterlibatan kewirausahaan orang miskin. Peran masyarakat pasif karena dianggap program bantuan sosial itu tanggung jawabnya pemerintah, sehingga dalam hal ini peran tokoh masyarakat hanya berorientasi pada moral atau akhlak. Sedangkan orang miskin belum mampu memberdayakan dirinya agar mandiri dan belum berpartisipasi aktif dalam upaya penanganan kemiskinan Prinsip tauhid, khalifah dan keadilan sudah diimplementasikan pemerintah maupun masyarakat, namun perlu dilakukan penanaman agar kelompok miskin menyadari, termotivasi, beritikad, bekerja keras agar ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi, sehingga pemerintah daerah tidak mengedepankan pendekatan *pareto optimality* dalam pembangunan ekonomi.



**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PASCA SARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG 2023**



DISERTASI

**PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI JAWA TENGAH ERA OTONOMI DAERAH
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Muyassarrah
NIM: 2000029003

2023

DISERTASI

**PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI JAWA TENGAH ERA OTONOMI DAERAH
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**



Muyassarrah
NIM: 2000029003



**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM
PASCA SARJANA
UIN WALISONGO SEMARANG 2023**

**PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI JAWA TENGAH ERA OTONOMI DAERAH
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

DISERTASI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Doktor (S.3)
Dalam Bidang Ekonomi Islam



Oleh :

Muyassarah
NIM: 2000029003

**PROGRAM DOKTOR STUDI ISLAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) WALISONGO
SEMARANG
2023**

PENYATAAN KEASLIAN DISERTASI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Lengkap : Muyassarah
NIM : 2000029003
Program Studi : Doktor Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam

menyatakan bahwa disertasi yang berjudul:
**PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DI JAWA TENGAH ERA OTONOMI DAERAH
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri,
kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 10 November 2023
Pembuat Pernyataan,



Muyassarah
NIM: 2000029003

NOTA DINAS

Semarang, 10 November 2023

Kepada
Yth. Direktur
Pascasarjana
UIN
Walisongo
Di Semarang

Assalamu'alaikum wr. wb.

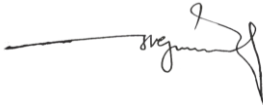
Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap disertasi yang ditulis oleh:

Nama : Muyassarah
NIM : 2000029003
Program Studi : Doktor Studi Islam
Konsentrasi : Ekonomi Islam
Judul : **PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN DI JAWA TENGAH
ERA OTONOMI DAERAH
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

Kami memandang bahwa disertasi tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diajukan dalam Sidang Ujian Disertasi. (Terbuka)

Wasaalamu 'alaikum wr. wb.

Promotor,



Prof. Dr. H Abdul Ghofur, M.Ag.
NIP. 196701171997031001

Ko-Promotor,



Dr. H. Ali Murtadho, M.Ag.
NIP. 197108301998031003



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA

Jl. Walisongo 3-5 Semarang 50185, Telp./Fax: 024--7614454, 70774414

FDD: 38

PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERBUKA

Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan bahwa disertai saudara:

Nama : Muyassarah

NIM : 2000029003

Judul : PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH ERA
OTONOMI DAERAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

telah diujikan pada 23 November 2023 dan dinyatakan:

LULUS

dalam Ujian Terbuka Disertasi Program Doktor sehingga dapat dilakukan Yudisium Doktor.

NAMA	TANGGAL	TANDATANGAN
<u>Prof. H. Nizar, M.Ag.</u> Ketua/Promotor/Penguji	<u>23-11-2023</u>	
<u>Prof. Dr.H.Musahadi, M.Ag.</u> Sekretaris/Penguji	<u>23-11-2023</u>	
<u>Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag.</u> Promotor/Penguji	<u>23-11-2023</u>	
<u>Dr. H. Ali Murtadho, M.Ag.</u> Kopromotor/Penguji	<u>23-11-2023</u>	
<u>Prof. Drs. H. Sri Walyoto, MM. Ph.D</u> Penguji	<u>23-11-2023</u>	
<u>Prof Dr. Hj. Siti Mujibatun, M.Ag</u> Penguji	<u>23-11-2023</u>	
<u>Dr. H. Wahab, MM</u> Penguji	<u>23-11-2023</u>	
<u>Dr.H.Muhyar Fanani, M.Ag</u> Penguji	<u>23-11-2023</u>	

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam disertasi ini berpedoman pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/ U/ 1987.

ا	Tak ber lambang	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	s	غ	G
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Ẓ	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	ṣ	ي	Y
ض	d		

Bacaan Panjang :

ā= a panjang

ī= i panjang

ū= u panjang

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-]

Bacaan Diftong:

au= أُو

ai= اِي

iy= اِي

Abstrak

Otonomi daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan semua umat, sehingga penanggulangan kemiskinan lebih cepat. Namun realitas kemiskinan masih tinggi dan program penanggulangan kemiskinan berorientasi *pareto optimality*, sehingga kemiskinan belum terselesaikan secara komprehensif.

Studi ini menjawab pertanyaan: Mengapa program bantuan pemerintah penting dalam penanggulangan masyarakat miskin di Jawa Tengah era otonomi daerah perspektif ekonomi Islam dan bagaimana peran *stakeholder* dalam program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah era otonomi daerah perspektif ekonomi Islam.

Persoalan ini diselesaikan melalui studi *field research* yakni penelitian lapangan dan dianalisa secara fenomenologi dan deskriptif menggunakan logika dan refleksi. Temuan penelitian ini yaitu *pertama*, program penanggulangan kemiskinan sangat lamban karena anggaran dan kebijakan pemerintah daerah masih bergantung pada pusat bahkan program penanggulangan kemiskinan hanya berorientasi penyerapan anggaran. *Kedua*, peran pemerintah menggenjot program penanggulangan kemiskinan belum mampu mewujudkan perubahan kemandirian masyarakat miskin, karena kebijakan pemerintah bersifat *pareto optimality*, karena bantuan tidak disesuaikan kondisi dan penyebab kemiskinan serta mengabaikan keterlibatan kewirausahaan orang miskin. peran masyarakat pasif karena dianggap program bantuan sosial itu tanggung jawabnya pemerintah, sehingga dalam hal ini peran tokoh masyarakat hanya berorientasi pada moral atau akhlak. Sedangkan orang miskin belum mampu memberdayakan dirinya agar mandiri dan belum berpartisipasi aktif dalam upaya penanganan kemiskinan Prinsip tauhid, khalifah dan keadilan sudah diimplementasikan pemerintah maupun masyarakat, namun perlu dilakukan penajaman agar kelompok miskin menyadari, termotivasi berdikari, bekerja keras agar ikut terlibat dalam kegiatan ekonomi, sehingga pemerintah daerah tidak mengedepankan pendekatan *pareto optimality* dalam pembangunan ekonomi.

Kata kunci: Program Penanggulangan Kemiskinan, Otonomi Daerah, Ekonomi Islam

Abstract

Regional autonomy aims to improve the welfare of all people, so that poverty alleviation is faster. However, the reality of poverty is still high and poverty alleviation programs are pareto optimality oriented, so that poverty has not been resolved comprehensively.

This study answers the questions: 1) Why is the government assistance program important in overcoming the poor in Central Java in the era of regional autonomy from an Islamic economic perspective. 2) What is the role of stakeholders in poverty alleviation programs in Central Java in the era of regional autonomy from an Islamic economic perspective.

This problem is resolved through field research studies, namely field research and analyzed phenomenologically and descriptively using logic and reflection. The findings of this study are first, the poverty alleviation program is very slow because local government budgets and policies are still dependent on the center, even poverty alleviation programs are only oriented towards budget absorption . Second, the government's role in boosting poverty alleviation programs has not been able to realize changes in the independence of the poor, because government policies are pareto optimality, because assistance is not adjusted to the conditions and causes of poverty and ignores the entrepreneurial involvement of the poor. the role of the community is passive because it is considered that social assistance programs are the responsibility of the government, so that in this case the role of community leaders is only oriented towards morals or morals. Meanwhile, the poor have not been able to empower themselves to be independent and have not actively participated in efforts to deal with poverty. so that local governments ignore the pareto optimality approach in economic development.

Keywords: *Poverty Reduction Program, Regional Autonomy, Islamic Economics*

خلاصة

يهدف الحكم الذاتي الإقليمي إلى تحسين رفاهية جميع الناس ، بحيث يتم ومع ذلك ، فإن واقع الفقر لا يزال . التخفيف من حدة الفقر بشكل أسرع مرتفعاً وبرامج التخفيف من حدة الفقر موجهة إلى باريتو الأمثل ، بحيث لم يتم حل الفقر بشكل شامل

لماذا يعد برنامج المساعدة)١(:تجيب هذه الدراسة على الأسئلة التالية الحكومية مهمًا في التغلب على الفقراء في جاوا الوسطى في عصر ما هو دور)٢(.) الاستقلال الإقليمي من منظور اقتصادي إسلامي أصحاب المصلحة في برامج التخفيف من حدة الفقر في وسط جاوا في عصر الاستقلال الذاتي الإقليمي من منظور اقتصادي إسلامي .

يتم حل هذه المشكلة من خلال الدراسات البحثية الميدانية وبالتحديد البحث الميداني وتحليل الظواهر والوصف باستخدام المنطق والتفكير ، ونتائج هذه الدراسة أولاً ، برنامج التخفيف من حدة الفقر بطيء للغاية لأن ميزانيات وسياسات الحكومة المحلية لا تزال تعتمد على المركز ، حتى برامج التخفيف من حدة الفقر موجهة فقط نحو استيعاب الميزانية

ثانياً ، لم يكن دور الحكومة في تعزيز برامج التخفيف من حدة الفقر قادراً على إحداث تغييرات في استقلالية الفقراء ، لأن السياسات الحكومية هي سياسة باريتو المثالية ، لأن المساعدة لا تتلاءم مع ظروف فقير . الفقر وأسبابه وتجاهل مشاركة رجال الأعمال في تنظيم المشاريع دور المجتمع سلبي لأنه يعتبر أن برامج المساعدة الاجتماعية هي

مسؤولية الحكومة ، بحيث يكون دور قادة المجتمع في هذه الحالة موجهاً وفي الوقت نفسه ، لم يتمكن الفقراء من فقط نحو الأخلاق أو الأخلاق تمكين أنفسهم ليكونوا مستقلين ولم يشاركوا بنشاط في جهود التعامل مع الفقر ، بحيث تتجاهل الحكومات المحلية نهج باريتو الأمثل في التنمية الاقتصادية .

برنامج الحد من الفقر ، الحكم الذاتي الإقليمي ، :الكلمات المفتاحية
الاقتصاد الإسلامي

MOTTO

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri (Surat ar-Ra’du: 11)

PERSEMBAHAN

Disertasi ini, saya persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua; bapak H Sardani (almarhum) dan ibu Hj. Tarmi yang telah mendidik dan mendoakanku
2. Mertua: Bapak Ismail (almarhum) dan Ibu Hj Naimah (almarhumah) yang selalu membimbing dan mendoakanku
3. Suamiku tercinta, Mansur yang dengan kesabaran mendampingi dan tetap memberikan semangat.
4. Kedua putraku: Mohammad Abdurrahman Rois dan Muhammad Burhanudin Abdullah sebagai anak-anak yang sholih. Serta menantuku Nadia Kusumaningrum terima kasih atas segala pengertian dan menjadikan hidup ini lebih indah dan bermakna.
5. Semua santri Pondok Pesantren Ar-Rois yang telah mendoakan dan memberikan dukungan semangat dengan tulus.

Disertasi ini semoga dapat memotivasi untuk terus belajar sepanjang hidup, dan dapat bermanfaat serta maslahat. Amin.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala limpahan rahmat, hidayah dan inayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi yang berjudul: Program Penanggulangan Kemiskinan Di Jawa Tengah Era Otonomo Daerah Perspektif Ekonomi Islam, dengan baik tanpa banyak kendala yang berarti. Shalawat dan salam senantiasa penulis sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat-sahabat dan para pengikutnya yang telah membawa Islam dan mengembangkannya hingga sekarang.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya disertasi ini bukanlah hasil jerih payah penulis secara pribadi. Tetapi semua itu merupakan wujud akumulasi dari usaha dan bantuan, pertolongan serta doa dari berbagai pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan disertasi ini. Oleh karena itu, penulis sampaikan banyak terimakasih kepada:

1. Plt Rektor UIN Walisongo Semarang, Prof. Dr. H.Nizar, M.Ag..
2. Direktur Pascasarjana UIN Walisongo, Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag. sekaligus selaku promotor yang telah memberikan perhatian dan waktu untuk membimbing penulis menyelesaikan disertasi
3. Wakil direktur pascasarjana UIN Walisongo Semarang Dr. H.A.Muhyar Fanani, M.Ag seluruh pengajar dan para tenaga Pendidikan yang telah membeikan pelayanan akademik maupun non akademik kepada penulis dengan baik
4. Prof. Dr. H. Fatah Syukur, M.Ag. Selaku Ketua Program Studi Doktor Studi Islam UIN Walisongo Semarang.
5. Dr. H. Muhammad Sulthon, M.Ag selaku Sekretaris Program Studi Doktor Studi Islam UIN Walisongo Semarang.
6. Dr. H. Ali Murtadho, M.Ag. selaku ko-promotor, terimakasih atas

bimbingan dan pengarahan yang diberikan dengan sabar dan tulus ikhlas.

7. Keluarga besar fakultas ekonomi dan bisnis Islam UIN Walisongo memberikan dukungan dan memotivasi penulis.
8. Teman-teman seperjuangan terutama kelas S3 Angkatan 2020 yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih atas semangat dan pertemanan yang kompak.

Akhir kata penulis berharap semoga disertasi ini dapat bermanfaat khususnya bagi diri pribadi penulis dan umumnya bagi kita semua. Amin, *Yā Rabbal ‘ālamīn*.

Semarang, 10 November 2023

Penulis,



Muyassarah

NIM.200002903

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA DINAS	iii
PENGESAHAN MAJELIS PENGUJI UJIAN TERTUTUP	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	v
ABSTRAK.....	vi
MOTTO.....	ix
PERSEMBAHAN.....	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	vxiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	24
C. Tujuan dan Signifikasi Penelitian	25
D. Kajian Pustaka	26
E. Kerangka Teoritik	32

F. Metode Penelitian	35
G. Sistematika Penulisan	52

**BAB II TEORI PROGRAM PENANGGULANGAN
KEMISKINAN ERA OTONOMI DAERAH
PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM**

A. Teori Kemiskinan.....	54
1. Pengertian dan Bentuk-bentuk Kemiskinan.....	54
2. Ciri- ciri Kemiskinan dan Faktor Penyebab Kemiskinan	59
3. Indikator Kemiskinan	61
4. Kemiskinan dalam Islam	63
B. Teori Kebijakan Publik.....	68
1. Kebijakan Publik dalam Menanggulangi Kemiskinan..	68
2. Proses Pembuatan Kebijakan Publik	75
3. Peran <i>Stakeholder</i> dalam Penanggulangan Kemiskinan	78
4. kebijakan Publik dalam Islam.....	80
C. Teori Program Bantuan.....	88
1. Pengertian dan Tujuan Bantuan Sosial.....	88
2. Instrumen Penanganan Kemiskinan	92
3. Prosedur Penyusunan Anggaran Program Bantuan....	94
4. Macam-macam Program Bantuan	99
5. Program Bantuan dalam Islam	106
D. Teori Pembangunan Ekonomi	111

1. Pengertian dan Indikator Keberhasilan Pembangunan	111
2. Macam-macam Teori Pembangunan Ekonomi	113
3. Konsep Kesejahteraan dalam Pembangunan ekonomi Islam.....	116
4. Pembangunan dalam Ekonomi Islam	123
E. Teori Pemberdayaan Masyarakat	138
1. Pengertian dan tahapan pemberdayaan masyarakat ...	138
2. Macam-macam Teori Pemberdayaan Masyarakat	143
3. Pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi Islam.....	152
F. Teori Otonomi Daerah	166
1. Sejarah Dinamika Otonomi Daerah	166
2. Dampak Otonomi Daerah.....	168
3. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah	169
4. Strategi <i>Good Governance</i>	171
5. Desentralisasi Fiskal.....	176
6. Otonomi Daerah dalam Ekonomi Islam.....	191

BAB III URGENSI PROGRAM PENANGGULANGAN

KEMISKINAN DI JAWA TENGAH ERA OTONOMI DAERAH

A. Urgensi Program Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah	198
B. Arah Pembangunan Ekonomi di Jawa Tengah	212
C. Program Bantuan untuk Masyarakat Jawa Tengah.....	218

1. PKH/Program Keluarga Harapan	228
2. BST/ Bantuan Sosial Tunai	231
3. BPNT/Bantuan Pangan Non Tunai.....	237
4. KJS/Kartu Jateng Sejahtera	239
5. BLT/Bantuan Langsung Tunai	242

**BAB IV PERAN *STAKEHOLDER* DALAM PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA
TENGAH ERA OTONOMI DAERAH PERSPEKTIF
EKONOMI ISLAM**

A. Peran Pemerintah Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan	246
B. Peran Masyarakat Sebagai Kontrol Kebijakan Pemerintah	270
C. Peran Orang Miskin dalam dalam Mewujudkan Kemandirian	274

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	287
B. Saran	288
C. Penutup	290

DAFTAR PUSTAKA	291
-----------------------------	------------

LAMPIRAN.....	320
----------------------	------------

DAFTAR RIWAYAT HIDUP	327
-----------------------------------	------------

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Prosentase Kemiskinan Tiga Kabupaten di Jawa Tengah .	19
Tabel 2 Nama Informan dalam Penelitian.....	38
Tabel 3. Kuadran Kemiskinan	67
Tabel 4. Peran Strategis Pemberantasan Kemiskinan	69
Tabel 5. Proses Kebijakan Pemberantasan Kemiskinan	73
Tabel 6. Sepuluh Propinsi Memiliki PT Terbanyak	171
Tabel 7. Angka Kemiskinan Jawa Tengah.....	200
Tabel 8. Jumlah Kemiskinan Tiga Kabupaten di Jawa Tengah	203
Tabel 9. Data Penduduk Miskin Di Jawa Tengah	205
Tabel 10. Jumlah Bantuan SosialTiga Kabupaten di Jawa Tengah	208
Tabel 11. Data Program Bantuan berdasarkan KPM	211
Tabel 12. Prosentase RT Dapat Bantuan PKH.....	229
Tabel 13. Peosentase RT Dapat BPNT	237
Tabel 14. Prosentase Rumah Tangga Penerima KPS/KJS	240
Tabel 15. Data Pengeluaran Perkapita dan Indek Pembangunan Manusia.....	246
Tabel 16. Rata-Rata Sekolah	277

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Kerangka Berfikir	34
Gambar 2. Tiga Kebutuhan Pokok Syariah.....	66
Gambar 3. Indikator Kesejahteraan Dalam Islam	117
Gambar 4. Dua Syarat Untuk Mencapai Kesejahteraan.....	120
Gambar 5. Tujuan Kebijakan Distribusi Dalam Islam	132
Gambar 6. Grafik Kemiskinan Jawa Tengah.....	221
Gambar 7. Prosentase Kemiskinan Tiga Kabupaten	249

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Program penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan pemerintah secara sistematis, terencana, dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat. Fakta kehidupan di Indonesia bahwa kemiskinan menjadi isu sangat menarik setiap gejolak ekonomi misalnya kenaikan BBM sangat mempengaruhi kondisi kelompok miskin, sehingga masyarakat miskin berdampak tidak mampu dalam memenuhi kehidupannya. Selain itu juga kebijakan kenaikan harga atau inflasi memberikan pengaruh negatif pada daya beli masyarakat khususnya masyarakat miskin. Ditambah setiap pemilu, di mana para kontestan selalu mengangkat tema kemiskinan/kesenjangan sosial dijadikan bahan dagangan bagi strateginya. Namun setelah mendapatkan pemimpin yang terpilih, ironisnya pemberantasan untuk menurunkan kemiskinan masih lambat, sementara pemerintah melaksanakan berbagai kebijakan dan program bantuan untuk penanggulangan kemiskinan. Dorongan pemerintah melalui anggaran yang memadai, namun tidak ada hasil penurunan angka

kemiskinan yang memadai.¹ Hasil penelitian Yanto Supriyatno,² menjelaskan bahwa program kesejahteraan sosial sering dilakukan, namun program tersebut belum mampu menurunkan angka kemiskinan.

Fakta lain juga adanya kebijakan desentralisasi fiskal yang diimplementasikan dengan aturan otonomi daerah. Kemandirian daerah bertujuan memberikan kebebasan mengatur pendapatan dan pengeluaran untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Kesejahteraan perihal ini sejalan dengan target kemandirian daerah untuk memberikan pelayanan dan pemenuhan kebutuhan warga daerahnya sendiri, pemberian pelayanan dan pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan permasalahan yang dialami warga daerahnya. Namun faktanya otonomi daerah yang harusnya dekat dengan masyarakat daerah belum mampu mengatasi masalah kemiskinan yang cukup komprehensif.³ Bahkan ada isu, bahwa otonomi daerah justru membentuk perilaku korupsi baru yang merembet ke berbagai daerah yang kemudian menyeret elite

¹Fachri Arsjad et al., “Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiyadaa,” *Economics and Digital Business Review* 3, no. 2 (2022): 379–96.

²Yanto Supriyatno and Andi Maulana, “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Bekasi,” *Governance* 10, no. 2 (2022): 34–48, <https://doi.org/10.33558/governance.v10i2.5638>.

³Rima Nabilah and Dani Sugiri, “Apakah Bantuan Sosial Dan Belanja Modal Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Daerah Di Provinsi Sumatera Selatan?,” *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi* 21, no. 1 (2022): 85–98, <https://doi.org/10.32639/fokbis.v21i1.115>.

politik, akhirnya masalah kemiskinan terabaikan.⁴ Di sinilah pentingnya perbaikan system bantuan pemerintah agar sesuai sasaran dan mampu mengubah kondisi miskin. isu persoalan kemiskinan dialami berbagai negara dengan bermacam-macam kondisi dan penyebabnya.

Penanggulangan kemiskinan merupakan tema krusial dan problem pemerintah khususnya negara berkembang. Yuan Alex mengatakan bahwa penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui pembangunan pedesaan,⁵ dan berlakunya otonomi daerah berdampak pada perkembangan daerah,⁶ serta penanggulangan kemiskinan di berbagai daerah telah meningkat selama bertahun-tahun. Namun, penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh Cina sangat tidak merata. Selanjutnya, inovasi teknologi dan perkembangan keuangan secara positif mempengaruhi efisiensi penanggulangan kemiskinan di Cina. Namun, dampak globalisasi terhadap efisiensi penanggulangan kemiskinan tidak signifikan.⁷

⁴Amalia Syauket, “Nepotistic Corruption Breeding For The Establishment Of A Political Dynasty,” *Devotion : Journal of Community Service* 3, no. 2 (2021): 98–105, <https://doi.org/10.36418/dev.v3i2.99>.

⁵Yuan Yang, Alex de Sherbinin, and Yansui Liu, “China’s Poverty Alleviation Resettlement: Progress, Problems and Solutions,” *Habitat International* 98 (April 1, 2020): 102135, <https://doi.org/10.1016/J.HABITATINT.2020.102135>.

⁶Endang Purwanti and Elien Noviyanti, “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018,” *Among Makarti* 14, no. 2 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.213>.

⁷Hashim Zameer, Muhammad Shahbaz, and Xuan Vinh Vo, “Reinforcing Poverty Alleviation Efficiency through Technological

Dengan banyaknya program penanggulangan kemiskinan, namun angka kemiskinan masih besar jumlahnya,⁸ dan sepeham juga Andi Muhammad Iqbal⁹ dan Benny Afivadz menyatakan bahwa penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas di era kontemporer.¹⁰ Apalagi mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam, maka aksi muslim lebih memprioritaskan penanggulangan kemiskinan di atas segalanya. Maka dari itu isu dan problem kemiskinan sangat menarik dalam dunia akademik dan kebijakan pemerintah serta bidang politik dalam lini kehidupan berbangsa. Tatanan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka muncul berbagai kebijakan dan program serta membutuhkan anggaran besar untuk mengentaskan kemiskinan dalam kondisi ekonomi stabil maupun bergejolak.

Data BPS merupakan data yang dipublish sebagai rujukan pengambilan keputusan kebijakan fiskal dalam penanggulangan kemiskinan. Kebijakan pemerintah Indonesia dalam

Innovation, Globalization, and Financial Development,” *Technological Forecasting and Sosial Change* 161 (December 1, 2020): 120326, <https://doi.org/10.1016/J.TECHFORE.2020.120326>.

⁸Regina S Baker et al., “The Enduring Significance of Ethno-Racial Inequalities in Poverty in the U.S., 1993–2017,” *Population Research and Policy Review* 41, no. 3 (2022): 1049–83, <https://doi.org/10.1007/s11113-021-09679-y>.

⁹M Elfan Kaukab, “Memetakan Pola Penguatan Ekonomi Untuk Masyarakat Dalam Kemiskinan Ekstrem Pasca Pandemi Di Kabupaten Wonosobo,” *Akuntansi, Jurnal Syariah, Perbankan* 2 (2022): 1–9.

¹⁰Moch Nur Ichwan Dkk, “Agama, Filsafat Dan Kemiskinan,” ISBN:97E- (Yoryakarta: Prograrq Studi Agama dan Filsafat Pascasarjatra UIN Sutran Kalijaga Y, 2015), X.

penanggulangan kemiskinan salah satunya dalam bentuk bantuan yang diberikan warga miskin. Kebijakan pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan berupa bantuan, sebab kondisi miskin identik dengan ketidakmampuan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan pokok. Bantuan pemerintah yang sering diberikan berupa bantuan sosial.¹¹ Bantuan sosial sangat berpengaruh sekali terhadap peningkatan kemampuan masyarakat bidang pendidikan, pemenuhan kebutuhan pokok misalnya akses terhadap kesehatan, listrik, air bersih dan sanitasi maupun sejenisnya. Akan tetapi garis haluan pemerintah belum mampu secara inklusif melakukan penanggulangan kemiskinan dengan cepat dan integral terutama dari sisi ekonomi. Oleh karena itu pentingnya peran stakeholder menyelesaikan persoalan dan mengubah masyarakat miskin menjadi mandiri.

Peran *stakeholder*, selain menggenjot perkembangan ekonomi juga pada penanggulangan kemiskinan. Tinggi rendahnya angka kemiskinan sangat bergantung atas kestabilan makro ekonomi terutama kenaikan BBM/kenaikan harga. Sehingga tingkat inflasi tinggi akan berdampak negatif angka kemiskinan

¹¹Nanda Herijal Putra and M. Anzaikhan, "Implementasi Kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial (Jps) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Era Pandemi Covid-19," *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Sosial Science* 8, no. 1 (2022): 39–56, <https://doi.org/10.22373/jai.v8i1.1757>.

akan mengalami kenaikan.¹² Peran kebijakan pemerintah pusat dan daerah dalam pemberantasan kemiskinan salah satunya dengan memberikan bantuan sosial misalnya beras diperuntukkan keluarga miskin, BLT, BPJS kesehatan. Tetapi kenyataan program pengurangan kemiskinan belum mampu dikatakan efektif.¹³ Bantuan pemerintah daerah untuk mengentaskan kemiskinan lebih banyak menerapkan bentuk bantuan sosial yang dianggap paling ampuh.

Sejarah mencatat bahwa banyaknya program bantuan sosial di berbagai departemen melaksanakan pemberantasan kemiskinan menerapkan subsidi sosial, akan tetapi angka kemiskinan nasional maupun daerah masih cukup tinggi. Fakta ini mesti dilakukan penelitian, di mana salahnya agar mampu mengetahui penyebab lambatnya untuk menurunkan kemiskinan khususnya di Jawa Tengah yang otonomi daerahnya sudah berjalan kurang lebih 21 tahun, selain itu keuntungan hidup Jawa Tengah salah satunya biaya hidup murah, namun kenyataan di lapangan angka

¹²Muhammad Rizki and Keisha Dinya Solihati Politeknik STIA LAN Jakarta, "The Impact of Corruption, Inflation and Unemployment Towards Poverty in Indonesia," *Journal of Business Administration Economic & Entrepreneurship* 4, no. 1 (2022): 47–56.

¹³Nursalam Fahik Folgentius Bere, Djaha Ajis Salim Adang, "Sosial Agencies Coordination and Supervision of Non Cash Food Sosial Assistance Distribution to Reduce Poverty Rate In Malaka Rgency of Indonesia," *Eurasia: Economics & Business* 4, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

kemiskinan masih cukup tinggi.¹⁴ Selain itu Jawa Tengah meraih dua kali penilaian baik dalam keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah ditargetkan yang disebut Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) Award 2019 dan 2020.¹⁵

Jawa Tengah merupakan provinsi memiliki perguruan tinggi terbanyak di urutan ke empat dengan sebutan kota pelajar, total perguruan tinggi 256 dengan rincian PTN: 9 dan PTS 247. Sebagaimana Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga sebutan kota pelajar, namun pada urutan ke delapan, total PT 109 dengan rincian PTN: 5 dan PTS: 104.¹⁶ Banyaknya perguruan tinggi merupakan penghasil kekayaan intelektual sebagai masukan pemerintah daerah untuk menjawab berbagai persoalan kemiskinan daerah.

Program bantuan sosial bentuknya beberapa macam misalnya berwujud uang tunai, barang dan jasa yang bersumber APBN maupun APBD yang diberikan bagi masyarakat miskin. Program bantuan sosial yang bertujuan untuk perlindungan sosial,

¹⁴Chelin Indra Sushmita, “Benarkah Biaya Hidup Di Jawa Tengah Termurah?” (diakses 25 November 2022: <http://bit.ly/AppsBisniscomPS iOS>: <http://bit.ly/A, n.d.>).

¹⁵<https://radarsemarang.jawapos.com/berita/jogja/2020/02/25/dua-kali-akuntabilitas-kinerja-nilai-a/> diakses 9 Mei 2022.

¹⁶<https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-5973812/10-provinsi-dengan-perguruan-tinggi-terbanyak-bisa-jadi-referensi-camaba> diakses 9 Mei 2022.

jaminan sosial, pemberdayaan, rehabilitas sosial dan pelayanan masyarakat.¹⁷ Macam program bantuan untuk pemberantasan kemiskinan itu, sejak masa orde baru hingga masa reformasi bahkan sudah otonomi daerah menjadi alternatif bantuan sosial sebagai kebijakan pemberantasan kemiskinan. Program-program tersebut pada hakekatnya sama, hanya perubahan nama semata karena macam dan tujuan sama persis. Bantuan itu ditujukan masyarakat miskin baik bersifat kelompok maupun individu.

Macam-macam program bantuan penanggulangan kemiskinan masa orde baru yang berbentuk Kredit Usaha Tani (KUT), Bantuan Desa (Bandes), Bantuan Dusun (Bandus), Inpres Desa Tertinggal (IDT), Bantuan Pembangunan Prasarana Perekonomian Desa Tertinggal (BP3DT), Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam (UEP-SP). Usaha Kredit Tani (UKT) merupakan bantuan yang berbentuk pinjaman kredit yang diberikan dengan jenis pupuk bagi para petani. Bandes dan Bandus merupakan bantuan desa yang diberikan masyarakat daerah melalui pemerintah desa yang berupa uang, Inpres Desa Tertinggal (IDT) merupakan bantuan tunai untuk kelompok usaha masyarakat miskin. Bantuan Pembangunan Prasarana Perekonomian Desa Tertinggal (BP3DT) merupakan bantuan dana

¹⁷Muhammad Afrizal Yusuf and Arif Afendi, "The Effect of Transfer Funds to Regions and Village Funds on Human Development Index in Districts of West Java Province in 2015-2018," *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 2, no. 2 (2020): 153–68, <https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.2.6360>.

pembangunan sarpras untuk masyarakat miskin agar mereka memiliki akses dalam kegiatan ekonomi. Usaha Ekonomi Produktif Simpan Pinjam (UEP-SP) adalah bantuan berkategori usaha kecil berupa uang dengan sifat produktif dan anggota kelompok berkewajiban menyimpan uang di kelompok usahanya agar memperoleh pinjaman modal.¹⁸ Bantuan pembangunan ekonomi di atas diharapkan mampu mengubah masyarakat miskin.

Masa orde baru hingga masa reformasi program penanggulangan kemiskinan diberikan pemerintah melalui masing-masing kecamatan dengan istilah Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Program tersebut berganti nama program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPM MP). Adapun bentuk program PNPM MP sebagai dana berwirausaha, pengembangan manusia, pembaharuan sarpras mirip dengan IDT dan BP3 DT. Dengan berlakunya bantuan pemberdayaan mandiri pedesaan, maka juga ada Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) macam bantuan ini berbentuk uang tunai yang diberikan pemerintah desa di wilayah bagian kota yang masyarakatnya masih miskin dengan mendapatkan seratus juta rupiah (100.000.000,00). Masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan katagori ini harus membentuk

¹⁸Rahayu, "Analisis Perkembangan Dana Otonomi Khusus Sebagai Implementasi Desentralisasi Fiskal Di Provinsi Aceh." *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 no 1 (2021): 360-367
[.doi.org/10.30596%2Fsnk.v2i1.8284](https://doi.org/10.30596%2Fsnk.v2i1.8284)

kelompok usaha baru dapat bantuan P2KP.¹⁹ Program bantuan ini bersifat produktif dengan tujuan kemandirian masyarakat miskin,

Era Otonomi Daerah (OTDA) program-program bantuan itu kembali menjadi pilihan kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah Rp 300 ribu setiap KK karena dampak kenaikan BBM yang berdampak daya beli masyarakat miskin rendah. Beras miskin (Raskin) yang berubah menjadi Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), bantuan ini berorientasi pada rumah tangga miskin. Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) diberikan masyarakat miskin dengan tujuan bantuan ini agar masyarakat miskin mendapatkan akses pelayanan kesehatan, Jaminan Kesehatan Sosial (Jamkesmas) dan Jaminan Kesehatan Semesta (Jamkesda), bantuan ini berubah menjadi Kartu Indonesia Sehat (KIS). Program ini bertujuan untuk melanjutkan pendidikan dengan biaya murah, selain itu pemerintah juga berikan program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP).²⁰ Dari masa ke masa pemerintahan bantuan penanggulangan kemiskinan masih dalam bentuk yang

¹⁹Carly Erfly Fernando Maun, "Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan," *Jurnal Politico* 9, no. 2 (2020): 1–16.

²⁰Fahik Folgentius Bere, Djaha Ajis Salim Adang, "Sosial Agencies Coordination and Supervision of Non Cash Food Sosial Assistance Distribution to Reduce Poverty Rate In Malaka Rgency of Indonesia." *Eurasia: Economics & Business*, 4 no.4 (2022): 2003-2005.

sama menjadi alternatif kebijakan yang diambil pemerintah. Adapun jenis program bantuan kemiskinan pasca otonomi daerah yang dilaksanakan pemerintah daerah Jawa Tengah yakni: program sembako, PKH, BST, KJS, BLT DD. Walaupun bantuan penanggulangan kemiskinan banyak jenisnya tersebut belum ada hasil dalam penanggulangan kemiskinan yang begitu signifikan.²¹ Dari tahun ke tahun masyarakat miskin masih dijadikan obyek menerima bantuan dan kurang memperhatikan motivasi untuk produktif dan jiwa usaha.

Penyebab kemiskinan memang sangat kompleks, karena penyebabnya sangat multi dimensi bisa disebabkan faktor korupsi, pendidikan, geografis, pemerintahan daerah tidak efektif, budaya masyarakat, rendahnya peran stakeholder, semua itu salah satu faktor penyebab kemiskinan, oleh karena itu pemerintah yang baik menjadi jalan keluar untuk mengentaskan kemiskinan. Karena kondisi kemiskinan sangat bergantung kondisi ekonomi dengan berbagai macam bantuan.²² Kondisi kemiskinan merupakan gejala global yang sangat kompleks bahkan multidimensi, oleh karena itu tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab dalam mengentaskan kemiskinan tetapi ada tiga faktor yang sangat

²¹Panglima Saragih, “Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta,” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6 (2015): 58.

²²Canh Phuc Nguyen and Thanh Dinh Su, “The Influences of Government Spending on Energy Poverty: Evidence from Developing Countries,” *Energy* 238 (2022): 121785, <https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121785>.

penting mempengaruhi penanggulangan kemiskinan yakni peran pemerintah, masyarakat, dan orang miskin sendiri.

Produktifitas masyarakat miskin menjadi strategi, peran masyarakat miskin sebagai subyek pembangunan dan subyek kemandirian hidup untuk mandiri tidak selalu bergantung pada pihak lain. Kemandirian masyarakat miskin mendapatkan pendapatan keluarga dan peningkatan daya beli masyarakat. Kemandirian masyarakat miskin bisa melalui penciptaan lapangan kerja sendiri, menjadi tenaga kerja yang mandiri melalui tenaga kerja di bawah instansi lembaga swasta, maupun pemerintah melalui program padat karya.²³ Produktifitas dan kemandirian masyarakat miskin itu dimiliki, jika kesenjangan penerimaan tidak akan terjadi, yang berakibat pada pembangunan ekonomi yang kuat. Padat karya dan produktifitas tenaga kerja merupakan strategi jalan keluar untuk menyelesaikan kemiskinan.

Hal tersebut untuk mewujudkan cita-cita agar orang miskin sebagai obyek dan subyek pemberantasan kemiskinan. Pemberantasan masyarakat miskin harusnya menjadi gerakan strategi antara pemerintah, masyarakat/tokoh masyarakat sebagaimana Martino Sardi dalam buku *Agama, filsafat dan*

²³Firmansyah Kusumayadi et al., "Pelatihan Diversifikasi Olahan Bawang Merah Menjadi Bawang Goreng Varian Rasa Untuk Meningkatkan Produktivitas Ibu Rumah Tangga Di Desa Donggobolo Kabupaten Bima," *Prima : Portal Riset Dan Inovasi Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 45–52, <https://doi.org/10.55047/prima.v1i2.182>.

Kemiskinan,²⁴ menyatakan bahwa tokoh agama masyarakat berperan dalam penanggulangan kemiskinan. Yang sementara ini hanya pembangunan bidang ibadah dan teologi saja, seharusnya, agama-agama mengutamakan seluruh gerakan dan energi untuk memerangi kemiskinan di Indonesia secara sistematis dan profesional, sehingga masyarakat Indonesia akan semakin sejahtera dan kemiskinan semakin dikikis habis. Pemikiran itu sejalan dengan Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,²⁵ yang menginstruksi penghapusan kemiskinan ekstrim di seluruh wilayah RI pada tahun 2024 melalui keterpaduan dan sinergi program, serta kerja sama antarkementerian/lembaga maupun pemerintah daerah.²⁶

Otonomi Daerah (OTDA) mendapatkan kewenangan yang luas dalam memberantas kemiskinan yang menjadi kekuatan pembangunan daerah bukan menjadi hambatan pembangunan. Hak kewenangan pemerintah daerah memiliki otoritas penuh untuk memecahkan masalah masyarakat miskin. Penyerahan kewenangan pusat ke daerah harusnya mendorong program kemiskinan itu tepat

²⁴Mutiullah dan Moch Nur Ichwan (ed., *Agama, Filsafat Dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Progarq Studi Agama dan Filsafat Pascasarjatra UIN Sutran Kalijaga,2015),2.

²⁵<https://Setkab.Go.Id/Presiden-Jokowi-Keluarkan-Inpres-4-2022-Tentang-Percepatan-Penghapusan-Kemiskinan-Ekstrem>,” n.d, diakses 2 Desember 2022.

²⁶Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

sasaran sebab penting untuk pemberantasan kemiskinan.²⁷ Realita masyarakat, hasil pengamatan peneliti bahwa bantuan pemerintah untuk orang miskin menimbulkan kecemburuan sosial di tengah masyarakat karena orang yang mendapat bantuan masih hubungan keluarga pegawai pemerintah daerah, kecurigaan data yang tidak valid/belum ada pembaharuan data. Sementara kondisi miskin untuk mengubah menjadi mampu sangat lambat sekali, masyarakat miskin merasa memenuhi kebutuhan hidupnya cukup mengandalkan bantuan sosial pemerintah, sehingga banyak masyarakat yang melaporkan dirinya bahwa dirinya punya hak untuk mendapatkan bantuan sosial pemerintah, sehingga peran pemerintah berkewajiban memberantas kemiskinan menjadikan masyarakat yang malas sebagai sumber pendapatannya. Peran pemerintah yang menonjol hanya menggambarkan besarnya bantuan sosial orang kemiskinan. Dugaan ini memandang miskin diartikan sebagai ketidakmampuan orang dalam memenuhi kebutuhan dasar.

Amanat dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 dan amanah konferensi *Sustainable Development Goals* (SDGs), yang mana pemerintah bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian peran pemerintah mempunyai tanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan pelayanan

²⁷Halilul Khairi, "Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia," *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 7, no. 1 (2022): 35, <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.37770>.

masyarakat miskin agar berkembang dan berubah menjadi lebih baik menjadi keluarga yang bebas jeratan kemiskinan. Tujuan Otonomi Daerah (OTDA) memberikan pelayanan, pelayanan pemerintah yang diberikan masyarakat dengan berbagai kebijakan pemberantasan kemiskinan, tetapi kenyataan masih belum optimal. Terbukti program penanggulangan kemiskinan dari periode ke periode jumlah masyarakat miskin belum kunjung turun angka kemiskinan secara signifikan.²⁸ Program pemerintah untuk pemberantasan kemiskinan perlu dikaji ulang ketidakmampuan penurunan masyarakat miskin.

Dasar program bantuan pemberantasan kemiskinan baik berupa barang, uang atau jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 di atas, dana sosial diberikan dalam rangka penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar (Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017).²⁹ Sebagaimana program bantuan di Jawa Tengah dalam peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 60 tahun 2019 tentang strategi penanggulangan kemiskinan daerah provinsi Jawa Tengah

²⁸Determinan Kemiskinan and Di Indonesia, “Determinan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1982-2012,” *Economics Development Analysis Journal* 4, no. 1 (2017): 58–64.

²⁹Peraturan Presiden RI, “Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017, Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai,” *Peraturan Presiden*, 2017.

tahun 2019 – 2023 dalam pasal 1,³⁰ dijelaskan bahwa agenda penanggulangan kemiskinan yakni program yang direncanakan oleh pemerintah pusat dan daerah, dunia bisnis, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, sanggup berbisnis baik mikro dan kecil, maupun agenda lain dalam bentuk peningkatan aktifitas ekonomi.

Efisiensi dan efektifitas pemberantasan kemiskinan, tidak hanya diserahkan pada pemerintah semata, melainkan perlu melibatkan faktor lain yakni masyarakat umum melalui kontrol,³¹ kewajiban pemerintah memberantas kemiskinan di tangan sendiri, akan menghasilkan tidak efektif dalam persoalan kemiskinan, pemerintah mengatasi kemiskinan sendiri, maka akan terjadi sejuta program pemberantasan tak akan mampu mengatasi problem-problem kemiskinan sesuai dengan target dalam ekonomi Islam.

Sejalan dengan perintah Islam, bahwa pembangunan ekonomi adalah *the process of alleviating poverty and provision of ease, comfort and decency in life* artinya prosedur untuk menurunkan kemiskinan bersama menghasilkan ketentraman,

³⁰Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, “Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.60 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2019-2023,” *Gubernur Jawa Tengah*, 2019, https://jdih.jatengprov.go.id/downloads/produk_hukum/pergub/pergub_tahun_2019/pergub_60_th_2019.pdf.

³¹Willya Achmad and Muhammad Fedryansyah, “Implementing Social Capital in Poverty Reduction Efforts in Indonesia” 15, no. 3 (2022): 689–98, <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002051>.

kedamaian dan budi pekerti dalam kehidupan adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh pemerintah bekerjasama dengan masyarakat untuk menyerukan kebaikan dan mencegah kemungkaran, sebagaimana dalam surat Ali Imran ayat 110 :

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ ۗ وَلَوْ أَمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ۚ
مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ

Artinya :” Kamu (umat Islam) adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, (karena kamu) menyuruh (berbuat) yang makruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa terdapat kewajiban tiap pribadi untuk menjauhkan dirinya dari belenggu kemelaratan maupun kemungkaran, oleh karena itu manusia bekerja agar tidak jatuh dalam kemelaratan atau kemiskinan.³² Selain itu ada juga kewajiban untuk keluarga, orang lain, maupun masyarakat serta kewajiban pemerintah untuk menuntaskan kemiskinan. oleh karena peran semua pihak diharapkan mendukung dan memotivasi agar

³²“Menelaah Al-Quran Dan Hadist Filantropi Islam ‘Perbandingan Tafsir Ibnu Kastir Dan Tafsir Fi Zhilalil Quran, ” *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2022): 300–334, <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.

yang lemah bisa bangkit dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup.

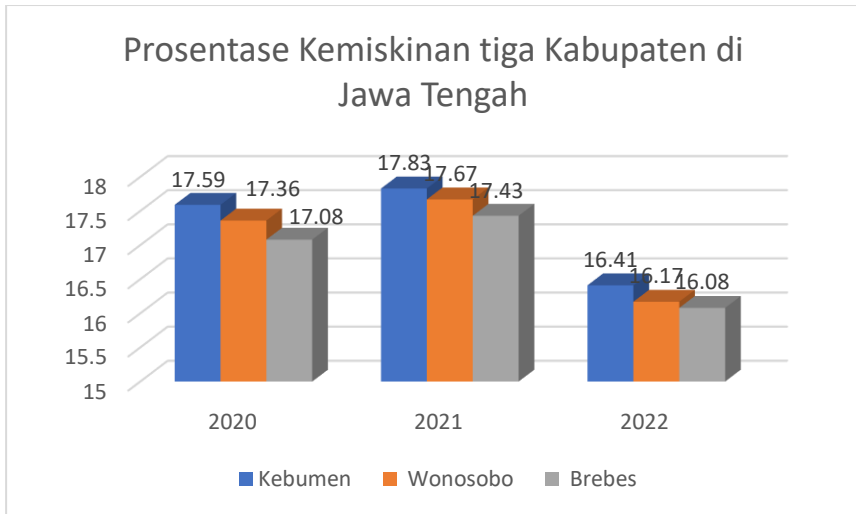
RPJMD 2020-2024 ditargetkan 6,0-7,0 % Sedangkan target pemerintah Jokowi tahun 2024 Penghapusan kemiskinan ekstrim di seluruh RI yang diamanahkan dalam Inpres Nomor 4 tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem, hasil capaiannya masih rendah, tidak sesuai harapan karena angka kemiskinan masih relatif tinggi khususnya di Jawa tengah yang ada di tiga kabupaten Kebumen, Brebes, Wonosobo yang menunjukkan penurunan angka kemiskinan masih lambat. Hal itu disebabkan banyak bantuan tetapi belum diberdayakan, karena bernuansa bantuan sosial sebagaimana pernyataan johan³³, sehingga membuat masyarakat kecanduan bantuan pemerintah.³⁴ Oleh karenanya kemiskinan khususnya tiga kabupaten di Jawa Tengah masih menjadi persoalan bangsa Indonesia.

Kesamaan program pemberantasan kemiskinan di Jawa Tengah berbentuk dana sosial tunai maupun non tunai. Persamaan bantuan itu belum pasti menghasilkan *out come* yang sama dan nyata. Menurut BPS angka kemiskinan tiga kabupaten di Jawa Tengah sangat bervariasi dari kenaikannya.

³³Johan Arifin, "Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Kesejahteraan Sosia* 6, no. 02 (2020), <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372>.

³⁴Hendra Gunawan Faisal fadhila Noorikhshan, "Mengkaji Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Politik," *Journal of Government and Politics (JGOP)* 2, no. 2022 (4AD).

Tabel 1. Prosentase Kemiskinan Tiga Kabupaten di Jawa Tengah



Sumber: jateng.bps.go.id

Berdasarkan tabel kemiskinan Jawa Tengah dijelaskan bahwa tiga kabupaten yang memiliki angka kemiskinan tertinggi dan berfluktuasi yakni kabupaten Kebumen dengan rincian (2020:17.59), (2021: 17.83), (2022: 16.41), Kabupaten Wonosobo dengan rincian (2020: 17.16), (2021: 17.67), (2022: 16.17) dan kabupaten Brebes dengan rincian (2020: 17.08), (2021: 17.43) dan (2022: 16.08).

Program bantuan sosial merupakan salah satu peran pemerintah untuk memberantas kemiskinan agar tercapai

peningkatan kualitas IPM.³⁵ Selain peran pemerintah pusat harus diperankan oleh pemerintah daerah dan orang miskin sendiri juga harus memberi pengaruh perubahan agar menjadi gerakan yang mampu mengubah kondisi orang miskin. Peran pemerintah, masyarakat umum dan orang miskin sendiri mampu berperan sesuai dengan kapasitas masing-masing. Usaha pemerintah dari berbagai macam kebijakan penanggulangan kemiskinan juga sangat dibutuhkan kesadaran orang miskin sendiri untuk gerak artinya bekerja keras sebanding dengan potensi orang miskin. Oleh karena itu bantuan pemberdayaan daerah dimanfaatkan untuk kegiatan produktifitas, bantuan peningkatan kualitas SDM juga dimanfaatkan yang benar dan sungguh-sungguh.

Program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan pemerintah pusat maupun daerah dengan berbagai macam bantuan, tetapi sangat ironis penanggulangan kemiskinan di tiga kabupaten di Jawa Tengah belum tercapai target yang diinginkan pemerintah. Kemiskinan menjadi bahan diskusi yang bermanfaat untuk dicarikan pemecahan masalahnya. Kemiskinan menjadi problem serius sebab akan menimbulkan kesenjangan dan pengangguran, sehingga penyelesaian problema kemiskinan harus

³⁵Mutiullah dan Moch Nur Ichwan editor., *Agama, Filsafat Dan Kemiskinan*,(Yogyakarta: Proqram Studi Agama dan Filsafat Pascasarjatra UIN Sutran Kalijaga, 2015),3.

melihat faktor-faktor yang melingkupinya.³⁶ Pemberantasan kemiskinan diperlukan kebijakan tepat dengan melihat bermacam kondisi dan budaya lingkungan miskin yang merupakan target strategi pemerintah. Kebijakan ini diperbuat untuk mengubah sifat dan kondisi miskin agar mampu bangkit menjalankan aktivitas yang makin produktif lagi.

Program dana sosial pemerintah di seluruh kabupaten/kota hasilnya berbagai macam dampak yang dihasilkan. Walaupun jenis dana sosial samaa, namun bilangan kemiskinan masih relatif tinggi di era otonomi daerah.³⁷ Oleh karena itu perlu kajian agar program bantuan pemerintah efektif dan efisien untuk memberantas masyarakat miskin menjadi mandiri dan produktif dengan bantuan yang didapat tersebut. Pedoman pemerintah mengukur kemiskinan berdasarkan garis kemiskinan yang ada dalam BPS. Batasan kebutuhan dasar minimum disebut GK/garis kemiskinan (2100 kalori/hari/kapita).³⁸ Padahal antar daerah terjadi beda, ada daerah memiliki GK tinggi, namun ada daerah lainnya GK rendah, tetapi

³⁶Hingga Sosial et al., “Bunuh Diri Sosiopathik Sebuah Fenomena Sosial Keagamaan Hingga Sosial Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Wonorejo, Srengat, Blitar),” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 5, no. 2 (2022): 102–19.

³⁷Saharuddin Saharuddin and Syarifuddin Syarifuddin, “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dengan Kualitas Pendamping Dan Kualitas Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Makassar,” *Jurnal Sosial Sains* 2, no. 7 (2022): 832–42, <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i7.441>.

³⁸Bambang Arwanto, “Penanggulangan Patronase Kemiskinan Nelayan Punggawasawi,” *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 7 (2022): 2003–5.

bantuan dan penanganan pemerintah disamakan. Persamaan bantuan ini misalnya jumlah bantuan sama, jenisnya juga sama, kebijakan bantuan yang sama menghasilkan bantuan tersebut belum mampu mengurangi kemiskinan secara signifikan dan komprehensif.

Program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah belum memberikan hasil jelas untuk menghilangkan kemiskinan, artinya miskin masih tinggi.³⁹ Kemiskinan merupakan masalah utama di negara berkembang seperti Indonesia. Pulau Jawa adalah pulau dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia yang salah satunya memiliki persentase kemiskinan di atas persentase kemiskinan nasional. Provinsi Jawa Tengah dengan persentase 11,79% tahun 2021 dan tahun 2022 10,98 %. Provinsi Jawa Tengah memiliki 29 kabupaten dan 6 kota. Banyak bantuan yang dikeluarkan pemerintah di masa pasca otonomi daerah, tetapi jumlah kemiskinan relatif tinggi. Oleh karena itu kebijakan pemerintah menjadi penting dianalisis supaya pemberantasan kemiskinan dapat dilakukan secara tepat/ketepatan sasaran kebijakan dilihat dari efektif berkaitan hasil dan efisiensi berkaitan proses. Hal ini perlu dikaji agar kebijakan bantuan pemerintah dalam

³⁹Rully Noor Octaviana, "Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) on Community Welfare in Central Java Province," *Literatus :Literature for Social Impact and Cultural Studies*, no. e-ISSN: 2686-5009 (2022): 1–10.

melaksanakan perencanaan dan penyusunan tepat dalam pemberantasan orang miskin.

Inti pembahasan penelitian ini adalah program bantuan era otonomi daerah dalam penanggulangan kemiskinan. Artinya penelitian ini menjelaskan usaha pemerintah memberikan bantuan sesuai permasalahan dan kebutuhan orang miskin serta peran pemerintah, masyarakat maupun orang miskin dalam penanggulangan kemiskinan. Pemerintah memiliki kekuatan untuk membuat program penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan atau masyarakat miskin berubah mandiri tanpa bergantung pada program bantuan sosial. Masyarakat memiliki kewajiban kontrol dan memberikan membantu kebijakan pemerintah melalui motivasi dan pandampingan pada kelompok miskin. Orang miskin sendiri berperan terbuka dan sadar diri bahwa bantuan sosial sifatnya hanya sementara dan berusaha menjalankan pelatihan-pelatihan yang diberikan pemerintah. Berlakunya Otonomi Daerah (OTDA), pemerintah daerah sebagai aktor penanggulangan kemiskinan yang lebih paham kondisi masyarakat dan lebih cepat mengatasi persoalan warga miskin. Masyarakat miskin memiliki kedudukan sebagai subyek maupun obyek kemiskinan, karena memiliki peran cukup strategis untuk menurunkan jumlah kemiskinan melalui peningkatan kualitas hidup. Hal itu dilakukan dengan memberdayakan potensi bakat dan minat yang dimiliki orang miskin yang diwujudkan dengan

pengaturan keuangan keluarga, bekerja keras dan perangi budaya malas, berdiam diri hanya bergantung pada orang lain.

Latar belakang di atas, membuat peneliti tertarik untuk membahas peran pemerintah daerah pasca otonomi daerah, di sini tim koordinator penanggulangan kemiskinan daerah di bawah BAPPEDA sebagai pemerintah daerah yang bertujuan meningkatkan pembangunan masyarakat berkualitas. Analisis akan dilakukan pada kabupaten di Jawa Tengah yang tingkat kemiskinannya cukup tinggi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, bahwa persoalan kemiskinan bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi masyarakat dan orang miskin sendiri ikut bertanggung jawab mencari strategi dan solusi mengatasi persoalan kemiskinan khususnya di Jawa tengah dalam tiga kabupaten yang kabupaten Kebumen, kabupaten Wonosobo dan kabupaten Brebes, Maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Mengapa program bantuan pemerintah penting dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah era otonomi daerah perspektif ekonomi Islam?
2. Bagaimana peran stakeholder dalam program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah era otonomi daerah perspektif ekonomi Islam ?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Sejalan dengan latar belakang yang merumuskan beberapa rumusan masalah, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mendalami pentingnya bantuan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan di Jawa Tengah era otonomi daerah erspektif ekonomi Islam.
2. Untuk mendalami peran stakeholder dalam program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah era otonomi daerah perspektif ekonomi Islam.

Adapun signifikansi penelitian ini antara lain:

1. Penelitian ini diharapkan dapat menemukan berbagai strategi kebijakan program yang efektif untuk pemberantasan kemiskinan melalui pemilihan dan perlakuan program agar mendapatkan hasil yang efektif bagi orang miskin semakin kualitas hidupnya.
2. Temuan penelitian ini sebagai bahan untuk mengevaluasi, apakah pemberian bantuan sudah disesuaikan dengan persoalan dan kebutuhan masyarakat miskin dan bagaimana peran pemerintah, masyarakat dan orang miskin sendiri dalam menanggulangi masyarakat miskin..
3. Temuan penelitian ini secara teoritis dapat mengusulkan berbagai strategi dalam pemberantasan kemiskinan dalam pengembangan ilmu kebijakan publik.
4. Temuan penelitian ini secara praktis memberikan:

- a. Bahan pembagian peran antara pemerintah, masyarakat dalam mengubah kehidupan orang miskin menjadi mandiri.
- b. Bahan masukan dapat menemukan strategi tepat dalam penanggulangan kemiskinan.
- c. Masukan pengambilan kebijakan otonomi daerah dalam menurunkan dan mengubah kondisi orang miskin.

D. Kajian Pustaka

Penelitian mengenai program bantuan sosial dan kemiskinan sebenarnya bukan merupakan penelitian pertama atau penelitian yang baru sama sekali. Ada beberapa kajian penelitian yang hampir sama dalam melakukan analisis kemiskinan antara lain:

1. Lilis Siti badriyah, *The Effectiveness of Local Government Spending on Poverty Rate reduction in Central Java, Indonesia* menjelaskan bahwa keefektifitasan belanja pemerintah daerah memiliki andil besar dalam mengurangi kemiskinan di Jawa Tengah Indonesia pada periode 2017-2019.⁴⁰ Penelitian kuantitatif ini dengan menggunakan analisa data regresi yang hasilnya menunjukkan bahwa belanja daerah untuk aspek kesehatan, perlindungan sosial dan pendidikan berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan. Adapun belanja di sektor ekonomi memiliki pengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan

⁴⁰Lilis Siti Badriah Suprih Handayani, Suharno Suharno, "The Effectiveness of Local Government Spending on Poverty Rate Reduction in Central Java, Indonesia," *Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah* 17, no. 101–120 (2022).

dan belanja pembangunan infra struktur tidak berpengaruh pada angka kemiskinan. Pemerintah perlu mempertahankan pengelolaan keuangan pada fungsi kesehatan, pendidikan, dan bantuan sosial, serta melakukan kajian lebih lanjut terkait alokasi anggaran pada sektor ekonomi dan infra struktur.

2. Ariyani Widyastuti, *Does Fiscal Decentralization Affect Poverty ? An Empirical Study Article Information*, menjelaskan apakah desentralisasi fiskal dengan berlakunya otonomi daerah bisa mempengaruhi kemiskinan. Penelitian ini termasuk kuantitatif dengan menerapkan teknik regresi menghasilkan penelitian yakni desentralisasi fiskal otonomi daerah dan dana perimbangan tidak mempengaruhi kemiskinan, tetapi pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif terhadap kemiskinan.⁴¹ Pertumbuhan ekonomi di sini menjelaskan bahwa kegiatan ekonomi berbentuk padat karya yang bertujuan penyerapan tenaga kerja, kegiatan tersebut mampu mengurangi angka kemiskinan.
3. Lilis Hidayati dkk, *Family Expectation and Poverty Alleviation Program: Approaches to Family Development Laws, Sustainable Development Goals, and Maqāsid Sharīa*. Penelitian ini masuk kualitatif dengan studi kasus kabupaten

⁴¹Ariyani Widyastuti and Agung Nusantara, "Does Fiscal Decentralization Affect Poverty? An Empirical Study Article Information," *Economics Development Analysis Journal* 1, no. 3 (2022): 305–12, <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>.

Tulungagung dan Trenggalek Jatim yang menjelaskan bahwa bantuan program keluarga harapan/PKH mempengaruhi kemiskinan dan sesuai dengan *maqasid syariah* dan tujuan pembangunan berkelanjutan.⁴² Bantuan program keluarga harapan memberikan pengaruh terhadap angka kemiskinan dilihat dari hukum kependudukan maupun tujuan SDGs serta *maqasid syariah* juga.

4. Anisul Fuad, *Poverty Reduction Strategy Based on Family Empowerment in the Perspective of Islamic Law* menjelaskan bahwa strategi dalam mengatasi kemiskinan berdasarkan pemberdayaan keluarga miskin dilihat dalam kaca mata hukum Islam, metode yang digunakan metode literature review. Hasil penelitian menjelaskan bahwa strategi bantuan dan jaringan *sosial* serta pemberdayaan masyarakat mempengaruhi kemiskinan. Sedangkan pandangan hukum Islam dalam mengentaskan kemiskinan sejalan dengan kebijakan pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan.⁴³

⁴²Lilis Hidayati Yuli Astutik, Iffatin Nur, and Mashuri Mashuri, “Family Expectation and Poverty Alleviation Program: Approaches to Family Development Laws, Sustainable Development Goals, and Maqāṣid Sharīa,” *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 38–56, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3227>.

⁴³Anisul Fuad, “Poverty Reduction Strategy Based on Family Empowerment in the Perspective of Islamic Law,” *Prosperity: Journal of Society and Empowerment* 2, no. 1 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.21580/prosperity.2022.2.1.10164>.

5. Bayu Indra Pratama dkk, *Political Branding: Content Analysis Of Debate Of Candidates For Vice Governor Of East Java Session I In Poverty Reduction*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi *political branding* yang dikembangkan oleh para Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam rangka penanggulangan kemiskinan di wilayah Jawa Timur. “Pertarungan politik” ini menjadi menarik karena masing-masing pasangan Khofifah dan Emil atau Saifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno bukanlah sosok baru di percaturan politik Jawa Timur. Latar belakang dan modal politik masing-masing pasangan tampaknya dipertaruhkan karena sejarah panjang dan mendalam serta kedekatannya dengan Jawa Timur. Dalam konteks persoalan kemiskinan, menjadi penting bagaimana mereka melakukan debat publik untuk melakukan manuver mengatasi masalah klasik ini dan semua pihak sepakat bahwa kemiskinan harus diperangi. Kajian ini menggunakan analisis isi dari debat terbuka. Sesi Pertama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur. Pada akhirnya kajian ini menunjukkan keunggulan Khofifah dan Emil Dardak dalam membahas persoalan kemiskinan, namun Saifullah Yusuf dan Guntur Soekarno juga memiliki ciri khas tersendiri dalam membahas persoalan kemiskinan. Masing-

masing memiliki fokus dan strategi branding politik tersendiri dalam menyampaikan gagasannya.⁴⁴

6. Magdalena Nany, *Does Balancing Fund Affect Economic Growth and Poverty Level in Central Java*, menjelaskan apakah benar dana perimbangan otonomi daerah dapat mempengaruhi pertumbuhan dan kemiskinan di Jawa Tengah.⁴⁵ Metode penelitian kuantitatif dengan teknik regresi yang menghasilkan penelitian bahwa dana perimbangan otonomi daerah berdampak pada pertumbuhan dan kemiskinan tetapi tidak seefektif dengan penerimaan pendapatan asset daerah.
7. Roni Ekha Putera, *Analisis Terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan Dan Partisipasi Masyarakat Di Indonesia*.⁴⁶ Partisipasi masyarakat dimanifestasikan ke dalam bentuk ikut serta menerapkan teknologi yang diperkenalkan, bayar pajak, investasi modal, dan sebagainya
8. Raden Heriyanto dan Tatik Mariyanti, *Poverty Alleviation Strategies Through Sharia Microfinance Institutions Politico-*

⁴⁴Bayu Indra Pratama, Azizun Kurnia Ilahi, and Diyah Ayu Amalia Avina, "Political Branding : Content Analysis Of Debate Of Candidates For Vice Governor Of East Java Session I In Poverty Reduction," *Komunika* 5, no. 1 (2022): 01–20, <https://doi.org/10.24042/komunika.v5i1.11367>.

⁴⁵Magdalena Nany and Trisni Suryarini, "Does Balancing Fund Affect Economic Growth and Poverty Level in Central Java?," *Jurnal Kajian Akuntansi* 6, no. 1 (2022): 1, <https://doi.org/10.33603/jka.v6i1.5078>.

⁴⁶Roni Ekha Putera, "Analisis Terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan Dan Partisipasi Masyarakat Di Indonesia," *Demokrasi* VI, no. 1 (2017): 1–25.

*Economics Study With Tawhidi Approach.*⁴⁷ Penelitian ini termasuk kualitatif yang menjelaskan bahwa strategi penanggulangan kemiskinan di Indonesia perlu strategi pendekatan struktural dan kultural, pendekatan kultural melalui ekonomi kerakyatan misalnya mengkampanyekan cinta produk dalam negeri, literasi wakaf zakat, literasi LKS, meningkatkan etika birokrasi dan nilai-nilai kebersamaan. Sedangkan struktural melalui kebijakan melalui peran koperasi, peran anggaran pendidikan, peran birokrasi, penegakan hukum adil dan jujur terhadap korupsi

9. Yang Zhou dkk, *Land consolidation boosting poverty alleviation in China: Theory and practice.*⁴⁸ Kemiskinan daerah diatasi melalui pemanfaatan lahan agar menciptakan lapangan kerja, meningkatkan produksi hasil pertanian dan sekaligus mempengaruhi pendapatan petani kelompok miskin di China.

10. Leovardo Mata Delgado, Odra Angélica Saucedo, Kadelbach, Vivian, Mata, *Effects of Conditional Cash Transfers (CCT) in Anti-Poverty Programs. An Empirical Approach with Panel Data for the Mexican Case of PROSPERA-Oportunidades,*

⁴⁷Raden Heriyanto and Tatik Mariyanti, "Poverty Alleviation Strategies Through Sharia Microfinance Institutions Politico-Economics Study With Tawhidi Approach," *APTISI Transactions on Management (ATM)* 6, no. 2 (2022): 132–41, <https://doi.org/10.33050/atm.v6i2.1794>.

⁴⁸Yang Zhou, Liying Guo, and Yansui Liu, "Land Consolidation Boosting Poverty Alleviation in China: Theory and Practice," *Land Use Policy* 82, no. August 2018 (2019): 339–48, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.12.024>.

hasil penelitian di Brasil dan Amerika Latin bahwa program CCT/ *Conditional Cash Transfers* berupa bantuan tunai melalui kesehatan dan Pendidikan kurang efektif, maka tidak perlu program bantuan tersebut diperpanjang oleh pemerintah⁴⁹

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini sama-sama mengatasi masalah kemiskinan, ada perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini yakni obyek penelitian ini kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki angka kemiskinan cukup tinggi, memfokuskan program penanggulangan kemiskinan pasca otonomi daerah. Fokus penelitian ini perspektif ekonomi Islam, bagaimana jawaban ekonomi Islam mengatasi kemiskinan agar konsep ini diimplementasikan oleh pemerintah daerah, hal itu sebagai suatu kebaruan yang belum diteliti oleh peneliti lain. Artikel-artikel yang ditemukan memfokuskan bantuan sosial dapat menanggulangi kemiskinan dan obyeknya bervariasi. Alasan inilah yang menyebabkan peneliti tertarik program pemberantasan kemiskinan pasca otonomi daerah perspektif ekonomi Islam di Jawa Tengah.

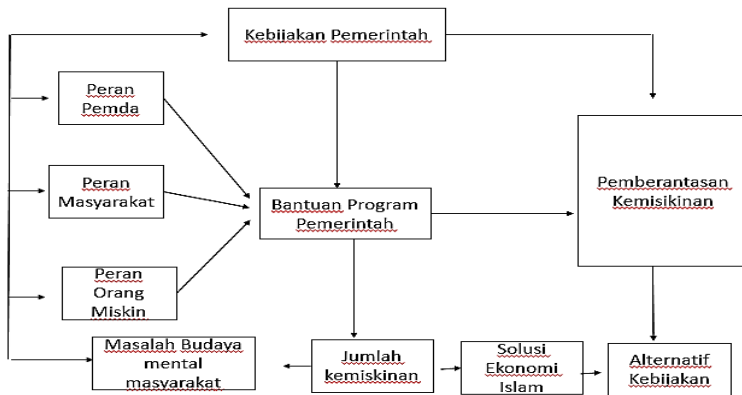
⁴⁹Leovardo Mata Delgado, Odra Angélica Saucedo, Kadelbach, Vivian, Mata, "Effects of Conditional Cash Transfers (CCT) in Anti-Poverty Programs. An Empirical Approach with Panel Data for the Mexican Case of PROSPERA- Oportunidades 2002–2012)," *Economies* 6, no. 29 (2018).

E. Kerangka Teoritik

Pembahasan kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan dasar, ketidakstabilan ekonomi makro, ketidakmampuan akses politik, kebijakan pemerintah pusat, ketidak efektifan kebijakan pemerintah daerah dan mental masyarakat. (Affandi 2017; Hong Ng, et al, 2013).). Berdasarkan pendapat tersebut, maka pemberantasan kemiskinan akan berhubungan dengan peran pemerintah daerah, masyarakat, dan orang miskin sendiri.

Program pemberantasan kemiskinan pasca otonomi daerah melalui kebijakan fiskal pada pengeluaran pemerintah melalui wujud belanja subsidi yang dinamai bantuan sosial kepada masyarakat. Peneliti menggunakan variabel yang merupakan bagian belanja subsidi berupa bantuan sosial yang diberikan masyarakat miskin. Peran otonomi daerah mempunyai tanggung jawab meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerahnya. Kesejahteraan masyarakat daerah dengan meningkatkan pendapatan pertumbuhan daerah. Masyarakat daerah juga memiliki tanggung jawab pada penurunan angka kemiskinan daerah. Budaya mental orang miskin juga mempengaruhi penurunan jumlah kemiskinan, sehingga orang miskin menjadi berubah menjadi mandiri.

Gambar 1. Kerangka Teoritik



Berdasarkan kerangka Teoritik di atas penanggulangan kemiskinan akan dipengaruhi oleh beberapa bantuan program kemiskinan, pemilihan variabel bantuan sosial kemiskinan mengadopsi beberapa penelitian yang sudah ada. Jumlah angka kemiskinan umumnya di Jawa Tengah khususnya di tiga kabupaten tersebut menjadi masalah bangsa karena faktor budaya mental masyarakat miskin. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan akan tergantung efektivitas kebijakan yang diterapkan, berdasarkan gambar kerangka fikir penelitian ini dalam rangka menurunkan angka kemiskinan berkolaborasi secara terus-menerus antara

penda, masyarakat dan masyarakat miskin, kolaborasi tersebut merupakan komitmen kebijakan pemerintah daerah.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini (*field research*) penelitian lapangan, di mana peneliti menggunakan cara untuk merancang, melaksanakan, menata data, dan menarik kesimpulan berkenaan dengan masalah penelitian ini tentang program pemberantasan kemiskinan pasca Otonomi ;Daerah/OTDA. Bentuk penelitian ini deskriptif (*descriptive research*) merupakan cara untuk menjelaskan gejala riil di lapangan yang berjalan pada momen atau masa yang lampau,⁵⁰ penelitian ini didasarkan juga pada asumsi filosofis,⁵¹ nara sumber yang jamak dan naratif.⁵² Penelitian deskriptif mempunyai dua karakter.⁵³

- a. Deskriptif penelitian merupakan penelitian memaparkan suatu kejadian sebenarnya yang ditelaah ketat dan urut, memprioritaskan sifat seobyektif mungkin dan dijalankan oleh peneliti sebenar-benarnya.

⁵⁰Robert Bogdanand Steven J.Taylor, *Introduction to Qualitative Research Methods*, (New York: Wiley 1975):4.

⁵¹Norma K. Denzim Yvona S. Lincoln, *Handbook of Qualitative Research, Synthese*, vol. 195 (New Delhi: Thousand oaks,CA, 2018), <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1319-x>.

⁵²Yvona S .Lincoln Egon Guba, *Naturalistic Inquiry* (London new delhi: sage publications Beverly hills, 1984); 47 .

⁵³Furchan Ahmad, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan* (Yogyakarta:Pustaka Belajar,2004):78..

b. Deskriptif penelitian tidak membutuhkan pengujian statistik yang berupa angka yang kemudian diolah dengan aplikasi SPSS yang hasil t hitung dikendalikan oleh t tabel, namun dalam penelitian ini menggunakan deskriptif penelitian yang benar dan sesuai dengan prosedur.

2. Letak Penelitian dan Waktu

Penelitian ini dilakukan di Jawa Tengah tepatnya tiga kabupaten yakni Kebumen, Wonosobo dan Brebes. Alasan pemilihan lokasi penelitian, dikarenakan penelitian tentang program pemberantasan kemiskinan yang mana tiga kabupaten tersebut mempunyai tingkatan prosentase tinggi, selain itu mendapatkan award dalam pengelolaan keuangan mendapatkan nilai A dan Jawa Tengah merupakan provinsi yang memiliki perguruan tinggi terbanyak di urutan ke empat dengan sebutan kota pelajar. Total perguruan tinggi 256 dengan rincian PTN: PTS 247, sebagaimana Daerah Istimewa Yogyakarta juga sebutan kota pelajar, namun pada urutan ke delapan, total PT 109 dengan rincian PTN:5, PTS: 104.⁵⁴ Banyaknya perguruan tinggi merupakan penghasil kekayaan intelektual sebagai

⁵⁴Rahayu, "Analisis Perkembangan Dana Otonomi Khusus Sebagai Implementasi Desentralisasi Fiskal Di Provinsi Aceh." *Proceeding Seminar Nasional Kewirausahaan*, 2 no 1 (2021): 360-367 [.doi.org/10.30596%2Fsnk.v2i1.8284](https://doi.org/10.30596%2Fsnk.v2i1.8284)

masuk pemerintah daerah untuk menjawab berbagai persoalan kemiskinan daerah.

Waktu penelitian ini dilaksanakan beberapa bulan setelah seminar proposal yang dilaksanakan tanggal 27 April 2022. Tahapan pertama dalam penelitian antara lain: melakukan observasi pada bulan Maret 2022 sebagai bahan kajian ujian komprehensif. Tahapan kedua pelaksanaan ujian komprehensif 20 Oktober 2022 kemudian melaksanakan riset ke tiga kabupaten dan penyusun disertasi hingga sekarang.

3. Pemilihan Informan/Nara sumber

Partisipasi narsum merupakan seseorang yang dipilih peneliti sebagai sumber informasi yang disebut subjek penelitian.⁵⁵ Pengkajian ini termasuk penelitian kualitatif, maka penelitian ini mengangkat suatu kasus yang terjadi di masyarakat tertentu yang menarik. Penelitian kualitatif tidak membutuhkan populasi dan sampel statistik. Tetapi narsum dalam penelitian kualitatif merupakan partisipasi yang akan dikroscek melalui wawancara. Sample dalam penelitian ini langsung diperoleh melalui orang yang tahu tentang masalah dalam penelitian. Sehingga sampelnya adalah sample konstruktif yang merupakan data yang bisa dikonstruksi melalui gejala yang terjadi yang sekiranya belum mampu dipahami oleh

⁵⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010):209.

peneliti. Adapun Teknik pengambilan sample dengan menerapkan *purposive sampling*, menggunakan sample yang memiliki ciri/karakter yang sejalan dengan tema yang diteliti.⁵⁶ Tujuan pengambilan teknik sampel dalam telaah ini untuk mencari data yang menggantikan kejadian yang ada di lapangan. Penelitian ini dalam memilih sumber data/informasi sebagai berikut:

Tabel 2. Nama Informan dalam Penelitian

No	Nama Informan	Keterangan
	Kebumen	
1	Agus Setyawan	Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia/ PPM Bappeda Kebumen
2.	Purnowati	Sekretaris BPKAD Kebumen
2	Adi Purnomo	Koordinator penanggulangan kemiskinan Bappeda kebumen
3	Joko Widodo	koordinator penanganan sosial dan pemberdayaan sosial
4	Agus Faurizan	Staff pelaksana penanganan kemiskinan
5	Mulyono	Tokoh masyarakat Kebumen

⁵⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010):85-86.

6	Khoiratul Awaliyah	Masyarakat Kebumen
	Brebes	
1	Endang Minarsih	Subkor pemberdayaan swadaya masyarakat dan usaha mikro dinsos Kab Brebes
2	Anggita	Staff penanggulangan Kemiskinan dinsos kab Brebes
3	Waruddin	Koordinator nangkis Brebes
4	Tarsono	Wakil Koordinator nangkis Brebes
5	Dani	Staff pemberdayaan swadaya masyarakat dan usaha mikro dinsos
6	Zaenal	Staff pemberdayaan swadaya masyarakat dan usaha mikro Dinsos Kab Brebes
7	Sauqi Wijaya	Tokoh masyarakat Brebes
8	Wurtanto	Masyarakat Brebes
	Wonosobo	
1.	Noer Cahyadi	Penyuluh sosial dinsos kab. Wonosobo
2.	Haryanto	Tokoh masyarakat Wonosobo
3	Danti	Masyarakat Wonosobo
4	M. Ihsan	Masyarakat Wonosobo

4. Metode Pengumpulan data

Cara pengumpulan data ialah prosedur yang dilaksanakan peneliti untuk menghimpun data mentah sesuai sumber yang tepat yang berasal dari subjek penelitian yang dipilih.⁵⁷ Adapun langkah yang diterapkan dalam pengumpulan data penelitian melalui berbagai metode yang digunakan antara lain:

a. Metode Observasi

Metode pengamatan adalah pemantauan peneliti terhadap kondisi sosial yang terjadi di lapangan.⁵⁸ Pengamatan dalam kata lain telah membantu mendapatkan data yang serupa dengan perilaku tertentu yang ada di lapangan.⁵⁹ Menurut Arikunto,⁶⁰ jenis observasi dalam penelitian ini yakni pengamat terlibat ikut berpartisipasi⁶¹ dalam kegiatan yang dijadikan subjek penelitian ini yaitu

⁵⁷Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004):87.

⁵⁸Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: Bumi Aksara, 2004):20.

⁵⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung, Alfabeta, 2010):190.

⁶⁰Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008):20.

⁶¹Yanyi K . Djamba and W. Lawrence Neuman, "Social Research Methods:Qualitative Approaches," *Teaching Sociology* 3, no. 3 (2002): 380, <https://doi.org/10.2307/3211488>.

mengamati program pemberantasan kemiskinan pasca Otonomi Daerah pesrsektif ekonomi Islam.

b. Metode Wawancara

Metode wawancara adalah cara tanya jawab yang dilakukan antara peneliti dengan sumber informasi.⁶² Pandangan lain menyatakan bahwa metode tanya jawab melalui wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data dan tersedia soal yang terkait tema penelitian dari peneliti dan informen menjawabnya. Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data melalui bertanya dan menjawab yang dilakukan oleh peneliti dan responden.

Adapun bentuk wawancara ada dua yakni bentuk terstruktur yakni peneliti sebelum melaksanakan tanya jawab, mereka harus menyiapkan susunan soal yang akan direncanakan yang sesuai dengan tema penelitiannya. Sedangkan wawancara kedua yakni wawancara tidak terstruktur yakni penelitian tidak menyiapkan soal pertanyaan, hanya bermodalkan garis besar tema yang akan ditanyakan dan seuai dengan masalah yang akan diteliti.

Penelitian ini dalam mengumpulkan data melalui wawancara terstruktur, peneliti berkomunikasi verbal dengan narsum tidak secara formal, menggunakan

⁶²Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Kencana, 2014):18 .

pendekatan santai karena tema yang diteliti ini sensitif sebab berkaitan bantuan yang identik dengan uang. Oleh karena itu peneliti mengajukan soal pertanyaan santai dan ringan terkait dengan tema program penanggulangan kemiskinan pasca otonomi daerah perspektif ekonomi Islam di Jawa Tengah.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi di zaman sekarang sangat mudah dicari dengan melalui berbagai bentuk misalnya laporan keuangan, berita online, jurnal, buku maupun majalah.⁶³ Pandangan lain menyatakan bahwa cara dokumentasi untuk mencari data melalui manuskrip, maupun catatan yang sesuai dengan tema penelitian.⁶⁴ Cara mengumpulkan data penelitian melalui dokumen yang bisa memberikan data yang berkaitan program bantuan penanggulangan kemiskinan pasca otonomi daerah perspektif ekonomi Islam di Jawa Tengah.

5. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis data dapat dibagi dua yakni:⁶⁵

⁶³Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2008):17.

⁶⁴Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal* (Jakarta: bumi aksara, 2004):187.

⁶⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2010):14..

- 1) Data kualitatif adalah tata aturan dalam menyelesaikan persoalan penelitian dengan membuat kalimat ilmiah dan logis berdasarkan peristiwa yang benar terjadi di lapangan, data yang diperoleh dianalisa sesuai dengan teori yang digunakan pisau analisa data.
- 2) Data kuantitatif adalah penyelesaian persoalan penelitian dengan cara memperoleh data bisa melalui penyebaran kuesioner maupun data laporan keuangan. Olah data statistik melalui aplikasi SPSS kemudian baru dianalisa hasil olah datanya dengan cara menguji hasil hitung yang dikonsultasikan ke t tabelnya.

Penelitian ini mengandalkan data kualitatif yang bersumber dari informen melalui tanya jawab sebagai cara penggalian data dalam penelitian ini. Peneliti mengalami kesulitan saat wawancara karena dianggap wartawan dari press surat kabar, sehingga kesulitan mendokumentasikan. Akhirnya menggunakan cara masuk sebagai masyarakat yang butuh pelayanan melalui pengambilan nomer urut antre bergabung dan membaur dengan antrean masyarakat serta makan diwarung sambil ngobrol, sehingga berbagai masalah yang dihadapi peneliti. Data kualitatif dalam penelitian ini menggunakan kalimat atau kata ilmiah dan

logis.⁶⁶ Oleh karena itu studi ini memanfaatkan data kualitatif yang berupa kalimat-kalimat ilmiah.

b. Sumber Data

Sumber data merupakan seseorang yang memberikan informasi/jawaban atas pertanyaan yang diberikan peneliti. Menurut Emir,⁶⁷ penggalian data dalam penelitian ada dua jenis yakni data primer dan data skunder, karakter asal mula fakta sebagai sumber data ada dua sumber data, sebagai berikut:

- 1) Data primer adalah sebuah fakta yang diperoleh melalui observasi dan wawancara secara langsung antara peneliti dan informen yang betul-betul mengetahui program bantuan penanggulangan kemiskinan pasca Otonomi Daerah tiga kabupaten yakni Kebumen, Brebes dan Wonosobo di Jawa tengah.
- 2) Data sekunder adalah asal fakta pendukung sebagai penghias data primer berupa jurnal, berita online, buku yang sesuai dengan tema penelitian ini yakni program penanggulangan kemiskinan pasca Otonomi daerah perspektif ekonomi Islam.

⁶⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D* (Bandung: Alfabeta, 2010):14.

⁶⁷Emzir, *Metodologi Kualitatif Analisis Data* (Jakarta: Rajawali Press, 2010):120.

6. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data peneliti menggunakan studi bentuk interaktif. Studi interaktif menurut sugiyono,⁶⁸ ada tiga langkah kegiatan penelitian yakni reduksi data, penyampaian fakta/data dan penarikan kesimpulan.

Pertama, reduksi data yakni cara memilah-milah, memfokuskan menyederhanaan data fakta dari berbagai asal usul data misalnya hasil wawancara, buku, jurnal maupun berita online, sedangkan prosedurnya mengambil kalimat inti dan menghapus yang tidak dibutuhkan, memilih yang inti, dan menulis memformulasikan data kemudian buat kesimpulan.

Kedua penyampaian fakta, yakni mengatur data dan mempersentasikan data dengan baik agar lebih mudah untuk dipahami. Penyajian bisa berupa kata-kata berupa lisan dan perlaku responden seterusnya.

Ketiga, menarik kesimpulan atau melakukan verifikasi yaitu proses penarikan kesimpulan awalnya masih belum kuat, terbuka dan ragu-ragu. Kesimpulan akhir akan dilakukan setelah penghimpunan data berakhir.

7. Uji Validitas Data

Pengecekan keabsahan penelitian kualitatif agar tetap terjaga keilmiahannya, maka mengikuti prosedur dan berbagai

⁶⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif* (Bandung:Alfabeta 2022): 20.

teori dan ilmu penelitian.⁶⁹ Oleh karena itu data kajian kualitatif ini mampu mempertanggungjawabkan, penelitian dikatakan ilmiah harus melalui uji keabsahan data antara lain:

a. *Credibility*

Uji *credibility* merupakan kredibilitas/uji kepercayaan kepada data yang diperoleh peneliti yang disusun dalam bentuk laporan penelitian dengan membuktikan agar tidak diragukan sebagai suatu karya ilmiah yang sudah di selesaikan dari tahapan penelitian hingga membuat laporan tugas akhir. Maka ada beberapa tahapan:

- 1) Jenjang pengamatan dapat meningkatkan kepercayaan data. Jenjang observasi artinya seorang peneliti terjun ke lapangan langsung sesuai dengan obyek penelitian atau lokus yang diteliti. Jenjang pengamatan dilakukan wawancara dengan sumber informen agar terhubung semakin percaya dan akrab dengan tujuan peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan dan informasi yang benar dan lengkap.

Panjang pengamatan akan di uji kredibilitas data penelitian memfokuskan pada pengujian data yang sudah diperoleh. Data diperoleh dicek lagi ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Data dicek ke lapangan untuk memperoleh data yang bisa

⁶⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000): 320.

dipertanggungjawaban/benar-benar kredibel, hingga pengamatan berakhir.

2) Pencermatan kualitas penelitian

Pencermatan kualitas artinya penelitian yang sungguh-sungguh dan semangat untuk mendapatkan kepastian data dan runtut kronologis peristiwa yang diteliti. Pencermatan yang berkualitas penelitian dapat dilakukan melalui pencatatan, *recored*.

Peningkatan kecermatan penelitian merupakan sistem pengecekan kerja, pastikan data sudah terkumpulkan dan laporan tersusun sesuai dengan pedoman. Semangat dan kesungguhan peneliti juga menggunakan kajian pustaka dahulu baik jurnal, buku digunakan referensi dalam penelitian agar laporan penelitian bermutu dan berkualitas.

3) Triangulasi

Triangulasi untuk pengujian kredibilitas berarti berbagai pengecekan data dari berbagai sumber, triangulasi cara pengumpulan data, dan waktu.⁷⁰

a. Triangulasi Sumber

Dalam menguji kredibilitas data ini dilakukan dengan cara pengecekan data memperoleh melalui beberapa sumber. Data akan yang terkumpul

⁷⁰Djama'an Satori and Aan Komariah, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2017):225.

dianalisis untuk menghasilkan kesimpulan kemudian dimintakan kesepakatan (*member check*) pada responden.

b. Triangulasi Teknik

Dalam menguji kredibilitas data ini melakukan dengan cara pengecekan data pada sumber yang sama dengan teknik berbeda. Misal dicek data dapat melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bisa dengan teknik pengujian kredibilitas melalui diskusi keberlanjutan pada sumber data hingga data dianggap benar.

c. Triangulasi Waktu

Pada triangulasi ini, peneliti akan mempertimbangkan waktu pengumpulan data bisa hari, jam, waktu sehabis makan, pagi, siang dan sebagainya. Karena waktu bisa mempengaruhi data yang diperoleh. Contohnya adalah data yang diambil dengan cara wawancara di sore hari pada saat nara sumber sudah santai dengan pekerjaan harian yang telah selesai. Maka besar kemungkinan nara sumber bisa menjawab pertanyaan wawancara dengan lebih santai dan lugas. Maka dari itu dalam pengecekan keabsahan data bisa dilaksanakan dengan pengujian observasi, wawancara atau dengan metode lain

dengan waktu atau kondisi yang berbeda. Jika hasil pengujian mendapatkan data yang beda maka peneliti bisa melaksanakan pengujian secara berulang hingga memperoleh data yang pasti dan akurat.

4) Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan data yang ditemukan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya.⁷¹ Peneliti melakukan pengecekan pada data yang bertentangan yang mereka terima.

5) Mencantumkan Referensi

Referensi dapat dijadikan sebagai pendukung untuk memperkuat pembuktian laporan penelitian. Oleh karena itu peneliti pada waktu observasi dan wawancara dilengkapi foto dan dokumen lain agar data yang diperoleh bisa dipercaya.

6) Pengecekan Data

Prosedur pengecekan data dilaksanakan peneliti terhadap informen yang diwawancarai dengan data dokumentasi misalnya jurnal buku dan berita-berita

⁷¹Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif* (Bandung:Alfabet 2022), 100.

online. Tujuan pengecekan ini agar bisa diketahui sejauhmana data yang didapat sesuai yang disampaikan narsum.

b. *Transferability*

Transferability adalah kevaliditasan eksternal dalam penelitian kualitatif. Kevaliditasan eksternal merupakan hasil temuan penelitian mampu digeneralisasikan misalnya validitas eksternal yakni mengecek program bantuan berlangsung seperti program bantuan apa saja untuk mengentaskan kemiskinan dan tercapai tidak penanggulangan kemiskinan. Oleh karena itu nilai transfer bagi peneliti tergantung si pemakai, sehingga peneliti mampu mempertanggungjawabkan melalui pemakaian penelitian dalam situasi sosial yang berbeda. Apakah nilai transfer yang sekarang dapat digunakan dalam situasi lain. Kalau penelitian bisa dipakai dalam situasi berbeda, berarti nilai tranfer mampu dipertanggungjawabkan.

c. *Defendability*

Defendability identic dengan reliabilitas memiliki arti bahwa penelitian yang dapat dipercaya, dipertanggung jawabkan atau dapat diandalkan. Penelitian dapat dipercaya, jika dilakukan uji dengan

nara sumber beda dengan tema yang sama menghasilkan hasil yang sama. Penelitian *defendability* akan memberikan hasil penelitian yang sama walaupun responden/ narsum beda dan prosedur penelitian sama, maka hasil penelitian yang didapat juga menunjukkan hasil yang sama juga. Pengecekan *dependability* dapat dilakukan terhadap semua proses penelitian dari masalah penelitian, jumlah responden kemudian peneliti ke lapangan langsung, dilanjutkan pengecekan data hingga pembuatan laporan hasil penelitian.

d. *Confirmability*

Confirmability merupakan objektivitas pengecekan dalam penelitian kualitatif. Telaah studi objektif jika hasil studinya tidak bertentangan dengan teori dan pembimbing atau orang lain. Tahapan *confirmability* merupakan pengecekan hasil temuannya apakah prosedur penelitian sudah mengikuti aturan penelitian. Kalau sudah sesuai prosedur berarti penelitian tersebut sudah memenuhi standar *confirmability*. Kevaliditan atau sahnya data, jika tidak beda dengan data yang diperoleh di lapangan

hingga pengolahan data dan bisa dipertanggungjawabkan hasil penelitiannya.⁷²

G. Sistematika Pembahasan

Berdasarkan latar belakang masalah, maka susunan sistematika penulisan disertasi ini terdiri atas lima bab, meliputi bab satu berupa pendahuluan yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan signifikansi penelitian, kajian pustaka, kerangka berpikir dan metode penelitian, sistematika pembahasan.

Bab kedua Teori program penanggulangan kemiskinan pasca otonomi daerah perspektif ekonomi Islam yang terdiri dari teori kemiskinan, teori kebijakan public, teori program bantuan, teori pembangunan ekonomi, teori pemberdayaan masyarakat, teori otonomi daerah.

Bab ketiga urgensi program bantuan penanggulangan kemiskinan pasca otonomi daerah di Jawa Tengah yang terdiri dari kondisi kemiskinan dan bantuan social, arah pembangunan ekonomi dalam otonomi daerah dan urgensi program bantuan bagi masyarakat pasca otonomi daerah.

Bab keempat peran *stakeholder* dalam program penanggulangan kemiskinan pasca otonomi daerah perspektif ekonomi Islam yang terdiri dari peran pemerintah program penanggulangan kemiskinan pasca otonomi daerah, peran

⁷² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif.* (Bandung: Alfabeta, 2017), 115.

masyarakat sebagai control kebijakan pemerintah mempengaruhi angka kemiskinan pasca otonomi daerah, peran orang miskin sendiri dalam melakukan perubahan diri dari miskin menjadi mandiri dan program penanggulangan kemiskinan pasca otonomi daerah dalam pandangan ekonomi Islam.

Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan, saran dan penutup

BAB II

TEORI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN PASCA OTONOMI DAERAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Teori kemiskinan

1. Pengertian dan bentuk-bentuk kemiskinan

Pengertian kemiskinan yang dijadikan pedoman pemerintah adalah menurut lembaga BPS dan Depsos. Kemiskinan adalah ketidak mampuan manusia untuk hidup layak dalam memenuhi kebutuhan pokok. Batasan kemiskinan adalah garis minimum untuk memenuhi kebutuhan makan dan non makan yang disebut *poverty threshold*.⁷³ Masalah miskin multidimensi yang tak terpenuhi hak-hak pokok untuk mempertahankan dan membangun kehidupan berkualitas.⁷⁴ Kondisi ketidakcukupan sandang, papan dan pangan ditunjukkan kecilnya pendapatan seseorang.⁷⁵ Berbagai definisi itu digunakan sebagai standar untuk mengukur kemiskinan dan dasar untuk mengeluarkan kebijakan untuk menanggulangnya. Ketidakcukupan mengcover

⁷³Fabiana Meijon Fadul, “Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Propinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021,” *Journal Ebismen* 1, no. 3 (2022): 176–89.

⁷⁴M Rafi Farrel Fuady, Mirza Fuady, and Fahmi Aulia, “Kemiskinan Multi Dimensi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia,” *Tataloka* 23, no. 4 (2022): 575–82, <https://doi.org/10.14710/tataloka.23.4.575-582>.

⁷⁵Muhammad Irkham Firdaus and Jaya Sahputra, “Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam,” *Jurnal Tafaqquh STIS Darul Falah* 7, no. 1 (2022): 76–87.

keperluan hidup minimal sebagai salah satu barometer situasi ekonomi dalam mengukur kesuksesan perubahan yang diperbuat pemerintah daerah.⁷⁶ Pandangan lain mengatakan bahwa kemiskinan penghambat pembangunan yang dibuktikan adanya pengangguran dan keterbelakangan, yang dibiarkan menyebabkan ketimpangan.⁷⁷ Kemiskinan merupakan seseorang individu maupun kelompok yang tidak mampu memenuhi kebutuhan primer. Ketidakmampuan seseorang memenuhi kebutuhan primer, maka bantuan jaringan sosial dibutuhkan untuk penanganan kemiskinan sebagaimana menurut Mutiullah yang menyatakan tiga aspek untuk menangani kemiskinan, yakni perbaikan fasilitas kesehatan dan pendidikan, pembukaan lapangan kerja.⁷⁸ Ketiganya dengan prosedur program bantuan pemerintah dengan melalui anggaran APBN maupun APBD.

Dalam bahasa Inggris, kemiskinan diartikan *poverty*, artinya miskin sangat tidak punya dan kualitas keadaan rendah,

⁷⁶Kecamatan Winong and Kabupaten Pati, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kerajinan Rajut Di Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati" 1, no. 2 (2021): 119–34.

⁷⁷M. Rimawan and Fenny Aryani, "Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima," *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 9, no. 3 (2019): 287–95, <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/22539>.

⁷⁸Mutiullah dan Moch Nur Ichwan (ed., *Agama, Filsafat Dan Kemiskinan*, (Yogyakarta: Progarq Studi Agama dan Filsafat Pascasarjatra UIN Sutran Kalijaga, 2015),3.

sehingga miskin diilustrasikan seperti manusia yang konsumsinya di bawah garis kemiskinan.⁷⁹ Batasan orang miskin untuk bahan makanan orang desa 240 kg beras dan untuk orang kota 360 kg beras yang disebut Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non Makanan /GKNM contoh kebutuhan non makanan yaitu pendidikan, kesehatan dan sejenisnya.

Beberapa bentuk keterbatasan yang dihadapi orang miskin, misalnya terbatasnya ketrampilan yang dimiliki orang miskin, terbatasnya peluang tenaga kerja, terbatasnya anggaran pemerintah, buruknya budaya masyarakat, buruknya pemerintah dan kondisi politik. Maka perlu adanya kebijakan pemerintah daerah untuk mengatasi persoalan miskin. Otonomi daerah mampu meningkatkan target pendapatan dan program pro masyarakat miskin tepat sasaran,⁸⁰ karena pemerintah daerah dengan berlakunya otonomi daerah lebih dekat pemerintah

⁷⁹Nurlaila Maysaroh Chairunnisa and Yuha Nadhirah Qintharah, “Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020,” *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)* 7, no. 1 (2022): 147–61, <https://doi.org/10.51289/peta.v7i1.530>.

⁸⁰Harsanto Nursadi Alit Ayu Meinarsari, “Arah Baru Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah :Sentralisasi Atau Desentralisasi,” *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 8 (2022): 1–18.

daerah untuk menangani kemiskinan daerah. Kemiskinan di Indonesia ada beberapa bentuk antara lain:⁸¹

a. Kemiskinan Absolut

Miskin absolut adalah ketidakcukupan seseorang atau sangat minimnya untuk memenuhi kebutuhan pokok misalnya papan sandang, pangan dan Pendidikan dan kesehatan. Pendapatan yang diperoleh tidak mencukupi kebutuhan sehari-hari. Pendapatan yang diperoleh sangat kecil jika dibandingkan dengan kebutuhan yang harus dipenuhi.

b. Kemiskinan Relatif

Miskin relatif adalah disebabkan pembangunan pemerintah belum merata di seluruh nusantara. Pembangunan yang tidak merata akan menghasilkan ketimpangan pendapatan masyarakat, karena orang miskin tersebut mampu pada tingkatan atas GK namun karena mereka tidak mendapatkan sasaran pembangunan pemerintah, maka orang miskin tetap di bawah GK.

c. Kemiskinan Kultural

Miskin kultur adalah miskin karena budaya atau *mindset* berpikir masyarakat yang malas bekerja,

⁸¹Ardhi Firmansyah et al., “Pengelompokan Tingkat Kemiskinan Menggunakan Metode SAW,” *Scientia Sacra : Jurnal Sains , Teknologi Dan* 2, no. 1 (2022): 121–26.

materialistik hedonistik, inovatif dan kreatifitas rendah.⁸² Karena sudah dimanjakan dengan berbagai bantuan yang mereka dapat baik dalam negeri maupun luar negeri.

d. Kemiskinan Struktural

Miskin struktural adalah sistem dan kondisi social budaya dan sosial politik yang tidak memberikan dorongan dan motivasi masyarakat miskin untuk berubah menjadi mandiri tanpa bergantung pada pihak-pihak lain yang mencari jabatan atau tujuan-tujuan tertentu.⁸³ Macam kemiskinan di atas memerlukan kebijakan yang beda-beda. Tidak bisa disamakan kebijakan bantuan yang diberikan kelompok miskin. Sehingga pemerintah daerah dalam memberikan intervensi dalam memberikan bantuan disesuaikan dengan jenis miskinnya. Penanganan miskin pemerintah bertanggung jawab, masyarakat dan orang miskin sendiri juga ikut bertanggung jawab untuk berubah lebih baik lagi dan mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

⁸²OK Henry, Yuanita FD, and Bambang Hermanto, "Kajian Faktor Natural Dan Kultural Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan (Medan Utara)," *Potensi* 2, no. 2 (2022): 23–35.

⁸³Hasbi sultan Muhammad Iqbal Latief, Rabina Yunus, "Problematisasi Akselerasi Penanganan Kemiskinan Nelayan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Makassar," *Jurnal Pembangunan Manusia* 3, no. 1 (2022): 1–7, <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1026>.

2. Ciri-ciri Kemiskinan dan Faktor Penyebab Kemiskinan

Miskin merupakan seseorang yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan menurut ahli ekonomi ada beberapa ciri seseorang dikatakan miskin antara lain:

- a. Ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok.
- b. Ketidakmampuan bekerja, disebabkan sakit fisik dan mental.
- c. Ketidakmampuan di lingkungan sosial.
- d. Rendahnya kualitas manusia.
- e. Mudah mendapatkan guncangan.
- f. Keterbatasan dunia kerja dan mata pencaharian
- g. Keterbatasan jalan untuk memenuhi bidang pendidikan dan kesehatan.
- h. Keterbatasan jaminan masa tua dan ketidakmampuan aktif dalam masyarakat.⁸⁴

Berdasarkan berbagai ciri-ciri miskin baik meliputi keterbatasan material maupun non material, perlu adanya intervensi kebijakan yang berorientasi dengan ciri-ciri kemiskinan yang ada di masyarakat. Intervensi pemerintah memerlukan kerja sama antara masyarakat dan kelompok

⁸⁴Faizatun Nisa' Sari Wuladari, Alma Azahra, Novita Sari, Amalia Nasution, "Kesenjangan Pendapatan Yang Memicu Kemiskinan Di Indonesia," *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 1, no. 1 (2022): 238–51.

miskin sendiri. Adapun faktor-faktor yang menyebabkan miskin, dilihat berdasarkan karakter antara lain.⁸⁵

- a. Karakter Regional: *Pertama*, wilayah terpencil dan terpinggir serta pembangunan infrastruktur belum merata sehingga untuk memenuhi kebutuhan butuh biaya tinggi karena pasar dan kantor pelayanan cukup jauh dari daerah orang miskin. *Kedua* lahan tanah yang dimiliki memiliki kualitas rendah. *Ketiga*, kurang didukung oleh iklim, cuaca dan lainnya. *Keempat*, rendahnya manajemen wilayah.
- b. Karakter Komunitas: *Pertama*, keberadaan informasi dan masyarakat. *Kedua*, kondisi masyarakat di bidang Pendidikan, kesehatan dan lain-lain. *Ketiga*, untuk mendapatkan barang dan jasa. *Keempat*, susunan kondisi sosial dan mendapatkan modal.
- c. Karakter Rumah Tangga: *Pertama* luas rumah. *Kedua* jumlah anggota rumah. *Ketiga* status kepala keluarga. *Keempat* status barang yang dimiliki. *Kelima* mata pencaharian. *Keenam* jenjang pendidikan.
- d. Karakter Individu: umur, pendidikan, status perkawinan, suku/daerah⁸⁶

⁸⁵Muhammad Iqbal Latief, Rabina Yunus, "Problematisasi Akselerasi Penanganan Kemiskinan Nelayan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Makassar." *Jurnal Pembangunan Manusia*, 3 no. 1 (2022):1-7

⁸⁶Jurnal Dinamika Pemerintahan, "Implementasi Program Keluarga Harapan /PKH Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Kabupaten Indragiri Hilir 2016-2020," *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 1, no. 1 (2022): 124–37.

Kemiskinan terjadi karena berbagai macam faktor penyebab dan karakter regional hingga karakter individu harusnya sebagai dasar pemerintah dalam memberikan bantuan agar tepat sasaran menurunkan angka kemiskinan, karena sementara ini bantuan pemerintah bias. Bantuan pemerintah membuat gejolak dan kecemburuan dan kisruh, karena bantuan pemerintah tidak tepat sasaran bagi yang berhak saja.

3. Indikator Kemiskinan

Para ahli bidang ekonomi menyatakan bahwa kemiskinan adalah seseorang yang memiliki minimnya pendapatan, sehingga keterbatasan memenuhi kebutuhan hidup. Tolok ukur kemiskinan yang digunakan dasar pemerintah untuk melaksanakan program bantuan adalah BPS. Adapun indicator kemiskinan yang biasa digunakan, antara lain:⁸⁷

- a. BPS menggunakan ukuran miskin absolut pendapatan seseorang lebih rendah dari garis kemiskinan.⁸⁸ Garis kemiskinan merupakan asas perhitungan total rakyat miskin yang perhitungannya menerapkan pendekatan kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Garis Kemiskinan Makanan

⁸⁷Johan Arifin, “Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia.”

⁸⁸Teja Rinanda Nirwana Br. Bangun, “Pengaruh Oligarki Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia,” *Journal All Fields of Science* 1, no. 1 (2021): 44–53.

(GKM) merupakan jumlah keperluan minimum makanan disamakan 2100 kilo kalori perkapita perhari.

b. BKKBN (Badan Kependudukan dan keluarga Berencana Nasional) tolok ukur miskin berdasarkan indikator keluarga sejahtera, antara lain:⁸⁹

1). Keluarga pra-sejahtera merupakan ketidakmampuan suatu keluarga untuk memenuhi kebutuhan minimum misalnya pendidikan anak sekolah, papan sandang dan pangan. Indikator meliputi: keluarga makan dua kali sehari, anggota keluarga berpakaian, lantai rumah baik, sakit segera berobat.

2). Keluarga sejahtera I merupakan keluarga yang mampu terpenuhi kebutuhan sandang, papan, pangan dan pendidikan dan kesehatan, namun ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan sosial dan psikologi. Indikatornya meliputi: makan yang bergizi dan bervitamin minimal sekali dalam seminggu, membeli baju baru dalam setahun, teratus dalam menjalankan ibadah, memiliki luas lantai, stabilnya penghasilan, cukup punya 2 anak, bisa baca dan umur 5-15 sekolah.

⁸⁹Muntaha Mardhatillah, "Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Padang Panjang," *Jurnal Ilmiah Ekotrans Dan Erudisi* 1, no. 1 (2021): 76–87, <https://ejournal-unespadang.ac.id/index.php/JIEE/article/view/313>.

- 3). Keluarga sejahtera II merupakan suatu rumah tangga sanggup memenuhi kebutuhan keluarga sejahtera 1 dan mampu memenuhi kebutuhan lainnya seperti menabung berwisata dan lainnya, indikatornya meliputi: menabung hari tua, berlibur sekali dalam enam bulan, intraksi baik, peningkatan pengetahuan, memiliki alat transportasi.
- 4). Keluarga sejahtera III merupakan suatu ruma tangga mampu terpenuhi kebutuhan hidup, mampu beradaptasi dalam segala kondisi, tetapi belum mampu bersedekah.
- 5). Keluarga sejahtera III Plus merupakan suatu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan baik material maupun non materia. Bahkan mampu memenuhi kebutuhan primer, sekunder dan tersier.

c. Bank Dunia

Tolok ukur kemiskinan yang digunakan negara internasional adalah bank dunia. Orang dikatakan miskin jika pengeluarannya kurang dari US\$2 per hari. Klasifikasi orang miskin pertama *extreme poor* yaitu sangat miskin belanja yang dikeluarkan di bawah US\$1 per hari.

4. Kemiskinan dalam Islam

Berdasarkan pandangan Islam, bahwa sampai kapanpun kemiskinan pasti ada, karena miskin merupakan *sunnatullah fil hayah*, namun Islam mengajak bagaimana mengurangi agar

tujuan hidup tercapai *falah*.⁹⁰ Sebagaimana perintah Islam yang mengajak untuk saling peduli, bersilaturahmi, saling kerjasama. Lima pilar dalam menyelesaikan persoalan hidup dunia antara lain ulama yang berilmu, keadilan yang dilaksanakan pemerintah, kelompok kaya peduli orang miskin, orang fakir berdoa yang baik, aktor birokrat bersifat jujur.⁹¹ Sebagaimana dalam surat Al Hasyr ayat 8:

لِلْفُقَرَاءِ الْمُهَاجِرِينَ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ
دِيَارِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ
وَرِضْوَانًا وَيُتَصَرَّفُونَ اللَّهُ وَرَسُولَهُ ۗ أُولَٰئِكَ
هُمُ الصَّادِقُونَ [8]

Artinya; “ (Harta rampasan itu juga) untuk orang-orang fakir yang berhijrah yang terusir dari kampung halamannya dan meninggalkan harta bendanya demi mencari karunia dari Allah dan keridaan(-Nya) dan (demi) menolong (agama) Allah dan Rasul-Nya. Mereka itulah orang-orang yang benar”.

⁹⁰M. Syahrul Syarifuddin and Amir Sahidin, “Filantropi Islam Menjawab Problem Kesenjangan Ekonomi,” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2021): 101–9, <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/11506>.

⁹¹Victorinus Laoli, “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value of Money Pada Pemerintah Kabupaten Nias,” *Owner* 3, no. 1 (2019): 91, <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.108>.

Rampasan perang diberikan orang-orang miskin, karena . mereka hidup dalam keadaan miskin, tetapi mereka adalah pembela Rasul dan pejuang di jalan Allah. Seakan-akan dengan ayat ini, Allah memerintahkan Nabi Muhammad agar memperhatikan mereka dengan menyerahkan sebagian *fai*’ ini untuk mereka.

Islam mengajak orang miskin jangan malas bekerja, karena orang malas bekerja diancam .ajaran Islam. Orang yang minta-minta merupakan suatu kedholiman, karena manusia punya potensi baik yang dimiliki oleh semua orang begitu juga firman Allah surat Ali Imran:134.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ
وَالكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ وَاللَّهُ
يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

(134)

Artinya:”(yaitu) orang-orang yang menafkahkan (hartanya), baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan (kesalahan) orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa sifat orang yang bertakwa adalah senantiasa menginfakkan hartanya baik itu di saat kaya maupun susah, ang menahan amarahnya meskipun sebenarnya mampu melampiaskannya, dan yang memaafkan

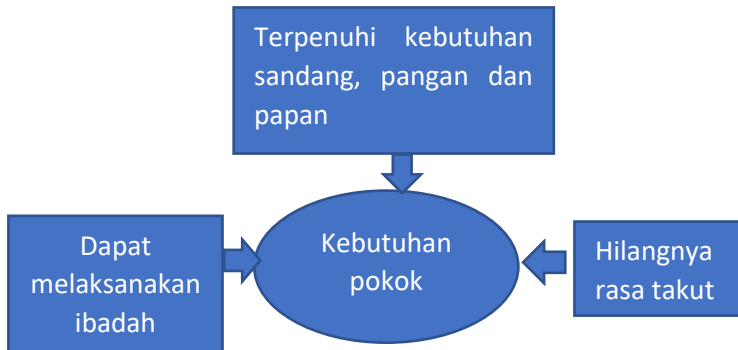
orang yang berbuat zalim kepadanya. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik yang memiliki perangai semacam itu.

Bahkan orang miskin sendiri perlu berbagi dengan sesama dengan sesuatu sekecilpun jangan sampai tidak pernah memberikan sesuatu karena miskin sebagai alasan belaka. Sebab harta dalam Islam sangat penting sebagai sarana ibadah.⁹² Islam menjelaskan kebutuhan pokok/dasar yang harus dipenuhi manusia terlebih dahulu. Adapun kebutuhan pokok dalam Islam antara lain:⁹³ *Pertama*, melaksanakan ibadah secara teratur, *kedua* terpenuhi semua kelompok kebutuhan, *ketiga* tidak punya perasaan khawatir/wawas. Kebutuhan pokok dalam Islam memenuhi kebutuhan duniawi dan akherat.

⁹²Naerul Edwin Kiky Aprianto, “Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah,” *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 65–74.

⁹³Ibrahim Ahmad Harun, “Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Juhur Ulama,” *Jurnal Economina* 1, no. November (2022): 564-577.

Gambar 2. Tiga Kebutuhan Pokok Syariah



Gambar tersebut menjelaskan penyebab kemiskinan bidang ekonomi yakni ketidakmampuan memenuhi kebutuhan diri dan keluarganya dan di bidang agama yakni keterbatasan pengetahuan umum dan agama serta mempunyai perasaan takut.

Berdasarkan jenis kemiskinan, maka strategi untuk mengatasi penanganan miskin menggunakan teori kuadran sebagai berikut:

Tabel 3 Kuadran Kemiskinan

KUADRAN II	KUADRAN I
Kemiskinan Material	Sejahtera
KUADRAN IV	KUADRAN III
Kemiskinan Absolut	Kemiskinan Spiritual

Tabel tersebut di atas menjelaskan bahwa Islam menganggap bahwa keluarga merupakan unit kecil dalam masyarakat. Sehingga kuadran sebagai strategi penanganan kemiskinan, kuadran I merupakan keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan material dan spiritual. Kuadran I disebut keluarga yang sejahtera dunia akherat, artinya konsumsi total yang terdiri konsumsi dunia dan akherat melalui ZIS.

Kuadran II menjelaskan bahwa rumah tangga yang bisa terpenuhi kebutuhan spiritual, namun miskin dalam memenuhi kebutuhan material. Sebaliknya berlaku pada kuadran III keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan hidup tetapi miskin spiritualnya. Kuadran ke IV yang parah karena keluarga yang miskin materi juga miskin spiritual.

B. Teori Kebijakan Publik

1. Kebijakan Publik dalam Penanggulangan Kemiskinan

Kata kebijakan disebut *policy*, artinya suatu perbuatan untuk mengambil keputusan untuk mencapai tujuan yang ditetapkannya. Kata publik adalah masyarakat luas, memiliki budaya lokal yang harus dilestarikan. Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan pemerintah Daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah

penduduk miskin dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan rakyat⁹⁴.

Kebijakan adalah suatu tindakan menjalankan keputusan atau tidak perlu dilaksanakan suatu program yang sudah ditetapkan. Oleh karena itu kebijakan publik berarti kebijakan untuk memilih melaksanakan kebijakan karena bermanfaat bagi masyarakat dan sebaliknya tidak menjalankan karena tidak bermanfaat masyarakat atau melanggar etika masyarakat. Oleh karena itu kebijakan penanggulangan kemiskinan menggunakan teori kuadran di bawah ini:

Tabel 4. Peran Strategis Penanggulangan Kemiskinan.

	Peran Strategi	Peran tidak/kurang strategi
	I	II
Masyarakat mampu melaksanakan	Pemerintah dengan Masyarakat	Masyarakat
	III	IV
Masyarakat tidak mampu melaksanakan	Pemerintah	Pemerintah

Tabel tersebut menjelaskan bahwa teori strategi kebijakan pemberantasan kemiskinan yang bersumber

⁹⁴Alfi Qodrun Nada, “Pengelolaan Desa Mandiri Pangan Berbasis Ekonomi Lokal Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Kota Batu,” *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 13 (2020): 76–84, <https://doi.org/10.31947/jgov.v13i2.9350>.

Munadi.⁹⁵ Bahwa kuadran I pemerintah bekerja sama dengan masyarakat dan kuadran II yakni masyarakat mampu melaksanakannya tidak perlu intervensi pemerintah. Kuadran II pemerintah mampu menjalankan sendiri tanpa bantuan pemerintah misalnya menargetkan anggaran. Hal tersebut sebagai ilustrasi mengenai apakah pemerintah mengambil pilihan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan. Ada juga pekerjaan-pekerjaan di mana pemerintah harus mengerjakan tetapi tidak mengerjakan, namun ada pula pemerintah tidak usah turut campur tetapi memaksakan diri turut campur. Misalnya, di kota-kota besar di seluruh dunia usaha angkutan publik, khususnya *massa rapid transportation*, dikelola oleh pemerintah karena harus murah, bersubsidi, dan sulit diperoleh laba.

Berdasarkan teori kuadran peran strategi pemberantasan kemiskinan bahwa pemerintah berkewajiban mengerjakan seluruh program kegiatan pemberantasan kemiskinan pada Kuadran I dan sebagian pada Kuadran III. Secara detail jenis-jenis pekerjaan pada masing-masing kuadran dapat dilihat dalam tabel berikut:

⁹⁵Muhammad Munadi, "Community Participation In The Public Policy Making In Education Sector In Surakarta Municipality," *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 12, no. 2 (2013): 268–84, <https://doi.org/10.21831/pep.v12i2.1431>.

Kuadran I	Kuadran II	Kuadran III	Kuadran IV
Produktifitas masyarakat /pemberdayaan	Pengadaan Paket Sembako	Anggaran Program bantuan sosial	Mengimpor
Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN	Pengaturan DTKS	Pendampingan pemberdayaan	Intervensi harga

Tabel di atas menjelaskan bahwa pada kuadran 1 peran strategis dilaksanakan pemerintah bersama dengan masyarakat. Masyarakat mampu melaksanakan dengan satu hal yang dapat dilakukan sebagai upaya memperbaiki kondisi kehidupan dengan memiliki tingkat produktifitas masyarakat dengan disertai mampu mengelola uang dengan baik dan tetap menggali produktifitas sesuai potensi/daya yang dimilikinya, sehingga program bantuan dari pemerintah yang memiliki hak memberikan pada masyarakat. Bantuan pemerintah sebagai kail semata dan yang mendapatkan ikan adalah masyarakat yang menerima bantuan pemerintah. Pemerintah dan masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk mengubah masyarakat miskin menjadi produktif. Tanpa campur tangan masyarakat hanya pemerintah yang melaksanakan pemberantasan kemiskinan melalui bansos tak akan menghasilkan apa yang ditargetkan pemerintah.

Adapun kuadran I dalam pemulihan ekonomi nasional yakni pemulihan ekonomi nasional akan efektif dan cepat tercapai tujuan, jika peran strategi pemerintah daerah dapat dilaksanakan bersama rakyat dengan baik. Kondisi wilayah masyarakat, kondisi sosial ekonomi dan grafis daerah harus diketahui secara detail oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu peran dan kontribusi tidak hanya pemerintah, tapi masyarakat dan pelaku UMKM. Pemerintah memberikan kemudahan/stimulus fiskal dan moneter, seyogyanya disambut dengan positif oleh pelaku usaha dengan menggerakkan usahanya secara baik. Pelaku usaha merespon dengan baik terhadap kebijakan stimulus fiskal dan moneter, dengan tujuan agar UMKM mampu memberikan sumbangan besar bagi kemajuan ekonomi.

Salah satu penggerak ekonomi nasional adalah konsumsi dalam negeri, semakin banyak konsumsi maka ekonomi akan bergerak. Konsumsi sangat terkait dengan daya beli masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengalokasi anggaran sebesar Rp 172,1 triliun untuk mendorong konsumsi/kemampuan daya beli masyarakat. Dana tersebut disalurkan melalui Bantuan Langsung Tunai, Kartu Pra Kerja, pembebasan listrik dan lain-lain. Pemerintah juga mendorong konsumsi kementerian/Lembaga/pemerintah daerah melalui percepatan realisasi APBN/APBD. Konsumsi juga diarahkan

untuk produk dalam negeri sehingga memberikan *multiplier effects* yang signifikan.

Adapun kuadran II bahwa masyarakat hanya bergantung bantuan pemerintah, menghitung hari dan tanggal pembagian bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah. Malas bekerja bahkan bekerja tidak sungguh-sungguh karena sudah masuk data tetap kesejahteraan sosial. Masyarakat hanya bersifat pasif, pemerintah memberi motivasi melalui bantuan dan masyarakat memiliki kesadaran untuk gerak untuk mencari kerja atau berdagang agar kondisi miskin berubah menjadi mandiri.⁹⁶ Pemberdayaan sebagai solusi pemecahan masalah kemiskinan dengan melalui model sesuai kondisi kultur dan problem kelompok miskin.

Adapun kuadran III bahwa pemerintah punya akses mengintervensi anggaran program bantuan social dan pemberdayaan, artinya pemerintah mampu melaksanakan program tersebut, karena masyarakat tidak mampu memutuskan anggaran dan melakukan pemberdayaan diri tanpa dukungan pemerintah yang memiliki kebijakan fiskal untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat. Kuadran IV juga pemerintah tidak perlu menjalankan impor dan intervensi harga untuk mengatasi kemiskinan. Kebijakan pemerintah hendaknya fokus

⁹⁶Bambang Subiyakto et al., “Community Economic Empowerment Through The Existence of Thematic Village,” *The Innovation of Social Studies Journal* 4, no. 1 (2022): 01, <https://doi.org/10.20527/iis.v4i1.6368>.

kuadran I dan II untuk menangani kemiskinan melalui pemberdayaan produktifitas masyarakat.⁹⁷

Ketidaktepatan sasaran bantuan yang diberikan pemerintah. Maka kebijakan pemerintah perlu mencari solusi sebagai berikut:

Tabel 5. Proses kebijakan Penanggulangan Kemiskinan

	Perumusan Kebijakan (Eksekutif - legislatif)	
Isu Kebijakan (problem dan goal)		Implementasi Kebijakan (menghasilkan outcome dan dampak kebijakan)
	Evaluasi Kebijakan: kesejahteraan	

Tabel tersebut menjelaskan bahwa strategi tidak bisa ditangani sendiri, namun perlu kerjasama baik pemerintah maupun masyarakat. *Strategi* yang ditangani biasanya persoalan isu tingkat nasional bahkan internasional yang ada dua unsur persoalan dan tujuan. Kebijakan publik diputuskan harus berorientasi pada persoalan yang timbul di tengah-tengah

⁹⁷M Chairul Basrun Umanilo, "Integration of Community Empowerment Models [Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat]," *Proceeding of Community Development* 2 (2019): 268, <https://doi.org/10.30874/comdev.2018.319>.

masyarakat dan persoalan itu harus menghasilkan tujuan yang diinginkan.

Kebijakan publik berorientasi pada kesejahteraan, karena kebijakan untuk menyelesaikan persoalan isu yang sedang dihadapi masyarakat wajib diselesaikan agar tercapai kesejahteraan. Kebijakan ada dua pendekatan, yakni kebijakan *fundamental oriented* dan *technical oriented*. Kebijakan orientasi fundamental wilayah eksekutif dan teknikal wilayah legislatif, sehingga kebijakan fundamental dan perlu adanya kerjasama pihak pemerintah dan masyarakat. Kebijakan yang berorientasi kesejahteraan perlu dievaluasi apakah benar-benar tercapai kesejahteraan yang benar bukan bias atau semu.

Penerapan kebijakan publik berorientasi pada income apa yang akan dihasilkan dari kebijakan pemerintah, penerapan kebijakan lebih berorientasi pada kemanfaatan masyarakat pada umumnya. Kebijakan dalam jangka panjang berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Adanya isu persoalan, ada tujuan yang dicapai, diimplementasikan dan evaluasi itu merupakan siklus kebijakan publik, mungkin ada tujuan yang tidak tercapai atau salah sasaran perlu dikaji tahapan evaluasi kebijakan tersebut dan dilakukan *feedback*.

2. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Kebijakan publik dibuat melalui beberapa tahapan atau langkah-langkah yang dilalui agar tercapai tujuan kebijakan publik, antara lain

a. Susunan Agenda (*Agenda Setting*)

Susunan agenda (*Agenda Setting*) merupakan langkah awal yang dilakukan untuk menyusun program-program yang pro masyarakat. Tahapan ini berisi proses awal banyaknya masukan masalah yang diagendakan, masukan dan milih-milih persoalan yang strategis dan diprioritaskan untuk didiskusikan. Penyusunan agenda ini merupakan langkah yang penting karena isu penting sebagai isu kebijakan yang diawali saling debat yang akhirnya menjadi keputan kebijakan publik. Tetapi tidak semua isu dibahas sebagai agenda kebijakan, kriteria isu kritis akan dibahas, jika diabaikan akan terjadi ancaman dalam kehidupan berbangsa.

b. Perumusan Kebijakan (*Policy Formulating*)

Isu yang diprioritaskan masuk agenda pembahasan kebijakan oleh para pembuat keputusan kebijakan, pembahasan masalah untuk mencari penyelesaian terbaik yang akhirnya menjadi kebijakan yang dilaksanakan masyarakat luas. Penyelesaian isu mendapatkan masukan dari berbagai aktor pengambil keputusan, perumusan kebijakan

mendapatkan banyak masukan sebagai bahan pertimbangan untuk memilih kebijakan yang akan dipilih sebagai kebijakan publik.

c. Pengesahan Kebijakan (*Policy Endorsement*)

Pasca perumusan kebijakan, langkah selanjutnya diadakan pengesahan atau legitimasi kebijakan yang dimusyawarahkan untuk mengambil suatu kebijakan yang pasti. Tujuan pengesahan kebijakan memberikan otoritas aktor pemerintah untuk menghasilkan kebijakan yang dilaksanakan oleh masyarakat agar kehidupan teratur kebijakan yang legal, maka masyarakat menyadari sebagai warga negara menyadari untuk menjalankan kebijakan pemerintah. Oleh karena itu kebijakan yang disahkan merupakan peraturan yang dipatuhi baik aktor pemerintah dan masyarakat, agar tatanan kehidupan semakin baik sesuai yang diamanatkan oleh kebijakan pemerintah.

d. Pelaksanaan Kebijakan (*Policy Implementation*)

Langkah pelaksanaan ini merupakan hasil kebijakan yang sudah disahkan untuk dilaksanakan. Tidak dipungkiri, kebijakan yang dilaksanakan akan mendapatkan kendala dan pelaksanaan di lapangan dirumuskan berbeda-beda dalam menjalankan kebijakan. Kendala dan permasalahan pelaksanaan kebijakan karena dipengaruhi berbagai faktor di

lapangan. Berbagai kendala dan persoalan jangan dijadikan penghambat tetap diatasi masalah dan menjalankan kebijakan sebagai amanah dari kebijakan pemerintah. Pelaksanaan kebijakan yang belum tercapai, perlu evaluasi untuk perbaikan kebijakan tahun berikutnya.

e. Evaluasi Kebijakan (*Policy Evaluation*)

Tahapan ini sangat penting untuk menemukan persoalan dan dampak kebijakan yang dilaksanakan untuk mencari jalan keluar kendala kebijakan tersebut. Evaluasi kebijakan tidak hanya di lihat pada tahap akhir, namun tahapan evaluasi dikerjakan pada proses pelaksanaan kebijakan diterapkan. Evaluasi poses kebijakan meliputi perumusan kebijakan, program masukan yang dipilih, legalisasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan hingga kendala dan dampak kebijakan yang dijalankan. Evaluasi kebijakan ini dilakukan, karena kebijakan negara bisa berjalan lancar dan menghadapi resiko.

Memecahkan permasalahan kebijakan publik, contoh kemiskinan yang mana pemerintah melaksanakan strategi untuk mendapatkan hasil berupa perubahan hidup lebih produktif melalui berbagai program pemerintah untuk memberantas kemiskinan yang dapat berdampak positif bagi negara dan orang miskin sendiri.

3. Peran *Stakeholder* dalam Penanggulangan Kemiskinan

Penanganan orang yang serba kekurangan dalam berbagai aspek kehidupan merupakan kendala dalam pembangunan dan menjadi tantangan dalam negeri maupun luar negeri. Dengan demikian bantuan pemerintah khususnya untuk kelompok miskin sangat perlu baik untuk memenuhi kebutuhan pokok, kemandirian melalui wirausaha maupun bentuk pelatihan untuk mendorong berjiwa wirausaha. Pemerintah melakukan kebijakan bantuan social dilaksanakan secara bertahap dan sesuai hasil evaluasi di tahun sebelumnya agar kebijakan pemerintah tercapai tujuan kebijakan tersebut. Dengan kebijakan tepat sasaran, maka kelompok miskin mampu mandiri tanpa bergantung pihak lain.

Berdasarkan Inpres Nomor 4 Tahun 2022 yang berisi penanganan kemiskinan ekstrim secara cepat melalui berbagai program bantuan yang diberikan kelompok miskin. Oleh karena itu pemerintah pusat dan daerah bekerja sama untuk melaksanakan kebijakan intruksi presiden dengan mendata ulang dan mengklasifikasikan data miskin berdasarkan data masing-masing daerah. klasifikasi kebijakan sebagai berikut:

- a. Klaster I merupakan peraturan pemecahan kemiskinan berdasarkan bantuan dan pengamanan sosial. Pokok sentral aturan kebijakan ini guna memenuhi kebutuhan pokok agar kualitas hidup orang miskin lebih baik. Fokus utama

kebijakan ini adalah untuk pemenuhan hak dasar yang ditunjukkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat miskin untuk kehidupan yang lebih baik. Melingkupi program KSI, BPNT, BLT, PKH dan sejenisnya.

- b. Kluster II merupakan aturan kebijakan pemecahan kemiskinan berdasarkan pemberdayaan masyarakat. Pokok sentral kebijakan ini perbaikan kualitas hidup masyarakat dengan tujuan masyarakat miskin berubah menjadi mandiri, jenis program di kluster ini adalah BST.
- c. Kluster III merupakan aturan kebijakan pemecahan masyarakat miskin yang berdasarkan pemberdayaan usaha mikro melalui bantuan kemudahan dalam mencari permodalan dalam aspek bisnis yang di milikinya. Jenis program kluster ini adalah KUR.

Mengatasi masalah kemiskinan membutuhkan kerja sama dari pihak pemerintah, masyarakat, lembaga yang terkait dan masyarakat miskin sendiri. Penanganan kemiskinan tidak bisa dilaksanakan oleh pemerintah saja, melainkan ditangani secara komprehensif dari semua stakeholder. Ekonomi Islam menganjurkan untuk saling kepedulian, bekerja keras, hidup sederhana, tidak boros berinvestasi dan menjaga serta menjaga kelestarian alam untuk mencapai kebahagiaan hidup. Kewajiban menangani kemiskinan tidak ditangan pemerintah,

namun kewajiban bersama stakeholder yang ada. Penanganan kemiskinan merupakan kesadaran perlu dibangkitkan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan, Kesadaran ini merupakan kewajiban mutlak menjadi kewajiban pemerintah melalui kebijakan program bantuan.

4. Kebijakan Publik dalam Ekonomi Islam

Islam sebagai pedoman hidup manusia untuk menjalani hidup di semua aspek kehidupan. Ilmu ekonomi, politik, kesehatan dan semua ilmu lainnya sudah termuat dalam ajaran Islam. Kompletnya ajaran Islam memberikan pengajaran bagi manusia untuk membangun intelektual dan kultur yang ada di masyarakat yang berpijak pada al-Quran dan Hadits. Oleh karena itu kebijakan publik bagi yang membuat kebijakan dan yang melaksanakan serta yang mendapatkan kebijakan dijalankan sesuai dengan ajaran Islam.

Kebijakan publik dalam Islam adalah kebijakan universal yang bertujuan demi kemaslahatan umat yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Menurut ahli ekonomi agar tercapainya tujuan kebijakan tersebut, maka kebijakan tersebut berorientasi pada pilar *maqashid shari'ah* pada semua kebijakan publik yang dihasilkan oleh aktor pembuat kebijakan.

Pilar untuk membenahi pelaksanaan kebijakan publik dalam ekonomi Islam antara lain:

- a. Prinsip ketauhidan (*Ilahiah*) adalah prinsip utama dipegang dalam pembuatan kebijakan baik proses pembuatan, pelaksanaan serta evaluasi hingga perbaikan kebijakan harus berdasarkan prinsip ketauhidan.
- b. Prinsip kemanusiaan (*Insaniah*) adalah jenis kebijakan untuk apapun hendaknya berdasarkan kesejahteraan dan kenyamanan semua masyarakat sekarang hingga di masa depan.
- c. Prinsip keseimbangan (*Tawazun*) adalah kebijakan yang berorientasi pada keseimbangan material dan non material serta keseimbangan pribadi dan social serta proposional
- d. Prinsip keadilan (*Al-'Adalah*) adalah kebijakan harus sesuai dengan pedoman dan tepat sasaran serta merata tanpa membedakan. Kebijakan publik yang baik jika kebijakan sesuai dengan nilai ketauhidan, kemanusiaan, dan seimbang serta adil, maka kebijakan tersebut akan menghasilkan kemaslahatan umat manusia.
- e. Prinsip pelayanan (*Al-Khadimah*) adalah kebijakan yang dibuat itu berdasarkan pemberian pelayanan yang baik yang disebut *servis excelen*. Karena aktor pemimpin/pegawai birokrasi sebagai pelayan masyarakat, oleh karena itu kebijakan yang dibuat juga berprinsip pelayanan terbaik kepada masyarakat.

f. Prinsip keteladanan (*Uswah Al-Hasanah*) adalah pemimpin sebagai abdi atau pelayan masyarakat dituntut sebagai contoh suri tauladan masyarakat. Oleh karena itu dalam membuat kebijakan juga mengisaratkan keteladannya. Aktor pemimpin mampu mengimplementasikan sifat kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana pernyataan “*Sayyid al-qawm khaadimuhum*”⁹⁸ (pemimpin adalah pelayan bagi umat).

Perumusan kebijakan publik harusnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut di atas. Pancasila dan UUD 1945 merupakan dasar yang berdasarkan nilai agama. Oleh karena itu kebijakan publik di Indonesia menjadikan dasar pijakan pembuatan kebijakan. Kebijakan publik tidak berorientasi pada kepentingan dan keuntungan pribadi ataupun kelompoknya. Dengan demikian prinsip *maqasid syariah* tersebut seharusnya jadikan dasar negara membuat jenis kebijakan publik apapun sesuai ajaran Islam yang bertujuan untuk menghasilkan kesejahteraan bagi semua masyarakat.

Maqashid syari'ah dalam praktek kehidupan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: Pertama, *dharuriyah* yakni kebutuhan primer yang menjadi keinginan pokok manusia harus terpenuhi jika tidak terpenuhi menimbulkan penderitaan, kehancuran baik

⁹⁸Al Qisthi and Jurnal Sosial, “Meningkatkan Kinerja Aparat Birokrasi,” 2023, 18–33.

dunia dan akherat. Kebutuhan *dharuriyah* tersebut merupakan bagian dari lima prinsip *maqasid syariah* yang terjaganya prinsip agama (*hifzud-dien*), jiwa (*hifzun-nafs*), akal (*hifzul-'aql*), keturunan (*hifzun-nasb*), dan harta (*hifzul-maal*);

Kebutuhan kedua, *hajjiah* merupakan kebutuhan sekunder, yang mana sebagai pendukung kebutuhan primer misalnya kebijakan publik memerlukan badan pengawasan kebijakan publik agar tercapai tujuan kemaslahatan umat dan mengatasi kendala dan persoalan dalam menjalankan kebijakan publik. Kebutuhan ketiga, *tahsiniyyah*, merupakan kebutuhan tersier yang dapat memberikan daya tarik, kebahagiaan dan kenyamanan masyarakat.

Pelaksanaan kebijakan publik menjalankan tahapan kebutuhan primer *dharuriyah* kebutuhan *hajjiah* dan *tahsiniyyah* sebagai pendukung agar kebutuhan *dharuriyah* sebagai kebutuhan pokok mudah tercapai tujuan kesejahteraan demi kemaslahatan umat bersama.⁹⁹

Upaya penanganan masalah miskin dalam ekonomi Islam berdasarkan tiga faktor, antara lain:

- 1). Pemerintah sebagai aktor menangani kemiskinan

⁹⁹Nasitotul Janah and Abdul Ghofur, "Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam," *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din* 20, no. 2 (2018): 167–92, <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045>.

Tanggung jawab pemerintah yakni menangani persoalan kemiskinan. Peran pemerintah sangat penting, karena program bantuan dirumuskan oleh pemerintah mampu memberikan dampak dapat berhenti dari miskin atau program bantuan tersebut membantu masyarakat miskin. Kenyataan tingkat kemiskinan dapat dikatakan sangat bergantung bantuan pemerintah. Dalam al-Qur'an surat al-Balad ayat 13 :

فَاكْفُرُوا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ

Artinya: “Melepaskan budak dari perbudakan”

Usaha pemerintah melaksanakan berbagai amal kebaikan; di antaranya memerdekakan budak yang beriman dari belenggu perbudakan; memberi makanan di saat terjadi kelaparan dan krisis makanan, pada masa seperti ini kepelitan seseorang akan terlihat karena takut jatuh miskin, sehingga memberi bantuan makanan pada masa seperti ini memiliki keutamaan yang besar.

Pemerintah berperan membantu masyarakat mengalami kelaparan maupun yang jatuh miskin, sehingga tugas pemerintah memberikan solusi dan menangani masalah yang dialami orang miskin.

2). Masyarakat sebagai aktor menangani kemiskinan

Masyarakat merupakan negara kecil yang bertanggung jawab terhadap pembangunan, oleh karena itu perlu adanya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat untuk menangani masalah kemiskinan. Adapun peran masyarakat yang perlu dilakukan untuk menangani kemiskinan, antara lain:

- a). Terpenuhi apa yang dibutuhkan sanak famili
- b). Menjalankan ibadah ZISWAF (Zakat Infak Shodaqoh dan Wakaf)
- c). Menciptakan produktifitas yang berorientasi pada masyarakat dan lingkungan sekitar.

Masyarakat mempunyai tanggung jawab untuk ikut berpartisipasi bantu masyarakat miskin. Oleh karena keluarga mempunyai tanggung jawab terhadap anggota keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, kalau sudah mampu memenuhi kebutuhan pokok, maka melaksanakan ZISWAF, karena harta yang dimiliki sebagian milik orang lain. Masyarakat juga mampu menciptakan produktifitas untuk keluarga dan masyarakat disekitar lingkungan setempat. Islam menganjurkan untuk berproduktif melalui kerja keras. Sebagaimana dalam surat Adz-Dzariyat ayat 56:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

Artinya “Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaKu”

Ibadah tidak hanya ibadah ritual belaka, namun aktifitas karena Allah juga termasuk ibadah, sehingga manusia diwajibkan beribadah pada Allah. Berarti manusia bekerja untuk memproduksi juga merupakan kewajiban beribadah karena Allah.¹⁰⁰

3). Individu sebagai aktor menangani kemiskinan

Individu di sini maksudnya adalah orang miskin sendiri, manusia miskin mempunyai posisi penting dalam menangani persoalan ekonomi dirinya sendiri. Setiap orang mempunyai potensi dan kekuatan atas dirinya untuk melakukan perubahan lebih baik lagi.¹⁰¹ Keluar dari kemelaratan ekonomi harusnya diri sendiri yang memulai melakukan perubahan yang meliputi cara pikir semangat, cara memandang hidup, dan semua aspek kehidupan.

¹⁰⁰Abu Bakar, “Nilai-Nilai Pendidikan Pada Ayat-Ayat Amsal Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah,” *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)* 5, no. 1 (2017): 17–58, <https://doi.org/10.21093/sy.v5i1.911>.

¹⁰¹Ayu Diah Amalia, “Modal Sosial Dan Kemiskinan Social Capital and Poverty,” *Sosio Informa, Puslitbang Kemensos RI* 1, no. 3 (2015): 1–14, <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/166/108>.

Ekonomi Islam memberikan solusi untuk mengatasi masalah miskin melalui kerja keras, sebab kerja keras merupakan instrumen utama bagi orang miskin. Islam memberikan jalan keluar agar semua manusia dapat memenuhi kebutuhan dasar bahkan kebutuhan tersier dengan cara bekerja keras dan berdoa berserah diri pada Allah Allah memberikan rezeki pada setiap manusia. Allah memastikan rezeki akan diberikan, namun manusia berusaha untuk mengubahnya melalui aktifitas kerja.¹⁰² Allah akan mengubah manusia yang punya keinginan untuk melakukan perubahan agar hidupnya lebih baik lagi, sebagaimana dalam surat ar-Ra'du: 11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ۗ

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah berpesan kepada hambanya didunia hendaknya mencari rezeki dan berusaha melalui kerja dan Allah juga menjamin rezeki yang

¹⁰²N Fajriani, S Solahudin, and ..., “Konsep Rezeki Menurut Al-Sa’Di,” ... *IAT: Prosiding Al ...*, 2019, 1–15, <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/piat/article/view/1615>.

sudah didapat oleh setiap manusia.¹⁰³ Bekerja merupakan sebagian ibadah, sehingga manusia yang beragama mempunyai keyakinan bahwa usaha seseorang tidak ada yang sia-sia. Oleh karena itu orang miskin mampu mengubah dirinya menjadi mandiri, sebab Allah menjamin bagi manusia yang bekerja dengan ikhlas dan menggunakan hati nuraninya. Manusia yang berdiam diri dan malas bekerja berarti mendholimi potensi yang dimilikinya dan hanya bergantung pada program bantuan pemerintah ataupun pihak lain.

C. Teori Program Bantuan

1. Pengertian dan tujuan bantuan sosial

Program dana santunan merupakan bantuan sosial yang berupa uang tunai maupun barang komoditas yang bersumber dari APBN/APBD melalui pemerintah pusat/daerah yang diberikan pada orang miskin. Dana bantuan sosial sifatnya tidak terus menerus dan selektif hanya untuk masyarakat miskin.¹⁰⁴ APBD bisa dianggarkan

¹⁰³Risanaldi Dwi Fajri and U. Saepudin, "Implikasi Pendidikan Dari Quran Surat Ar-Ra'd Ayat 11 Tentang Perubahan Terhadap Upaya Pendidikan Dalam Mengembangkan Potensi Manusia," *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 1 (2022): 100–106, <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i1.2161>.

¹⁰⁴Yuliana Maknolia and Dasrun Hidayat, "Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covid-19 Di Kota Bandung," *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2020): 1–7, <https://doi.org/10.31602/jm.v3i2.3694>.

untuk bantuan sosial asalkan memiliki kemampuan dana APBD tersebut.¹⁰⁵ Program bantuan sosial dapat diprogramkan jika program yang wajib dan diprioritaskan sudah dianggarkan dengan menerapkan prinsip keadilan dan kemanfaatan untuk semua manusia.¹⁰⁶ Program bantuan sosial dianggarkan bersumber dari pemerintah pusat dan daerah yang dialokasikan untuk orang miskin sesuai nama, alamat dan total rupiahnya, anggaran sesuai pagu yang diusulkan oleh SKPD tertinggi 50% dari pagu bantuan sosial. Masyarakat yang mendapatkan bantuan harus memenuhi kriteria minimal:¹⁰⁷

- a. Selektif adalah program bantuan yang diberikan orang miskin yang disebut penerima manfaat agar terlindungi dari resiko sosial
- b. Syarat yang harus dipenuhi bagi penerima manfaat yakni memiliki KTP, domisili di daerah pemerintah tersebut.

¹⁰⁵Kabupaten Oleh et al., “Manajemen Program Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Apbd Kabupaten (Bansos-Rtlh Apbd” 6, no. 1 (2022): 1–18.

¹⁰⁶Fahrial Fahrial, Andrew Shandy Utama, and Sandra Dewi, “Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pembangunan Perekonomian Desa,” *Jurnal Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 251, <https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.256>.

¹⁰⁷Muhamad Reza Humaidi, “Rasionalisasi Laporan Bantuan Sosial Bulan Mei 2020 Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah,” *Journal Riset Akuntansi Politala* 4, no. 1 (2021): 34–50.

- c. Berciri temporer, artinya bantuan tidak wajib dan tidak harus setiap tahun dianggarkan melainkan jika masih dalam keadaan miskin artinya bantuan tetap diberikan hingga keluar dari kemelaratan.
- d. Sejalan dengan tujuan yang sudah ditentukan awal perumusan program bantuan. Sejalan dengan tujuan yang ditentukan meliputi: 1). perbaikan social; 2). penjagaan sosial; 3). pemberdayaan sosial; 4). jaminan sosial; 5). penanganan kemiskinan; dan 6). mengatasi bencana.

Beberapa jenis program bantuan pemerintah untuk menangani kemiskinan. Pasca pandemic COVID-19 mempengaruhi dampak negatif terhadap semua aspek kehidupan, terutama berdampak pada masyarakat miskin bahkan angka kemiskinan semakin naik. 9,2% menjadi 9,7 sehingga akhir 2020 1,3 juta orang menjadi miskin. Namun angka miskin menjadi 12,4 artinya 8,5 juta orang, karena dampak COVID-19 menjadi miskin,¹⁰⁸ dan menurut Asep.¹⁰⁹Mengurangi jumlah orang miskin dampak pandemic

¹⁰⁸Edwardus Iwantri Goma, “Dampak Covid-19 Terhadap Isu Kependudukan Di Indonesia,” *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi* 5, no. 1 (2021): 33–42, <https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3180>.

¹⁰⁹Asep Suryahadi, Ridho Al Izzati, and Daniel Suryadarma, “The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia (Draft),” *SMERU Working Paper* April, no. April (2020): 1–20, <http://smeru.or.id/en/content/impact-covid-19-outbreak-poverty-estimation-indonesia>.

covid-19, maka negara menjalankan peranya untuk membantu masyarakat yang terdampak pandemic COVID-19. Harusnya Indonesia mampu menurunkan angka kemiskinan, karena adanya kebijakan OTDA mempunyai tujuan memberikan layanan daerah lebih dekat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah.

Negara sekarang menerapkan sistem otonomi daerah dengan berbagai macam-macam program penanganan permasalahan kemiskinan berasaskan bantuan sosial, bantuan sosial diarahkan pemberdayaan masyarakat agar kelompok miskin mampu berproduksi dan melakukan perubahan untuk mandiri.¹¹⁰ Indonesia di era sistem otonomi daerah lebih cepat mengatasi kemiskinan. Karena masing-masing kabupaten/kota langsung memberikan pelayanan dan pemberian bantuan sosial lebih tepat sasaran. Di samping itu otonomi berorientasi pada pelayanan dan pemecahan masalah masyarakat lebih paham apa yang menjadikan sebab masyarakat miskin daerah setempat. Sejalan dengan amanat negara yang dijalankan di era otonomi daerah. Berlakunya otonomi daerah diawali dengan kondisi krisis moneter dan sejalan dengan amanah MDGS

¹¹⁰Velan Kunjuraman, "Local Community Participation Challenges in Community-Based Ecotourism Development in Sabah, Malaysian Borneo," *Community Development Journal* 57, no. 3 (2022): 487–508, <https://doi.org/10.1093 /cdj/bsaa065>.

dan dilanjutkan dengan SDGs yang memiliki program *zero poverty*.¹¹¹

2. Instrumen Penanganan Kemiskinan

Percepatan penanganan persoalan yang dihadapi kelompok miskin, ada empat instrumen langkah strategi yang harus dilakukan pemerintah, antara lain:¹¹²

- a) Program bantuan sosial disempurnakan.
- b) Masyarakat miskin diberi peluang untuk mengakses pelayanan dasar.
- c) Pemberdayaan masyarakat
- d) Pembangunan inklusif

Berlakunya otonomi daerah lebih mudah penyelesaian masalah-masalah daerah. Bantuan sosial telah menyisakan berbagai persoalan di masyarakat, oleh karena itu pemerintah hendaknya setiap tahun memperbaiki data dan proses program bantuan sosial serta hasil program tersebut agar semakin sempurna. Pemerintah memberikan semua

¹¹¹H W Syahputra, "Proses Integrasi Dan Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Provinsi Riau," *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul ...* 2, no. 1 (2021), <https://jsdmu.ejournal.unri.ac.id/index.php/JSDMU/article/view/33%0Ahttps://jsdmu.ejournal.unri.ac.id/index.php/JSDMU/article/download/33/24>.

¹¹²I Satibi and U Sudrajat, "Strategi Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Tasikmalaya," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISPO)* 9, no. 2 (2019): 362–81.

masyarakat untuk mengakses apa yang dibutuhkan dalam kehidupan.¹¹³

Program bantuan sosial lebih berorientasi pada produktifitas yang melalui pemberdayaan masyarakat agar bantuan pemerintah yang setiap tahun diprogramkan mampu memberikan perubahan bagi masyarakat miskin. program bantuan sosial tidak hanya dijadikan ajang bagi-bagi uang kepada masyarakat. Oleh karena itu program bantuan pemerintah hendaknya berorientasi pada edukasi. Program tersebut mendidik bagi warga masyarakat untuk lebih mandiri melalui produktifitas diri. Pemberdayaan yang dilakukan masyarakat secara tidak langsung akan memberikan akses pembangunan inklusif bagi semua masyarakat secara luas.¹¹⁴ Pembangunan inklusif mengarah pada penciptaan akses luas bagi semua masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan membuka lapangan kerja seluas-luasnya dan mengurangi kesenjangan yang ada di daerah.

¹¹³Siddhartha Paul Tiwari, "The Potential Impact of COVID-19 on the Asian Rural Economy: A Study Based on Asian Countries," *Journal of Education, Management and Development Studies* 2, no. 3 (2022): 1–7, <https://doi.org/10.52631/jemds.v2i3.116>.

¹¹⁴Christoph Dörffel and Sebastian Schuhmann, *What Is Inclusive Development? Introducing the Multidimensional Inclusiveness Index, Social Indicators Research*, vol. 162 (Springer Netherlands, 2022), <https://doi.org/10.1007/s11205-021-02860-y>.

Dengan berbagai strategi penanganan kemiskinan yang dilakukan oleh pemerintah. Sebelum dilaksanakan strategi empat di atas, pemerintah perlu melaksanakan langkah-langkah tahapan penyusunan anggaran program bantuan dalam APBD.

3. Prosedur Penyusunan Anggaran Program Bantuan

a. Sistem Anggaran Program bantuan

Setelah ditentukan jenis program bantuan sosial, maka langkah selanjutnya menentukan anggaran sesuai dengan prosedur SOP sebagai berikut:¹¹⁵ *Pertama* Masyarakat memberitahukan berbagai usulan Bersama dengan kepala daerah setempat. *Kedua* kepala daerah memilih SKPD / (satuan kerja perangkat daerah sebagai pembantu gubernur yang terdiri sekretaris daerah, sekretaris DPRD, dinas daerah dan lembaga lain) melaksanakan evaluasi dari usulan hasil musyawarah masyarakat. *Ketiga* Kepala SKPD memberitahukan hasil musawarah berdasarkan evaluasi yang diputuskan melalui pertimbangan kepala daerah. *Keempat* Tim Anggaran daerah menyampaikan beberapa hasil musyawarah yang direkomendasikan dan isu prioritas sesuai kemampuan anggaran daerah. *Kelima* hasil pertimbangan kepala SKPD

¹¹⁵Abdul Nashar, "Pengelolaan Organisasi Dalam Penanggulangan Kemiskinan DiKota Kenduri," *Journal of Political Science* 1, no. April (2019): 1–12.

dan TAPD sebagai landasan usulan anggaran bantuan berbentuk uang/barang. *Keenam* program bantuan berbentuk uang yang bersumber dari APBD di bagian belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial, obyek belanja bantuan sosial. *Ketujuh* program bantuan berbentuk barang cara menganggarkan di APBD bagian belanja langsung dirinci jenis belanja barang dan jasa. Obyek belanja bantuan sosial barang dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang diserahkan pihak ketiga yakni SKPD. *Kedelapan* kepala daerah memberitahukan penerima manfaat sesuai nama alamat beserta besaran jumlah bantuan. *Kesembilan* Pembagian program bantuan sesuai data KPM yang tercantun di kepala daerah, *Kesepuluh*, penyaluran program bantuan social yang belum terdaftar, boleh secara individu menyampaikan ke kepala desa setempat kemudian divalidasi SKPD terkait.

b. Pelaporan dan Tanggung Jawab Program Bantuan

Sistem penganggaran dan pencairan program bantuan sosial, perlu adanya langkah yang harus dilalui sampai membuat laporan agar dapat dipertanggungjawabkan.¹¹⁶ *Pertama* program bantuan

¹¹⁶Jantje J. TinangonHendrik Manossoh Puasa, Flayer, “Analisis Akuntabilitas Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Kota Manado,” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “GOODWILL”* 12, no. 2 (2021): 264–75.

berbentuk uang, kepala desa membuat catatan penggunaan uang melalui PPKD kemudian ditembuskan kepada SKPD terkait. *Kedua* KPM mendapatkan bantuan berbentuk barang memberitahukan kepada kepala daerah melalui kepala SKPD tentang penggunaan anggaran bantuan sosial. *Ketiga* Bantuan sosial berupa uang dicatat dipraktekkan dalam program belanja bantuan sosial di PPKD pada tahun berjalan. *Keempat* Bantuan sosial berupa barang ditulis yang dipraktekkan pada obyek belanja di program belanja barang dan jasa pada SKPD terkait. Kemudian direkap program bantuan tersebut oleh PPKD paling lambat 5 Januari tahun berikutnya. *Kelima* perekapan terdiri identitas orang yang menerima jenis bantuan. *Keenam* pelaksana berbagai program jenis bantuan diserahkan pada pemerintah daerah. *Ketujuh* pengajuan calon KPM dari kepala desa dan ditetapkan dalam data base terpadu penerima bantuan, pelaksanaan pencairan ada pernyataan integritas yang menjelaskan bahwa jenis bantuan yang diterima dapat digunakan sesuai tujuan bantuan social. Bantuan yang diterima harus dilaporkan bukti penerimaan berupa foto dan KTP. Dan surat pernyataan jika diperlukan. *Kedelapan* KPM mampu bertanggungjawab atas bantuan yang diterima. meliputi surat pernyataan sesuai pengusulan bantuan, paling lambat

10 Januari tahun berikutnya kepala daerah menyampaikan laporan program bantuan sosial. *Kesembilan* pelaksanaan bantuan sosial dilaporkan dalam laporan keuangan pemerintah daerah di tahun berjalan. *Kesepuluh* program bantuan sosial yang belum terserap ke KPM dimasukkan di neraca sebagai persediaan. *Kesebelas* Praktek program bantuan barang disesuaikan dengan dengan harga barang dan dicatat dan dilaporkan ke keuangan pemerintah daerah.

c. Monitoring dan Evaluasi Program Bantuan

Sistem kontrol dan penilaian jenis berbagai program bantuan sosial diuraikan beberapa hal yakni:¹¹⁷

1. SKPD terikat melaksanakan kontrol dan penilaian pada pencairan program bantuan sosial pada orang yang sudah menerima
2. Dampak kontrol dan penilaian dimasukkan pada kepala daerah berbentuk Salinan diserahkan pada SKPD yang bertugas melakukan pengawasan program bantuan sosial.
3. Hasil kontrol dan penilaian program bantuan sosial menemukan pemanfaatan program bantuan sosial tidak

¹¹⁷Health Sciences, “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah” 4, no. 1 (2018): 1–23.

sesuai pengusulan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹¹⁸

d. Pelaksanaan dan Penatausahaan Program Bantuan

Sistem pengaktualisasi dan tata kelola program bantuan sosial diuraikan sebagai berikut Pengimplementasian dana program bantuan sosial berbentuk uangseseuai pedoman DIPA-PPKD. Pengimplementasian program bantuan sosial berbentuk pelaksanaan anggaran bantuan sosial berpedoman DPA-SKPD. Usalan nama yang yang diusulkan kepala desa akan terdaftar di link penerima bantuan sosial yang telah ditetapkan oleh kepala daerah.¹¹⁹

4. Macam-macam Program Bantuan

a. PKH/Program Keluarga Harapan

Program keluarga harapan adalah jenis program bantuan sosial dan bersyarat yakni status miskin, penyandang disabilitas dan orang lanjut usia, pendidikan anak prasejahtera, serta kesejahteraan dan gizi ibu hamil atau nifas. perempuan dan anak-anak di bawah usia enam tahun. Tujuan program ini tercapainya taraf

¹¹⁸I Wayan Tagel Winarta et al., “Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Di Pemerintah Kabupaten Gianyar,” *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 1 (2020): 28–42.

¹¹⁹Muslim Afandi and Syed Agung Afandi, “E-Government and Budget Transparency of Indragiri Hulu Government,” no. ICoCSPA 2018 (2019): 75–79, <https://doi.org/10.5220/0008816900750079>.

hidup lebih sejahtera bagi masyarakat miskin. Perubahan sosial lebih baik lagi sebagai amanat konstitusi dan nawacita presiden.¹²⁰ Program bantuan ini adalah bantuan tunai dari pemerintah diberikan pada Keluarga Penerima Manfaat/KPM yang sudah memenuhi syarat. Program ini diharapkan memberikan dampak dan mengurangi kemiskinan secara efektif.

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program unggulan bagi pemerintah untuk kelompok kluster 1 dengan tujuan membantu meringankan persoalan orang miskin dalam memenuhi kehidupan yang semakin mahal dan sulit. Dalam program PKH ini, pemerintah tidak hanya membantu kebutuhan dasar untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga memperhatikan kesehatan dan pendidikan masyarakat miskin untuk menegakkan hak-hak tersebut. Program bantuan pemerintah sangat membantu perekonomian masyarakat miskin,¹²¹ sehingga mendapat respon dari masyarakat terkait dengan program untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan. Mereka menerima bantuan untuk

¹²⁰Intan Putri Pratiwi, FX Ferdinandus, and Arthur Daniel Limantara, "Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting," *Cahaya Tech* 8, no. 2 (2019): 182–95.

¹²¹Sherzod Igamberdievich Mustafakulov et al., "Poverty: Basic Principles Of The State At Its Reduction," *International Journal of Scientific & Engineering Research* 11, no. 9 (2020): 1501–8.

membayar kebutuhan makan, biaya pendidikan anak, dan biaya pengobatan. Perlu digaris bawahi bahwa dukungan pemerintah tidak dapat sepenuhnya mengangkat masyarakat dari kemiskinan. Upaya yang dilakukan oleh masyarakat untuk memperbaiki kehidupannya harus diimbangi dengan hal tersebut. Sehubungan dengan dukungan tersebut, tujuan Program Keluarga Harapan (PKH) antara lain meningkatkan kualitas dan aksesibilitas layanan pendidikan dan kesehatan, serta kondisi ekonomi (KPM), tingkat pendidikan anak pra sejahtera, serta kesejahteraan dan gizi ibu hamil atau nifas, perempuan dan anak-anak di bawah usia enam tahun

b. BST/Bantuan Sosial Tunai

Bantuan Sosial Tunai (BST) merupakan bantuan berasal dari Kemensos RI diperuntukkan orang miskin yang data identitasnya terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan memiliki kartu tanda penduduk sesuai daerah setempat. BST disalurkan ke KPM dengan sistem pencairan langsung diambil di kantor Pos Indonesia, dan Bank yang sudah ditunjuk oleh pemerintah.

Program BST sebagai program bantuan yang diberikan pemerintah sebelum covid maupun pandemic COVID-19, bahkan masa pandemic juga diberikan masyarakat yang terdampak pandemic COVID-19

bantuan tunai berupa uang Rp.600.000,-/KK/bulan.¹²² BST disebut JPS yang dianggarkan melalui APBN sesuai intruksi kepala negara/presiden dengan sistem bantuan di luar Jabodetabek berupa uang sedangkan di lingkungan Jabodetabek berupa sembako. Program bantuan ini tidak masuk kategori PKH, BPNT dan kartu pra kerja. Adapun tujuan BST . antara lain:¹²³

- 1). Untuk memperbaiki dan mengembalikan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan layak.
- 2). Untuk melindungi aspek sosial melalui pencegahan dan penanganan dampak sosial agar dapat hidup dengan baik.
- 3). Masyarakat mempunyai masalah sosial berubah menjadi berdaya mengatasi permasalahan hidup.
- 4). Keluarga penerima manfaat dapat memenuhi kebutuhan dasar dalam kehidupan.
- 5). Bantuan untuk masyarakat yang tidak punya pekerjaan, akhirnya mereka bisa hidup layak.
- 6). Mengatasi masyarakat yang mendapatkan dampak bencana yang terjadi di daerah setempat.

¹²²Nisa`ul Mufidah, “Efektivitas Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan,” *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)* 1, no. 2 (2021): 82–92.

¹²³Saraswati Rizqi Onilla and Retno Suryawati, “Responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sleman Dalam Menangani Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) (Studi Kasus Di Desa Sidoarum),” *Jurnal Administrasi Publik* 13, no. 1 (2022): 61–76, <https://doi.org/10.31506/jap.v13i1.13275>.

Berbagai macam program bantuan sosial yang diperuntukkan masyarakat miskin yang bersumber dari anggaran APBN maupun APBD memiliki beberapa jenis bentuknya, antara lain:¹²⁴

- a). Program bantuan tunai berupa uang langsung disalurkan ke KPM melalui bantuan beasiswa, masyarakat miskin.
 - b). Program bantuan sosial berupa barang yang disalurkan pada masyarakat miskin yang membutuhkan pengembangan pekerjaan yang digeluti, usaha dagang atau bisnis maupun alat untuk membantu orang yang cacat misalnya kursi roda, kaki palsu dan sejenisnya.
 - c). Program bantuan sosial berupa jasa yang diberikan kepada kelompok miskin berupa pemberian pelatihan atau kursus yang mendukung kelompok miskin agar mampu mengadakan perubahan kemandirian hidup.
- c. Program Sembako/ BPNT Bantuan Pangan Non Tunai

Jenis program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) disebut juga program sembako. Anggaran program bantuan ini bersumber dari APBN yang diberikan pemerintah.¹²⁵ Program ini membantu

¹²⁴Marisa Ramadhani Ansyah, "Monitoring Dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penyelenggaraan Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Helvetia Timur" 9, no. 2 (2022): 255–60.

¹²⁵Juniar Hutagalung, Dicky Nofriansyah, and Mufthi Adi Syahdian, "Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menggunakan Metode

mengurangi beban masyarakat miskin, pemerintah berharap bantuan ini mampu menurunkan angka kemiskinan.¹²⁶ Bentuk program bantuan BPNT berupa sembako misalnya sembilan bahan pokok.

Sistem BPNT yang diberikan langsung bagi yang berhak menerima dan barang sembako yang diterima dan tidak dapat diterima secara tunai, sehingga kalau tunai harus ditukar dengan bahan makan pokok yang menjadi keperluan masyarakat miskin. Oleh karena itu program bantuan ini diberikan orang miskin agar mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.

d. KJS/Kartu Jateng Sejahtera

Program Kartu Jateng Sejahtera (KJS) merupakan wujud kepedulian pemerintah propinsi untuk membantu masyarakat yang tidak punya penghasilan dan tidak mendapat bantuan APBN maupun APBD propinsi maupun kabupaten/kota. Program bantuan ini diberikan bagi yang membutuhkan bantuan, program bantuan yang anggarannya berasal dari APBD propinsi. Adapun yang mendapatkan program bantuan ini adalah orang miskin,

ARAS,” *Jurnal Media Informatika Budidarma* 6, no. 1 (2022): 198, <https://doi.org/10.30865/mib.v6i1.3478>.

¹²⁶Yusi Yustikasari and Husni Mubarak, “Comparative Analysis Performance of K-Nearest Neighbor Algorithm and Adaptive Boosting on the Prediction of Non-Cash Food Aid Recipients” 6, no. 1 (2019): 1–18, <https://doi.org/10.15294/sji.v9i2.32369>.

sakit kronis lanjut usia maupun disabilitas yang belum mendapatkan program bantuan jenis apapun. Sistem yang digunakan dalam memberikan program bantuan ini setiap triwulan dengan jumlah Rp.750 ribu per orang dan KPM harus membuka rekening tabungan Bank Jateng.¹²⁷

e. BLT /Bantuan Langsung Tunai

Program bantuan pada jenis BLT merupakan bantuan langsung tunai diberikan pada masyarakat miskin. Anggaran program bantuan BLT berasal dari anggaran dana desa/BLT DD dan bantuan diberikan untuk mengurangi beban masyarakat yang kena dampak pandemic COVID-19. Tujuan program bantuan BLT dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam sehari-hari. Karena saat pandemic kebutuhan semakin sulit dan semakin naik harga barang. Sedangkan pendapatan menurun, sehingga program bantuan dapat meringankan beban masyarakat miskin. Program bantuan BLT diberikan pada KPM berupa tunai dan non tunai. Non tunai dicairkan lewat transfer ke rekening bank dan tunai

¹²⁷Dinar Melani Hutajulu Istiqomah Tri Handayani, Panji Kusuma Prasetyanto, “Analisis Pengaruh Jumlah UMKM, Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Dan Harapan Lama Sekolah Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2017,” *DINAMIC: Directory Journal of Economic* 3, no. 3 (2018): 182–94.

dicairkan melalui pegawai kelurahan/desa, bank atau langsung diambil di kantor pos.¹²⁸

Program bantuan BLT ada yang memanfaatkan sebagai pengembangan bisnis atau usaha bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, sebagai tambahan modal dalam mata pencaharian petani, nelayan atau berdagang ataupun padat karya yang diberikan bagi masyarakat yang menghadapi resiko sosial. Adapun anggaran yang diterima dalam program bantuan BLT sejumlah Rp. 300 ribu sebagai tambahan memenuhi kebutuhan hidup maupun sebagai tambahan usahanya. Adapun syarat-syarat KPM yang mendapatkan bantuan BLT, antara lain:

- 1). Orang miskin yang mendapat bantuan harus sesuai data RT/RW dan desa setempat.
- 2). KPM tidak memiliki pekerjaan karena pandemi Covid-19.
- 3). KPM tidak mendapatkan bantuan sosial lainnya misalnya Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.

¹²⁸Nuniek Dewi Pramanik, "Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19," *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora* 01, no. 12 (2020): 113–20, <https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/209/149>.

- 4). KPM yang belum terdaftar mendapatkan bantuan ini, maka bisa daftar ke kepala desa.
- 5). KPM memenuhi syarat tetapi tidak punya KTP tetapi berdomisili di daerah tersebut, maka kepala desa bisa mengusulkan.

5. Program bantuan dalam ekonomi Islam

Program bantuan yang dilaksanakan pemerintah merupakan salah satu solusi penanganan kemiskinan. Kemiskinan dapat menghambat manusia untuk meningkatkan kualitas hidup manusia agar tercapai kesejahteraan yang hakiki, karena Islam mengajak untuk tercapainya kesejahteraan yang diwujudkan dalam pemenuhan kebutuhan material dan spiritual yang seimbang, serta meningkatkan kualitas kehidupan secara moral dan material.¹²⁹ Pernyataan lain bahwa sejahtera adalah hati tenang dan bahagia serta serba kecukupan harta yang dialami masing-masing orang.¹³⁰ Berbeda dengan kesejahteraan ahli lain ada beberapa tahapan aspek kesejahteraan dalam ekonomi Islam, antara lain:

Pertama terpenuhi kebutuhan dasar misalnya sandang, papan dan pangan serta kesehatan pendidikan. *Kedua* adalah

¹²⁹Umar Chapra, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2010):15.

¹³⁰Ibrahim Nuhu Tahir, "The Neglected Approach to Poverty Alleviation," *International Journal of Economics, Management and Accounting* 27, no. 1 (2019): 41–82.

seseorang telah merasakan aman (*safety needs*), *ketiga* kebutuhan sosial (*social needs*). *keempat* seseorang merasakan diakui oleh orang lain dan lingkungan (*esteem needs*), dan *kelima* adanya pengaktualisasian diri (*self actualization needs*). Dengan demikian program bantuan penanggulangan kemiskinan perlu melihat beberapa aspek kebutuhan yang dibutuhkan oleh masing-masing manusia.

Islam mengajarkan manusia dalam melaksanakan kehidupan akan berkaitan dengan prinsip keadilan dan mencapai tujuan hidup yakni. Kesejahteraan yang hakiki. bahwa semua negara mempunyai konsep keadilan sosial beriringan dengan jaminan sosial yang diakhiri dengan aspek sejahtera, kesejahteraan ini akan tercapai jika dimulai dari aspek distribusi sebagai intrumen untuk menjamin rasa keadilan. Dana bantuan untuk menjamin setiap warga merupakan dana yang bersumber dari warga melalui sumber pajak dan ZIZWAF.¹³¹ Bahwa negara memiliki kewajiban untuk mensejahterakan warganya, selain itu kesejahteraan tidak hanya tanggung jawab negara, tetapi masyarakat dan masyarakat individu orang miskin sendiri juga wajib ikut

¹³¹Willya Achmad, "Corporate Social Responsibility and Zakat: A Model of Philanthropy in the Society Era 5.0," *Jurnal Scientia* 11, no. 01 (2022): 565–74, <http://seaninstitute.org/infor/index.php/pendidikan/article/view/579>.

berkolaborasi mengejar kesehataraan.¹³² Oleh karena itu program bantuan sosial merupakan penjaminan sosial dari anggaran pemerintah pusat dan daerah yang diberikan kepada KPM. Yang meliputi aspek kebutuhan pokok dan pendidikan dan kesehatan, selain program sosial produktif tersebut. Pemerintah juga bertanggung jawab pada usia produktif dan non produktif juga berhak untuk mengejar kesehatan yang seimbang yang disebut *Falah*. Ada beberapa dasar-dasar bantuan sosial dalam ekonomi Islam, antara lain:¹³³

Pertama, dasar kemanusiaan adalah manusia berhadapan dengan kedudukan dan martabat sebagai manusia. Oleh karena itu dasar kemanusiaan itu merupakan perlindungan harga diri seseorang sebagai warga negara yang memiliki kedudukan yang sama antara orang satu dengan orang lain. Dasar kemanusiaan dijelaskan dalam surat al Hujurat ayat 13 bahwa manusia di hadapan Allah sama sedangkan yang membedakan hanya takwanya.¹³⁴ Jadi,

¹³²Rian Saputra and Silaas Oghenemaro Emovwodo, "Indonesia as Legal Welfare State: The Policy of Indonesian National Economic Law," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.21>.

¹³³Diah Mukminatul Hasimi, "Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1, no. 01 (2020): 61–72, <https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5762>.

¹³⁴Mirhan AM, "Refleksi Penciptaan Manusia Berbangsa-Bangsa Dan Bersuku-Suku (Telaah Surah Al-Hujurat Ayat 13)," *Jurnal Studia Insania* 3, no. 1 (2015): 1, <https://doi.org/10.18592/jsi.v3i1.1099>.

manusia diciptakan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, sehingga tidak ada yang paling unggul, oleh karena itu amal dan ketakwaan yang menjadikan ukuran kemuliaan seseorang.

Kedua dasar manfaat, dasar ini tergambar dalam pemberian program bantuan sosial dan berbagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang berupa pelayanan kesehatan dan pendidikan serta kebutuhan pokok dasar manusia sebagaimana dalam surat al-Nisa ayat 36 yang menjelaskan bahwa manusia disuruh menyembah Allah dan berbuatlah baik dengan sesama manusia karena Allah tidak suka terhadap orang sombong.¹³⁵ Dengan demikian manusia mempunyai hubungan vertikal langsung berhubungan dengan Allah dan hubungan horizontal bagaimana manusia berhubungan baik dengan sesama manusia.

Ketiga dasar keadilan, dasar ini berkaitan dengan aspek didistribusikan melalui program bantuan sosial. Pendistribusian bersifat merata tidak membedakan suku, ras, kaya dan miskin sebagaimana dalam firman Allah surat al-Ma'idah ayat 8:

¹³⁵Sapto Wardoyo, Ahmad Mukhlisin, and Abdullah Ridlo, "Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Kepada Kaum DhuF (Perspektif Al-Qur'an Surat An-Nisa Ayat 36 Tafsir Al-Maraghi)," *QALAM: Jurnal Pendidikan Islam* 01, no. 2 (2020): 92–108.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ

Artinya “Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil”

Agar semua mampu menegakkan keadilan di manapun. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial yang berkewajiban memberikan pelajaran dan amalan yang adil untuk menciptakan manusia-manusia *insan kamil*.¹³⁶ Ketiga dasar ini adalah dasar satu kesatuan dan saling kait mengkait untuk melaksanakan ketiga dasar dalam melaksanakan berbagai program bantuan sosial baik sebagai aktor pemangku kebijakan, warga masyarakat dan orang miskin sendiri juga melaksanakan ketiga dasar ini agar tercapai tujuan kesejahteraan dan *insan kamil*.

D. Teori pembangunan ekonomi

1. Pengertian dan indikator keberhasilan pembangunan

Pembangunan ekonomi secara umum suatu teknik untuk melakukan perbaikan gaya hidup yang lebih baik di tengah-tengah masyarakat. Pengertian pembangunan ekonomi secara luas yakni sebuah sistem perubahan dalam berbagai

¹³⁶Lia Yulianti, Fitroh Hayati, and Ayi Sobarna, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah Ayat 8,” *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 1 (2022): 13–20, <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i1.1657>.

multidimensi dan berbagai variabel yang terlibat dalam melakukan perubahan agar tujuan hidup tercapai baik meliputi berbagai lembaga maupun non lembaga, sehingga tujuan negara tercapai. Misalnya tercapai tujuan pertumbuhan ekonomi dan kualitas manusia serta mampu mengurangi angka kemiskinan,¹³⁷ dengan sistem pembangunan ekonomi yang baik jika aktor pemerintah dan pelaksana manusia berjalan saling kolaborasi yang baik.¹³⁸ Sistem pembangunan ekonomi mempunyai tujuan pendistribusian yang adil dan tercapainya kesejahteraan material dan non material.

Pembangunan ekonomi berkaitan jumlah penduduk dan perkembangan teknologi yang semakin maju dan berbagai bentuk fitur-fitur yang ada. Adapun tujuan pembangunan ekonomi di daerah untuk meningkatkan berbagai macam lapangan kerja di masing-masing daerah. Pembangunan ekonomi dimulai dari belakang yakni mulai pembangunan di desa, karena pembangunan ekonomi merupakan strategi pembangunan desa sebagai pelengkap makro ekonomi yang mengimplementasikan pembangunan nasional. Pengertian

¹³⁷Oumarou Zallé, "Natural Resources and Economic Growth in Africa: The Role of Institutional Quality and Human Capital," *Resources Policy* 62, no. October (2019): 616–24, <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.11.009>.

¹³⁸Valeria Naciti, "Corporate Governance and Board of Directors: The Effect of a Board Composition on Firm Sustainability Performance," *Journal of Cleaner Production* 237 (2019): 117727, <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117727>.

pembangunan banyak dimanfaatkan oleh aktor kebijakan untuk mengembangkan stabilitas perekonomian pemerintah pusat.¹³⁹ Konsep pembangunan meningkatkan kehidupan dan menaikkan standar kehidupannya. Sehingga pembangunan wajib meliputi aspek multidimensi yang harus dilakukan perbaikan agar manusianya semakin produktif dan tercapai kesejahteraan hidupnya. Pembangunan di sektor pertanian mengalami kemunduran, karena pembangunan yang tercurahkan digalakkan di sektor industrialisasi. Oleh karena itu pemerintah sebagai aktor pengambil kebijakan perlu penanganan secara multidimensi dan sesuai dengan kemampuan masyarakat masing-masing.

Bahwa kesuksesan pembangunan dapat memperlihatkan 3 nilai pokok.¹⁴⁰ *Pertama*, tumbuh potensi masyarakat untuk mencukupi kebutuhan dasar (*basic needs*). *Kedua*, naiknya rasa hormat dan martabat seseorang (*selfesteem*) sebagai manusia; dan ketiga, naiknya kebebasan untuk menentukan pilihan hidup (*freedom from servitude*) sebagai bagian hak asasi manusia. Dampak pembangunan ini adalah adanya arus urbanisasi yang mengakibatkan

¹³⁹Mohammed Basheer et al., “Balancing National Economic Policy Outcomes for Sustainable Development,” *Nature Communications* 13, no. 1 (2022): 1–13, <https://doi.org/10.1038/s41467-022-32415-9>.

¹⁴⁰Di Yang et al., “The Contribution of Data-Driven Poverty Alleviation Funds in Achieving Mid-21st-Century Multidimensional Poverty Alleviation Planning,” *Humanities and Social Sciences Communications* 9, no. 1 (2022): 1–9, <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01180-x>.

meningkatnya pertumbuhan ekonomi hanya di wilayah perkotaan. Sehingga di pedesaan akan meninggalkan lapangan kerja yang ada di desa, karena lebih memilih ke kota. Hal ini yang perlu diperhatikan oleh berbagai pihak untuk memberikan pembangunan yang imbang antara desa dan kota.

2. Macam-macam Teori Pembangunan Ekonomi

a. Teori klasik

Ahli ekonomi klasik diperopori oleh Adam Smith dengan karyanya yang berjudul *An Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations* 1776, menerangkan persoalan pembangunan ekonomi, bahwa: *Pertama*, hukum alam dalam ekonomi adalah bahwa manusia mengetahui kepentingan diri sendiri, sehingga manusia bebas mengejar untuk diri sendiri.¹⁴¹ Oleh karena itu Adam Smith menentang adanya intervensi pemerintah, pasar itu bebas. Jika pemerintah intervensi justru terjadi distorsi baru yang akan bermunculan. *Kedua*, pembagian kerja, artinya tenaga kerjalah yang meningkat produk-produk yang bermunculan, pembangunan pandangan Adam Smith akan meningkatkan tenaga kerja dan hemat waktu, sehingga hambatan produktifitas bukan dari tenaga kerja tetapi dari unsur modal. Kemajuan teknologi

¹⁴¹Paolo Santori, "Is Relationality Always Other-Oriented? Adam Smith, Catholic Social Teaching, and Civil Economy," *Philosophy of Management* 21, no. 1 (2022): 49–68, <https://doi.org/10.1007/s40926-021-00175-z>.

menghasilkan pembagian kerja dan perkembangan pasar. *Ketiga*, modal dahulu yang harus diutamakan baru pembagian kerja. Menurut Adam Smith adalah modal sebagai syarat utama dalam pembangunan ekonomi. Oleh karena itu pembangunan ekonomi diimbangi dengan sikap investasi dan menabung bagi manusia.

b. Teori Aliran Neo-Klasik

Teori Neo Klasik berkembang pertengahan 1950 an telah mengkritik teorinya Keynes yang menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi sangat bergantung pada konsumsi masyarakat.¹⁴² Teori ini menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung pada penawaran (*supply*) dan produksi. Bunga dan pendapatan sangat menentukan tinggi rendahnya minat masyarakat dalam menabung. Kebijakan bunga akan mempengaruhi tingkat investasi. Pembangunan ekonomi merupakan sistem yang meliputi beberapa tahapan terus menerus secara harmonis dan tumbuh dengan baik. Teori neo-klasik lebih optimis jika dibandingkan teori klasik, karena klasik mengatakan bahwa pembangunan ekonomi berkembang lambat karena keterbatasan sumber daya alam. Beda dengan teori neo-klasik bahwa keterlambatan

¹⁴²Hakim Berradia, Mehdi Abid, and Zouheyr Gheraia, "Renewable Energy Consumption-Economic Growth Nexus in Saudi Arabia : Evidence from a Bootstrap ARDL Bounds Testing Approach 1 Introduction and Literature Review," *Wseas Transaction on Environment and Development* 19 (2023): 33–44, <https://doi.org/10.37394/232015.2023.19.4>.

pembangunan ekonomi, jika manusia mampu mengatasi masalah tersebut. Neo-klasik memandang pembangunan ekonomi akan menghasilkan tujuan, jika memberikan keuntungan bagi semua pihak.

c. Teori Aliran Keynesian

Pelopor teori ini adalah John Maynard Keynes, hidup di Inggris tahun 1883-1946. Sebutan teorinya Great Depression. Teori ini menyatakan bahwa peningkatan konsumsi itu karena arus uang, karena peningkatan pendapat akan mendorong unsur pengeluaran/ belanja. Teori Keynes menyatakan bahwa konsumsi merupakan alat bertambahnya pendapatan orang lain. Ketika *Great Depression* melanda, masyarakat cenderung lebih menahan uangnya dan penghematan untuk tidak banyak pengeluaran. Teori ini lebih mengedepankan intervensi pemerintah, karena pemerintah memiliki peran kekuatan otoritas untuk mempengaruhi pembangunan ekonomi. Teori ini lebih menekankan sektor publik ikut mengintervensi untuk memajukan perekonomian yang disebut *laizes-faire capitalism* (teori kapitalisme).¹⁴³ Konsep kapitalis murni menentang intervensi pemerintah, karena pasar diberi kebebasan akan tercapai keseimbangan pasar. Teori Keynes tidak memberikan kebebasan pihak swasta. Pemerintah

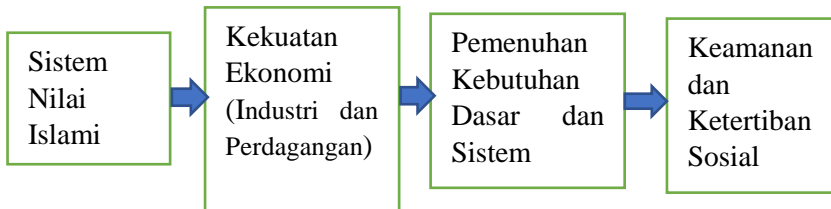
¹⁴³Klara Stumpf and Bernd Sommer, “The Economy for the Common Good: A European Countermovement against the Destructive Impacts of Laissez-Faire Capitalism?,” *Culture, Practice & Europeanization* 4, no. 1 (2019): 103–15, <https://doi.org/10.5771/2566-7742-2019-1-103>.

berkewajiban mengatur pihak swasta dijamin agar bekerja sama dengan pihak lainnya.

3. Konsep Kesejahteraan dalam Pembangunan ekonomi Islam

Aspek pertumbuhan ekonomi bertujuan untuk mencapai kesejahteraan yang hakiki harus melalui prosedur terintegrasi antara pertumbuhan ekonomi dan pembagian harta supaya pertumbuhan yang benar-benar berkualitas dapat diwujudkan. Konsep kesejahteraan berbagai macam pemahaman tergantung bagaimana cara berpikir dalam memahami kesejahteraan. Oleh karena kesejahteraan hakiki berdasarkan nilai ajaran Islam, sebagaimana dalam Surat al-Quraisy ayat 1-4 merupakan strategi yang perlu diperhatikan dalam pembangunan ekonomi. Ada empat indikator kesejahteraan yakni:¹⁴⁴

Gambar 3. Indikator Kesejahteraan dalam Islam



Gambar tersebut menjelaskan bahwa ekonomi Islam melihat riil dalam berbisnis yang merupakan hasil yang halal untuk memenuhi kebutuhan pokok dan menjaga keamanan

¹⁴⁴Muhamad Nurois Amin, “Strategi Bisnis Yang Tersirat Dalam Surat Al-Quraisy Ayat 1 – 4,” *Taqorrub: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah* 1, no. 1 (2020): 1–12, <https://doi.org/10.55380/taqorrub.v1i1.40>.

lingkungan agar terjaga keamanan dan ketentraman serta saling tolong menolong dengan sesama terutama orang yang butuh bantuan.

Indikator *pertama* yakni sistem nilai Islam yakni bahwa sistem nilai Islam merupakan pondasi dalam melaksanakan kegiatan ekonomi, jika mengabaikan nilai Islam, maka kesejahteraan tidak akan di dapat, Kesejahteraan yang didapat bagi yang mengabaikan nilai Islam akan mendapatkan musibah dan bencana yang didapat, karena telah mengabaikan peran Allah dalam kegiatan hidupnya.¹⁴⁵ Kesejahteraan manusia akan dicapai, jika pembangunan ekonomi bisa diwujudkan kedaulatan ekonomi dan tata kelolanya berdasarkan nilai-nilai Islam.

Indikator *kedua*, jika tidak ada kegiatan ekonomi sama sekali, maka kesejahteraan juga tidak akan tercapai. Oleh karena itu intisari kegiatan ekonomi terletak pada kondisi sektor riil. Sektor riil ini yang akan memberikan penyerapan tenaga kerja. Sedangkan sektor moneter sebagai sarana untuk mendukung keberhasilan di sektor riil. Aktifitas ekonomi harus berdasarkan akad dan transaksi yang dibenarkan dalam ekonomi Islam. Karena akad transaksi merupakan akad yang diterapkan dalam sektor riil dalam berbisnis. Indikator *ketiga*

¹⁴⁵Nur Rachmat Arifin and Nida Laili Fitriyah, “Konsep Kesejahteraan Pandangan Ulama Kontemporer,” *IQTISADIE: Journal Of Islamic Banking and Shariah Economy* 1 (2021): 174–92.

adalah memenuhi kebutuhan pokok dan system pembagian kekayaan, sejalan dalam surat Al-Hasyr ayat 7:¹⁴⁶

Orang dikatakan sejahtera, jika terpenuhinya kebutuhan *daruriyahnya*. Jika pemenuhan kebutuhan hanya sebagian masyarakat yang dapat memenuhi kebutuhan pokok berarti ada persoalan dalam sistem distribusi. Oleh karena itu sistem distribusikan memiliki peran penting untuk menghasilkan kualitas sejahtera yang hakiki. Islam memberikan petunjuk agar distribusi baik jika menghasilkan tercapainya tujuan untuk menurunkan angka kemiskinan, menghilangkan ketimpangan, perputaran ekonomi yang adil, dan sumber daya alam dapat dinikmati oleh semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat pinggiran.

Indikator *keempat*, tolok ukur kesejahteraan dari keamanan dan ketertiban sosial. Suatu wilayah dikatakan masyarakatnya sejahtera terhindar dari konflik dan peperangan.¹⁴⁷ Sehingga akan mencapai kesejahteraan secara individu tidak secara kolektif. Sehingga kesejahteraan individu

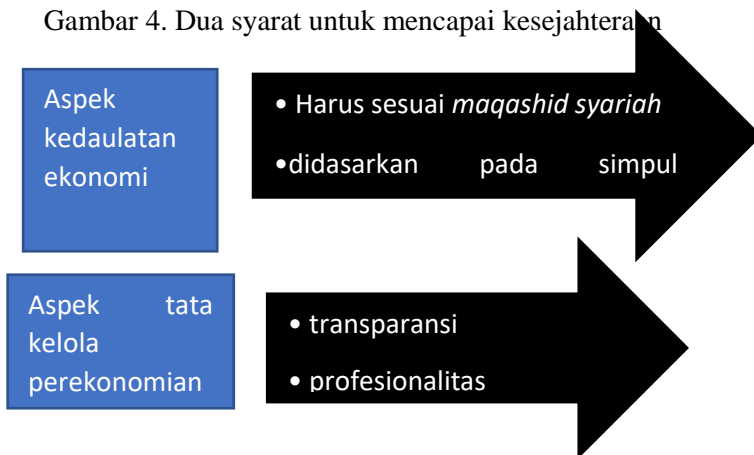
¹⁴⁶Ahmad Lutfi Fikri, Muaidy Yasin, and Akhmad Jupri, "Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 02 (2018): 103, <https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.249>.

¹⁴⁷Yuhan Wang et al., "Evaluation of Common Prosperity Level and Regional Difference Analysis along the Yangtze River Economic Belt," *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 19 (2022), <https://doi.org/10.3390/ijerph191911851>.

jika perasaan takut dan *was-was* serta ketidaknyamanan bisa dihilangkan semuanya, agar tercapai sejahtera yang hakiki.

Kedaulatan ekonomi dapat diwujudkan sesuai dengan *maqasid syariah* dan nilai-nilai ajaran Islam lain agar tercapainya kesejahteraan yang berkualitas, jangan sampai pembangunan ekonomi berorientasi pada *pareto optimality*.¹⁴⁸ Syarat kedua tata kelola perekonomian yang meliputi transparansi, amanah dan profesionalitas.

Gambar 4. Dua syarat untuk mencapai kesejahteraan



Kedaulatan ekonomi merupakan hal penting dalam suatu pemerintahan, dan tidak bisa dabaikan. Kedaulatan ekonomi merupakan pondasi dan suatu kekuatan masyarakat.¹⁴⁹ Oleh

¹⁴⁸Umar Chapra, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi...*,85.

¹⁴⁹Dede Aji and Rifki Rosyad, "Religion and Economics : From the Transformation of the Human Capital Index (HCI) to the Economic Sovereignty of Islamic Boarding Schools in Indonesia," *Quantitative Economics and Management Studies* 1, no. 4 (2020): 249–59, <https://doi.org/10.35877/454ri.qems188>.

karena itu kebijakan ekonomi harus berdasarkan kemaslahatan umat. Kedaulatan ekonomi ini akan kuat, sehingga tidak mudah didikte oleh asing. Kedaulatan akan memberikan masalah jika memenuhi dua syarat yakni berdasarkan kemanfaatan dan keberkahan.¹⁵⁰

Untuk memperkuat kedaulatan ekonomi, yang memiliki kekuatan dan kewibawaan ekonomi di mata negara luar/asing maka kebijakan ekonomi mengimplemenasikan dua syarat kebijakan, antara lain;

Syarat *pertama*, tujuan ekonomi Islam yakni mampu memelihara dan menjalankan nilai *maqasid syariah* untuk mencapai *falah* dunia dan akherat. Maka kebijakan yang dilaksanakan hendaknya sesuai dengan *maqasid syariah*.¹⁵¹ Pondasi yang dipegang oleh kebijakan pemerintah hendaknya berorientasi pada kaum *dhuafa*. Kepentingan orang yang paling lemah lebih diutamakan agar kesejahteraan tercapai seluruh lapisan level masyarakat.

Syarat *kedua*, untuk mencapai kesejahteraan yakni tata kelola perekonomian. Unsur mengelola kekayaan dan asset

¹⁵⁰Nur Asiyah and Abdul Ghofur, "Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari'Ah Kontemporer," *Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 59, <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1349>.

¹⁵¹Ali Murtadho, "Arah Pengembangan Kajian Ekonomi Islam Berbasis Kesatuan Ilmu Pengetahuan Di Iain Walisongo," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2014): 21–36, <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.761>.

yang dimiliki oleh suatu negara harus meliputi indikator keterbukaan, memiliki kompetensi yang terlatih dalam mengelola keuangan.¹⁵² Keterbukaan akan memberikan informasi kepada semua lapisan masyarakat, sehingga tidak ada yang ditutup-tutupi, apalagi sampai melakukan korupsi. Jika tidak terdapat keterbukaan, akan terjadi keburukan dan tidak tercapainya kesejahteraan, karena pengelolaan keuangan tidak ada transparansi. Oleh karena aktor-aktor di lapangan juga diinstruksikan untuk tetap jujur dan terbuka dalam memberikan bantuan sosial kepada masyarakat.

Di samping itu tata kelola juga harus mempunyai indikator professional yang merupakan kecakapan dalam mengelola keuangan, sehingga kemahiran seseorang dalam mengelola keuangan juga mempengaruhi tercapainya kesejahteraan. Kalau orang yang mengelola keuangan tidak canggih akan terjadi tidak efektif dan efisien.

Tata kelola juga harus mempunyai indikator dalam melaksanakan pertanggungjawaban keuangan harus meliputi prinsip amanah dan jujur. Hal ini sangat penting baik dalam ajaran Islam maupun ketatanegaraan. Aspek ekonomi Islam mengajarkan bahwa setiap aktifitas kelak akan

¹⁵² Yang et al., "The Contribution of Data-Driven Poverty Alleviation Funds in Achieving Mid-21st-Century Multidimensional Poverty Alleviation Planning." *Humanities and Social Sciences Communications*, 9 no 1 (2022):1-9

dipertanggungjawabkan, sedangkan aspek ketatanegaraan adalah pengelolaan keuangan negara harus dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun etika sebagai pegawai pemerintahan.

Tugas administratif sebagai alat yang hendaknya dicatat terkait keluar masuknya anggaran publik jangan ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan wewenang.¹⁵³ Adapun tugas etika, sebagai alat terhadap kepatuhan dan loyalitas terhadap pemerintah dalam segala kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi mudah dimintai pertanggungjawaban secara administrasi, namun sulit dipertanggungjawabkan secara etika. Sedangkan tugas etika dapat sebagai rel untuk menghindari kejahatan-kejahatan dan eksploitasi serta penyalahgunaan yang ranah ke pencucian uang dalam semua kegiatan ekonomi.

4. Pembangunan dalam Ekonomi Islam

a. Pendekatan ekonomi pembangunan syariah

Pendekatan ekonomi Islam dalam pembangunan ekonomi harus mengakomodir berbagai pihak baik potensi budaya lokal dan agama yang diyakini masyarakat. Pembangunan bisa berhasil atau tidak hasil karena faktor agama dan budaya lokal yang dimiliki daerah diabaikan.

¹⁵³Sayed Fayaz Ahmad et al., "Academic and Administrative Role of Artificial Intelligence in Education," *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 3 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.3390/su14031101>.

Oleh karena pembangunan ekonomi mampu mengimplementasikan instrumen strategis dan sangat dibutuhkan khususnya bagi bangsa Indonesia.

Pembangunan ekonomi dalam Islam, jika mampu mengimplementasikan nilai-nilai ajaran ekonomi Islam sehingga baik faktor eksternal maupun internal suatu negara perlu adanya kerja sama yang baik dan sejalan dengan Quran dan Hadits.¹⁵⁴ Pembangunan ekonomi dalam ekonomi Islam harus memperhatikan dasar-dasar yang diterapkan dalam pembangunan antara lain:¹⁵⁵

- 1) Prinsip ketauhidan dan khalifah diterapkan dalam pembangunan ekonomi. Prinsip ketauhidan merupakan pondasi setiap aktifitas pembangunan. Oleh karena itu pembangunan ekonomi harus mengimplementasikan larangan dan perintah dari Allah Swt. sejalan dengan pemikiran Ibnu Taimiyyah yang dikutip oleh Abdul Adhim Al Islahi bahwa pemerintah tanpa agama terjadi

¹⁵⁴Mohammad Ghozali, Norazzah Binti Kamri, and M. Ali Zi Khafid, "The Merger of Indonesian Islamic Banks: Impact on the Islamic Economy Development," *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 6, no. 1 (2022): 23, <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7551>.

¹⁵⁵R. Wilson, *Economic Development in the Middle East, Economic Development in the Middle East* (Francis: Taylor & Francis, 2022), <https://doi.org/10.2307/40201175>.

kerusakan, oleh karena itu pemerintah harus *amar makruf nahi munkar*¹⁵⁶.

Seseorang atau pemerintah yang membangun dirinya dengan baik dan sesuai dengan ajaran Islam, maka Allah akan menjamin rejekinya. Dan manusia tidak boleh pesimis dan sombong. Sehingga manusia harus bekerja keras dan berdoa untuk menyerahkan apa yang sudah dikerjakan untuk pembangunan ekonomi.

Manusia sebagai hamba Allah dan sekaligus sebagai khalifah di muka bumi. Untuk melakukan pembangunan agar kemakmuran yang ada di muka bumi bermafaat untuk semua makhluk. Karena manusia memiliki potensi baik dan buruk yang harus dipilih untuk diimplementasikan dalam pembangunan ekonomi.

- 2) Unsur jasmani dan rohani diikutsertakan dalam pembangunan ekonomi. Manusia sebagai hamba Allah dan wakil Allah di muka. Oleh karena modal material. Jasmani dan rohani/non materi sebagai modal dalam pembangunan ekonomi yang berdasarkan keadilan, Keadilan pemerintah lebih bagus dari sekedar berbuat baik belaka, keadilan harus adanya keseimbangan dan tunduk pada aturan Allah Swt. Pembangunan tidak hanya berdasarkan unsur jasmani belaka, tetapi perlu

¹⁵⁶Abdul adzhim al Ishlahi, *Mabadi Al Iqtisad Al Islami* (Riyadh Arab Saudi: Maktabatul Minhaj, n.d.).

dasar moral spiritual. Karena ukuran keberhasilan pembangunan ekonomi tidak hanya berhasil jasmani tetapi juga moral juga berhasil lebih baik.

- 3) Inti pembangunan ekonomi adalah manusia dilibatkan sebagai subjek dan objek dan pembangunan ekonomi bertujuan mencapai kesejahteraan sosial pembangunan ekonomi manusia juga sebagai pelaku utama dalam pembangunan juga sekaligus sebagai sasaran pembangunan ekonomi.¹⁵⁷ Oleh karena itu manusia mampu melaksanakan pembangunan sebaik-baiknya dan orang yang di kenai pembangunan juga melaksanakan amanah institusi dengan sebaik-baiknya.

4) Peran negara (*role of the state*)

Peran pembangunan di sini antara masyarakat dan pemerintah untuk saling mensupport,¹⁵⁸Jadi jangan sampai bertentangan dan berseberangan dengan tujuan pembangunan yang dicapai. Islam mengajak agar unsur pemerintah dan swasta memberikan kontribusi perkembangan pembangunan

¹⁵⁷Absattorov Bakhtiyor Mamarasulovich, “Religious And Philosophical Foundations Of Human Moral Development,” *American Journal of Interdisciplinary Research and Development* 11, no. 12 (2022): 154–63, <https://doi.org/www.ajird.journalspark.org> Volume 11, Dec., 2022 RELIGIOUS.

¹⁵⁸Nizomiddinov Kudratbek Tuychieva Nodira, “Development Anti-Monopolism And Competition Essentialy, Its Role in The Development Of The Country’s Economy,” *Wb Of Scientist:International Scientific Research Journal* 3, no. 11 (2022): 2003–5.

ekonomi yang baik dan positif sebagaimana yang di anjurkan Nabi Muhammad agar pembangunan mampu mewujudkan bahagia dunia akherat. Bahwa pembangunan untuk mengentaskan kemiskinan dalam pandangan ekonomi Islam sebagai berikut:

- a). Menata sistem kepemilikan,: tidak boleh diberikan/jual belikan asing¹⁵⁹
- b). Memberikan langsung: pemerintah memberikan bantuan bidang pendidikan dan kesehatan secara langsung
- c). Menjamin bantuan secara tidak langsung; menyuruh wajib kerja, menyediakan lapangan kerja, kwajiban ahli waris, subsidi baitul maal
- d). Menata sistem monoter. ¹⁶⁰ Sedangkan menurut Fahim Khan bahwa stretegi pembangunan dalam ekonomi Islam melalui dua strategi. *Pertama*, strategi menciptakan kesempatan kerja berupah tetap. *Kedua*, strategi menciptakan kewirausahaan pada masyarakat.¹⁶¹ Sayangnya kenyataan bahwa strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan bersifat konvensional hanya berorientasi pada strategi yang pertama, sebagaimana berbagai cara untuk menciptakan kesempatan kerja berupah

¹⁵⁹ Abdul Mannan, *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997).

¹⁶⁰Umer Chapra, *Islam Dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2010).

¹⁶¹Ali Murtadho, "Strategi Pembangunan Ekonomi Yang Islami," *Economica* VII, no. 2 (2016): 1–22.

tetap bagi tenaga kerja sebanyak-banyaknya dan semurah-murahnya. Strategi ini yang terlibat orang kapitalis yang berinvestasi memperluas lapangan pekerjaan untuk dipekerjakan dengan mendatangkan keuntungan yang besar-besarnya bukan dilibatkan dalam aktivitas kewirausahaan. Strategi konvensional ini cenderung mengabaikan strategi penciptaan peluang kewirausahaan sebagai solusi problem pengangguran yang lambat laun menambah angka kemiskinan.

b. Prinsip Distribusi dalam Pembangunan

Islam meletakkan sesuatu pada tempatnya agar tidak mendholimi pihak-pihak lain. Orang kaya yang memiliki kelebihan mampu memenuhi kebutuhan apapun, tentunya si kaya mempunyai tanggung jawab terhadap yang kekurangan.¹⁶² Oleh karena itu aspek distribusi mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi. Aspek distribusi merupakan instrumen keseimbangan agar tidak terjadi konflik sosial dalam masyarakat. Adapun prinsip-prinsip distribusi dalam ekonomi Islam yang perlu diimplementasikan agar tercapai pembangunan ekonomi yang lebih sejahtera, antara lain:

- 1).Penghasilan yang didapat seseorang tergantung pada usaha kerasnya seseorang dengan usaha yang halal dan baik sesuai

¹⁶²Wan Khairuldin Wan Mohd Khairul Firdaus and Mohammad Mahadi, "The Philosophy and Elasticity of Zakah Distribution in Islam," *International Journal of Education and Research* 1, no. 8 (2013): 1–12.

yang diperintahkan Allah.¹⁶³ Penghasilan ini setelah didapat juga diimbangi dengan mensyukuri nikmat yang diterimanya. Penghasilan yang didapat juga harus memperhatikan pendistribusian kekayaan yang didapat, karena bagian harta yang didapat sebagian adalah milik orang lain.

2). Terpenuhinya keinginan pokok yang merupakan hak dasar semua manusia. Kebutuhan pokok merupakan masuk katagori kebutuhan daruriyyah dan *maqasid syariah* melalui kebutuhan pokok sandang papan dan pangan. Sedangkan kebutuhan *hajjiyah* sebagai kebutuhan sekunder dan *tahsiniyyah* merupakan kebutuhan tersier.

3). Harta tidak boleh berputar di tangan segelintir kelompok, yaitu kelompok super kaya (QS 59: 7). Harta harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Akses terhadap sumber-sumber harta dan kekayaan harus dibuka selebar mungkin dan setiap kelompok dalam masyarakat harus diberikan kesempatan yang sama. Bahwa kinerja setiap individu akan melahirkan hasil ekonomi yang berbeda, itu tidak menjadi persoalan selama setiap individu itu diberikan akses dan kesempatan yang sama.

¹⁶³Christoph Luetge, *Handbook Of The Philosophical Foundation*, Springer, vol. 4 (Springer, 2013):132.

4).Harta yang dimiliki merupakan sebagian milik orang lain, oleh karena itu orang miskin merupakan tanggung jawab bagi orang lain juga. Kepedulian di sini merupakan suatu kewajiban bagi orang kaya, jika di sekitarnya ada kelompok miskin bagikan kewajiban menjalankan ibadah shalat. Peran orang kaya melakukan ZISWAF pada orang miskin.

c. Kebijakan Distribusi dalam Islam.

Berdasarkan penjelasan di atas, distribusi merupakan kewenangan dan kebebasan pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai program bantuan social untuk rakyat miskin dan terikat dengan peraturan undang-undang yang terkait bantuan social.¹⁶⁴ Untuk itu, kebijakan pemerintah terkait program bantuan social harus sesuai SOP dan tepat sasaran dan dilaksanakan secara efektif. Distribusikan dipraktekkan akan menghadapi hambatan dan tidak tercapainya tujuan distribusi sendiri, Adapun tujuan kebijakan distribusi dalam Islam adalah sebagai berikut:

- 1). Menjamin pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat:
berdasarkan penjelasan sebelumnya bahwa terpenuhinya kebutuhan dasar adalah hak setiap warga masyarakat. Tugas negaralah untuk menjamin bahwa kebutuhan dasar

¹⁶⁴Deni Zam Jami and Asep Muharam, "Strategy for Improving the Quality of Islamic Religious Education Study Programs with Total Quality Management," *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2022): 267–83, <https://doi.org/10.31538/ndh.v7i2.2096>.

setiap warga terpenuhi. Selain itu, negara juga berkewajiban untuk membangun indikator yang menjadi parameter terpenuhi tidaknya kebutuhan dasar tersebut, termasuk menentukan *consumption basket* yang menjadi standar kebutuhan dasar masyarakat. Inilah yang kemudian merupakan tolok ukur kebutuhan minimal kebanyakan sama. Tolok ukur ini sewaktu-waktu bisa berubah, oleh karena itu pemerintah sewaktu-waktu melakukan evaluasi dan pengawasan kebijakan distribusi ekonomi.

- 2). Menjamin distribusi pendapatan dan kekayaan tetap seimbang, karena pendapatan dan kekayaan terjaga keseimbangan merupakan kunci stabilitas ekonomi, politik dan sosial. Kewajiban pemerintah melaksanakan keadilan dalam pendistribusian anggaran dan sumber daya alam secara merata dan tepat sasaran. Hal ini dapat dilakukan melalui beragam kebijakan yang bisa memastikan bahwa setiap warga negara bisa mengakses sumber-sumber ekonomi ini dengan baik. Salah satu penyebab munculnya isu keuangan inklusif, yaitu akses keuangan untuk semua kelompok masyarakat, adalah karena selama ini tidak kelompok masyarakat mendapat kesempatan untuk mengakses jasa layanan keuangan.

3). Melenyapkan ketimpangan yang terjadi di masyarakat. Hal ini sesuatu yang penting karena ketimpangan adalah akar persoalan yang menyebabkan permusuhan dan disintegrasi di masyarakat.¹⁶⁵ Untuk itu, negara harus menjamin adanya aliran kekayaan dari kelompok kaya kepada kelompok miskin, melalui beragam instrumen kebijakan, seperti zakat, pajak dan lain-lain. Pemenuhan kebutuhan dasar, keseimbangan distribusi pendapatan dan kekayaan, dan pengeliminasi kesenjangan ekstrim.

Gambar 5. Tujuan Kebijakan Distribusi dalam Islam



¹⁶⁵Riashat Islam, Zafarali Ahmed, and Doina Precup, “Marginalized State Distribution Entropy Regularization in Policy Optimization,” *School of Computer Science* 1 (2019): 1–18, <http://arxiv.org/abs/1912.05128>.

Dengan tujuan kebijakan distribusi sebagaimana tersebut di atas, menurut Lukman Hakim Saputra¹⁶⁶ langkah selanjutnya bagaimana mengimplimentasikan kebijakan yang sesuai aturan dan tepat serta efektif di setiap langkah distribusi. Jika merujuk pada pendekatan ekonomi konvensional, maka cara tahapan distribusi berdasarkan dua cara.¹⁶⁷ yaitu:

- a) Distribusi pasca produksi: adalah pembagian yang dilaksanakan setelah aktifitas menghasilkan barang dan jasa. Pembagian ini sangat erat dengan hasil yang diterima dari berbagai faktor yang digunakan dalam produksi. Karena itu, distribusi ini juga disebut sebagai distribusi fungsional. Sebagai contoh, buruh mendapatkan gaji sebagai return atas jasa tenaga dan keahlian yang diberikannya dalam proses produksi, dan pengusaha mendapatkan profit sebagai return terhadap investasi dan kegiatan bisnis yang dilakukannya.
- b) Pengalokasian ulang yakni pembagian program bantuan sosial melalui transfer digunakan untuk

¹⁶⁶Lukman Hakim and Ahmad Danu Syaputra, "Al-Qur'an Dan Penanggulangan Kemiskinan," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 629, <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1310>.

¹⁶⁷Sophie Bacq and Ruth V. Aguilera, "Stakeholder Governance for Responsible Innovation: A Theory of Value Creation, Appropriation, and Distribution," *Journal of Management Studies* 59, no. 1 (2022): 29–60, <https://doi.org/10.1111/joms.12746>.

stimulan pengembangan modal misalnya pengembangan modal bagi para petani. Dengan konsep seperti ini, salah satu indikator pembagian yang baik baik adalah pemerintah sellau memantau sewaktu-waktu penetapan upah minimal baik provinsi/kabupaten/kota. Juga negara akan melihat kekuatan APBN sebagai sumber dana untuk pelaksanaan kebijakan *government to people transfer*.

- c) Problem yang biasanya muncul pada distribusi pasca produksi adalah bagaimana menentukan tingkat upah yang adil, dan bagaimana menjembatani kepentingan pengusaha dan buruh. Sedangkan problem pada redistribusi biasanya bersumber dari dua hal. *Pertama*, apabila APBN berada pada kondisi defisit, maka bagaimana membiayai program *transfer payment* ini. Jika utang adalah jalan yang dipilih oleh para pengambil kebijakan, maka tentu akan membebani APBN ke depannya. *Kedua*, ketepatan penyaluran bantuan dana.¹⁶⁸ Di negara-negara berkembang, biasanya masalah penyaluran ini sering menimbulkan persoalan domestik yang terkadang mengganggu

¹⁶⁸Ricardo Hausmann and Ulrich Schetter, "Horrible Trade-Offs in a Pandemic: Poverty, Fiscal Space, Policy, and Welfare," *World Development* 153 (2022): 105819, <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105819>.

stabilitas negara. Ini bersumber dari manajemen pengelolaan yang lemah, praktik korupsi, maupun database penerima manfaat yang kurang tepat dan tidak memenuhi syarat. Karena itu, diperlukan solusi yang bersifat komprehensif melalui peningkatan kualitas dan akuntabilitas birokrasi yang menjadi ujung tombak eksekusi sistem distribusi.

d) Pendekatan kebijakan distribusi dalam ekonomi Islam

Mekanisme distribusi dalam konvensional jauh dari nilai-nilai ajaran Islam, Perbedaan yang terlihat jelas antara konsep ekonomi konvensional dengan ekonomi syariah terletak pada konsep redistribusi.¹⁶⁹ Secara umum, tahapan distribusi dalam Islam betul-betul ditentukan pada pertanyaan apakah perbaikan/perubahan ekonomi menghasilkan ketimpangan atau tidak, melahirkan keadilan atau kezaliman ekonomi. sedangkan pendekatan distribusi dalam ekonomi Islam sebagai berikut:

1). Distribusi pra-produksi

Distribusi ini sangat terkait dengan perencanaan kegiatan ekonomi, baik pada skala makro maupun mikro. Pada level makro, distribusi

¹⁶⁹Haris Maiza Putra and Ending Solehudin, "Fundamentals of Economic and Monetary Policy in Islam," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2022): 89, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.4302>.

pra-produksi tercermin pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) suatu negara. Apakah kebijakan pendapatan dan alokasi belanja *pro-poor* atau tidak. Apakah kebijakan pemerintah telah mengakomodir kebutuhan masyarakat banyak atau hanya segelintir orang. Serta apakah kebijakan yang diambil mampu mengangkat derajat para fakir miskin yang hidup di bawah naungan negara tersebut atau malah sebaliknya dizalimi.

Kedudukan APBN penting dalam pendistribusian karena APBN berisi pendapatan pengeluaran yang akan ditribusikan ke dalam pembangunan ekonomi. APBN akan tergambar program-program yang akan dilaksanakan pemerintah baik program yang berkaitan penanggulangan kemiskinan maupun ketimpangan sosial.¹⁷⁰ ada level mikro, pembagian dapat dilihat dari hasil dari factor-faktor produksi misalnya tenaga kerja, apakah memenuhi prinsip keadilan atau tidak. Bagaimana mengukur alokasi yang adil, sehingga masing-masing bagian mendapatkan proporsi yang tepat. Bagaimana mengalokasikan

¹⁷⁰Ali Murtadho, "Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis," *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 33–50, <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759>.

anggaran perusahaan untuk investasi SDM karyawannya melalui pelatihan dan pengembangan diri mereka. Serta bagaimana mengakomodir kebutuhan *daruriyat* mereka jika belum mencapai tahap *hajiyat* apalagi *tahsiniyat*.

2).Distribusi pasca produksi

Sama seperti ekonomi konvensional, distribusi ini terkait dengan distribusi fungsional.¹⁷¹ Hal yang penting adalah peran serta keterlibatan aktor dalam memproduksi barang dan jasa. Pada level makro, misalnya terkait dengan masalah upah minimum regional (UMR), apakah diperlukan atau tidak, adil atau tidak. Apakah ada indikator lain yang mampu mewakili pemenuhan kebutuhan tenaga kerja nasional, sehingga mampu pula mencerminkan kinerja mereka.

Pada level mikro, distribusi ini dilakukan melalui tingkat realisasi upah bagi pekerja, dan return bagi pemilik modal. Apa indikator keadilan UMR dan return yang diterima oleh setiap faktor produksi. Salah satu ukuran yang dapat digunakan adalah *konsep iwad* yang merujuk pada Tawfik

¹⁷¹Zahra Gharib et al., "Post-Disaster Temporary Shelters Distribution after a Large-Scale Disaster: An Integrated Model," *Buildings* 12, no. 4 (2022), <https://doi.org/10.3390/buildings12040414>.

Azrak ¹⁷² di mana kompensasi (*equivalent rate*) adalah imbangan dari risiko, kewajiban, dan usaha.

3). Redistribusi

Bahwa pembagian ulang tidak hanya melalui transfer saja,¹⁷³ bahwa transfer anggaran disesuaikan dengan harga barang yang berlaku di suatu negara setempat. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yakni:

- a). Zakat wajib bagi yang mampu dan memiliki kesadaran kepatuhan bayar pajak.
- b). Sukarela yakni melaksanakan ZISWAF
- c). Larangan dalam melaksanakan yakni riba, *gharar* dan *maisir* dalam pembangunan ekonomi.

E. Teori Pemberdayaan Masyarakat

1. Pengertian dan tahapan pemberdayaan masyarakat

Pemberdayaan merupakan proses, teknik, perilaku untuk berkemampuan dan kesangupan berdaya, yaitu sanggup berbuat untuk mencurahkan akal, pikiran dan berdaya untuk

¹⁷²Tawfik Azrak and Hani Hazaa, "The Profit/Gain from Islamic Law of Contract Perspective and The Issue Of Ownership Risk (Daman Al-Milkiyyah)," *Journal of Islamic Finance* 10, no. 1 (2021): 111–16.

¹⁷³E. L. Glaeser, "Should Transfer Payments Be Indexed to Local Price Levels?," *Regional Science and Urban Economics* 28, no. 1 (1998): 1–20, [https://doi.org/10.1016/S0166-0462\(97\)00022-7](https://doi.org/10.1016/S0166-0462(97)00022-7).

menghasilkan produktifitas yang lebih baik lagi.¹⁷⁴ Masyarakat merupakan suatu kumpulan manusia saling berinteraksi satu dengan yang lain, dan menjunjung tinggi moral daerah setempat. Pendapat masyarakat merupakan kontribusi untuk melakukan perkembangan pembangunan ekonomi, sehingga masukan masyarakat sebagai masukan untuk peningkatan pemberdayaan umat. Pemberdayaan yang berorientasi pada produktifitas manusia, untuk mengubah nasib manusia dari yang tidak berdaya berubah menjadi kuat dalam memenuhi kebutuhan hidup dan mengatasi berbagai hambatan hidup.

Pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan manusia untuk lebih memanusiakan artinya bahwa pembangunan ekonomi ini menekankan partisipasi manusia bukan manusia sebagai mobilisasi. Karena partisipasi manusia bukan hanya sekedar aktif dalam aspek konsumen belaka tetapi aktif dalam aspek produsen. Artinya manusia ikut menyusun dan merusmuskan program, hingga bertanggung jawab terlaksananya program hingga bertanggung jawab keberhasilan program pemerintah dan memiliki tanggung jawab dan partisipasi dalam pembangunan ekonomi yang terus menerus.

¹⁷⁴Maira Khan et al., “How Transformational Leaders Are Engaged in Work Settings During Episode of Covid-19? Exploring Mediating Effects of Structural Empowerment and Process Innovation,” *SAGE Open* 12, no. 2 (2022), <https://doi.org/10.1177/21582440221093354>.

Pemberdayaan secara konsep artinya gambaran mental atau kekuasaan (*empowerment*), berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat. Jika sudah memiliki modal sosial yang kuat akan mudah diarahkan dan mudah diberi wawasan pengetahuan. Konsep pemberdayaan masyarakat merupakan transfer ilmu pengetahuan yang akan mempengaruhi daya kreatifitas dan inovasi dalam produktifitas maupun berkarya untuk mencapai tujuan kesejahteraan yang diinginkan. Konsep pemberdayaan tersebut memberikan kekuatan untuk melanjutkan pembangunan yang berkelanjutan.

Dengan demikian peran pemerintah dan aktor lain dapat memberikan ide kepada masyarakat bawah untuk lebih berdaya lagi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan hidup. Oleh karena itu pembangunan hendaknya bersifat *bottom-up* artinya pembangunan yang melibatkan partisipasi manusia secara aktif untuk mencapai apa yang diinginkan yang disebut pembangunan negosiasi.¹⁷⁵ Karena berdasarkan musyawarah semua lapisan masyarakat untuk

¹⁷⁵Peng Han et al., "Bottom-Up Forces in Agroecosystems and Their Potential Impact on Arthropod Pest Management," *Annual Review of Entomology* 67 (2022): 239–59, <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-060121-060505>.

membangun masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan pembangunan ekonomi.

Pembangunan melalui *bottom-up* merupakan pembangunan yang dimulai dari bawah yakni pembangunan dimulai dari pedesaan. Karena daerah memiliki beragam kemampuan daerah, sumber daya yang berpotensi, budaya-budaya yang unik dan sejenisnya. Hal itu sebagai kunci untuk dikembangkan pembangunan pedesaan *top-down* adalah sebagai kebijakan untuk menangani modernisasi infrastruktur. Pemberdayaan pada hakekatnya melepaskan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat.¹⁷⁶ Oleh karena itu merupakan suatu proses untuk membangun kekuatan dan keberdayaan masyarakat terutama masalah kemiskinan. Pemberdayaan berorientasi pada kepemilikan pengetahuan, mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan yang awalnya tidak mampu menghadapi masalah hidup berubah menjadi berdaya, sehingga memiliki harga diri dan martabat yang lebih unggul.

Proses pemberdayaan ada dua faktor agar berdaya yakni: *Pertama* berikan kekuatan yakni pemerintah memberikan dukungan melalui kekuatan kebijakan dan materi agar masyarakat miskin memiliki kekuatan untuk berdaya dan

¹⁷⁶Franziska Günzel-Jensen et al., “Do the United Nations’ Sustainable Development Goals Matter for Social Entrepreneurial Ventures? A Bottom-up Perspective,” *Journal of Business Venturing Insights* 13, no. July 2019 (2020): e00162, <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00162>.

mampu mengubah dirinya menjadi mandiri dan menentukan pilihan berdikari walaupun dengan cara dialog dengan orang-orang yang terlibat dalam pemberdayaan. *Kedua* yakni berikan motivasi atau semangat agar masyarakat mempunyai semangat untuk berdaya.¹⁷⁷ Proses pemberdayaan ini tidak akan bisa berjalan tanpa dukungan aktor pemerintahan dan aktor masyarakat/lembaga yang terkait serta orang miskin sendiri.

Peremberdayaan bisa berjalan, jika didukung adanya keahlian, dan ilmu pengetahuan serta kekuatan/kewenangan yang memadai mampu mempengaruhi hidupnya dan masyarakat lain yang tertarik.¹⁷⁸ Untuk mengimplementasikan pemberdayaan perlu berkelanjutan, jadi tidak bisa dijalankan pada tahap tertentu saja. Dengan demikian perlu adanya kesinambungan hingga masyarakat yang dijadikan sasaran pemberdayaan mampu mandiri dan semakin meningkat kualitas usahanya. Ada beberapa tahapan siklus pemberdayaan yakni:¹⁷⁹

¹⁷⁷Ambar Teguh Sulistyani and Yulia Wulandari, "Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Dalam Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM)," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)* 2, no. 2 (2017): 146, <https://doi.org/10.22146/jpkm.27024>.

¹⁷⁸Rauf A Hatu, "Pemberdayaan Dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teortis)," *Inovasi* 7, no. 4 (2010): 240–54.

¹⁷⁹Alfian Izzat El Rahman, "Empowerment Of Quality Development Of Student Human Resource Assets In The Siti Khadijah Student Community Of Al-Qodiri Islamic Boarding School Jember In Developing The Creativity And Productivity Of Students In 2021," *Al-Ijtima: Jurnal Pengabdian*

Pertama ada kemauan dari masyarakat untuk bisa berubah. *Kedua* masyarakat mampu menghilangkan semua hambatan baik internal maupun eksternal. *Ketiga* masyarakat memiliki kebebasan dan tanggung jawab. *Keempat* mampu mengembangkan peran dan tanggung jawab melalui minat dan motivasi dalam menjalankan usahanya. *Kelima* tahapan ini mulai kelihatan hasilnya sesuai dengan niatnya. *Keenam* mengalami perubahan psikologi dari awal hingga pada tahapan ini. Tahapan ini lebih matang dari pada tahap-tahap sebelumnya. *Ketujuh* pemberdayaan yang sudah berhasil, biasanya tertantang agar hasil kerjanya mendapatkan hasil dan kualitas yang makin baik.¹⁸⁰ Penekanan pemberdayaan adalah proses untuk mengadakan perubahan dari tidak berdayaan menjadi berdaya karena mendapatkan dukungan melalui proses pemberdayaan dan berbagai siklus tahapan yang dilalui dengan kuat.

2. Macam-macam Teori Pemberdayaan Masyarakat

a. Teori Ketergantungan Kekuasaan (*power-dependency*)

Kekuasaan adalah kunci pemberdayaan masyarakat bisa berjalan, jika aktor penguasa memberikan kesempatan

Kepada Masyarakat 2, no. 2 (2022): 185–95, <https://doi.org/10.53515/aijpkm.v2i2.44>.

¹⁸⁰Ahmad Hamdan Moch Alfi RidhoTanu Jaya, Lilis Karwati, “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga,” *Jurnal Obor Penmas* 5, no. 1 (2021): 22–32.

dan dukungan motivasi bagi masyarakat untuk berubah menjadi berdaya. Oleh karena itu *power* tidak bisa dipisahkan dengan keputusan masyarakat, karena kekuasaanlah yang memiliki wewenang untuk memutuskan kebijakan yang berorientasi pada peningkatan pemberdayaan masyarakat.¹⁸¹ Teori ketergantungan antara pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan program pemberdayaan, karena pemerintah yang memiliki modal sebagai sarana pemberdayaan masyarakat. Jika masyarakat yang berdaya sudah mempunyai kekuasaan/*power*, maka mereka akan berdaya dan jika teori ketergantungan ini sudah mampu menjalankan pemberdayaan sudah kuat, maka lahirlah teori keadilan.

b. Teori Sistem (*The Social System*)

Talcott Parsons melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Seperti para pendahulunya, Parsons juga menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi.¹⁸² Parsons berasumsi bahwa setiap masyarakat

¹⁸¹Siwi Dyah Ratnasari and Akhmad Saikhu, "Peran Pelembagaan Dalam Program One Village One Product Melalui Empowerment Masyarakat," *Journal JIMMU* 7, no. September (2022): 226–42.

¹⁸²Endah Ratnawaty Chotim, "Talcott Parsons' Sociological Perspective In Viewing Social Change In Society In The New Normal Era," *Ijd-Demos* 4, no. 1 (2022): 607–17, <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i1.238>.

tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan.¹⁸³ Ada empat fungsi agar sistem pemberdayaan yang sudah mapan tetap bertahan, antara lain:

- 1). Pembiasaan, membentuk sistem yang kuat dalam menghadapi hal-hal yang membahayakan. Oleh karena itu sistem pemberdayaan segera dapat menyesuaikan diri terhadap lingkungan.
- 2). Pemerolehan, suatu sistem menentukan tujuan yang akan dicapai.
- 3). Kredibilitas, suatu sistem mampu berhubungan dengan bagian yang lain. Dengan demikian sistem yang mampu mewujudkan sistem yang jujur dengan yang lainnya.
- 4). Perlindungan pola, suatu sistem saling melengkapi, saling melindungi dan memperbarui serta memberi motivasi bagian-bagian yang menghasilkan suatu

¹⁸³Mir Sadaat Baloch, Abdul Wahid Zehri and Afi Ullah, "Understanding Social Theory Creation: A Perspective from Pierre Bourdieu and Talcott Parsons," *Research Paper*36-46 3, no. 3 (2022).

karya.¹⁸⁴ Pemberdayaan masyarakat perlu memiliki teori sistem tersebut agar berdaya, dan bertahan menjadi pemberdayaan berdaya.

c. Teori Ekologi (Kelangsungan Organisasi)

Manusia merupakan makhluk sosial, yang saling tolong menolong, oleh karena itu manusia hidup berkelompok bermasyarakat berbangsa. Suatu sistem organisasi merupakan bagian dari manusia, sehingga kita akan maju karena ada sistem organisasi. Dalam organisasi ada susunan organisasi yang berisi aktor-aktor yang mempunyai peran dan fungsi masing-masing, organisasi yang sudah maju akan ada struktur organisasi. Seseorang ikut berorganisasi tertentu, mesti mempunyai alasan masing-masing, masuk organisasi karena mencari kemanfaatan dan mencari pemenuhan kebutuhan, sehingga kelompok menjadikan suatu keharusan untuk mencari tujuan yang diinginkan. Organisasi merupakan teori guna melihat sistem kerja sama setiap individu. Bahwa organisasi merupakan wadah untuk kumpulan masyarakat yang punya tujuan sama dan orientasi mencari kekuatan / berdaya.

d. Teori Konflik

¹⁸⁴Prima Fithri et al., “Peningkatan Kapasitas Pengelola UMKM Dari Sisi Manajemen Operasional Dan Pemasaran,” *Jurnal Andalas: Rekayasa Dan Penerapan Teknologi* 1 (2022): 12–15.

Perselisihan dalam kehidupan pasti terjadi, karena kita saling berinteraksi dan jika tidak sepaham, akan terjadi konflik jika salah satu tidak mengalah atau menyadari atas persoalan yang menyebabkan perselisihan.¹⁸⁵ Hikmah teori konflik, akan selalu muncul dan akan selalu dapat ditemukan dalam semua level kehidupan masyarakat. Dalam interaksi, semua pihak bersinggungan dan sering melahirkan konflik. Belajar dari konflik yang kemudian disadari menghasilkan kerugian para pihak akan memunculkan inisiatif meminimalisir kerugian itu. Caranya adalah mengupayakan damai untuk kembali hidup bersama. Dalam konteks demikian, konflik didefinisikan bukan dari aspek para pelaku konflik, tetapi merupakan sesuatu yang *given* dalam interaksi sosial. Malahan konflik menjadi motor pergaulan yang selalu melahirkan dinamika dalam masyarakat.

Dikenal beberapa pendekatan teoritis untuk menjelaskan konflik. Sebagai kenyataan social, diantaranya pendekatan ketimpangan dalam dunia ekonomi yang menjelaskan bahwa munculnya konflik dikarenakan ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan yang menciptakan kelangkaan. Sementara di sisi lain, individu

¹⁸⁵Iskandarsyah Siregar and Zulkarnain, "The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory: A Literature Review," *International Journal of Arts and Humanities Studies* 2, no. 1 (2022): 09–16, <https://doi.org/10.32996/bjahs.2022.2.1.2>.

bersifat individualis, mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan surplus yang ada. Adanya kesamaan antara individu membuka peluang terjadinya perebutan pada satu komoditi dan sebaliknya juga membuka kerjasama di antara para pelaku.

Pada proses pemberdayaan yang dilakukan di suatu lingkungan sosial (masyarakat) akan sangat sering menemui konflik. Konflik yang terjadi berkaitan erat dengan ketidakpercayaan dan adanya perubahan kepada mereka. Perubahan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan berbagai norma sosial yang sudah tertanam sejak lama di dalam masyarakat. Terdapat tiga model penjelasan yang dapat dipakai untuk menganalisis kehadiran konflik dalam kehidupan masyarakat.¹⁸⁶ *Pertama* penjelasan budaya, *kedua* penjelasan ekonomi, *ketiga* penjelasan politik. Perspektif budaya menjelaskan bahwa konflik dalam masyarakat diakibatkan oleh adanya perbedaan budaya dan suku. Dalam sejarah, konflik cenderung seringkali terjadi karena persoalan perbedaan budaya yang melahirkan penilaian stereotip.

¹⁸⁶Felix Bittmann, "How Trust Makes a Difference: The Impact of the First Wave of the COVID-19 Pandemic on Life Satisfaction in Germany," *Applied Research in Quality of Life* 17, no. 3 (2022): 1389–1405, <https://doi.org/10.1007/s11482-021-09956-0>.

Masing-masing kelompok budaya melihat sebagai anggota atau bagian dari budaya yang sama dan melakukan pertarungan untuk mendapatkan otonomi budaya. Terdapat perdebatan tentang pendekatan primordial terhadap realitas konflik. Sebagian antropolog ada yang menerima dan sebagian menolak. Argumentasi kalangan yang menolak beralasan bahwa terdapat masalah serius bila hanya menekankan penjelasan konflik dari aspek budaya semata. Pendekatan budaya tidak memasukkan faktor-faktor penting dari aspek sosial dan ekonomi.

Pandangan teori konflik mengacu pada dua aspek, yang pertama tentang ekonomi/uang yaitu berkaitan dengan modal sebagai sarana untuk kelompok dapat dikatakan berdaya dan mandiri. Aspek kedua menyangkut tentang organisasi, apabila kelompok dapat memajemen konflik dengan baik, maka ketuhan dan kekuatan organisasi/kelompok orang akan terus kuat dan lestari sehingga mereka akan memiliki daya dari sisi finansial dan sisi keanggotaan massa.

e. Teori Mobilisasi Sumberdaya

Gerakan sosial terdiri dari individu-individu dan interaksi di antara anggota suatu masyarakat. Pendekatan pilihan rasional (*rational choice*) menyadari akan hal ini, tetapi versi mereka memperhitungkan individu

sebagai yang abstrak untuk menjadi realistis. Pragmatisme, feminisme, dan yang terkait dengan berbagai tradisi yang mendorong lahirnya studi tentang aksi-aksi individu (*individual action*) dan aksi-aksi kolektif (*collective action*) sejak tahun 1960-an, yakni penelitian tentang perlawanan (*social resistance*), gerakan sosial (*social movement*) dan tindakan kolektif (*collective behavior*) berkembang di bawah inspirasi dari teori-teori besar tersebut.¹⁸⁷ Dua dari mereka di antaranya dipengaruhi oleh pandangan Marxisme, terutama sosiologi makro versi Amerika yang menekankan teori mobilisasi sumber daya (*resource mobilization theory*) dan interaksi dengan negara. Bahwa untuk mengetahui keinginan seseorang akan sangat terkait dengan tujuan. Dalam hal ini, maka tujuan adalah pusat pendekatan yang strategis sebagai taktik, meskipun dalam pemahaman umum, telah keliru memahami bahwa strategi merupakan instrumen tujuan yang bersifat sementara mencerminkan budaya dan emosi.

Pada konteks pemberdayaan masyarakat maka teori mobilisasi menjadi salah satu dasar yang kuat, karena untuk menjadi seorang atau kelompok masyarakat yang

¹⁸⁷Andreana Drencheva, Ute Stephan, and Malcolm G. Patterson, "Whom to Ask for Feedback: Insights for Resource Mobilization From Social Entrepreneurship," *Business and Society* 61, no. 7 (2022): 1725–72, <https://doi.org/10.1177/00076503211057497>.

berdaya/memiliki *power* selain uang, *knowledge* maka *people* juga “mempunyai peranan yang penting. Kumpulan orang akan memberikan kekuatan, kekuatan itu akan memberikan *power* pada orang atau masyarakat.

f. Teori Constructivist

Teori konstruksi merupakan teori pengetahuan yang berasal dari filosofi, dimana untuk membuat suatu susunan pengetahuan. Pengetahuan suatu hal yang aktif menerima melalui pikiran maupun melalui intraksi manusia. Oleh karena itu suatu pengetahuan aktif untuk memikirkan pengetahuan pembangunan.¹⁸⁸

Teori konstruktivisme sebagai tindakan menciptakan sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan teori behavioristik yang memahami hakikat belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon. Sedangkan teori konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan pada proses daripada hasil.

¹⁸⁸Jami and Muharam, “Strategy for Improving the Quality of Islamic Religious Education Study Programs with Total Quality Management.” *Nidhomul Haq : Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 7 no 2 (2022): 267-283.

Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting.

Pada proses pemberdayaan masyarakat pendekatan teori belajar secara konstruktivisme perlu ditanamkan dan diupayakan agar masyarakat mampu mengkonstruksi pemahaman untuk berubah. Pemberdayaan masyarakat hendaknya tetap mempertahankan nilai-nilai yang sudah melekat di masyarakat selama nilai tersebut baik dan benar. Nilai-nilai kebersamaan, keikhlasan, gotong-royong, kejujuran, kerja keras harus dibangun dan dikonstruksikan sendiri oleh masyarakat untuk menciptakan perubahan agar lebih berdaya. Keterkaitan dengan konsep pemberdayaan maka aspek ilmu (*knowledge*) yang ada di dalam masyarakat perlu dibangun dengan kuat dan dikonstruksikan di dalam masyarakat itu sendiri.

3. Pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi Islam

a. Bentuk upaya pemberdayaan masyarakat dalam Islam

Pemberdayaan merupakan suatu keharusan dalam kehidupan, karena pemberdayaan bagian dari sifat ketuhanan. Islam memerintahkan untuk peduli terhadap sesama, diutamakan bagi orang belum berdaya. Perintah melaksanakan shalat bergandengan dengan perintah zakat mengisaratkan untuk peduli sesama, kepedulian ini menjadi

kebiasaan, maka terbentuklah sifat untuk mewujudkan pemberdayaan masyarakat terhadap kondisi manusia yang lemah khususnya wilayah ekonominya.¹⁸⁹ Pemberdayaan mengubah manusia menjadi lebih baik dan akhirnya masyarakat lemah yang sudah menjadi mandiri memberikan kontribusi pada pembangunan.

Islam memerintahkan agar umat manusia mengubah nasibnya melalui pemberdayaan kemampuan yang dimiliki, yang dipraktikkan Nabi Muhammad Saw sebagaimana cerita pengemis meminta-minta pada Nabi Muhammad yang sedang bermusyawarah bersama sahabat-sahabat.

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ أَمَا فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جَلَسْتُ نَتَبَسُّنَ بَعْضُهُ وَنَتَبَسُّطُ بَعْضُهُ وَقَعْتُ نَشْرَبُ فِيهِ مِنَ الْمَاءِ قَالَ الْبَيْتِيُّ بِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ وَقَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ زَيْدٌ عَلَى دِرْهَمٍ مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذَهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ وَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ وَقَالَ اشْتَرِ بِأَخَذِهِمَا طَعَامًا فَأَبْدُهُ إِلَى أَهْلِكَ وَاشْتَرِ بِالْآخِرِ قَدُومًا فَأَتِنِي بِهِ فَأَتَاهُ بِهِ فَشَدَّ فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُودًا بِيَدِهِ ثُمَّ قَالَ لَهُ اذْهَبْ فَأَخْتَطِبْ وَبِعْ وَلَا أَرْتِنَاكَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَذَهَبَ الرَّجُلُ يَخْتَطِبُ وَيَبِيعُ فَجَاءَ وَقَدْ أَصَابَتْ عَشْرَةَ دَرَاهِمٍ فَاشْتَرَى بِبَعْضِهَا ثَوْبًا وَبِبَعْضِهَا طَعَامًا فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَذَا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تُجِئَ الْمَسْأَلَةَ لِحُكْمَةٍ فِي وَجْهِكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الْمَسْأَلَةَ لَا تَصْلُحُ إِلَّا لِلثَّلَاثَةِ لِدِي فَرٍ مُدَقِّعٍ أَوْ لِدِي عُزْمٍ مُفْطِئِعٍ أَوْ لِدِي

دم موجه

Pengemis dari kaum anshor yang bernama Salman ditanya Rasulullah “apa yang kau miliki”. Pengemis menjawab punya satu helai kain dan satu cangkir untuk minum. Rasulullah menawarkan para sahabat-sahabatnya

¹⁸⁹Yasmansyah Yasmansyah and Abdul Aziz, “Pendidikan Ekonomi Menurut Perspektif Al-Quran,” *JKIP : Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2021): 36–49, <https://doi.org/10.55583/jkip.v2i1.186>.

untuk membeli, dibelilah cangkir dengan harga dua dirham, maka Rasulullah mengatur satu dirham beli makanan untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan satu dirham untuk beli kapak. Rasul menyuruh carilah kayu bakar kemudian jual ke pasar kemudian dua minggu kembali dengan membawa 10 dirham¹⁹⁰.

Kisah kaum anshor menjadikan pembelajaran bagi umat manusia, kaum anshor berubah hidupnya menjadi lebih baik dan lepas dari kemiskinan. Model pemberdayaan Nabi Muhammad Saw di atas memaksimalkan kemampuan yang dimiliki seseorang. Pemberdayaan Nabi Muhammad Saw merupakan contoh bagi semua masyarakat, sehingga orang miskin bisa mencontoh dan pembelajaran baginya untuk mengubah kondisi ekonomi orang miskin.

Macam-macam program bantuan pemerintah belum mampu menghilangkan kemiskinan, suatu daerah masih banyak jumlah orang miskin, solusi pemberdayaan masyarakat tersebut wajib terus menerus dilakukan. Tanggung jawab memberdayakan seseorang, tidak hanya pemerintah, setiap orang wajib memberdayakan manusia-manusia lingkungannya.¹⁹¹ Oleh karena itu peran pemerintah

¹⁹⁰Monzer Kahf, “Ayat Dan Hadits Tentang Ekonomi,” 2022, 1–1114.

¹⁹¹Muyassarrah, “Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di

hendaknya mampu bekerja sama dengan masyarakat untuk mewujudkan berbagai bentuk pemberdayaan dan sesuai dengan potensi manusia yang dimiliki, maka akan lahir berbagai kreatifitas dan berbagai macam produk yang dihasilkan dari pemberdayaan masyarakat daerah tersebut.

b. Aspek-aspek dalam pemberdayaan masyarakat dalam Ekonomi Islam

Untuk melepaskan dari belenggu kemelaratan, Islam telah mengajarkan untuk bekerja melalui pemberdayaan yang diminati masing-masing orang. Oleh karena ada tiga aspek yang dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat sebagai jalan keluar dari ketidakmampuan bidang ekonomi, antara lain:

1). Pengembangan

Aspek pengembangan adalah awal mula masyarakat tidak punya keahlian, kemudian melalui pelatihan yang diberikan pemerintah, maka ketidakberdayaan dapat dikembangkan/memulai membangun kemampuan yang dimiliki sesuai dengan budaya daerah, misalnya budaya pertanian, maka pengembangan/pembangunan menjadikan periotas pada bidang pertanian, demikian juga budaya daerah

Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang),” *INFERENSI* 10, no. 2 (December 1, 2016): 539, <https://doi.org/10.18326/infsl3.v10i2.539-558>.

lainnya.¹⁹² Pemberdayaan masyarakat perlu melihat budaya daerah dan potensi yang dimiliki manusia daerah tersebut.

2). Penguatan Potensi

Aspek penguatan potensi merupakan modal dasar pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan masyarakat akan berhasil, jika sesuai dengan potensi dan budaya masyarakat yang akan diberdayakan. masyarakat miskin yang belum berdaya hendaknya didorong dan dibangkitkan semangatnya untuk bekerja keras sesuai dengan bakat minatnya.¹⁹³ Dorongan dan motivasi dari pihak lain, akan menciptakan perilaku optimis dan unggul hasilnya.

Perilaku optimis merupakan modal utama yang wajib dilaksanakan dalam pemberdayaan masyarakat miskin. Aspek penguatan kemampuan, masyarakat juga disadarkan bahwa potensi yang dimiliki sangat bermakna contohnya percaya diri, potensi bekerja dan lain-lain, jika potensi itu diberdayakan melalui kreatifitas dan inovasi dalam bekerja kerasnya. Potensi manusia

¹⁹²M. Ihsan, "Gusjigang; Karakter Kemandirian Masyarakat Kudus Menghadapi Industrialisasi," *Iqtishadia* 10, no. 2 (2018): 153, <https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2862>.

¹⁹³Cihwanul Kirom, "Etos Kerja Dalam Islam," *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 57, <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4697>.

dioptimalkan akan mengubah kondisi masyarakat menjadi berdaya.

3). Kemandirian

Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dihindari dari kemandirian, aspek kemandirian butuh intervensi pemerintah melalui program bantuan sosial. Selain intervensi pemerintah, masyarakat juga ikut mendukung dan meningkatkan kesadaran diri untuk berdaya dalam menghadapi persoalan hidupnya. Pemerintah wajib menganggarkan untuk mewujudkan pemberdayaan.¹⁹⁴ Kemandirian daerah juga perlu mendukung pemberdayaan. Tanpa intervensi dan dukungan masyarakat pemberdayaan tidak bisa diwujudkan.

Kemandirian masyarakat terwujud jika masyarakatnya memanfaatkan potensinya, berpikir, melaksanakan sesuatu yang dianggap tepat untuk memecahkan persoalan hidup dengan memanfaatkan potensinya.¹⁹⁵ Islam mengajarkan pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan merupakan wujud

¹⁹⁴Maulana Mukhlis and Syarief Makhya, “Implikasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemandirian Daerah Pasca Pemekaran (Studi Di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, Dan Mesuji Lampung),” *CosmoGov* 5, no. 2 (2019): 147, <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.22803>.

¹⁹⁵Fahmi Irhamsyah, “Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional,” *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI* 38, no. 2 (2019): 45–54.

implementasi nilai-nilai *ilahiyyah*. Gerakan pemberdayaan bagian dari perubahan untuk lebih maju lagi, karena lewat pemberdayaan masyarakat mengarah ke hidup lebih bagus bisa dikonkretkan.¹⁹⁶ Yaitu pemberdayaana dalam surat ar-Ra'du ayat 11 ayatnya dibawah ini:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Prinsip perubahan bisa dikerjakan setiap manusia kecuali bagi manusia yang tidak mau berusaha, karena Allah tidak akan mengubah kenikmatan, musibah bencana, keagungan, keajaiban dan keburukan, kecuali manusia berkeinginan memperbaiki pikiran, sikap dan realitas hidupnya.¹⁹⁷ Maka Allah tidak mau memperbaiki keadaan seseorang lebah bagus, kalau seseorang itu tidak mau memperbaikinya. Oleh karena itu pemerintah mendorong dan memotivasi agar masyarakat berdaya. Perbaikan kondisi manusia dapat dicapai bagi orang yang berkeinginan dan *mindset* untuk berubah. Kemauan dan

¹⁹⁶Taufik Hidayat B Tahawa, "Relationship Of Regional Financial Ability Levels And Poverty Percentage To Economic Growth Of West Sulawesi Province, 2013 - 2018," *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 3, no. 2 (2021): 139–48.

¹⁹⁷M. Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia Di Bumi* (Tangerang: PT Lentera Hati,2020):54.

mindset akan menciptakan perubahan positif, baik bentuk perbuatan maupun kondisi kehidupan di masyarakat.

Setiap perubahan berhubungan dengan *mindset* seseorang, kesiapan *mindset* demi perubahan merupakan cara mudah setiap manusia untuk melaksanakan perbaikan hidup menjadi mandiri. Kaum tidak melakukan perubahan menjelaskan perubahan sosial bukan perubahan individu, namun perubahan sosial tidak bisa dilakukan seseorang, oleh karena itu pemberdayaan masyarakat dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Kata *qaum* itu diperuntukkan untuk umum/masyarakat sebagai pelaku perbaikan melalui pemberdayaan.¹⁹⁸ Tanpa pemberdayaan tidak akan terjadi perbaikan sosial, sehingga keadaan tetap seperti sediakala. Oleh karena manusialah yang melaksanakan aktifitas sebagai pelaku utama. Perbaikan merupakan kunci agar manusia menjadi berdaya. Aktor pemerintah maupun masyarakat sehebat apapun, jika masyarakatnya motivasi, keinginan dan *mindset* rendah akan sulit tercapai perubahan sosial.

c. Prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi Islam

¹⁹⁸Arifin, "Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia. *Sosio Informa* 6 no. 2, (2020):114-131

Pemberdayaan masyarakat dapat bangkit atas prinsip yang berpedoman ajaran Islam. Manusia merupakan unsur utama dalam melaksanakan pemberdayaan, pemberdayaan masyarakat tidak akan tercapai, jika tanpa disertai keinginan manusianya untuk melaksanakan perbaikan. Ada tiga prinsip pemberdayaan masyarakat dalam ekonomi Islam, antara lain:

1).Prinsip kepedulian

Prinsip ini merupakan bagian dari implementasi prinsip ketauhidan dari nilai-nilai ajaran Islam. Tauhid adalah pedoman inti dalam Islam, tidak hanya pengucapan ikrar ketauhidan, namun perlu ditunjukkan aksinya. Unsur aksi dapat melaksanakan keterbukaan sesama manusia.¹⁹⁹ Manusia berpegang pada prinsip ketauhidan yang diimplementasikan dalam kehidupan sosial akan mencapai pemberdayaan yang baik.²⁰⁰ Di samping itu perlu menolong orang yang tidak punya daya menuju berdaya, sehingga mereka lepas dari jeratan miskin. Kemiskinan itu bisa mengakibatkan pada kekufuran, untuk menjauhi jebakan,

¹⁹⁹Abdul Qadri, “Bencana Dan Tindakan Kepedulian Sosial Dalam Keberagamaan: Studi Komparasi Kitab Suci Al-Qur’an Dan Alkitab,” *Khazanah Theologia* 3, no. 2 (2021): 105–16, <https://doi.org/10.15575/kt.v3i2.11667>.

²⁰⁰Ibnu Affan, “Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,” *DE LEGA LATA: Jurnal Lmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 127–38, [http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata%0AVolume 6 N](http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata%0AVolume%206N).

diperlukan prinsip kepedulian dengan pemberdayaan masyarakat harus dilaksanakan.

Prinsip ketauhidan mengajak semua orang berkomitmen kuat untuk mengimani Allah dan keteladanan Nabi Muhammad Saw. Ketauhidan tidak hanya sekedar ritual ibadah belaka, namun ibadah sosial juga harus dilaksanakan.²⁰¹ Karena bukti riilnya berbuat baik sesamanya melalui kepedulian dan bantuan dalam memberdayakan manusia. Ketauhidan dan perilaku adalah satu kesatuan tidak bisa dipisahkan antara keduanya, sehingga ketauhidan tidak diimbangi perilaku melalui perbuatan baik, iman seseorang akan hampa. Hubungan iman dan perbuatan melahirkan *hablum minnanas* dan *hablum minnallah*.

2).Prinsip keadilan

Konsep keadilan merupakan dekat dengan perilaku ketakwaan terhadap Allah Swt. Prinsip keadilan adalah sasaran pokok dalam bidang sosial sejak dunia ini ada.²⁰² Adil dalam kehidupan berjalan baik, jika diimbangkan

²⁰¹Mahmuda Mulia Muhammad, “Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Eko Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah,” *El-Iqthisadi : Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 68, <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18352>.

²⁰²Hakim and Syaputra, “Al-Qur’an Dan Penanggulangan Kemiskinan.”

dengan implementasi riil dalam kehidupan sehari-hari. Gerakan adil merupakan hukum *sunnatullah* harusnya tidak bergantung pada kondisi manusia, namun karena Allah semata. Menggerakkan keadilan diabaikan akan mengakibatkan bencana bagi masyarakat luas yang mestinya menghabiskan biaya yang lebih besar.²⁰³ Gerakan keadilan dilakukan dengan bagus, sekalipun kondisi masyarakat lemah. Jangan sampai sumber daya melimpah membuat orang lupa memberdayakan masyarakat miskin.

Pembangunan menerapkan keadilan semakin berkualitas manusia melalui pemberdayaan masyarakat, semakin dekat dengan nilai-nilai ketuhanan. Manusia tidak adil, hidup bermewah-mewahan dan membiarkan orang miskin, maka lambat-laun akan mengalami kehancuran.

3).Prinsip Kesamaan

Prinsip kesamaan menganggap bahwa manusia adalah sama baik dihadapi sesama maupun di hadapan Allah. Oleh karena itu jangan merasa bahwa dirinya hebat dan berdaya. Harusnya diimplementasikan dalam pemberdayaan masyarakat untuk orang yang lemah yang ada di sekitarnya. Manusia merupakan makhluk sosial, sehingga

²⁰³Hilafa Putri Rahayu, “Kinerja Pemerintahan Desa Untuk Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Wangun Kecamatan Palang-Tuban,” *Praja Observer, Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3, no. 1 (2023): 38–45.

manusia tidak bisa hidup sendiri, pasti membutuhkan bantuan orang lain.

Prinsip kesamaan adalah bagian dari peri kemanusiaan, sehingga sesama manusia tidak boleh saling bermusuhan, namun hendaknya saling mendukung dan membantu antara satu dengan yang lain agar menghasilkan perubahan masyarakat yang lebih baik lagi.²⁰⁴ Pemberdayaan tidak hanya dalam arti sempit, namun perlu pemberdayaan di seluruh dunia, hal ini akan terjadi ketimpangan di tengah-tengah masyarakat, maka harus diatasi dengan cara pemberdayaan tidak hanya wilayah perkotaan terus, tapi pemberdayaan di desa perlu ditingkatkan, sehingga pembangunan ekonomi dimulai dari belakang artinya wilayah pedesaan itu bagian dari pemberdayaan masyarakat juga.

Tujuan pemberdayaan masyarakat dalam Islam adalah menghasilkan kesejahteraan dibidang ekonomi.²⁰⁵ Kesejahteraan adalah cita-cita dan handalan bagi semua manusia. Menurut Hendri Anto bahwa sejahtera yang

²⁰⁴Fadli Syahdiyono, "Sistem Demokrasi Indonesia Menurut Prespektif Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 1–20.

²⁰⁵Saharuddin and Syarifuddin, "Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dengan Kualitas Pendamping Dan Kualitas Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Makassar," *Jurnal Sosial Sains* 2, no.7,(2022): 832-842.

holistic dan seimbang²⁰⁶. Jika tindakan yang menghasilkan kesejahteraan bertentangan dengan perikemanusiaan, hal tersebut bertentangan dengan ajaran Islam.²⁰⁷ Islam berharap semua manusia sejahtera, karena sejahtera lahir dari kemaslahatan. Mencapai kemaslahatan harus mendapatkan kebebasan secara ekonomi dengan melalui kerja keras dan membangkitkan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat akan terwujud, jika adanya kesadaran sosial dan pemerintah daerah tersebut. Bertambahnya masyarakat peduli sesama manusia, maka makin banyak pemberdayaan masyarakat.²⁰⁸ Kesejahteraan sejati, jika terpenuhi material dan spiritual supaya hidup bahagia dan bisa mengembangkan diri. Oleh karena itu pemerintah memberikan pelayanan yang melingkupi pendidikan, kesehatan dan jaminan sosial. Pemberdayaan masyarakat harusnya dimulai sedini mungkin melalui keluarga yang kuat dan kesadaran tinggi, karena keluarga

²⁰⁶Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomika Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia, 2003), <https://www.coursehero.com/file/p7apo87/Anto-M-B-Hendrie-2003-Pengantar-Ekonomika-Mikro-Islami-Yogyakarta-Ekonisia/>.

²⁰⁷Hakim and Syaputra, "Al-Qur'an Dan Penanggulangan Kemiskinan, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6 no,3, (2020):629.

²⁰⁸Abdul Rauf Alauddin Said, "Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - Luasnya Menurut UUD 1945," *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015): 505–30, <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>.

lemah secara ekonomi dan motivasi lemah, akan berdampak anak turun yang lemah juga.

Islam berpesan agar jangan sampai meninggalkan anak turun lemah, khawatir anak turunnya tidak sejahtera. Oleh karena itu keluarga dipersiapkan anak turun berdaya dan kuat agar terlahir keturunan yang kuat dan sejahtera. Tujuan manusia beraktifitas bidang ekonomi yakni ingin terpenuhi hidupnya sejahtera untuk diri sendiri dan semua anggota keluarga serta menolong orang lain yang butuh.

F. Teori Otonomi daerah

1. Sejarah Dinamika Otonomi Daerah

Otonomi Daerah menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia* otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Otonomi daerah mengalami banyak perkembangan dari zaman ke zaman.²⁰⁹ Dalam kurun waktu kurang lebih dua puluh enam tahun terakhir, yaitu sejak diberlakukannya UUD No. 22 Tahun 1999 sampai dengan UU No. 23 Tahun 2014, implementasi otonomi daerah mengalami berbagai permasalahan sehingga perlu adanya perbaikan di

²⁰⁹Martino Maggetti and Philipp Trein, "Multilevel Governance and Problem-Solving: Towards a Dynamic Theory of Multilevel Policy-Making?," *Public Administration* 97, no. 2 (2019): 355–69, <https://doi.org/10.1111/padm.12573>.

masa mendatang. Berikut adalah dinamika otonomi daerah di Indonesia:

a. Era Hindia Belanda

Regering Reglement (RR)1854 merupakan undang-undang yang dikeluarkan oleh pemerintah Belanda untuk Indonesia, di mana setiap daerah di Indonesia ditempatkan beberapa pegawai yang tidak sebanding dengan luas daerah di Indonesia (kurangnya SDA). Hal ini menyebabkan terjadinya penyimpangan dan dikeluarkanlah *Desentralisatiewent* 1903 (STB.1903/329), terdapat pembentukan *Gewest* (kedudukan keuangan untuk membiayai kegiatannya sendiri),²¹⁰ terdapat perwakilan rakyat (DPRD) dengan pusat pemerintahan di Kota Bogor, Jawa Barat.

Desentralisatiewent 1922, dilaksanakan karena kegagalan STB 1903 (sedikit kewenangan pada masa itu). Dibentuknya pemerintahan baru yang mengikutsertakan masyarakat pribumi di bawah Gubernur Jendral Hindia Belanda, membentuk daerah otonom baru diluar Jawa-Madura (Sumatera, Celebes / Sulawesi, dan Borneo).

b. Era Jepang.

²¹⁰Azwandi et al., "The Effect of Financial Performance on the Human Development Index Moderated Economic Growth in Regency/City in the Province of Riau Island," *International Journal of Educational Review* 2, no. 5 (2022): 633–50.

Pembagian daerah di masa Jepang lebih terperinci yaitu menjadi tiga wilayah kekuasaan:

- 1). Sumatera dengan kendali AD XXV berkedudukan di Bukittinggi.
- 2). Jawa dan Madura dengan kendali AD XVI berkedudukan di Jakarta
- 3). Daerah lain dengan kendali AL berkedudukan di Makasar.

Pada era Jepang sudah terbentuk sistem administrasi yang cukup lengkap dan terstruktur daripada era Belanda, Struktur administrasi pada era Jepang:

- 1). Panglima bala tentara Jepang
- 2). Pejabat militer Jepang
- 3). Residen
- 4). Bupati
- 5). Wedana
- 6). Asisten Wedana
- 7). lurah/kepala desa
- 8). Kepala dusun, kepala dusun, RT/RW dan kepala rumah tangga.

c. Era Orde Lama.

Pemerintah mengeluarkan Penetapan Presiden (Perpres) No 6 Tahun 1959 dan Perpres Tahun 1960 yang mengatur tentang pemerintahan daerah, yaitu :

- a. Kotaraya
- b. Kotamadya
- c. Kotapraja

d. Era Orde Baru.

- 1). Terdapat dua tingkat daerah otonom, Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II.

2). Dikenal tiga jenis pengawasan antara lain, pengawasan preventif, represif dan umum.

e. Era Reformasi

1). UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah

2). UU No 25 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Adanya otonomi pada era reformasi inilah yang menjadi jawaban dari persoalan-persoalan otonomi daerah pada era sebelumnya, seperti menjawab masalah desentralisasi politik, administratif dan ekonomi. Terdapat revisi atau perubahan pada UU No 22 Tahun 1999 yang dikenal dengan UU No 32 Tahun 2004. Lalu, untuk mengatur keuangan di daerah pemerintah juga mengeluarkan UU No 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Akan tetapi otonomi daerah diperbarui lagi atau digantikan dengan UU No 23 Tahun 2014 dan dilakukan beberapa kali perubahan, yaitu: Perubahan pertama UU Nomor 2 Tahun 2015 (2 Februari 2015). Perubahan kedua UU Nomor 9 Tahun 2015 (18 Maret 2015). Perubahan ketiga UU Nomor 11 Tahun 2020 (2 November 2020) dan UU Nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

2. Dampak Otonomi Daerah

Pelaksanaan Otonomi Daerah di Indonesia, di mana dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah harus sesuai amanat Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan pemerintah daerah. Pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembangunan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya Otonomi daerah tidak mungkin terlepas dari dampak positif dan negatif. Berikut beberapa dampaknya bagi pemerintah dan masyarakat:²¹¹

a. Dampak Positif: Lebih mudah dalam mengembangkan kebudayaan. Menjadikan perekonomian lebih meningkat. Dari segi waktu dan biaya, pembangunan daerah menjadi lebih efisien. Dalam pengelolaan SDA dapat lebih maksimal. Terdapat desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah. Meningkatnya tingkat pelayanan dan kesejahteraan pada masyarakat. Adanya kewenangan kebijakan daerah sesuai kondisi wilayahnya.

²¹¹Bustani Bustani, Muammar Khaddafi, and Rico Nur Ilham, "Regional Financial Management System of Regency/City Regional Original Income In Aceh Province Period Year 2016-2020," *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 2, no. 3 (2022): 459–68, <http://radjapublika.com/index.php/IJERLAS/article/view/277>.

- b. Dampak negatif: Lambatnya perkembangan daerah yang miskin. Pada daerah tingkat satu tidak ada koordinasi. Memungkinkan terjadinya kesenjangan sosial, dikarenakan adanya kewenangan yang diberikan pemerintah pusat yang tidak sesuai tempatnya. Melupakan tanggung jawabnya dikarenakan merasa melakukan kegiatannya sendiri

3. Prinsip-Prinsip Otonomi Daerah.

a. Prinsip Otonomi Luas.

Otonomi luas ini adalah kekuasaan daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan di bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter, dan fiskal, agama, serta kewenangan bidang lainnya yang akan ditetapkan dengan peraturan pemerintah.²¹² Di samping itu keleluasaan otonomi mencakup pula kewenangan yang utuh dan bulat dalam penyelenggaraannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

b. Prinsip Otonomi Nyata

Yang dimaksud prinsip otonomi nyata adalah tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan

²¹²Roy Marthen Moonti, "Regional Autonomy in Realizing Good Governance," *Substantive Justice International Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 43, <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.31>.

pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing.²¹³ Bisa diartikan keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintahan di bidang tertentu yang secara nyata ada dan diperlukan serta tumbuh, hidup, dan berkembang di daerah.

c. Prinsip Otonomi Bertanggung Jawab.

Yang dimaksud dengan prinsip otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Hal ini berupa perwujudan pertanggungjawaban sebagai konsekuensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan kewajiban yang harus dipikul oleh daerah dalam mencapai tujuan pemberian otonomi, berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan, dan pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

²¹³Danur Condro Guritno, Bhimo Rizky Samudro, and Albertus Maqnu Soesilo, "The Paradox of Political Dynasties of Regeneration Type and Poverty in Regional Autonomy Era," *International Journal of Ethics and Systems* 35, no. 2 (2019): 179–94, <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2018-0069>.

serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

4. Strategi *Good Governance*

Good Governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *political framework* bagi tumbuhnya aktifitas usaha.²¹⁴ *Good Governance* pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama. Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara.

Berikut ini adalah 10 konsep Strategi *Good Governance* menurut Dyah Tribuwana et al.,:²¹⁵

²¹⁴Nguyen Ba Chien and Nguyen Nghi Thanh, "The Impact of Good Governance on the People's Satisfaction with Public Administrative Services in Vietnam," *Administrative Sciences* 12, no. 1 (2022), <https://doi.org/10.3390/admsci12010035>.

²¹⁵Dyah Tribuwana et al., "Implementation of Good Governance in the Defense Sector To Improve the Quality of Human Capital of Indonesia Government," *International Journal of Arts and Social Science* 5, no. 7 (2022): 28–34.

- a. *Catalytic Government: Steering rather than rowing.* Aparatur dan birokrasi berperan sebagai katalisator, yang tidak harus melaksanakan sendiri pembangunan tapi cukup mengendalikan sumber-sumber yang ada di masyarakat. Dengan demikian aparatur dan birokrasi harus mampu mengoptimalkan penggunaan dana dan daya sesuai dengan kepentingan publik.
- b. *Community-owned government: empower communities to solve their own problems, rather than merely deliver service.* Aparatur dan birokrasi harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian dalam pelayanannya. Organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti koperasi, LSM, dan sebagainya, perlu di ajak untuk memecahkan permasalahannya sendiri, seperti masalah keamanan, kebersihan, kebutuhan sekolah, permukiman murah dan lain-lain.
- c. *Competitive government: promote and encourage competition, rather than monopolies*". Aparatur dan birokrasi harus memberdayakan masyarakat dalam pemberian dan juga dalam pelayanannya. Organisasi-organisasi kemasyarakatan seperti koperasi, LSM dan sebagainya, perlu diajak untuk memecahkan permasalahannya sendiri, seperti masalah keamanan,

kebersihan, kebutuhan sekolah, pemukiman murah, dan lain-lain.

- d. *Mission-driven government: be driven by mission rather than rules*". Aparatur dan birokrasi harus melakukan aktivitas yang menekankan kepada pencapaian-pencapaian yang merupakan "misinya" dari pada menekankan pada peraturan-peraturan. Setiap organisasi diberi kelonggaran untuk menghasilkan sesuatu sesuai dengan misinya.
- e. *Result-oriented government: result oriented by funding outcomes rather than inputs*. Aparatur dan birokрасinya hendak berorientasi kepada kinerja yang baik. Instansi yang demikian harus di beri kesempatan yang lebih besar di banding instansi yang kinerjanya kurang.
- f. *Customer-driver government: meet the needs of the customer rather than the bureaucracy*. Aparatur dan birokrasi harus mengutamakan pemenuhan kebutuhan masyarakat bukan kebutuhan dirinya sendiri.
- g. *Enterprising government: concentrate on earning money rather than just spending it*. Aparatur birokrasi harus memiliki aparat yang tahu cara yang tepat dengan menghasilkan uang untuk organisasinya, di samping pandai menghemat biaya. Dengan demikian para pegawai akan terbiasa hidup hemat.

- h. *Anticipatory government: invest in preventing problems rather than curing crises.* Aparatur dan birokrasi yang antisipatif, lebih baik mencegah daripada memadamkan kebakaran. Lebih baik mencegah epidemi daripada mengobati penyakit. Dengan demikian akan terjadi “*mental swich*” dalam aparat daerah.
- i. *Decentralilazed government: decentralized authority rather than build hierarchy.* Diperlukan desentralisasi dalam pengelolaan pemerintahan, dari berorientasi hirarki menjadi partisipatif dengan pengembangan kerja sama tim. Dengan demikian organisasi bawahan akan lebih leluasa untuk berkreasi dan mengambil inisiatif yang diperlukan.
- j. *Market-oriented government: solve problem by influencing market forces rather than by treating public programs.* Aparatur dan birokrasi harus memperhatikan kekuatan pasar. Pasokan didasarkan pada kebutuhan atau permintaan pasar dan bukan sebaliknya. Untuk itu kebijakan harus berdasarkan pada kebutuhan pasar. Agar lembaga pemerintah lebih mampu melaksanakan fungsi pemerintahan yang baik (*good governance*), perlu diciptakan suatu sistem birokrasi dengan ciri-ciri sebagai berikut:²¹⁶

²¹⁶Ayesha Masood and Muhammad Azfar Nisar, “Repairing the State: Policy Repair in the Frontline Bureaucracy,” *Public Administration Review* 82, no. 2 (2022): 256–68, <https://doi.org/10.1111/puar.13414>.

- a. Memiliki struktur yang sederhana, dengan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi melaksanakan tugas-tugas pemerintahan (pengembangan kebijakan dan pelayanan) secara arif, efisien, dan efektif.
- b. Mengembangkan hubungan kemitraan (*partnership*) antara pemerintah dan setiap unsur dalam masyarakat yang bersangkutan (tidak sekedar kemitraan internal di antara sesama jajaran instansi pemerintahan saja).
- c. Memahami dan komit akan manfaat dan arti pentingnya tanggung jawab bersama dan kerja sama dalam suatu keterpaduan serta sinergisme dalam pencapaian tujuan.
- d. Adanya dukungan dan sistem imbalan yang memadai untuk mendorong terciptanya motivasi, kemampuan dan keberanian menanggung resiko (*risk taking*) berinisiatif, partisipatif, yang telah diperhitungkan secara realistic dan rasional.
- e. Adanya kepatuhan dan ketaatan terhadap nilai-nilai internal (kode etik administrasi publik, juga terhadap nilai-nilai etika dan moralitas yang diakui dengan junjungan tinggi secara sama dengan masyarakat yang dilayani).

5. Desentralisasi fiskal

Desentralisasi merupakan sebuah instrumen untuk mencapai salah satu tujuan bernegara, yaitu terutama memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan menciptakan

proses pengambilan keputusan publik yang lebih demokratis. Desentralisasi akan diwujudkan dengan memberikan kewenangan kepada tingkat pemerintahan yang lebih rendah untuk melakukan pembelanjaan, kewenangan untuk memungut pajak (*taxing power*), terbentuknya dewan yang dipilih oleh rakyat, kepala daerah yang dipilih oleh rakyat, dan adanya bantuan dalam bentuk transfer dari pemerintah pusat.²¹⁷

Salah satu wujud pelaksanaan otonomi daerah adalah dengan adanya otonomi dalam aspek pengelolaan keuangan daerah yang disebut otonomi fiskal atau desentralisasi fiskal. Menurut Irena, desentralisasi fiskal adalah pendelegasian tanggung jawab dan pembagian kekuasaan dan kewenangan untuk pengambilan keputusan di bidang fiskal yang meliputi aspek penerimaan (*tax assignment*) maupun aspek pengeluaran (*expenditure assignment*).²¹⁸ Desentralisasi fiskal ini dikaitkan dengan tugas dan fungsi pemerintah daerah dalam penyediaan barang dan jasa publik (*public goods / public service*).

Dengan kata lain, desentralisasi fiskal dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih

²¹⁷Andi Matala, "Reviewing the Performance Of Local Governments In Managing Corporate Social Responsibility Program" 2, no. 2 (2022): 55–63.

²¹⁸Irena Szarowská, "Does Fiscal Decentralization Matter for Economic Development? Case of the Czechia," *Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics* 2022 (2022): 1–11, <https://doi.org/10.5171/2022.856279>.

rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan dan pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintah yang dilimpahkan.²¹⁹ Desentralisasi fiskal memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola keuangan daerahnya. Daerah diberikan kewenangan dalam menggali sumber-sumber penerimaan sesuai dengan potensi yang dimiliki. Prinsip dari desentralisasi fiskal tersebut adalah *money follow functions*, di mana pemerintah daerah mendapat kewenangan dalam melaksanakan fungsi pelayanan dan pembangunan di daerahnya.

Pemerintah pusat memberikan dukungan dengan menyerahkan sumber-sumber penerimaan kepada daerah untuk dikelola secara optimal agar mampu membiayai daerahnya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pemerintah pusat juga memberikan dana transfer yang dapat dikelola daerah dalam pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tujuannya adalah untuk mengatasi ketimpangan fiskal dengan pemerintah pusat dan antar pemerintah daerah lainnya. Untuk meminimilaisir ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat melalui dana transfer tersebut, daerah dituntut

²¹⁹Yongming Zhu et al., “Technological Innovation, Fiscal Decentralization, Green Development Efficiency: Based on Spatial Effect and Moderating Effect,” *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 7 (2022), <https://doi.org/10.3390/su14074316>.

dapat mengoptimalkan kemampuannya dalam menggali potensi pendapatannya.

Pemerintah pada hakekatnya mengemban tiga fungsi utama, antara lain fungsi alokasi, distribusi dan stabilisasi.²²⁰ 1. Fungsi alokasi adalah peran pemerintah dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi agar tercipta secara efisien, yaitu peran pemerintah dalam menyediakan barang yang tidak bisa disediakan oleh pasar. 2. Fungsi distribusi adalah peran pemerintah dalam mempengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan untuk menjamin adanya keadilan dalam mengatur distribusi pendapatan. 3. Fungsi stabilisasi merujuk pada tindakan pemerintah dalam mempengaruhi keseluruhan tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi dan harga. Dalam hal ini pemerintah menggunakan kebijakan anggaran untuk mengurangi pengangguran, kestabilan harga dan tingkat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Pelaksanaan desentralisasi fiskal menurut Halim akan berjalan dengan baik dengan berpedoman pada hal-hal sebagai berikut: 1) Adanya Pemerintah Pusat yang kapabel dalam melakukan pengawasan dan *enforcement*. 2) Terdapat keseimbangan antara akuntabilitas dan kewenangan dalam

²²⁰Nur Azizah, Hendra Kusuma, and Zainal Arifin, "Economics Development Analysis Journal Does Fiscal Decentralization Increase the Economic Growth in Sulawesi Island? Article Information," *Economics Development Analysis Journal*, no. 1 (2022), <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>.

melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah. 3) Stabilitas politik yang kondusif. 4) Proses pengambilan keputusan di daerah harus demokratis, di mana pengambilan keputusan tentang manfaat dan biaya harus transparan serta pihak-pihak yang terkait memiliki kesempatan mempengaruhi keputusan-keputusan tersebut. 5) Desain kebijakan keputusan yang diambil sepenuhnya merupakan tanggung jawab masyarakat setempat dengan dukungan institusi dan kapasitas manajerial yang diinginkan sesuai dengan permintaan pemerintah. 6) Kualitas sumberdaya manusia yang kapabel dalam menggantikan peran sebelumnya yang merupakan peran pemerintah pusat. Pelaksanaan desentralisasi ada tekanan politik dalam pemerintah daerah, antara lain:²²¹

a. Tekanan Politik Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal Dan Kaitannya Dengan Pelayanan Publik

Stabilitas ekonomi makro tidak hanya terpengaruh oleh tingkat desentralisasi namun juga tahapan pelaksanaan desentralisasi. Pola tahapan desentralisasi pada umumnya lebih banyak dipengaruhi oleh faktor politik dan kelembagaan daripada ekonomi. Pada banyak negara, desentralisasi kewenangan pengeluaran lebih dulu

²²¹Peng Tang et al., "Can the Performance Evaluation Change from Central Government Suppress Illegal Land Use in Local Governments? A New Interpretation of Chinese Decentralisation," *Land Use Policy* 108, no. May (2021): 105578, <https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105578>.

dilaksanakan untuk mengakomodasi tekanan politik dan perlunya efisiensi. Pada beberapa negara yang sedang melakukan transisi ke perekonomian pasar (seperti negara-negara Eropa Timur) dan sedang mengalami kesulitan keuangan, pemerintah pusat umumnya mudah melimpahkan kewenangan pengeluaran tanpa kewenangan pendapatan yang mencukupi. Sebaliknya pada beberapa negara Amerika Latin, pengalihan anggaran pendapatan pemerintah pusat ke Pemda dilaksanakan seperti yang telah ditetapkan dalam undang-undang, sebelum kewenangan pengeluaran Pemda dirumuskan dengan jelas. Pola-pola tersebut tidak mendorong terjadinya disiplin anggaran.

Ketidakseimbangan vertikal yang condong pada pemerintah pusat cenderung meningkatkan transfer pusat ke daerah, atau menutup defisit dan akumulasi hutang beberapa waktu kemudian. Namun bila ketidakseimbangan itu condong pada Pemda, maka cenderung mendorong pengeluaran yang berlebihan untuk fungsi yang menjadi bebannya, seperti kenaikan gaji yang berlebihan. Hal ini akan menyulitkan Pemda mengatur kembali anggarannya jika kemudian diberikan tambahan fungsi.²²² Hubungan

²²²Cinzia Di Novi et al., “Does Fiscal Decentralization Affect Regional Disparities in Health? Quasi-Experimental Evidence from Italy,” *Regional Science and Urban Economics* 78, no. July (2019): 103465, <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2019.103465>.

fiskal antar tingkat pemerintahan hendaknya memperhitungkan kenyataan bahwa peningkatan desentralisasi kewenangan pengeluaran, dapat berjalan dengan baik karena pertimbangan efisiensi maupun politik. Peraturan daerah tentang APBD sebagai produk dari proses politik anggaran pun juga sebagai pengejawantahan adanya desentralisasi fiskal di daerah. Pada dasarnya merupakan rencana aksi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan harapan publik. Namun demikian, kepentingan publik sebagai sasaran anggaran seringkali justru terdistorsi oleh kebenaran yang didasarkan atas kepentingan pragmatis penguasa, di sisi lain publik cenderung menyerahkan keputusan anggaran kepada pemegang kekuasaan (eksekutif dan legislatif).

Ruang partisipasi publik dalam proses penganggaran juga tidak berjalan efektif, dan hanya dijalankan secara formalistik sekedar memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Studi sebelumnya yang dilakukan Mohamed abdukkadir ²²³ menjelaskan bahwa proses perencanaan, pemrograman dan penganggaran di Amerika Serikat, lebih banyak digunakan sebagai strategi politik

²²³Mohamed Addulkadir Ali, "The Effect Of Budgeting Process On Organizational Performance In Selected Firms In Mogadishu Somalia," *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal* 8, no. 2 (2022): 198–210, <https://doi.org/10.36713/epra2013>.

untuk mengontrol dan mengarahkan kontroversi, bukan sebagai alat untuk memperbaiki akuntabilitas atau pengambilan keputusan. Desentralisasi fiskal dianggap sebagai alat untuk mendekatkan pengembalian kebijakan penyediaan barang publik agar lebih efisien dan sesuai dengan permintaan masyarakat diharapkan mampu membuka akses barang publik. Di Indonesia desentralisasi fiskal tercermin dalam kebijakan pendapatan asli daerah dan pengeluaran pemerintah yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Perubahan sistem keuangan yang dilakukan oleh pemerintah diharapkan mampu memberikan manfaat di berbagai sektor, seperti sektor publik, kesehatan, pendidikan, dan keamanan. Manfaatnya antara lain:²²⁴ *Pertama*, mendorong peningkatan partisipasi, prakarsa dan kreativitas masyarakat dalam pembangunan, serta mendorong perataan hasil-hasil pembangunan (keadilan) di seluruh daerah dengan memanfaatkan sumber daya dan potensi yang tersedia di masing-masing daerah. *Kedua*, memperbaiki alokasi sumber daya produktif melalui pergeseran peran pengembalian keputusan publik tingkat

²²⁴Rima Melati Anggraeni, Moh Khusaini, and Ferry Prasetyia, "Fiscal Decentralization and Per Capita Income Convergence between Regencies / Municipalities in Java Island," *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* 5, no. 4 (2022): 1–11.

pemerintah yang paling rendah yang memiliki informasi yang paling lengkap. (Shah, 1997 dalam Mardiasmo, 2002). Desentralisasi fiskal mempunyai permasalahan dalam pelaksanaan yang dilakukan pemda. Saat ini, pelaksanaan desentralisasi fiskal belum banyak atau tidak berdampak langsung kepada masyarakat baik yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi, dan pelayanan publik. Hal ini disebabkan masyarakat lokal tidak mempunyai pengaruh dan kendali terhadap kebijakan fiskal daerah.

Pada sisi lain, wakil rakyat yang duduk di parlemen yang notabene adalah wakil masyarakat yang sebetulnya bisa mengendalikan atau melakukan kontrol terhadap kebijakan fiskal pemda, rupanya tidak memperjuangkan kebijakan fiskal untuk kepentingan masyarakat, tetapi hanya memperjuangkan aspirasi pribadi, pengusaha, dan kepentingan partai politik saja. Pelaksanaan musrenbang dalam proses perencanaan pembangunan daerah, cenderung dilakukan hanya untuk memenuhi proses formal yang didasarkan pada regulasi, bahkan terkesan sekedar proses ritual yang seolah-olah keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan benar-benar telah terjadi. Kondisi seperti ini tentunya berdampak pada proses penganggaran pemerintah yang cenderung *status quo*, tidak responsif terhadap keinginan atau harapan masyarakat yang

dinamis, sejalan dengan dinamika yang terjadi di lingkungan masyarakat.

Penganggaran partisipatif dan diskursus *good governance* yang menjadi slogan pemerintah di era reformasi, mestinya menempatkan masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan, tetapi juga menjadikan mereka sebagai subyek pembangunan.²²⁵ Celakanya kedudukan legislatif dan adanya stabilitas politik yang tidak menentu sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah dan sekaligus sebagai wakil masyarakat dalam struktur kekuasaan, tidak menganggap ini sebagai persoalan penting yang seharusnya mereka dorong, supaya mekanisme musrenbang lebih efektif. Akibatnya, kebijakan fiskal ini hanya menguntungkan segelintir orang saja, dan pelayanan terhadap publik juga tidak pernah meningkat. Hal ini bisa dijadikan contoh seperti jika melihat anggaran desentralisasi dari pemerinah pusat ke pemda, baik itu berupa DAK (Dana Alokasi Khusus), Bansos (bantuan Sosial), dan anggaran lain-lain, hanya dinikmati oleh para elit lokal saja seperti eksekutif, dan legislatif. Sedangkan untuk masyarakat lokal belum menikmati manfaatnya.

²²⁵Pauliina Lehtonen, "Policy on the Move: The Enabling Settings of Participation in Participatory Budgeting," *Policy Studies* 43, no. 5 (2022): 1036–54, <https://doi.org/10.1080/01442872.2021.1895981>.

Dengan demikian, masih belum maksimal pelayanan pemda kepada masyarakat, disebabkan masih banyak kendala penerapan fiskal di pemerintah daerah seperti kurangnya kompetensi pimpinan daerah, politisi, dan aparatur daerah dalam menerapkan instrumen pendapatan daerah. Selain itu, pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah juga masih sangat lemah, hal ini bisa dilihat dari penerapan perda tentang pajak dan retribusi daerah yang kurang efektif.

Belum lagi persoalan-persoalan lain seperti negara-negara yang menerapkan desentralisasi selalu didera kasus-kasus korupsi, seperti China dan Indonesia.²²⁶ Di Indonesia, korupsi sudah menjalar ke daerah-daerah otonom akibat dari desentralisasi. Dan banyaknya kasus korupsi di daerah otonom menyebabkan kurang perhatian pemerintah daerah kepada pelayanan yang baik dan bermutu untuk upaya meningkatkan kesejahteraan” masyarakat.

b. Eksternalitas Negatif Desentralisasi Fiskal dalam Penerapannya

Desentralisasi fiskal tidak dapat dipisahkan dengan konsep desentralisasi secara umum yang di dalamnya

²²⁶Ade Paranata, “The Miracle of Anti-Corruption Efforts and Regional Fiscal Independence in Plugging Budget Leakage: Evidence from Western and Eastern Indonesia,” *Heliyon* 8, no. 10 (2022): e11153, <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11153>.

menyangkut masalah administratif dan politis. Desentralisasi politik merupakan tonggak terwujudnya demokratisasi dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Sementara desentralisasi administrasi merupakan instrumen untuk menjalankan pelayanan kepada masyarakat, dan desentralisasi fiskal memiliki fungsi untuk mewujudkan pelaksanaan desentralisasi politik dan administrasi melalui pelimpahan kewenangan di bidang fiskal.²²⁷ Secara prinsipil ketiga jenis desentralisasi tersebut semua menekankan pelimpahan pelimpahan kewenangan ke pemerintah daerah, diikuti oleh pembiayaan dari pemerintah pusat.

Maka dari itu desentralisasi dapat dimaknai sebagai gambaran sejauh mana kewenangan dipegang oleh pemerintah daerah untuk mampu mengambil keputusan sendiri yang mengikat beberapa kebijakan pada ruang lingkup pemerintahan daerah.²²⁸ Mencermati ketiga jenis desentralisasi penjabarannya cukup luas, maka uraian selanjutnya lebih fokus mengkaji masalah

²²⁷Nur Farida, "Fiscal Decentralization, Economic Growth and Regional Development Inequality in Eastern Indonesia," *Journal of Indonesian Applied Economics* 9, no. 2 (2021): 1–9, <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2021.009.02.1>.

²²⁸Deepak Chaudhary, "The Decentralization, Devolution and Local Governance Practices in Nepal: The Emerging Challenges and Concerns," *Journal of Political Science* 19 (2019): 43–64, <https://doi.org/10.3126/jps.v19i0.26698>.

desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah, serta antar daerah lainnya, serta perbaikan pelayanan publik, efisiensi pemanfaatan sumber daya, di samping itu untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam tataran lebih aplikatif, desentralisasi fiskal sebagai pelimpahan kewenangan pengelolaan potensi ekonomi dan sumber daya lainnya di daerah, namun tetap diikutkan transfer dari pemerintah pusat. Besarnya transfer dana ke daerah dan kemungkinan peningkatan penerimaan diharapkan memiliki korelasi yang kuat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi karena pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memprioritaskan kegiatan yang lebih tepat sasaran, intervensi dari pemerintah di tingkat atas relatif minim, sehingga daerah lebih mandiri mengambil keputusan.

Dari ketiga jenis desentralisasi tersebut, yang dianggap ideal yakni devolusi di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih luas baik secara administratif, politik maupun kewenangan di bidang ekonomi untuk menggali potensi yang dimiliki oleh

daerah.²²⁹ Pelaksanaan desentralisasi tanpa diberikan kewenangan yang besar kepada pemerintah daerah, maka tujuan dari pelaksanaan desentralisasi itu sendiri sulit tercapai. Oleh sebab itu dalam pelaksanaan desentralisasi diperlukan kewenangan, terutama untuk mengembangkan potensi ekonomi.

Sampai saat ini masih saja muncul persoalan yang menyangkut desentralisasi fiskal dan pola perimbangan pusat-daerah. Isunya masih sama dengan sebelumnya, dengan berbagai alasan dan pertimbangan, pola pertimbangan keuangan pusat daerah yang diterapkan saat ini masih belum bisa diterima semua pihak, sehingga perlu terus dilakukan evaluasi dan penyempurnaannya dari waktu ke waktu.

Banyak pihak yang melihat bahwa pola hubungan keuangan pusat dan daerah yang hingga saat ini belum bagus terutama terletak dalam penerapan kebijakannya. Namun demikian, pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah di Indonesia terasa semakin jauh dari apa yang dicita-citakan sebagaimana penjabaran idealitas di atas.

²²⁹Rainer Rohdewohld Bruno Carrasco, Hanif A Rahemtulla, *Decentralization Local Governance and Localizing the Sustainable Development Goals in Asia And The Pacific, Decentralization, Local Governance, and Localizing the Sustainable Development Goals in Asia and the Pacific*, 2022, <https://doi.org/10.4324/9781003282297-10>.

Daerah justru semakin bergantung kepada pemerintah pusat, munculnya praktek dinasti penguasa di daerah serta maraknya perilaku korupsi para pejabat publik. Idiom yang muncul kemudian desentralisasi fiskal dan otonomi daerah tak lain hanya memindahkan eksternalitas negatif dari pemerintah pusat di era Orde Baru menuju pemerintah daerah (Pemda) di era reformasi ini.²³⁰ Korupsi di Indonesia menjadi permasalahan bangsa yang telah mengakar dari lapisan paling bawah struktur pemerintahan hingga pada level yang tertinggi. APBN dan APBD di Indonesia masih dinilai kurang pengawasan dalam pelaksanaannya, sehingga menimbulkan anggaran tidak efisien. Selama ini anggaran publik selalu mengalami kebocoran baik dari segi penerimaan maupun pengeluaran. Secara harfiah, korupsi berarti kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.

Di Indonesia melalui penelitian Lukman Iqbal, et. al. mengindikasikan bahwa desentralisasi fiskal membawa implikasi pada terjadinya pergeseran relasi kekuasaan pusat-daerah dan antar lembaga di daerah.²³¹ Berbagai perubahan

²³⁰Hiromi Masuda et al., "Exploring the Role of Local Governments as Intermediaries to Facilitate Partnerships for the Sustainable Development Goals," *Sustainable Cities and Society* 82, no. September 2021 (2022): 103883, <https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.103883>.

²³¹Lukman Iqbal Hanafi Arief Maulana, Chumanidya Utami, "The Progress Of Regional Autonomy Policy And Development

membuka peluang maraknya *'money politics'* oleh kepala daerah untuk memperoleh dan mempertahankan dukungan dari legislatif, pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan oleh anggota legislatif sebagai setoran bagi partai politik serta yang paling umum, adalah keinginan untuk memperkaya diri sendiri.

6. Otonomi Daerah Dalam Ekonomi Islam

Pembentukan Daerah Otonomi bisa menjadi solusi peningkatan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan di suatu daerah. Pemberian otonomi kepada daerah memberikan ruang yang luas bagi daerah untuk menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki sebagai upaya meningkatkan pelayanan publik. Dinamika yang berkembang dimasyarakat dari tahun ke tahun selalu mengharapkan adanya peningkatan pelayanan publik, potensi ekonomi, sosial budaya, pariwisata mau pun sumber daya alam. Pada tataran implementasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dibutuhkan komitmen pemerintah daerah dalam upaya jalinan kerja sama daerah. Salah satu tujuan pembentukan daerah otonomi baru adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah dengan mengedepankan kepentingan masyarakat untuk memperoleh

Attainments:Indonesia's Experiences (1999-2021)," *Jurnal Ilmu Administrasi* 19, no. 1 (2022): 95–111.

kesejahteraan yang layak setara dengan daerah-daerah dengan pendapatan yang tinggi.

Islam memberi peluang kepada masyarakat untuk berubah, maju dan dinamis. Namun kemajuan dan kedinamisannya harus tetap dalam batas-batas prinsip Al-Quran. Prinsip umum itu adalah Tauhidullah (keyakinan kepada Allah SWT), persaudaraan, persatuan dan keadilan⁷. Dari kaidah fiqih di atas tersebut mengisyaratkan bahwa pemerintah sebagai pemangku kebijakan seharusnya memperhatikan aspek kemaslahatan semua pihak, khususnya daerah-daerah yang menjadi wilayah kekuasaannya. Agar kesejahteraan masyarakat dapat terjamin disemua daerah, sehingga ketimpangan ekonomi dapat dihindari. Serta harta dalam konteks kemajuan ekonomin dapat diakses oleh semua elemen seperti firman Allah surat Al Hasyr ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَكُمْ الرَّسُولُ فَاخْذُوهُ
وَمَا نَهَيْكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ [7]

Artinya: “Harta rampasan (*fai*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin

dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Pembentukan daerah otonomi adalah hanya terfokus bagaimana suatu daerah otonomi mampu mengelola pemerintahan, keuangan, dan kepentingan publik lainnya dengan baik. Bahkan lebih jauh, dengan dikeluarkannya UU No 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, yang penekanannya lebih kepada bagaimana daerah otonomi mengelola APBD-nya dengan baik. Hal itulah yang membuat setiap daerah merasa terbebani dan sibuk untuk mengimplementasikan UU tersebut²³². Otonomi daerah yang sebenarnya bertujuan untuk memaksimalkan kewenangan daerah dalam membangun kemandiriannya, bukan hanya dalam mengelola APBD dan roda pemerintahannya, tetapi lebih dari itu adalah bagaimana setiap daerah mampu memaksimalkan potensi-potensi sumber daya yang dimilikinya²³³ Normalnya dengan otonomi, ketergantungan

²³²Bayu Kharisma, “Desentralisasi Fiskal Dan Pertzumbuhan Ekonomi: Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia,” *LEkonomi Dan Studi Pembangunan* 14 (2013): 101–19.

²³³Anwar Hidayat, “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat,” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2020), <https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5660>.

daerah kepada 'perhatian' pemerintah pusat semakin lama semakin berkurang, bukan hanya dalam urusan birokrasi, tetapi juga dalam sumber daya ekonomi dan pengelolaan daerah itu sendiri.

Timbulnya keinginan diterapkannya proses desentralisasi di berbagai negara di dunia, khususnya di negara-negara berkembang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain latar belakang atau pengalamansuatu negara, peranannya dalam globalisasi dunia, kemunduran dalam pembangunan ekonomi, tuntutan terhadap perubahan tingkat pelayanan masyarakat, tanda-tanda adanya disintegrasi diberbagai negara serta banyaknya kegagalan yang dialami oleh pemerintahan sentralistik dalam memberikan pelayanan masyarakat yang efektif.²³⁴ Kebijakan desentralisasi dalam negara islam merupakan kebijakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan syariah, negara memiliki peran untuk bertanggungjawab mengurangi kesenjangan pendapatan sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara dengan wilayah yang luas, jumlah penduduk yang banyak, dan memiliki kebutuhan atau tuntutan nasional lainnya kerap menerapkan kebijakandesentralisasi, termasuk desentralisasi fiscal. Dalam

²³⁴Halimah Halimah et al., "Pengaruh Kepemimpinan Keuchik Terhadap Efektifitas Pelayanan Masyarakat Gampong Kambuek Payapi Kunyet Kecamatan Padang Tiji," *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 1 (2023): 282–89, <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1661>.

pandangan ekonomi islam menyangkut desentralisasi ekonomi yang mengacu pada desentralisasi fiskal, maka terdapat beberapa unsur dari teori fiskal ²³⁵, yaitu:1).Ekonomi Islam terdiri dari ekonomi tiga sektor, yaitu, sektor swasta, sektor sosial/sukarela, dan sektor publik. Tiga sektor bekerja sama, memberikan kerangka kelembagaan pada perekonomian Islam. 2).Zakat sebagai dasar darisistem fiskal. 3).Alokasi, distribusi dan fungsi stabilisasi dari ekonomi Islam diproses dan dilaksanakan melalui semua sector tersebut secara bersama-sama. 4).Peran sektor public dibanding sektor lain adalah minimal tapi penting sejauh beroperasi terus menerus untuk memastikan alokasi optimal sumber daya yang ada dalam masyarakat, distribusi pendapatan, dan membangun stabilitasAdapun tujuan dari kebijakan fiskal dalam Islam untuk menciptakan stabilitas ekonomi, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan pemerataan pendapatan, ditambah dengan tujuan lain yang terkandung dalam aturan Islam yaitu Islam menetapkan pada tempat yangtinggi akan terwujudnya persamaan dan demokrasi. Menurut Metwally, setidaknya ada 3 tujuan yang hendak dicapai kebijakan fiskal dalam ekonomi

²³⁵Yeyen Novita, Reni Indriani Agustine, and Abdul Aziz Nugraha Pratama, "Analisis Desentralisasi Fiskal Dalam Pandangan Ekonomi Islam," *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 2, no. 2 (2023): 206–15, <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1402>.

Islam²³⁶ yaitu: (1). Islam mendirikan tingkat kesetaraan ekonomi dan demokrasi yang telah tinggi (2) .Islam melarang pembayaran bunga dalam berbagai bentuk pinjaman³.Ekonomi islam mempunyai komitmen yang membantu ekonomi masyarakat yang berkembang dan menyebarkan pesan dan ajaran Islam seluas mungkin.

Dengan dibentuknya daerah otonomi diharapkan masyarakat bisa mengeksplorasi potensi-potensi yang ada di daerahnya masing-masing agar desa menjadi modern yang mampu menghasilkan produksi pangan yang lebih modern seperti produksi yang dihasilkan kota. Oleh karena itu pemerintah daerah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat daerahnya. Sebagaimana kaidah fiqh berikut:

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنُوطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyatnya”

Modernisasi pedesaan era otonomi daerah sangat esensial untuk negara sedang berkembang. Di kebanyakan negara sedang berkembang bagian yang terbesar dari penduduknya hidup di desa-desa dan sebagian penting dari

²³⁶Heru M, Atikah R, and Nurlaila, “Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam,” *Jurnal Ilmiah Simantek* 6, no. 2 (2022): 7–16.

pendapatan nasional berasal dari pertanian, oleh karena saatnya era otonomi daerah menjalankan moderasi pedesaan, karena perkembangan agraria menghasilkan bahan makan dan bahan-bahan baku agraria kepada penduduk tinggal di kota-kota. Dilihat dalam kerangka nasional selanjutnya dapat dikemukakan bahwa demi perkembangan dan pemeliharaan persatuan nasional, perlu diadakannya modernisasi kehidupan di desa-desa dan dengan demikian sekaligus mengusahakan integrasi nasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Modernisasi pedesaan didukung dengan system otonomi daerah dengan menerapkan nilai-nilai dan norma yang dipegangi oleh masyarakat desa, Pemerintah daerah harus membangun daerah menjadi smart city agar menjadi daerah maju sebagaimana dikota-kota besar di dunia. Tujuan smart city untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan kota. Melalui platform digital dan partisipasi warga, penduduk dapat berkontribusi dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan publik, memperkuat keterlibatan masyarakat, dan meningkatkan rasa memiliki terhadap kota mereka. Oleh karena itu pemimpin daerah dengan menerapkan otonomi daerah dalam membangun daerah harus sesuai dengan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyatnya sejalan dengan ke khasan dan potensi yang dimiliki oleh daerah masing-masing

BAB III

URGENSI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH ERA OTONOMI DAERAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

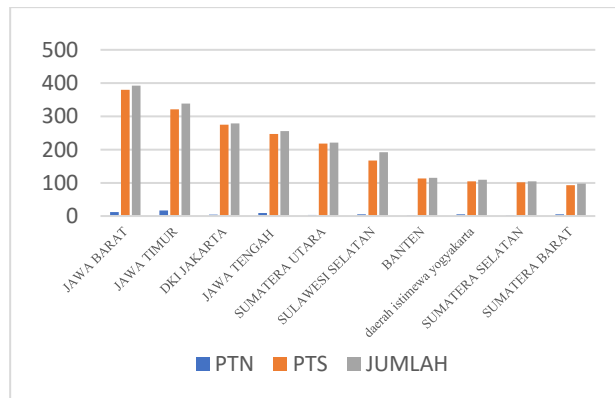
A. Urgensi Program Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah Era Otonomi Daerah/OTDA Perspektif Ekonomi Islam

Kemiskinan menghambat pembangunan ekonomi yang dilaksanakan di Indonesia berorientasi pada pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi aman dan baik, jika mengalami peningkatan produksi barang dan jasa dalam suatu negara. Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat jika indikator pendapatan nasional semakin meningkat, artinya tingkatan pendapatan nasional menggambarkan tercapainya kesejahteraan perkapita suatu negara. Sedangkan kemiskinan di Jawa Tengah masih cukup tinggi, hal tersebut akan menghambat pertumbuhan ekonomi, kemiskinan tidak hanya menghambat kehidupan sosial melainkan juga masalah akidah. Kondisi orang miskin menghadapi kesulitan untuk terlibat dalam bidang Pendidikan, pelatihan, akses permodalan yang akhirnya tidak mampu bersaing dalam dunia kerja dengan pemilik modal, hal itu menimbulkan konflik sosial kemudian juga bertambahnya pengangguran, jika tidak diatasi akan menciptakan kemiskinan baru.

Karena itu program bantuan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan sangat penting, sejalan dengan misi

pemerintah otonomi daerah memberikan pelayanan publik dan mengatasi masalah masyarakat lebih cepat. Otonomi daerah lebih berorientasi pada peningkatan kesejahteraan dan pelayanan masyarakat. Jawa Tengah sudah berjalan 21 tahun melaksanakan otonomi daerah dan PRJMD 2020-2024 ditargetkan kemiskinan 6,0-7,0%, namun prosentase kemiskinan baik kabupaten/kota maupun propinsi masih cukup tinggi, padahal Jawa Tengah merupakan provinsi memiliki perguruan tinggi terbanyak di urutan ke empat dengan sebutan kota pelajar berdasarkan data 10 propinsi yang memiliki perguruan tinggi terbanyak sebagai berikut:

Tabel 6 Sepuluh Propinsi Memiliki PT Terbanyak



Sumber: referensi camaba

Berdasarkan data tersebut menjelaskan, total perguruan tinggi 256 dengan rincian PTN: 9 dan PTS 247. Sebagaimana Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) juga sebutan kota pelajar, namun Yogyakarta urutan ke delapan, total PT 109 dengan rincian

PTN: 5 dan PTS: 104.²³⁷ Banyaknya perguruan tinggi merupakan penghasil kekayaan intelektual sebagai masukan pemerintah daerah untuk menjawab berbagai persoalan daerah khusus persoalan kemiskinan daerah.

Adapun pembagian wilayah administratifnya Jawa Tengah di era otonomi daerah memiliki 29 kabupaten dan 6 kota yang diharapkan mampu mandiri dalam desentralisasi fiskal. Penelitian ini, diambil tiga kabupaten yang jumlah penduduknya masuk kelompok miskin di tingkat tiga besar yakni kabupaten Kebumen, Brebes dan Wonosobo. Adapun data kemiskinan di Jawa Tengah antara lain: ²³⁸

Tabel 7. Angka Kemiskinan di Jawa Tengah

No	Kab. / Kota	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)			Persentase Penduduk Miskin (persen)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
	JAWA TENGAH	3980.90	4109.75	3831.44	11.41	11.79	10.93
1	Kabupaten Cilacap	198.60	201.71	190.96	11.46	11.67	11.02
2	Kabupaten Banyumas	225.84	232.91	220.47	13.26	13.66	12.84
3	Kabupaten Purbalingga	149.48	153.08	145.33	15.90	16.24	15.30

²³⁷<https://www.detik.com/edu/perguruan-tinggi/d-5973812/10-provinsi-dengan-perguruan-tinggi-terbanyak-bisa-jadi-referensi-camaba> diakses 9 Mei 2022.

²³⁸<https://Jateng.Bps.Go.Id/Indicator/23/34/1/Kemiskinan.Html> Diakses 26 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB,.

4	Kabupaten Banjarnegara	144.95	150.19	141.25	15.64	16.23	15.20
5	Kabupaten Kebumen	211.09	212.92	196.16	17.59	17.83	16.41
6	Kabupaten Purworejo	84.79	88.80	82.64	11.78	12.40	11.53
7	Kabupaten Wonosobo	137.63	139.67	128.11	17.36	17.67	16.17
8	Kabupaten Magelang	146.34	154.91	145.33	11.27	11.91	11.09
9	Kabupaten Boyolali	100.59	104.82	97.18	10.18	10.62	9.82
10	Kabupaten Klaten	151.83	158.23	144.87	12.89	13.49	12.33
11	Kabupaten Sukoharjo	68.89	73.84	68.72	7.68	8.23	7.61
12	Kabupaten Wonogiri	104.37	110.46	105.19	10.86	11.55	10.99
13	Kabupaten Karanganyar	91.72	95.41	88.56	10.28	10.68	9.85
14	Kabupaten Sragen	119.38	122.91	115.14	13.38	13.83	12.94
15	Kabupaten Grobogan	172.26	175.72	163.20	12.46	12.74	11.80
16	Kabupaten Blora	103.73	107.05	99.83	11.96	12.39	11.53
17	Kabupaten Rembang	100.08	101.40	94.56	15.60	15.80	14.65
18	Kabupaten Pati	127.37	128.74	118.04	10.08	10.21	9.33
19	Kabupaten Kudus	64.24	67.06	66.06	7.31	7.60	7.41
20	Kabupaten Jepara	91.14	95.22	89.08	7.17	7.44	6.88
21	Kabupaten Demak	146.87	151.74	143.01	12.54	12.92	12.09

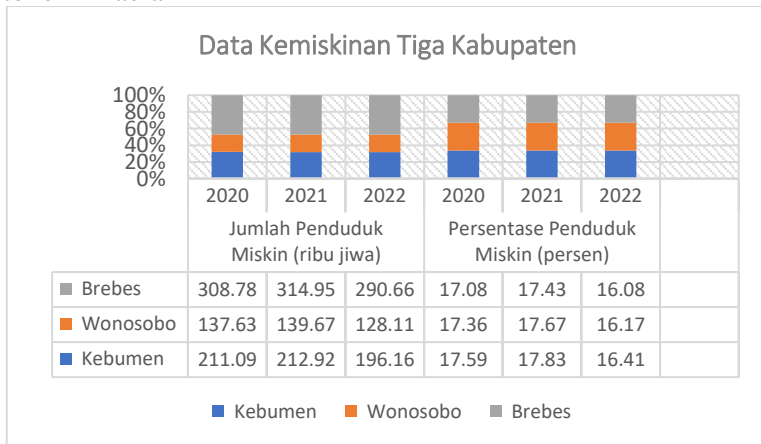
22	Kabupaten Semarang	79.88	83.61	78.60	7.51	7.82	7.27
23	Kabupaten Temanggung	77.33	79.09	73.04	9.96	10.17	9.33
24	Kabupaten Kendal	97.49	100.00	93.03	9.99	10.24	9.48
25	Kabupaten Batang	70.57	74.91	69.94	9.13	9.68	8.98
26	Kabupaten Pekalongan	91.86	95.26	87.53	10.19	10.57	9.67
27	Kabupaten Pemalang	209.03	215.08	195.84	16.02	16.56	15.06
28	Kabupaten Tegal	117.50	123.52	113.62	8.14	8.60	7.90
29	Kabupaten Brebes	308.78	314.95	290.66	17.08	17.43	16.08
30	Kota Magelang	9.27	9.44	8.65	7.58	7.75	7.10
31	Kota Surakarta	47.03	48.78	45.94	9.03	9.40	8.84
32	Kota Salatiga	9.69	10.14	9.45	4.94	5.14	4.73
33	Kota Semarang	79.58	84.45	79.87	4.34	4.56	4.25
34	Kota Pekalongan	22.16	23.49	21.81	7.17	7.59	7.00
35	Kota Tegal	19.55	20.27	19.78	7.80	8.12	7.91

Sumber: jateng.bps.go.id

Berdasarkan tabel di atas kemiskinan tertinggi pada tahun 2020 terjadi di Kabupaten Kebumen dengan angka kemiskinan 17,59 persen, sedangkan jumlah kemiskinan terendah terjadi di Kota Pekalongan dengan angka kemiskinan 4,34 persen. Kemudian pada tahun 2021 kemiskinan tertinggi masih sama diduduki oleh

Kabupaten Kebumen dengan angka kemiskinan 17,83 persen dan angka kemiskinan terendah terjadi di Kota Pekalongan yakni sebesar 4,56. Untuk tahun 2022 angka kemiskinan tertinggi dan terendah masih tetap diduduki oleh Kabupaten Kebumen dan Kota Pekalongan dengan angka kemiskinan 16,41 persen dan 4,25 persen. Sedangkan angka kemiskinan terendah pada tahun 2020-2022 berturut-turut terjadi di Kota Pekalongan. Berdasarkan tabel tersebut terlihat bahwa prosentase kemiskinan tertinggi ada tiga kabupaten sebagai berikut :

Tabel 8. Jumlah Kemiskinan Tiga Kabupaten di Jawa Tengah Era otonomi Daerah



Sumber: jateng.bps.go.id

Berdasarkan tabel tersebut diatas menjelaskan bahwa angka kemiskinan tertinggi pada tahun 2020-2022 berturut-turut terjadi di Kabupaten Kebumen dengan peningkatan sebesar 0,24 persen pada tahun 2021 dan mengalami penurunan sebesar 1,42

persen pada tahun 2022 namun masih menempati posisi tertinggi dalam angka kemiskinan di Jawa Tengah.

Kemiskinan merupakan masalah yang menghambat pertumbuhan ekonomi, oleh karena itu perlu diatasi melalui program bantuan. Pemerintah mengeluarkan kebijakan bantuan kesejahteraan melihat batasan kemiskinan berpedoman pada BPS, berdasarkan pendekatan pemenuhan kebutuhan pokok (*basic needs approach*). Orang dikatakan miskin jika mengalami ketidakmampuan dari sisi ekonomi dalam mencukupi kebutuhan makan dan non makan (kesehatan, perumahan, Pendidikan dll) dilihat dari sisi pengeluaran. Menurut BPS kebutuhan makan minim daerah setara dengan 2100 kilokalori/kapita/hari (1 kg setara dengan 7.700 kalori). Jika seseorang memenuhi kebutuhan makan dibawah kilokalori disebut garis kemiskinan yang disebut GK. Pentingnya program penanggulangan kemiskinan di era otonomi daerah, karena sebelum otonomi daerah berlaku angka kemiskinan di tiga kabupaten yakni Kebumen, Wonosobo dan Brebes sangat tinggi diantara prosentase 25% hingga 36%, sebagaimana data BPS sebagai berikut:

Tabel 9. Data Penduduk Miskin di Jawa Tengah Sebelum Otonomi Daerah

Kabupaten / Kota	Kemiskinan			
	Jumlah Penduduk Miskin (ribu jiwa)		Persentase Penduduk Miskin (persen)	
	1996	1999	1996	1999
PROVINSI JAWA TENGAH	6417.60	8755.40	21.61	28.46
Kabupaten Cilacap	238.60	469.30	15.54	29.72
Kabupaten Banyumas	294.00	624.10	21.28	44.05
Kabupaten Purbalingga	168.20	255.60	22.44	33.29
Kabupaten Banjarnegara	366.00	437.80	45.45	52.38
Kabupaten Kebumen	293.80	323.60	25.78	27.80
Kabupaten Purworejo	188.80	238.80	26.91	33.67
Kabupaten Wonosobo	215.80	249.70	31.55	35.39
Kabupaten Magelang	263.60	318.60	25.52	30.15
Kabupaten Boyolali	240.50	322.20	28.13	36.91
Kabupaten Klaten	150.10	262.80	13.69	23.55
Kabupaten Sukoharjo	66.40	98.90	9.36	13.36
Kabupaten Wonogiri	236.00	266.00	24.29	26.94
Kabupaten Karanganyar	106.50	113.00	14.52	14.83
Kabupaten Sragen	328.90	331.40	39.19	38.69
Kabupaten Grobogan	439.10	460.40	36.71	37.23
Kabupaten Blora	291.10	365.30	37.03	45.39
Kabupaten Rembang	27.60	88.20	5.11	15.70
Kabupaten Pati	265.70	346.60	24.47	21.36
Kabupaten Kudus	102.60	102.50	15.33	14.59

Kabupaten Jepara	63.10	69.60	7.17	7.57
Kabupaten Demak	166.20	208.50	18.66	22.16
Kabupaten Semarang	102.30	191.50	12.64	23.07
Kabupaten Temanggung	137.10	184.50	21.65	28.30
Kabupaten Kendal	137.70	149.10	16.51	17.31
Kabupaten Batang	201.70	205.50	33.05	32.68
Kabupaten Pekalongan	78.30	180.50	10.91	24.56
Kabupaten Pemasang	268.60	421.00	22.68	33.91
Kabupaten Tegal	286.60	388.10	22.34	29.27
Kabupaten Brebes	405.40	620.50	24.80	36.02
Kota Magelang	14.60	16.10	11.93	12.79
Kota Surakarta	48.30	91.30	9.34	17.23
Kota Salatiga	6.20	8.00	5.89	7.56
Kota Semarang	158.20	238.50	11.73	16.68
Kota Pekalongan	47.70	86.40	14.72	22.19
Kota Tegal	12.50	21.50	4.21	6.29

Sumber : BPS. Jateng

Berdasarkan data kemiskinan diatas menjelaskan bahwa kemiskinan di Jawa Tengah sebelum Otonomi daerah mengalami peningkatan rata-rata kisaran 27%-33% misalnya tiga kabupaten kebumen prosentase kemiskinan dari 25.78% menjadi 27.80 %, sedangkan kabupaten Wonosobo dari 31.55% menjadi 35.39% dan kabupaten Brebes dari 24.80% menjadi 36.02%

Beberapa factor penyebab kemiskinan Jawa Tengah sangat kompleks, pemerintah tidak mampu menjalankan sendiri untuk mengatasi masalah kemiskinan yang sangat pelit, oleh karena itu

tiga kabupaten di Jawa Tengah yang prosentase kemiskinan kisaran sebelum otonomi daerah antara 24,80%-36,02% setelah otonomi daerah pada tahun 2022 prosentase kemiskinan antara 16,08%-16,41% masih sangat memprihatinkan, karena hal itu akan berdampak sulitnya pembangunan ekonomi dan peningkatan pendapatan, karena prosentase kemiskinan tiga kabupaten diatas prosentase kemiskinan propinsi Jawa tengah yang kisaran 10,93%. Selain itu tujuan pemerintah daerah angka kemiskinan bisa turun sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD 2020-2024 angka kemiskinan ditargetkan 6% atau 7%. Oleh karena itu semua aspek kehidupan bekerjasama untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di daerah, berdasarkan hasil wawancara:

“Memang benar adanya bahwa angka kemiskinan di Kebumen tertinggi diantara kabupaten dan kota di Jawa Tengah, namun persoalan kemiskinan ini tidak hanya pihak pemerintah yang bertanggung jawab tetapi semua pihak-pihak yang terkait hendaknya membantu dan mendukung untuk bisa keluar dari jeratan kemiskinan”(wawancara dengan AS pada tanggal 1 Maret 2022)

Adapun data bantuan sosial di tiga kabupaten yakni kabupaten Wonosobo, Brebes dan Kebumen di provinsi Jawa Tengah website Badan Pusat Statistik yaitu :

Tabel 10.

Jumlah Bantuan Sosial Tiga Kabupaten di Jawa Tengah

BANTUAN SOSIAL				
	2019	2020	2021	2022
W	142.151.400	16.497.800.000	188.514.800.000	18.600.000.000.000
B	399.529.800	44.662.200.000	44.803.600.000	12.400.000.000.000
K	228.009.600	28.317.600.000	343.561.400.000	24.017.000.000.000

Sumber: Jateng.BPS.go.id data diolah²³⁹

- Pada tahun 2019, data bantuan sosial terendah berada di Kabupaten Wonosobo yaitu Rp 142.151.400 dengan planning atau rencana awalnya sebesar Rp 142.185.600. Data bantuan sosial Kabupaten Kebumen yaitu Rp 228.009.600 dengan planning atau rencana awalnya sebesar Rp 228.195.00. Sedangkan dana bantuan sosial tertinggi pada tahun 2019 berada di Kabupaten Brebes dengan data sebesar Rp 399.529.800 dengan planning atau rencana awalnya sebesar Rp 399.816.000.
- Pada tahun 2020, data bantuan sosial tertinggi berada di Kabupaten Brebes yaitu Rp 44.662.200.00 dengan planning atau rencana awalnya sebesar Rp 64.753.600.000. Data bantuan sosial di Kabupaten Kebumen sebesar Rp 28.317.600.000 dengan planning atau rencana awalnya Rp 33.663.400.000 dan dana bantuan sosial terendah pada tahun 2020 berada di

²³⁹“https://www.bps.go.id/indikator/indikator/view_data_pub/330/0/api_pub/mkt1sfDwbWdZa1hKZ2FtRU1NaHRsUT09/Da_04/1,” n.d.

Kabupaten Wonosobo yaitu sebesar Rp 16.497.800.000 dengan planning atau rencana awalnya Rp 18.137.400.000.

- Menurut data yang saya peroleh dari website brebeskab.go.id pada tahun 2020, sebanyak 58.054 kepala keluarga se Kabupaten Brebes mendapat bantuan sosial tunai (BST) sebesar Rp. 600.000.
- Pada tahun 2021, dana bantuan sosial tertinggi berada di Kabupaten Kebumen yaitu sebesar Rp 343.561.400.000, dana bantuan sosial di Kabupaten Wonosobo yaitu sebesar Rp 188.514.800.000, dan dana bantuan sosial terendah pada tahun 2021 berada di Kabupaten Brebes yaitu sebesar Rp 44.803.600.000.
- Menurut Badan Pusat Statistik Kabupaten Brebes, banyaknya penerima program bantuan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Brebes tahun 2021, sebanyak 110.217 orang mendapat bantuan sosial PKH. Jumlah penerima bantuan (kepala keluarga) di Kabupaten Brebes sebanyak 127.078 kepala keluarga.
- Pada tahun 2022 dana bantuan sosial tertinggi berada di Kabupaten Kebumen yaitu sebesar Rp 24.017.000.000.000, sedangkan di Kabupaten Wonosobo yaitu sebesar Rp

18.600.000.000, dan dana bantuan sosial terendah berada di Kabupaten Brebes yaitu sebesar Rp 12.400.000.000.000.²⁴⁰

Program bantuan pemerintah mengalami pasang surut sejalan dengan kondisi masyarakat miskin dan sesuai kemampuan anggaran daerah dan pusat. Program bantuan bersumber dari APBN/APBD, berdasarkan hasil wawancara:

“Anggaran program bantuan sosial tidak bisa dipastikan tergantung anggaran propinsi dan daerah, bantuan sosial ini bertujuan agar masyarakat miskin berubah menjadi mandiri tidak bergantung pada bantuan pemerintah terus, bantuan ini jangan dijadikan ajang bagi-bagi uang tetapi kami berharap untuk pemberdayaan.program pemberdayaan berjalan, usaha mereka berjalan tetapi 2/3 tahun rata-rata usaha tersebut tidak berjalan Oleh karena itu kami bekerja sama dengan pihak dinsos untuk melaksanakan dan mengevaluasi program bantuan social yang ditargetkan”(wawancara dengan AP pada tanggal 1 Maret 2022)

Program bantuan sosial jangan dijadikan ajang bagi-bagi uang kepada masyarakat. Seharusnya program bantuan pemerintah penting dan berorientasi pada edukasi. Program tersebut mendidik bagi warga masyarakat miskin untuk lebih mandiri melalui produktifitas diri. Sistem otonomi daerah memberikan peluang besar untuk meningkatkan dayaguna dan hasilguna penyelenggaraan pemerintahan di daerah, terutama pelayanan

²⁴⁰“<https://jateng.bps.go.id/Statictable/2020/07/20/1885/Jumlah-Keluarga-Penerima-Manfaat-Kpm-Dan-Anggaran-Bantuan-Sosial-Pangan-Menurut-Kabupaten-Kota-Di-Provinsi-Jawa-Tengah-2019-2021.html> Diakses 28 Januari 2023 Pukul 10.35 WIB,” n.d.

cepat dan pembangunan daerah. Namun masyarakat miskin belum mampu merespon positif terhadap banyaknya bantuan pemerintah. Ketidakmampuan masyarakat karena memiliki budaya malas dan mindset masyarakat miskin.

Tabel 11. Data Program bantuan Berdasarkan KPM

Kabupaten	Jenis Bantuan	Tahun		
		2020	2021	2022
Kebumen	PKH	613545	260206	238568
	BPNT/SEMBAKO	908894	906277	987122
	BST	228997	178648	218522
	JPS	123421	28911	11211
Wonosobo	PKH	76311	78066	90322
	BPNT/SEMBAKO	70288	75101	79335
	BST	75011	70022	72089
	JPS	821	543	423
Brebes	PKH	110905	105915	105982
	BPNT/SEMBAKO	215154	118946	203156
	BST	901681	108625	788708
	JPS	250153	341	321

Sumber tiga kabupaten yang diolah

Program bantuan sosial yang dianggarkan fluktuatif setiap tahun demi membantu masyarakat miskin agar mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, pemerintah sudah menjalankan kewajibanya

mengintervensi melalui anggaran pendapatan belanja untuk program bantuan sosial telah diprioritaskan. Oleh karena itu tinggal kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sebagai kontrol kebijakan pemerintah serta orang miskin sendiri yang seharusnya menyadari dan semangat untuk mengubah dirinya dari miskin menjadi mandiri. Strategi penanggulangan kemiskinan tidak bisa ditangani sendiri, namun perlu kerjasama baik pemerintah maupun masyarakat. Strategi kerjasama antara pihak pemerintah dan masyarakat juga diimbangi dengan penanganan masalah bawah, artinya masalah pembangunan daerah diutamakan terlebih dahulu.

B. Arah Pembangunan Ekonomi di Jawa Tengah dalam Otonomi Daerah

Sebelum berlakunya Otonomi Daerah/OTDA sistem pemerintahan masih bersifat sentralistik, memusatkan seluruh wewenang kepada sejumlah kecil manajer atau yang berada di posisi puncak pada suatu struktur organisasi yang berpusat di Jakarta, sentralisasi adalah sistem pemerintahan lama Indonesia di era Orde Baru, yang menempatkan seluruh kekuasaan di pemerintah pusat. Sehingga arah pembangunan ditentukan oleh pusat dan anggaran daerah juga sangat minim. Berbeda arah pembangunan di era Otonomi daerah/OTDA yang berorientasi pada kekhasan dan potensi suatu daerah.

Otonomi daerah memberikan kebebasan dalam mengatur rumah tangga daerah oleh karena itu pembangunan ekonomi

daerah adalah suatu proses di mana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut, berdasarkan kutipan wawancara:

“Masalah pokok otonomi daerah dalam pembangunan adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakan-kebijakan pembangunan yang didasarkan pada ke-khas-an daerah yang bersangkutan dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber fisik secara lokal (daerah). Orientasi otonomi daerah mengarahkan kita kepada pengambilan inisiatif-inisiatif yang berasal dari daerah tersebut dalam proses pembangunan untuk menciptakan kesempatan kerja baru dan merangsang peningkatan kegiatan ekonomi. Namun tidak bisa dipungkiri masih bergantung pada pemerintah propinsi baik anggaran maupun kebijakan, pernah mengadakan bazar UMKM tapi minim sekali peserta dengan alasan rugi karena pertumbuhan ekonomi daerah masih rendah”(wawancara dengan AP pada tanggal 1 Maret 2022)

Sejalan dengan pernyataan Bustani arah kebijakan ekonomi dalam otonomi daerah bertujuan sebagai payung hukum dalam mewujudkan visi dan misi kepala daerah serta menyelesaikan isu strategis dan permasalahan daerah melalui perumusan program-program prioritas dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dan berdampak positif, namun hasil penelitian tentang program penanggulangan kemiskinan di Jawa

Tengah era OTDA masih bersifat ketergantungan anggaran dan kebijakan, sehingga program bantuan sosial bersifat penyerapan anggaran belaka. Prioritas program pembangunan daerah dengan melihat kondisi perekonomian secara global, nasional hendaknya lebih menguatkan dan mengembangkan perekonomian daerah yang dilengkapi dengan kondisi pelayanan publik dan infrastruktur yang semakin baik serta keberantaraan pasar untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berdasarkan hasil wawancara:

“Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kemiskinan menjadi berdaya mandiri diperlukan pembangunan dan pengembangan infrastruktur untuk mendukung perekonomian berbasis pertanian, pertambangan, kelautan, industri, perdagangan, dan pariwisata. Maka untuk menunjang pencapaian target tersebut perlu diupayakan pembangunan prasarana dan sarana transportasi, pengairan, dan permukiman untuk mendukung percepatan pengembangan investasi, pariwisata, dan pengembangan potensi ekonomi pada umumnya serta pengembangan etos kerja semangat kewirausahaan dan kemitraan dalam rangka menciptakan perluasan kesempatan kerja dan penanggulangan kemiskinan untuk meningkatkan kekuatan perekonomian”
(wawancara dengan AS 1 Maret 2022)

Pentingnya program bantuan pemerintah untuk penanggulangan kemiskinan sebagaimana pernyataan Muhammad Munadi bahwa kebijakan penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan publik yang harus di pilih dan dilaksanakan karena sekarang serba digital, jika penanggulangan kemiskinan tidak

turunkan, maka pertumbuhan ekonomi yang tercapai tidak dirasakan kelompok miskin. Oleh karena itu tugas pemerintah mengambil program bantuan untuk memerangi kemiskinan agar tercapai kesejahteraan hidupnya. Dalam usaha mendorong peran masyarakat dalam pembangunan perekonomian daerah terutama dalam rangka pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lokal lainnya. pengelolaan sumber daya alam dilakukan dengan prinsip-prinsip memperhatikan kelestarian alam. Upaya untuk mendorong pertumbuhan perekonomian di samping sektor pertanian harus terus dilaksanakan dengan mendorong pembangunan di beberapa sektor potensi lainnya, yaitu sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran, jasa-jasa, pengangkutan dan komunikasi, bangunan kontruksi, persewaan, dan jasa perusahaan serta jasa lainnya yang ada di Kebumen, Wonosobo maupun Brebes.

Potensi daerah yang dimiliki untuk mendorong pertumbuhan perekonomian sangat dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu kebijakan pemerintah pusat dalam bidang ekonomi. Selain itu faktor internal juga harus diupayakan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yaitu kebijakan fiskal/APBD dalam bidang perekonomian antara lain upaya penguatan kemandirian perekonomian melalui pembinaan Usaha Kecil, Mikro dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, penyediaan infrastruktur pertanian, penyediaan modal usaha dengan bunga rendah bagi

UMKM dan koperasi, perbaikan atau pemeliharaan pasar-pasar, dan lain-lain.

Sejalan dengan Mardhatillah bahwa faktor non ekonomi juga berpengaruh terhadap tingkat pertumbuhan perekonomian yaitu kondisi sosial dan politik, kondisi sosial dan keadaan politik yang stabil diharapkan dapat mendukung upaya mendorong perekonomian daerah agar indikator keluarga sejahtera tercapai, sehingga program-program usaha yang dilakukan masyarakat miskin melalui program penanggulangan kemiskinan dari pemerintah sangat berarti untuk meningkatkan pendapatan masyarakat miskin.

Arah pembangunan era otonomi daerah memberikan kebebasan pemerintah daerah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat daerahnya. Kesejahteraan belum dicapai oleh rakyatnya, maka kebijakan-kebijakan hendaknya berorientasi pada program-program pro rakyat yang bersifat produktif sebagai bekal hidupnya, Sebagaimana kaidah fiqih berikut

تَصَرُّفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “kebijakan pemimpin kepada rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan atau kesejahteraan rakyatnya”

Kebijakan otonomi daerah menjalankan sesuai amanah pusat dan juga harus mampu melaksanakan kebijakan yang bersifat kemaslahatan umat. Otonomi daerah mewujudkan kesejahteraan

masyarakat melalui peningkatan pelayanan, partisipasi aktif masyarakat dan daerah mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta potensi keanekaragaman daerah masing-masing.

Kemandirian masyarakat terwujud jika masyarakatnya memanfaatkan potensinya, berpikir, melaksanakan sesuatu yang dianggap tepat untuk memecahkan persoalan hidup dengan memanfaatkan potensinya.²⁴¹ Solusi pembangunan ekonomi kontemporer untuk mengatasi masalah kemiskinan, menurut Fahim Khan bahwa strategi pembangunan menciptakan kesempatan kerja dengan upah tetap dan keikutsertaan masyarakat miskin dalam kegiatan ekonomi, tetapi prakteknya negara berkembang menciptakan lapangan kerja dengan upah murah dan mengabaikan penciptaan kewirausahaan pada diri pekerja.²⁴² Berlakunya otonomi daerah mendorong semua daerah agar mampu mandiri anggaran/dana yang dibutuhkan dalam pembangunan daerahnya, artinya daerah memanfaatkan kebebasan dalam mengatur rumah tangga daerah baik dari komponen pendapatan dan pengeluaran belanja pemerintah daerah. Pengelolaan keuangan yang bersumber dari pendapatan daerah perlu penggalan potensi daerah untuk sumber pemasukan APBD. Program penanggulangan

²⁴¹Irhamyah, "Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional."

²⁴²Murtadho, "Strategi Pembangunan Ekonomi Yang Islami."

kemiskinan merupakan salah satu langkah untuk membuat mandiri melalui program penanggulangan yang produktif, karena otonomi daerah mendorong semua kabupaten/kota mampu mandiri anggaran yang dibutuhkan dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

C. Program Bantuan Untuk Masyarakat Jawa Tengah

Menurut ekonom muslim untuk mengatasi problem kemiskinan dengan cara,²⁴³ *pertama* menata system kepemilikan, jangan dijual pada asing, *kedua* memberikan bantuan langsung bidang pendidikan dan kesehatan, *ketiga* menjamin bantuan secara tidak langsung yakni menyuruh wajib kerja, penyediaan lapangan kerja, kewajiban ahli waris, subsidi Baitul maal, *keempat* menata system moneter, hilangkan instrumen riba dan sejenisnya. Selaras dengan penelitian ini yakni pada poin dua dan tiga melalui program bantuan yang diberikan pemerintah pusat dan daerah yang bersumber dari anggaran APBN dan APBD.

Analisis bantuan pemerintah daerah mempengaruhi penurunan angka kemiskinan di wilayah Jateng ada 35 kabupaten atau kota yang jumlah kemiskinan tertinggi ada tiga kabupaten yakni kabupaten kebumen jumlah kemiskinan 17.83 %, kabupaten Wonosobo jumlah kemiskinan 17.67% dan kabupaten Brebes jumlah kemiskinan 17.43%. Penelitian ini menggunakan teori

²⁴³Mannan, *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*.

kuadran peran strategis penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

	Peran Strategi	Peran tidak strategi
	I	II
Masyarakat mampu melaksanakan	Pemerintah dengan Masyarakat	Masyarakat
	III	IV
Masyarakat tidak mampu melaksanakan	Pemerintah	Masyarakat individu

Sebagaimana M Choirul²⁴⁴ bahwa kuadran I merupakan pelaku pembangunan ekonomi yang saling kerjasama dalam menumbuhkan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kuadran III menjelaskan bahwa program bantuan ini wajib dijalankan pemerintah, tak dipungkiri penanggulangan kemiskinan belum mencapai tujuan yang diharapkan pemerintah pusat dan daerah. Kuadran II dan IV tidak perlu dilaksanakan karena peran strategis yang tidak perlu dilakukan khususnya berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan. Program bantuan merupakan kebijakan pemerintah

²⁴⁴Umanailo, "Integration of Community Empowerment Models [Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat]."

dan pemberdayaan masyarakat miskin merupakan peran *stakeholder*.

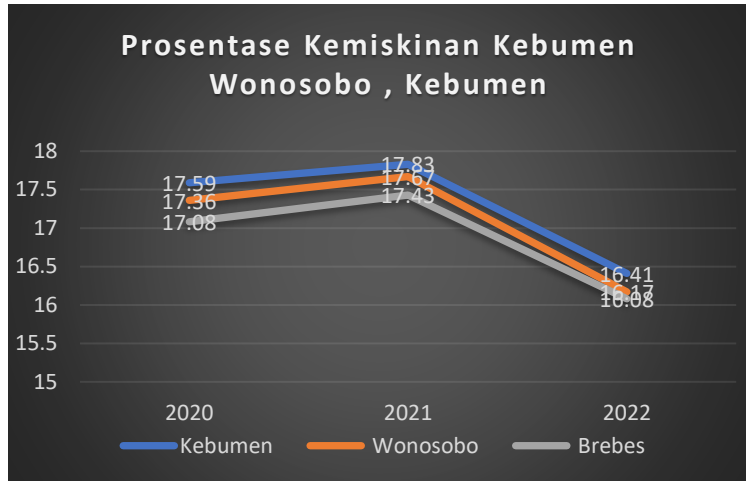
Program pemberian bantuan untuk masyarakat miskin merupakan jaring pengaman sosial bertujuan sebagai alat peringan beban masyarakat miskin dan meningkatkan Indek Pembangunan Manusia dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan kewajiban pemerintah memberikan bantuan orang miskin. Masyarakat tidak mampu mengeluarkan kebijakan bantuan sosial, adapun yang memiliki peran dan wewenang adalah pemerintah. Jenis program bantuan pemerintah pasca otonomi daerah sebagai wujud bentuk komitmen dalam menanggulangi kemiskinan. Berikut kutipan wawancaranya:

“Jenis bantuan sosial masyarakat miskin yakni Program sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan social Tunai (BST), Kartu Jateng Sejahtera (KJS), BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa) : bagi orang miskin yang tidak mendapatkan bantuan apapun. Insallah bansos sebagai program pemerintah mampu menekan angka kemiskinan, kalau tidak berdampak positif, program bantuan mubadzir, karena sudah kita buktikan dari tahun ke tahun angka kemiskinan secara umum turun, bukan hanya kali ini saja. Program bantuan dapat membantu masyarakat miskin, terus terang memang program bantuan belum mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin apalagi mengubah orang miskin menjadi mandiri”(Hasil wawancara dengan Z dan D pada tanggal 13 Desember 2022)

Otonomi Daerah berjalan 21 tahun dan angka kemiskinan naik turun belum tercapai 6 % atau 7 % sebagai target kemiskinan nasional khususnya di kabupaten Kebumen, kabupaten Wonosobo dan Brebes, pemerintah berhasil melakukan program perlindungan sosial (perlinsos). Pada tahun 2020 masa pandemic banyak sekali program perlinsos yang dilakukan pemerintah, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Subsidi Listrik, BLT Desa, hingga Kartu Prakerja. Sebagian besar dari program perlinsos juga dilanjutkan pada 2022. Berdasarkan BPS persentase kemiskinan Jawa tengah sebagai berikut:

Gambar 6. Grafik Kemiskinan Propinsi dan Tiga Kabupaten di Jawa Tengah





Sumber Jateng.bps.go.id

Berdasarkan gambar grafik kemiskinan di atas menjelaskan bahwa persentase kemiskinan Jawa Tengah mengalami fluktuasi. Sehingga kuadran III yang mampu menurunkan kemiskinan adalah pemerintah. Kemiskinan di provinsi Jawa Tengah pada tahun 2019 sebesar 10,8 persen, ini merupakan persentasi yang kecil namun tetap masih di atas persentase kemiskinan nasional. Kemudian pada tahun 2020 Jawa tengah mengalami kenaikan persentase kemiskinan bekisar 0,61 persen dari tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya pandemic covid-19, dampak dari pandemi tersebut sangat besar bagi Jawa Tengah salah satunya banyaknya pengangguran yang membuat persentase kemiskinan semakin meningkat menjadi 11,41 persen. Secara rata-rata persentase pada tahun 2021 sejumlah 11,79 persen atau mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya 2021. Kenaikan ini disebabkan pandemi covid-

19 yang berkepanjangan. Bahkan di tiga kabupaten yakni Kebumen, Wonosobo dan Brebes mengalami fluktuasi tahun 2020 ke tahun 2021 mengalami kenaikan karena pandemic Covid-19 dan tahun 2022 mengalami penurunan angka kemiskinan karena adanya kebijakan pemulihan ekonomi nasional.

Akibatnya bidang sosial ekonomi, masyarakat miskin semakin miskin karena pendapatan masyarakat semakin menurun sedang pengeluaran masih sama. Namun, masyarakat harus menurunkan pengeluaran konsumsi baik berupa makanan ataupun non makanan. Selanjutnya pada tahun ini angka kemiskinan di Jawa Tengah mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2022 persentase kemiskinan sebanyak 10,93 persen dari jumlah penduduknya 3,83 juta orang. Pada tahun ini terjadi penurunan sekitar 0,86 persen. Turunnya kemiskinan ini sebuah hal positif bagi Jawa Tengah karena selama ini berupaya untuk menurunkan kemiskinan dengan berbagai upaya atau program, pelaksanaan program pun tidak hanya dari pemerintah tetapi masyarakat juga ikut andil dalam menciptakan lingkungan kondusif.

Program bantuan dalam pelaksanaan otonomi daerah semakin baik, karena berlakunya otonomi daerah, peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik juga, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah

serta antar daerah dalam kerangka menjaga keutuhan negara kesatuan. Tujuan otonomi daerah juga sejalan dengan visi tiga kabupaten untuk meningkatkan sejahtera, mandiri, unggul, maju dan berkeadilan, namun realita terkesan pemerataan dan keadilan pembagian bantuan sosial di pemerintah daerah *carot marot* dan tidak tepat sasaran dan apakah program bantuan disesuaikan kondisi dan penyebab kemiskinan agar menurunkan angka kemiskinan?, berikut kutipan wawancaranya:

“Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dua cara, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.tidak melihat kondisi dan penyebabnya yang penting ada by name and by address. Tentunya sudah tepat sasaran karena KPM/ keluarga penerima manfaat bansos itu terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial” (hasil wawancara dengan T dan E pada tanggal 13 Desember 2022)

Kuadran III merupakan kewajiban pemerintah mengerjakan seluruh program kegiatan pemberantasan kemiskinan dengan melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu

masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Berdasarkan data prosentase kemiskinan Jawa Tengah turun, namun tiga kabupaten tertinggi angka kemiskinannya, padahal sektor wisata, kerajinan, jasa, pertanian, perkebunan, dan lainnya telah dimiliki ke tiga kabupaten, apa yang menyebabkan hal itu terjadi. Berdasarkan kutipan wawancara sebagai berikut:

“Sebetulnya anggaran sudah memadai, karena anggaran berapapun kurang. Oleh karena itu yang di perbaiki mindset orang pola pikir inilah yang mempengaruhi pikiran, perasaan, dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari keluarga miskin. Orang miskin malas bekerja dan konsumtif, mereka memiliki pekerja tidak tetap, begitu dapat bantuan pemerintah mereka enggan bekerja bahkan tetangganya yang sudah layak hidup juga komentar kapan saya bisa menikmati uang negara” (hasil wawancara dengan NC pada tanggal 14 Desember)

Kerja merupakan cara penanggulangan kemiskinan, kalau masyarakat malas bekerja dan mindset berpikinya konsumtif dan malas, maka program bantuan apapun dan banyakpun tidak akan memberikan efek positif bagi orang miskin. Walaupun kondisi masyarakat miskin tidak ada perubahan, pemerintah daerah tetap menganggarkan anggaran bantuan yang bersumber APBD dan APBN tetap berjalan sesuai amanah pemerintah propinsi maupun pemerintah pusat, bagaimana pengawasan dan pertanggung jawaban terhadap anggaran bantuan pemerintah agar sesuai tujuan pemerintah, misalnya pantauan/pendampingan bagi bantuan

produktif agar tidak beralih konsumtif berdasarkan kutipan wawancara:

“Masing-masing distribusi bantuan ada koordinator dan pendampingan agar bantuan langsung diterima oleh KPM baik pencairan melalui kantor pos, bermitra dengan bank tertentu maupun e-warung, namun pemantauan orang miskin sampai berdikari belum maksimal, yang penting kita tidak korupsi dan anggaran terserap, kalau tidak diambil kembali ke negara, hal itu belum pernah terjadi” (hasil wawancara dengan AF pada tanggal 15 Desember 2022)

Realita program bantuan menyisahkan kecemburuan dan banyaknya warga masyarakat protes, hal tersebut mengindikasikan terjadinya tidak tercapai sasaran, berdasarkan hasil wawancara

“program bantuan sosial menjadi ajang bagi-bagi uang karena banyak masyarakat menggunakan berbagai cara agar mendapatkan bantuan, misalnya mendekati aparatur pemerintah, pemecahan KK karena KK induknya dipandang sudah tidak layak mendapatkan bantuan pemerintah. Tetapi KPM ada yang tercapai sasaran, terbukti mampu mengembangkan bisnis yang sudah lama digeluti” (hasil wawancara dengan D sebagai individu miskin pada tanggal 14 Desember 2022)

Berdasarkan pengawasan dan pertanggung jawaban anggaran bantuan sosial, pemerintah daerah berorientasi pada penyerapan anggaran dan kurang berorientasi pada *out put* dari program bantuan pemerintah, terbukti proses pelaksanaan program bantuan sosial tertib dalam prosedur dan administrasi belaka. Berbeda penelitian di Brasil dan Amerika Latin bahwa program

CCT/ *Conditional Cash Transfers* berupa bantuan tunai melalui kesehatan dan Pendidikan kurang efektif, maka tidak perlu program bantuan tersebut diperpanjang oleh pemerintah.²⁴⁵

Di sinilah kuadran III pemerintah sebagai pembuat kebijakan program bantuan sosial dan masyarakat tidak mampu berperan dalam pelaksanaan program bantuan apalagi terkait anggaran. Oleh karena itu pemerintah menerapkan fungsi distribusi, alokasi dan stabilitas. Pemerintah telah menjalankan fungsinya dalam penanggulangan kemiskinan, sejalan dengan surat Al Hasyr:ayat 7

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ
وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ
الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ
وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَأَنْتَهُوْا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
شَدِيدُ الْعِقَابِ [7]

Artinya: “Harta rampasan (*fai*) dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di

²⁴⁵Leovardo Mata Delgado, Odra Angélica Saucedo, Kadelbach, Vivian, Mata, “Effects of Conditional Cash Transfers (CCT) in Anti-Poverty Programs. An Empirical Approach with Panel Data for the Mexican Case of PROSPEROportunidades 2002–2012,” *Economies* 6, no. 29 (2018) 154-158.

antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya.”

Fungsi distribusi merupakan peran pemerintah dalam mendistribusikan pendapatan dan sumberdaya alam secara merata, fungsi alokasi yakni pemerintah mempunyai peran menyediakan barang dan jasa sebagai pemenuhan kebutuhan masyarakat dan fungsi stabilitas bahwa pemerintah bertugas menjaga kestabilan ekonomi. Ketiga fungsi pemerintah itu diimplementasikan dalam program bantuan untuk menanggulangi kemiskinan. Adapun jenis bantuan dalam penanggulangan kemiskinan di tiga kabupaten Jawa Tengah sebagai berikut:

1. PKH/Program Keluarga Harapan

Bantuan merupakan program keluarga harapan untuk keluarga miskin yang terdiri ada keluarga yang penyandang disabilitas, lansia, usia anak sekolah dan ibu hamil dan punya anak dibawah 6 tahun. Bantuan ini merupakan program unggulan pemerintah. Sebagaimana pernyataan Intan Putri program ini mampu mewujudkan taraf hidup lebih sejahtera bagi keluarga miskin. Perubahan sosial lebih baik lagi sebagai amanat konstitusi dan nawacita presiden.²⁴⁶ Dasar pemberian

²⁴⁶Pratiwi, Ferdinandus, and Limantara, “Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting.”

PKH Keluarga Penerima Manfaat/KPM yang sudah memenuhi syarat. Sejalan dengan hasil wawancara sebagai berikut:

“Bantuan jenis PKH merupakan program unggulan pemerintah dan memiliki syarat yakni keluarga miskin yang memiliki anggota cacat, ibu hamil dan lansia serta memiliki anak usia dibawah 6 tahun akan mendapatkan bantuan uang sejumlah satu juta dengan sarat terpenuhi dan terdaftar di DTKS yang ada di dinsos, bantuan ini hampir semua kabupaten atau kota dapat “(wawancara dengan AP pada tanggal 1 maret)

Tabel 12. Prosentase Rumah Tangga dapat Bantuan PKH

Kab.	Prosentase rumah tangga yang dapat Bantuan PKH		
	2020	2021	2022
Kebumen	19.72	21.77	22.46
Wonosobo	19.28	20.49	23.22
Brebes	24.87	25.06	26.63

Berdasarkan data BPS bagian kependudukan menjelaskan bahwa Bantuan PKH ke tiga kabupaten mengalami kenaikan setiap tahunnya merupakan bukti bahwa bantuan ini sangat penting untuk mengatasi masalah keluarga miskin. Program Keluarga Harapan (PKH) bertujuan membantu meringankan beban keluarga miskin agar tercukupi kebutuhan makan setiap hari, Pendidikan anak dan biaya kesehatan jika anggota keluarganya ada yang sakit. Pemerintah sudah merencanakan dan melaksanakan program PKH, namun dalam realita

masyarakat tidak memanfaatkan sebagaimana mestinya, hasil kutipan wawancara:

“Bantuan PKH untuk keluarga miskin yang memiliki sarat tertentu dan sebelum pencairan sudah ada sosialisasi bahwa bantuan PKH digunakan untuk pemenuhan kebutuhan makan, biaya anak sekolah dan biaya kesehatan, namun lagi-lagi mendapatkan laporan masyarakat bahwa ada nenek sakit anggota keluarga yang mendapatkan PKH tidak dibawa ke rumah sakit agar mendapatkan pengobatan, setelah ditanya bagaimana penggunaan dana PKH, jawabnya sangat sederhana untuk makan pak” (wawancara dengan AF 15 Desember 2022)

Program PKH ini sangat penting bagi keluarga yang memiliki beberapa beban untuk agar tetap hidup, maka pemerintah perlu memiliki anggaran untuk bantuan PKH dengan tujuan membantu meringankan persoalan orang miskin dalam memenuhi kehidupan yang semakin mahal dan sulit. Dalam program PKH ini, pemerintah tidak hanya membantu kebutuhan dasar untuk kehidupan sehari-hari, tetapi juga memperhatikan kesehatan dan pendidikan masyarakat miskin untuk menegakkan hak-hak tersebut. Program bantuan pemerintah sangat membantu perekonomian masyarakat miskin,²⁴⁷ Namun kesadaran keluarga miskin belum sepenuhnya menjalankan porsi bantuan yang diharapkan pemerintah sebagai mana hasil kutipan wawancara keluarga miskin:

²⁴⁷Mustafakulov et al., “Poverty: Basic Principles Of The State At Its Reduction.”

“Setiap bulan bantuan keluarga miskin cair dengan jumlah satu juta yang harus saya gunakan untuk beli keperluan hidup sehari-hari. Uang satu juta tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan apalagi barang-barang sehari-hari mahal, sehingga neneknya minta diobatkan kadang saya abaikan karena penyakit orang sudah tua biasa dialami orang tua lainnya” (wawancara KA 15 Desember 2022)

2. BST/Bantuan Sosial Tunai

BST adalah Bantuan Sosial Tunai yang sumber anggarannya dari APBN yang bertanggung jawab Kemensos RI yang Namanya sudah terdaftar pada data terpadu sebagai penerima bantuan memiliki identitas berupa KTP dan alamat sesuai domisili wilayah setempat. Mekanisme pencairan bantuan tunai ini langsung ke orangnya melalui kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh pemerintah setempat. Dengan syarat tersebut, maka dilapangan ada yang menyalah gunakan dengan berbagai cara misalnya mendekati aparat pemerintah, memecah KK awalnya ikut KK anaknya maka orang tuanya punya KK sendiri. Berdasarkan hasil kutipan wawancara

“ Berdasarkan informasi masyarakat agar dapat bantuan uang enam ratus ribu dilakukan berbagai cara, ada yang mendekati pejabat daerah maupun memecah KK agar dapat bantuan dari pemerintah, setelah saya telusuri memang benar adanya dan saya tidak bisa berbuat apa-apa karena by nama dan alamat jelas sudah terdaftar di DTKS. Maaf masyarakat kita sangat bergantung sekali pada bantuan pemerintah buktinya masyarakat miskin diberi bantuan barang agar berjualan hanya awal saja, sehingga mindset budaya masyarakat yang harus

diperbaiki terlebih dulu”(wawancara dengan A 13 Desember 2022)

Jenis bantuan BST ini diberikan masyarakat baik sebelum COVID-19 maupun waktu pandemi COVID-19 yang terkena dampak COVID-19 juga mendapat enam ratus ribu/ KK/bulan.²⁴⁸ BST disebut JPS pada masa COVID-19 berupa sembako dan individu yang sudah mendapatkan bantuan BST tidak masuk kelompok yang mendapatkan bantuan PKH, BPNT dan bantuan sosial lainnya. Namun dalam kehidupan bermasyarakat ada laporan dari masyarakat yang mendapatkan bantuan double, hal tersebut berdasarkan kutipan hasil wawancara

“ Bantuan pemerintah kadang tidak adil karena ada yang seharusnya dapat bantuan malah tidak dapat, dan berkali-kali lapor ke kelurahan tiada respon, namun ada yang dapat berbagai jenis program bantuan yang mereka dapatkan dan sangat menjengkelkan jadwal kerja tukang tidak berangkat karena dapat bantuan cair sampai tiga kali” (wawancara dengan WO 13 Desember 2022)

Bantuan BST juga diberikan bagi masyarakat yang berdampak bencana alam, bentuk bantuan ini bisa berupa uang dan sembako. BST untuk masyarakat miskin memiliki beberapa jenis bentuk,²⁴⁹misalnya uang tunai langsung

²⁴⁸Mufidah, “Efektivitas Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.”

²⁴⁹Ansyah, “Monitoring Dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penyelenggaraan Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Helvetia Timur.”

disalurkan KPM, bantuan berupa barang misalnya masyarakat miskin yang bergelut usaha dagang misalnya peralatan yang dibutuhkan dagang, untuk orang cacat misalnya, kursi roda, kakai palsu dan sejenisnya. Selain itu BST ini juga berupa jasa berbentuk pelatihan atau kursus dengan tujuan agar yang bersangkutan menjadi mandiri dalam memenuhi kebutuhan hidup.

Bantuan BST ini sering terjadi keributan di daerah disebabkan banyak masyarakat ramai-rami ke kantor kelurahan, misalnya masyarakat yang biasanya dapat menjadi tidak dapat bahkan ada yang dapat tetapi juga ikut rebut. Keributan masyarakat berbentuk protes ke kantor kelurahan, berdasarkan kutipan hasil wawancara

“Saya heran dengan masyarakat diberi bantuan protes tidak dapat bantuan protes, terbukti banyaknya warga berdatangan ke kantor kelurahan dan kadang berbondong-bondong naik mobil pic up dengan tujuan protes ke kelurahan, padahal pihak kelurahan hanya sekedar menjalankan tugas dari pusat maupun propinsi” (wawancara dengan H tokoh masyarakat tanggal 14 Desember 2022)

Berbagai gejolak dalam program bantuan bisa jadi tidak sesuai tujuan dan sasaran program tersebut. Oleh karena itu kebijakan program bantuan perlu strategi dan prinsip keadilan serta berorientasi pada produktifitas dan perubahan hidup dari ketidakcukupan pemenuhan kebutuhan hidup yang selalu

bergantung pihak lain menjadi mampu berdikari sendiri melalui kerja²⁵⁰ Bekerja selaras dengan bakat dan minat, sebagaimana manusia itu memiliki potensi untuk bekerja. Oleh karena itu bantuan pemerintah untuk individu miskin disesuaikan kebutuhan dan persoalan kemiskinan yang dialami individu masing-masing, berdasarkan wawancara:

“ Bantuan pemerintah sangat membantu bagi orang miskin seperti saya ini, tapi kalau boleh milih saya butuh bantuan pupuk untuk hasil pertanian, oleh karena itu kalau dapat bantuan sembako lebih baik saya dapat uang agar bisa saya gunakan untuk beli pupuk, kalau dapat sembako yang tetap dihabiskan keluarga tapi lebih manfaat uang, makanya saya mengadu ke kelurahan kalau boleh ditukar uang saja” (wawancara dengan MI sebagai petani tanggal 14 Desember 2022)

Bantuan pemerintah hendaknya tidak hanya sekedar penyerapan anggaran semata atau sesuai administrasi dan pertanggung jawaban saja, namun bantuan pemerintah perlu melihat potensi dan mengetahui apa yang menyebabkan individu miskin agar program bantuan pemerintah tercapai tujuan yang memuaskan sebagaimana pernyataan cihwanul bahwa pemberdayaan masyarakat akan berhasil jika sesuai dengan potensi yang dimiliki individu miskin.²⁵¹ Dengan kebijakan desentralisasi, masalah kemiskinan lebih cepat teratasi melalui pelayanan public dan pengambilan keputusan

²⁵⁰Bakar, “Nilai-Nilai Pendidikan Pada Ayat-Ayat Amsal Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah.”

²⁵¹Kirom, “Etos Kerja Dalam Islam.”

lebih cepat sejalan pernyataan Andi Matala.²⁵² Oleh karena itu proses pendistribusian anggaran dari APBD propinsi diberikan masing-masing kabupaten/kota setiap propinsi. Pemerintah daerah di berikan kebebasan mengatur rumah tangga daerah masing-masing sejalan dengan pernyataan Roy Marthen.²⁵³

Realita pemerintahan daerah segala sesuatunya sangat bergantung pada pemerintah propinsi dan tidak mampu untuk berinovasi karena anggaran juga sangat bergantung pada propinsi bahkan penggunaan anggaran juga sudah ditentukan setiap pos belanjanya, berdasarkan wawancara:

“Pemerintah daerah diberikan kewajiban mengatur keuangan rumah tangga daerahnya sendiri belum sepenuhnya masih didekte dari propinsi dan pemerintah daerah belum mampu mendanai semua kebutuhan daerah, sehingga masih sangat bergantung pada propinsi. Daerah harus dapat meningkatkan pendapatan daerahnya. Masalah penanganan kemiskinan merupakan isu besar bagi negara, maka distribusi anggaran dan bentuk-bentuk program bantuan jelas sudah paket dari pusat. Kita di daerah tinggal melaksanakan apa yang diprogramkan dan evaluasi program bantuan juga belum mampu maksimal yang penting cocok antara data jenis bantuan dengan kondisi lapangan “(wawancara dengan P sebagai sekretaris BPKAD Kebumen tanggal 1 maret 2022)

Tujuan otonomi daerah agar pemerintah lebih cepat memberikan pelayanan dan pembangunan ekonomi lebih

²⁵²Matala, “Reviewing the Performance Of Local Governments In Managing Corporate Social Responsibility Program.”

²⁵³Moonti, “Regional Autonomy in Realizing Good Governance.”

terfokus pada persoalan masyarakat daerah, namun otonomi daerah belum tercapai tujuan yang diharapkan, ternyata belum sepenuh otonomi yang seluas-luasnya karena anggaran dan pengambilan kebijakan masih terpaku pada pemerintah di atasnya. Oleh karena itu pertanggung jawaban dan evaluasi setiap program bantuan sosial juga dilaksanakan dengan baik sesuai arahan dari propinsi, artinya bahwa evaluasi berorientasi pada administrasi dan hasil akhir dan pemerintah tidak melihat proses kemandirian masyarakat melalui bantuan pemberdayaan, berdasarkan kutipan wawancara:

“Berkaitan dengan evaluasi program bantuan terus terang berorientasi administrasi dan tidak memaksa si miskin terlibat dalam kegiatan kewirausahaan, sehingga bagaimana pencairan bantuan bisa dipertanggung jawabkan dan tidak korupsi sehingga tidak mungkin pihak kita harus mengevaluasi proses pemberdayaan apakah benar-benar si wulan berternak ayam atau tidak sangat sulit bagi kita, kita berpikir sangat sederhana harusnya masyarakat miskin dibantu pemerintah harusnya dilaksanakan dengan baik sesuai arahan akan pencairan bantuan yang dilakukan oleh mitra BAPPEDA yakni teman-teman kelurahan bahkan koordinator dinsos” (wawancara dengan AP sebagai koordinator penanggulangan kemiskinan di BAPPEDA tanggal 1 maret 2022)

3. Program Sembako/ BPNT Bantuan Pangan Non Tunai

Jenis BPNT merupakan program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) atau program sembako dan sumber anggaranya

dari APBN pemerintah pusat melalui pemerintah propinsi.²⁵⁴ BPNT diberikan setiap bulan di kabupaten Kebumen, Wonosobo maupu Brebes, BPNT ini terdiri dari bahan pangan sembilan bahan pokok yang meliputi karbohidrat, protein hewani dan nabati, tujuan bantuan ini membantu mengurangi beban masyarakat miskin dan mengentaskan kemiskinan.²⁵⁵.BPNT ini juga sudah terdaftar, sehingga nama dan alamat juga jelas. Bisa dilihat prosentase rumah tangga yang mendapatkan BPNT di webs BPS Jateng.

Tabel 13 Prosentase Rumah Tangga BPNT

Kab.	Prosentase rumah tangga yang dapat Bantuan Pangan Non Tunai		
	2020	2021	2022
Kebumen	31.40	37.61	38.19
Wonosobo	33.81	37.90	34.67
Brebes	32.24	24.26	36.91

Berdasarkan data BPS Jateng dalam bagian kependudukan menjelaskan bahwa kabupaten Kebumen mengalami peningkatan bantuan non tunai berupa sembako tiap tahunnya. Sedangkan dua kabupaten yakni Wonosobo dan

²⁵⁴Hutagalung, Nofriansyah, and Syahdian, “Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menggunakan Metode ARAS.”

²⁵⁵Yustikasari and Mubarak, “Comparative Analysis Performance of K-Nearest Neighbor Algorithm and Adaptive Boosting on the Prediction of Non-Cash Food Aid Recipients.”

Brebes mengalami fluktuasi dalam prosentase rumah tangga yang menerima bantuan jenis BPNT.

BPNT ini berupa sembako tidak boleh diminta tunai, sehingga pihak kelurahan memberikan bagi masyarakat yang berhak dengan harapan masyarakat miskin mampu memenuhi kebutuhan dasar makan tercukupi vitamin dan gizinya. Adapun bahan makanan pokok yang benar-benar berkualitas tidak diperbolehkan bahan makanan pokok yang kualitas rendah. Berdasarkan kutipan hasil wawancara

“ pembagian sembako yang terdiri dari telor besar sayur gula dan lain-lain seharga dua ratus ribu dan warung ambil sembako ditunjuk pihak pemerintah, barang kualitas baik tetapi pernah kualitas rendah, misalnya beras berwarna kuning kusampaikan ke kelurahan berasnya jelek kemudian bulan depannya berasnya bagus kualitasnya dan ada juga yang minta ganti uang ” (wawancara dengan KA tanggal 15 Desember 2022)

BPNT merupakan bantuan sembako agar masyarakat miskin mendapat kebutuhan makan yang layak meliputi makanan yang vitamin dan bergizi agar masyarakat sehat dan cerdas. BPNT sangat bermanfaat dan merasa sangat butuh bagi individu miskin yang benar-benar butuh bahan makanan pokok. Bahkan ada yang mendapatkan bantuan sembako minta berupa uang saja dari pada sembako dengan berbagai alasan yang dibuat-buat masyarakat.

4. KJS/Kartu Jateng Sejahtera

KJS merupakan program Kartu Jateng Sejahtera, namun tidak semua kabupaten dan kota dapat, dalam hal ini kabupaten Kebumen dan Brebes serta Wonogiri. Program ini inisiatif dari pemerintah propinsi dan sarat yang mendapatkan bantuan KJS yang tidak dapat bantuan jenis apapun. program bantuan ini anggarannya berasal dari APBD propinsi, berdasarkan kutipan wawancara:

“ bahwa bantuan kartu jateng sejahtera ini kusus belaku pada kabupaten dan kota di bawah naungan propinsi Jawa tengah sarat yang mendapatkan bantuan ini adalah orang miskin, sakit kronis, lanjut usia dan disabilitas yang belum dapat bantuan apapun baik dari pusat maupun daerah, sehingga bantuan ini yang benar-benar memiliki sarat tersebut, jika masyarakat memiliki syarat tersebut tetapi tidak mendapatkan, maka kepala desa bisa mendaftarkan ke koordinator penanggulangan kemiskinan propinsi”(wawancara dengan NC tanggal 14 Desember 2022).

Adapun yang mendapatkan program bantuan ini adalah orang miskin, sakit kronis lanjut usia maupun disabilitas yang belum mendapatkan program bantuan jenis apapun. Sistem yang digunakan dalam memberikan program bantuan ini setiap triwulan dengan jumlah Rp.750 ribu per orang dan KPM harus membuka rekening tabungan Bank Jateng.²⁵⁶ Berdasarkan tabel rumah tangga yang mendapatkan bantuan KJS

²⁵⁶Istiqomah Tri Handayani, Panji Kusuma Prasetyanto, “Analisis Pengaruh Jumlah UMKM, Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Dan

Tabel 14. Prosentase Rumah Tangga Penerima KPS/KJS

Kab/Kota	Persentase Rumah Tangga yang Menerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS)/KJS menurut Kabupaten/Kota (Persen)							
	Dapat Menunjukkan Kartu		Tidak Dapat Menunjukkan Kartu		Tidak Punya		Keterangan	
	2020	2021	2020	2021	2020	2021	2020	2021
JATENG	10.31	12.71	3.91	4.29	85.78	83.00	100.00	100.00
Cilacap	15.91	12.77	2.88	3.95	81.21	83.28	100.00	100.00
Banyumas	19.47	27.69	4.55	4.68	75.98	67.63	100.00	100.00
Purbalingga	15.38	18.49	4.63	8.57	79.99	72.94	100.00	100.00
Banjarnegara	8.10	8.99	2.45	3.21	89.45	87.80	100.00	100.00
Kebumen	20.38	19.28	6.14	6.80	73.48	73.92	100.00	100.00
Purworejo	11.27	15.63	3.60	3.79	85.13	80.58	100.00	100.00
Wonosobo	4.36	4.51	3.96	3.69	91.68	91.80	100.00	100.00
Magelang	10.87	13.25	5.98	5.38	83.15	81.37	100.00	100.00
Boyolali	5.94	10.04	2.91	3.51	91.15	86.45	100.00	100.00
Klaten	12.46	9.93	5.43	3.78	82.11	86.29	100.00	100.00
Sukoharjo	5.90	8.67	2.77	2.15	91.33	89.18	100.00	100.00
Wonogiri	12.52	14.85	4.93	4.89	82.55	80.26	100.00	100.00
Karanganyar	7.43	9.01	5.36	2.53	87.21	88.46	100.00	100.00
Sragen	7.90	9.51	3.31	4.40	88.79	86.09	100.00	100.00
Grobogan	8.66	11.05	4.00	5.56	87.34	83.39	100.00	100.00
Blora	11.28	17.06	4.93	2.37	83.79	80.57	100.00	100.00
Rembang	11.83	16.43	6.22	4.49	81.95	79.08	100.00	100.00
Pati	9.86	11.59	2.91	2.52	87.23	85.89	100.00	100.00

Harapan Lama Sekolah Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2017.”

Kudus	4.36	5.78	1.84	1.79	93.80	92.43	100.00	100.00
Jepara	6.45	16.85	4.00	3.94	89.55	79.21	100.00	100.00
Demak	8.71	13.80	2.93	5.12	88.36	81.08	100.00	100.00
Semarang	6.80	8.67	1.88	2.66	91.32	88.67	100.00	100.00
Temanggung	7.55	16.05	7.33	7.22	85.12	76.73	100.00	100.00
Kendal	9.27	9.15	3.97	5.86	86.76	84.99	100.00	100.00
Batang	3.42	7.36	3.96	4.41	92.62	88.23	100.00	100.00
Pekalongan	14.36	17.21	3.36	4.00	82.28	78.79	100.00	100.00
Pemalang	13.39	18.70	3.59	8.11	83.02	73.19	100.00	100.00
Tegal	8.65	7.34	2.47	3.38	88.88	89.28	100.00	100.00
Brebes	14.51	17.06	5.71	4.86	79.78	78.08	100.00	100.00
Kota Magelang	5.78	9.94	2.19	3.72	92.03	86.34	100.00	100.00
Kota Surakarta	9.51	9.91	3.86	3.32	86.63	86.77	100.00	100.00
Kota Salatiga	5.39	4.66	1.90	2.50	92.71	92.84	100.00	100.00
Kota Semarang	4.15	4.05	2.58	2.83	93.27	93.12	100.00	100.00
Kota Pekalongan	4.38	7.08	1.54	2.28	94.08	90.64	100.00	100.00
Kota Tegal	9.73	11.85	1.48	2.36	88.79	85.79	100.00	100.00

Sumber : Survei Sosial Ekonomi Nasional²⁵⁷

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa keluarga miskin yang dapat bantuan keluarga Jateng sejahtera dari propinsi masih cukup ringgi ketiga kabupaten Kebumen, Brebes

²⁵⁷“<https://Jateng.Bps.Go.Id/Indicator/12/1625/1/Persentase-Rumah-Tangga-Yang-Menerima-Kartu-Perlindungan-Sosial-Kps-Kartu-Keluarga-Sejahtera-Kks-Menurut-Kabupaten-Kota.Html>,” n.d.

dan Wonosobo milih tinggi keluarga yang mendapatkan Kartu keluarga sejahtera

5. BLT /Bantuan Langsung Tunai

Program bantuan pada jenis BLT merupakan bantuan langsung tunai diberikan pada masyarakat miskin. Anggaran program bantuan BLT berasal dari anggaran dana desa/BLT DD dan bantuan diberikan untuk mengurangi beban masyarakat yang kena dampak pandemic COVID-19. Bantuan Langsung Tunai DD pada masa pandemi COVID-19 tidak semua kabupaten/kota dapat program bantuan tersebut, berdasarkan wawancara :

“ BLT DD di pemerintah kabupaten wonosobo tidak mendapat kan BLT DD pada waktu pandemic COVID-19. Namun yang kena dampak COVID-19 mendapatkan bantuan BST dan BPNT dari Kemensos RI yang berbentuk sembako dan PKH“ (wawancara dengan NC sebagai penyuluh social dinsos tanggal 14 Desember 2022)

Program bantuan BLT ada yang memanfaatkan sebagai pengembangan bisnis atau usaha bagi masyarakat yang terdampak COVID-19, sebagai tambahan modal dalam mata pencaharian petani, nelayan atau berdagang ataupun padat karya yang diberikan bagi masyarakat yang menghadapi resiko sosial. Adapun anggaran yang diterima dalam program bantuan BLT sejumlah Rp. 300 ribu sebagai tambahan memenuhi kebutuhan hidup maupun sebagai tambahan usahanya. Program BLT masa

COVID-19 yang mendapatkan bantuan memiliki beberapa syarat, berdasarkan kutipan wawancara:

“ syarat yang harus dimiliki KPM dalam bantuan BLT yaitu orang miskin dan data sesuai RT/RW desa setempat, orang yang putus hubungan kerja/PHK, padahal sebagai karyawan gaji murah bahkan dibawah UMR malah diPHK, bantuan ini bagi. KPM tidak mendapatkan bantuan social lainnya, jika KPM belum terdaftar bisa daftar ke kepala desa, jika orang miskin yang benar membutuhkan bantuan memenuhi syarat tetapi tidak punya KTP dan berdomisili daerah setempat, maka kepala desa wajib mengusulkan orang tersebut.”(wawancara dengan JW sebagai coordinator penanggulangan social dan pemberdayaan sosial tanggal 15 Desember 2022)

BLT DD bersumber dari anggaran APBD daerah sendiri sebagai inisiatif bagi pemerintah daerah untuk membantu masyarakat yang berdampak COVID-19 karena saat pandemic kebutuhan semakin sulit dan semakin naik harga barang. Sedangkan pendapatan menurun, sehingga program bantuan dapat meringankan beban masyarakat miskin. Sebelum COVID-19 BLT DD sebagai program andalan daerah Tujuan program bantuan BLT dapat membantu untuk memenuhi kebutuhan pokok dalam sehari-hari.²⁵⁸

²⁵⁸Pramanik, “Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19.”

BAB IV
PERAN *STAKEHOLDER* DALAM PROGRAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI JAWA TENGAH
ERA OTONOMI DAERAH PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

A. Peran Pemerintah Dalam Program Penanggulangan Kemiskinan di Jawa Tengah Era Otonomi Daerah Perspektif Ekonomi Islam

Dalam ekonomi Islam penyelesaian kemiskinan bersifat individu harus disesuaikan masalah penyebab miskin dan kebutuhan orang miskin, sehingga dalam pelaksanaan program bantuan pemerintah perlu adanya kerjasama dari berbagai elemen masyarakat. Persoalan kemiskinan merupakan persoalan publik, oleh karena menggunakan teori kebijakan publik dengan menerapkan teori kuadran peran strategis penanggulangan kemiskinan di era otonomi.

Otonomi daerah memberikan wewenang daerah untuk memecahkan persoalan daerah agar tercapai peningkatan kesejahteraan dan memberikan layanan masyarakat secara cepat. Oleh karena itu dalam menganalisa menggunakan kuadran I sebagai peran strategi penanganan kemiskinan yakni pemerintah bekerjasama dengan masyarakat baik tokoh masyarakat dan orang miskin sendiri. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab, masyarakat bekerjasama dan mendukung pemerintah agar tercapai tujuan mengubah orang miskin menjadi mandiri, sejahtera, maju, berdaya saing untuk meningkatkan pendapatan nasional.

Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto /PDRB dan IPM merupakan peran pemerintah, agar pertumbuhan ekonomi daerah dan indeks pembangunan manusia meningkat melalui program bantuan kelompok miskin. Adapun data pengeluaran per kapita dan IPM sebagai berikut:

Tabel 15. Data Pengeluaran Perkapita dan Indeks Pembangunan Manusia

Kab.	Pengeluaran per kapita Disesuaikan (ribu rupiah/orang/tahun)			IPM		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kebumen	8901.00	9028.00	9282.00	69.81	70.05	70.79
Wonosobo	10621.00	10760.00	11108.00	68.22	68.43	68.89
Brebes	10058.00	10152.00	10514.00	66.11	66.32	67.03

Sumber BPS Jateng diolah²⁵⁹

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita dan indeks pembangunan manusia masih pada level sedang sebagaimana tingkat IPM 80-100 kategori sangat baik, IPM 70-79 kategori tinggi dan 60-69 kategori sedang

Masyarakat miskin sebelum mendapatkan bantuan pemerintah jelas kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, setelah mendapatkan bantuan pemerintah awalnya mereka merasa senang dan bisa memenuhi kebutuhan hidup sesaat, namun belum ada wujud kemandirian. Maka peran pemerintah menggenjot

²⁵⁹“<https://Jateng.Bps.Go.Id/Indicator/26/83/1/Indeks-Pembangunan-Manusia-Metode-Baru-.Html>,” n.d.

program penanggulangan kemiskinan agar mandiri, berdasarkan wawancara sebagai berikut:

“Pemberian pelatihan bertujuan agar orang miskin mampu berwirausaha dan juga diberikan pelatihan tentang pemasaran barang agar mampu membuka lapangan kerja baru. Pemerintah juga membantu dan mempermudah jika ada masyarakat membutuhkan modal”(hasil wawancara dengan W pada tanggal 13 desember 2022)

Langkah yang harus diprioritaskan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dengan membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung usaha mikro, menjaga kestabilan harga barang pokok, memberikan subsidi kepada masyarakat, memberikan bantuan langsung, mengembangkan balai latihan kerja, mempermudah birokrasi investasi. Sehingga di masing-masing kabupaten/kota disediakan pelayanan masyarakat terpadu yang berupa mal/galeri agar cepat teratasi masalah masyarakat disekitarnya, berdasarkan wawancara :

“Otonomi daerah memberikan pelayan cepat dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu pemerintah daerah mendirikan pos-pos pelayan yang berupa mal pelayan terpadu ataupun galeri atau kantor pelayanan terpadu agar pemerintah lebih dekat dengan masyarakat. Fungsi mal pelayan terpadu memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan kemanan dan kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan beruisaha untul lebih produktif”. (hasil wawancara dengan T pada tanggal 13 Desember 2022)

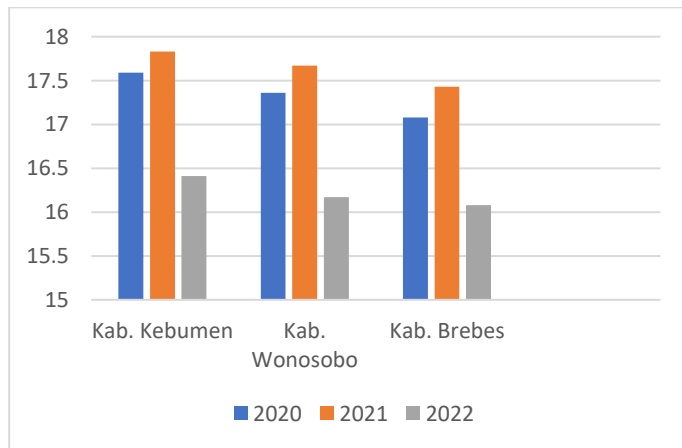
Program dikatakan berhasil apabila kegiatan tersebut mampu mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentunya tidak akan luput dari kesalahan-kesalahan, baik kesalahan yang fatal maupun kecil, oleh karena itu agar tidak terjadi kesalahan berdasarkan SOP yang merupakan pedoman pelaksanaan program bantuan. Peran pemerintah otonomi daerah menjalankan amanat pemerintah propinsi untuk memberikan layanan dan pemecahan masalah yang dialami masyarakat di semua bidang kehidupan. Orientasi peran pemerintah daerah berdasarkan SOP/standar operasional prosedur yang berfungsi sebagai pedoman memudahkan pelaksanaan kerja. SOP yang berisi tahapan dan urutan suatu pekerjaan akan menuntut aktor menyelesaikan tugasnya. Apakah ada kreatifitas dan inovatif serta tetap berpedoman SOP dalam menjalankan pendistribusian program bantuan?, dan apakah bantuan disesuaikan kondisi dan penyebab kemiskinan?, berdasarkan wawancara:

“Maaf kita sebagai aktor pelaksana dalam mendistribusikan bantuan berdasarkan hukum SOP yang ada, sehingga tidak bisa ditafsirkan semau kita. Karena bantuan itu riskan, sehingga kita distribusikan apa adanya dan mampu mempertanggung jawabkan, pertumbuhan ekonomi tercapai yang diamanahkan propinsi, masalah masyarakat miskin berubah atau tidak bukan tanggung jawab kita. Harusnya masyarakat sadar diri diberi bantuan dan tujuan pemerintah hanya sekedar bantu melalui pembagian jenis bantuan”(hasil wawancara dengan NC pada tanggal 14 Desember 2022)

Pemerintah berperan sesuai dengan administrasi dan SOP yang dijalankan dalam program bantuan penanggulangan kemiskinan, dalam pemahaman aktor daerah jika laporan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, khawatir dianggap korupsi. Sehingga melaksanakan peran pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran berorientasi penyerapan dan mampu dipertanggung jawabkan.

Peran pemerintah daerah di tiga kabupaten Jawa Tengah sangat berat untuk menurunkan angka kemiskinan sesuai amanat RPJMD sekitar 6%-7% karena keterbatasan dan kemampuan anggaran daerah. Prosentase kemiskinan yang di tiga kabupaten Jawa tengah sebagai berikut:

Gambar 7. Prosentase Kemiskinan Tiga Kabupaten



Sumber: Jateng.bps.go.id

Berdasarkan prosentase kemiskinan tersebut di atas bahwa tiga kabupaten yang dianggap tertinggi di Jawa tengah mengalami fluktuatif dari tahun ke tahun. Ketiga kabupaten tersebut dalam menyelesaikan persoalan kemiskinan melalui program pemberdayaan dan pelatihan. Pihak dinsos bekerja sama dengan pihak swasta yang profesional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu E sebagai Subkor pemberdayaan swadaya masyarakat dan usaha mikro Dinsos dan bapak T sebagai Wakil Koordinator nangkis bahwa program bantuan pemerintah dalam menangani kemiskinan menggunakan dua pendekatan:

“Penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dilaksanakan dua cara, pertama melindungi keluarga dan kelompok masyarakat yang mengalami kemiskinan sementara, dan kedua membantu masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis dengan memberdayakan dan mencegah terjadinya kemiskinan baru.tidak melihat kondisi dan penyebabnya yang penting ada by name and by address. Tentunya sudah tepat sasaran karena KPM/ keluarga penerima manfaat bansos itu terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) merupakan data induk yang berisi data pelayanan kesejahteraan sosial, penerima bantuan dan pemberdayaan sosial, serta potensi dan sumber kesejahteraan sosial. DTKS dijadikan data acuan dalam program penanganan fakir miskin dan penyelenggaraan kesejahteraan sosial” (hasil wawancara dengan T dan E pada tanggal 13 Desember 2022)

Pemerintah mengentaskan kemiskinan menggunakan dua pendekatan yakni melindungi keluarga miskin sementara dan

miskin kronis. Melihat kedua pendekatan itu menunjukkan bahwa program bantuan tidak sesuai dengan masalah keluarga miskin dan apa yang dibutuhkan keluarga miskin, sehingga wajar banyak penerima bantuan pemerintah banyak yang protes, artinya KPM/Keluarga Pengguna Manfaat bantuan mendapatkan bantuan sembako atau BPNT minta diganti berupa uang dan sebaliknya, yang dapat bantuan uang minta bantuan sembako, berdasarkan kutipan wawancara:

“Saya heran dengan masyarakat diberi bantuan protes tidak dapat bantuan protes, terbukti banyaknya warga berdatangan ke kantor kelurahan dan kadang berbondong-bondong naik mobil pic up dengan tujuan protes ke kelurahan, padahal pihak kelurahan hanya sekedar menjalankan tugas dari pusat maupun propinsi” (wawancara dengan H tokoh masyarakat tanggal 14 Desember 2022)

Pemerintah bertanggung jawab dalam memberikan kail pada orang miskin untuk mencari ikan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat daerah tersebut. Pemerintah tidak perlu bantu orang miskin yang malas bekerja tetapi wajib memberikan bantuan orang miskin dalam kesulitan hidupnya, sebagaimana dalam surat al Kahfi ayat 79

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسْكِينٍ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَمَرْتُ أَنْ أَعْيِبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ

مَلِكٌ يَا أَخْذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا

Artinya “Adapun perahu itu adalah milik orang miskin yang bekerja di laut; aku bermaksud merusaknya, karena di hadapan mereka ada seorang raja yang akan merampas setiap perahu”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa perahu yang aku lubanggi itu adalah milik orang-orang miskin yang mereka gunakan untuk bekerja di laut demi mencari rezeki, aku sengaja melubanginya agar perahu itu memiliki kekurangan, sehingga tidak dirampas oleh raja yang zalim.²⁶⁰ Bantuan yang diberikan bersifat persoalan dan kebutuhan yang dialami si miskin.

Menurut Umer Chapra dalam membangun ekonomi berorientasi pada kesejahteraan hendaknya berdasarkan pada *maqasid al-syariah* agar tercapai *falah* tidak berorientasi pada *pareto optimality*.²⁶¹ Artinya bahwa pembangunan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan berorientasi pada keuntungan semata, pendistribusian barang dan jasa ke wilayah yang memberikan keuntungan dan mengabaikan daerah yang tidak memberikan keuntungan. Pembangunan yang berorientasi pada pendapatan nasional sebagai tolok ukur kesejahteraan akan bias, artinya pendapatan nasional tinggi belum tentu tingkat kesejahteraan masyarakat tinggi, gambaran ini bersifat kolektif, padahal bicara sejahtera bagi semua orang bersifat individu. Pendapatan nasional merupakan alat pemerintah untuk memutuskan kebijakan

²⁶⁰“<https://Tafsirweb.Com/4905-Surat-Al-Kahfi-Ayat-79>.”

²⁶¹Umar Chapra, *Islam dan Pembangunan Ekonomi* (Jakarta: Gema Insani, 2010), 85

pembangunan nasional, oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan juga wajar bersifat kolektif hanya melihat daftar DTKS, bantuannya sama hanya sesuai dengan nama bantuan, misalnya bantuan yang diberikan kelompok miskin yakni:

“Jenis bantuan sosial masyarakat miskin yakni Program sembako/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Sosial Tunai (BST), Kartu Jateng Sejahtera (KJS), BLT DD (Bantuan Langsung Tunai Dana Desa): bagi orang miskin yang tidak mendapatkan bantuan apapun. Insallah bansos sebagai program pemerintah mampu menekan angka kemiskinan, kalau tidak berdampak positif, program bantuan mubadzir, karena sudah kita buktikan dari tahun ke tahun angka kemiskinan secara umum turun, bukan hanya kali ini saja, harusnya banyak program bantuan pemerintah harusnya bersifat mutualisme, masyarakat mendapatkan bantuan negara mendapatkan keuntungan melalui peningkatan pendapatan nasional. Program bantuan dapat membantu masyarakat miskin, terus terang memang program bantuan belum mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin apalagi mengubah orang miskin menjadi mandiri”(Hasil wawancara dengan Z dan D pada tanggal 13 Desember 2022)

Menurut ekonomi Islam program penanggulangan kemiskinan harusnya berorientasi individu artinya pemberian bantuan lebih berorientasi pada masalah dan kebutuhan apa yang dibutuhkan si miskin, sehingga sejalan dengan potensi yang dimiliki oleh individu miskin, sehingga program penanggulangan bukan bersifat kolektif lebih keindividu miskin. Tujuan program penanggulangan kemiskinan agar keluarga miskin mampu

mencukupi kebutuhan hidup dan berubah menjadi mandiri tanpa bantuan pihak lain, sejalan surat ar Ra'du:11 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ لَا يُعَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُعَيِّرُوهُمَا بِأَنفُسِهِمْ

Artinya “*Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri,*”

Ayat tersebut di atas menurut tafsir al-Jalalain²⁶² merupakan ayat motivasi manusia untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik, apa pun kondisi manusia saat ini, jika manusia mau berubah, maka manusia harus mengubah diri sendiri, maka Allah akan mengubah manusia tersebut. Mengubah nasib melalui kerja keras, sebagaimana dalam surat At taubah 105 :

وَقُلِ اعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ
وَالْمُؤْمِنُونَ وَسَتُرَدُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ
وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

Artinya: “*Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata,*

²⁶²“[253](https://www.Detik.Com/Hikmah/Khazanah/d-6510153/Surat-Ar-Rad-Ayat-11-Jelaskan-Nasib-Suatu-Kaum-Ditentukan-Oleh-Mereka-Sendiri,” n.d.</p></div><div data-bbox=)

lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”

Di sinilah pentingnya program penanggulangan kemiskinan yang dilaksanakan otonomi daerah lebih melihat kondisi si miskin berdasarkan persoalan yang menyebabkan mereka miskin agar mampu mengubah kondisi menjadi potensi yang mandiri melalui kerja keras. Program penanggulangan kemiskinan agar tercapai target yang ditetapkan, maka program bantuan sesuai persoalan individu bukan bersifat kolektif.

Adapun dasar-dasar program bantuan kemiskinan dalam ekonomi Islam;²⁶³

Pertama dasar kemanusiaan, artinya bahwa pemerintah berkewajiban memperhatikan hak asasi manusia setiap warganya, oleh karena itu program penanggulangan kemiskinan merupakan kewajiban negara untuk dilaksanakan agar tercapai kesejahteraan yang merata, tanpa pilih-pilih wilayah/daerah, sebagaimana menganut teori *pareto optimality*, pendapatan nasional hanya berputar pada pemilik modal, artinya bahwa perputaran uang hanya pada wilayah banyak barang dan jasa.

Kedua dasar manfaat, dasar ini tergambar dalam pemberian program bantuan sosial dan berbagai pelayanan yang diberikan oleh pemerintah yang berupa pelayanan kesehatan dan pendidikan

²⁶³Hasimi, “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.”

serta kebutuhan pokok dasar manusia, Pemerintah mendistribusikan anggaran subsidi bagi masyarakat miskin, sebagaimana dalam surat Surah Al-Ma'arij ayat 24-25:

وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ ﴿٢٤﴾ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿٢٥﴾

Artinya; “dan orang-orang yang dalam hartanya tersedia bagian tertentu, bagi orang (miskin) yang meminta dan orang yang tidak mempunyai apa-apa (yang tidak mau meminta)”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa bantuan kekayaan yang berasal dari pemerintah untuk membantu masyarakat miskin kronis maupun miskin sementara, orang miskin yang tidak meminta-minta pada orang dan tidak disadari oleh orang lain bahwa dia adalah orang miskin, hendaklah orang seperti ini diberi sedekah atau bantuan yang dikeluarkan pemerintah, pemanfaatan bantuan bagi orang miskin sebagai modal kerja untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bantuan tersebut akan berdampak pada pembangunan sumber daya manusia dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejalan konsepnya Fahim Khan bahwa strategi pembangunan ekonomi Islam melalui dua strategi. *Pertama*, strategi menciptakan kesempatan kerja berupah tetap. *Kedua*, strategi menciptakan kewirausahaan pada masyarakat.²⁶⁴ Sayangnya kenyataan bahwa strategi pembangunan ekonomi yang diterapkan bersifat konvensional hanya berorientasi pada strategi yang pertama, sebagaimana berbagai cara untuk menciptakan

²⁶⁴Murtadho, “Strategi Pembangunan Ekonomi Yang Islami.”

kesempatan kerja berupah tetap bagi tenaga kerja sebanyak-banyaknya dan semurah-murahnya. Strategi ini yang terlibat orang kapitalis yang berinvestasi memperluas lapangan pekerjaan untuk dipekerjakan dengan mendatangkan keuntungan yang besar-besarnya bukan dilibatkan dalam aktivitas kewirausahaan. Strategi konvensional ini cenderung mengabaikan strategi penciptaan peluang kewirausahaan sebagai solusi problem pengangguran yang lambat laun menambah angka kemiskinan.

Program penanggulangan kemiskinan hendaknya berdasarkan kemanfaatan yang berupa mampu menciptakan kemandirian yang berupa kewirausahaan, sehingga program bantuan itu tidak hanya berputar pemilik modal tetapi orang miskin dipaksa untuk terlibat dalam lingkaran pasar yang ada. Program bantuan yang hanya berorientasi pada konsumtif dan yang terlibat pemilik modal saja, maka yang didapat hanya sebatas bantuan konsumtif tak menghasilkan manfaat perubahan mandiri.

Ketiga dasar keadilan, dasar ini berkaitan dengan aspek didistribusikan melalui program bantuan sosial. Pendistribusian bersifat merata tidak membeda-bedakan suku, ras, kaya dan miskin sebagaimana dalam firman Allah surat al-Ma'idah ayat 8:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ
 بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ آلَا
 تَعْدِلُوا ۗ وَعَدِلُوا ۗ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ
 ۗ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ [8]

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa program bantuan penanggulangan kemiskinan itu berdasarkan keadilan, sehingga pendistribusian dengan merata dan sesuai dengan penyebab miskin dan kondisi miskin agar tidak menimbulkan berbagai macam protes di masyarakat. Pihak pemerintah maupun masyarakat semua mampu menegakkan keadilan di manapun. Oleh karena itu manusia sebagai makhluk sosial yang berkewajiban memberikan pelajaran dan amalan yang adil untuk menciptakan manusia-manusia *insan kamil*.²⁶⁵ Ketiga dasar ini adalah dasar satu kesatuan dan saling kait mengkait untuk melaksanakan ketiga dasar dalam melaksanakan berbagai program bantuan sosial baik sebagai aktor pemangku kebijakan, warga masyarakat dan orang miskin sendiri juga melaksanakan ketiga dasar ini agar tercapai tujuan kesejahteraan dan *insan kamil*.

²⁶⁵Yulianti, Hayati, and Sobarna, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Berdasarkan Al-Qur’an Surat Al-Ma’idah Ayat 8.”

Pemerintah pusat bekerja sama dengan pemerintah daerah dalam mengatasi semua persoalan daerah, berlakunya Otonomi Daerah/OTDA memberikan wewenang daerah untuk memecahkan persoalan daerah agar tercapai peningkatan kesejahteraan dan memberikan layanan masyarakat secara cepat. Oleh karena itu dalam menganalisa menggunakan kuadran I sebagai peran strategi penanganan kemiskinan yakni pemerintah bekerjasama dengan masyarakat baik tokoh masyarakat dan orang miskin sendiri. Penanggulangan kemiskinan tidak hanya pemerintah saja yang bertanggung jawab tetapi bersifat kolektif untuk mencapai kesejahteraan umat. Maqasid Syariah merupakan pilar dalam memutuskan kebijakan publik, sejalan dengan pernyataan Abdul Manan dan Umer Chapra bahwa pemerintah berkewajiban memberikan bantuan langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat miskin, karena itu elemen masyarakat bekerjasama dan mendukung pemerintah agar tercapai tujuan mengubah orang miskin menjadi mandiri, sejahtera, maju, berdaya saing.

	Peran strategi	Peran tidak/kurang strategi
	I	II
Masyarakat mampu melaksanakan	Pemerintah dengan Masyarakat: bekerjasama, support dan kontrol	Masyarakat: protes, konsumtif
	III	IV

Masyarakat tidak mampu melaksanakan	Pemerintah: -proses dan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan dan menjadikan bantuan sesuai masalah miskin serta pengawasan maupun evaluasi	Pemerintah: keuntungan dan mengutamakan kepentingan
-------------------------------------	---	---

Kuadran I menjelaskan bahwa pemerintah dengan Masyarakat: bekerjasama, support dan kontrol, jika peran strategis antara pemerintah dan masyarakat terlaksana dengan baik, maka kuadran II masyarakat tidak akan protes, dan konsumtif masyarakat miskin sewajarnya. Kuadran III menjelaskan bahwa masyarakat tidak mampu menjalankan program bantuan tanpa dukungan pemerintah, karena pemerintah memiliki kekuatan mengeluarkan kebijakan program penanggulangan kemiskinan dan menjadikan bantuan sesuai masalah miskin serta pengawasan maupun evaluasi, maka kuadran IV hendaknya diabaikan oleh pihak pemerintah maupun masyarakat.

Kuadran tersebut yang perlu dilaksanakan oleh masing-masing *stakeholder* sesuai peran masing-masing dan berorientasi pada pilar kebijakan publik yakni kesejahteraan umat, sehingga tercapai tujuan program bersifat kolektif tetapi menyelesaikan miskin bersifat individu agar program penanggulangan kemiskinan

tercapai sasaran. Peningkatan Produk Domestik Regional Bruto/PDRB dan IPM merupakan peran pemerintah, agar pertumbuhan ekonomi daerah dan indek pembangunan manusia meningkat melalui program bantuan kelompok miskin. Maka peran pemerintah menggenjot program penanggulangan kemiskinan agar mandiri, berdasarkan wawancara sebagai berikut:

“Pemberian pelatihan bertujuan agar orang miskin mampu berwirausaha dan juga diberikan pelatihan tentang pemasaran barang agar mampu membuka lapangan kerja baru. Pemerintah juga membantu dan mempermudah jika ada masyarakat membutuhkan modal”(Hasil wawancara dengan W pada tanggal 13 desember 2022)

Langkah yang harus diprioritaskan pemerintah untuk mengatasi kemiskinan dengan membuka lapangan kerja, meningkatkan kualitas pendidikan, mendukung usaha mikro, menjaga kestabilan harga barang pokok, memberikan subsidi kepada masyarakat, memberikan bantuan langsung, mengembangkan balai latihan kerja, mempermudah birokrasi investasi. Sehingga di masing-masing kabupaten/kota disediakan pelayan masyarakat terpadu yang berupa mal/galeri agar cepat teratasi masalah masyarakat disekitarnya, berdasarkan wawancara:

“Otonomi daerah memberikan pelayan cepat dan meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu pemerintah daerah mendirikan pos-pos pelayan yang berupa mal/pelayan terpadu ataupun galeri atau kantor pelayanan terpadu agar pemerintah lebih dekat dengan masyarakat. Fungsi mal pelayan terpadu memberi kemudahan, kecepatan, keterjangkauan kemandirian dan kenyamanan

kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayanan. Selain itu untuk meningkatkan daya saing global dalam memberikan kemudahan berusaha untuk lebih produktif”. (Hasil wawancara dengan T pada tanggal 13 Desember 2022)

Peran pemerintah sudah sejalan dengan strategi Fahim Khan menciptakan lapangan pekerjaan. Namun peran pemerintah masih terkesan bersifat administrative dan sekedar penyerapan anggaran semata agar tidak masuk lingkaran korupsi, sehingga hanya sekedar pertanggung jawaban belaka. Program dikatakan berhasil apabila kegiatan tersebut mampu mencapai tujuan sesuai dengan apa yang diharapkan. Setiap kegiatan yang dilaksanakan tentunya tidak akan luput dari kesalahan-kesalahan, baik kesalahan yang fatal maupun kecil. Oleh karena itu agar tidak terjadi kesalahan berdasarkan SOP yang merupakan pedoman pelaksanaan program bantuan. Peran pemerintah otonomi daerah menjalankan amanat pemerintah propinsi untuk memberikan layanan dan pemecahan masalah yang dialami masyarakat di semua bidang kehidupan.

Orientasi peran pemerintah daerah berdasarkan SOP/standar operasional prosedur yang berfungsi sebagai pedoman memudahkan pelaksanaan kerja. SOP yang berisi tahapan dan urutan suatu pekerjaan akan menuntut aktor menyelesaikan tugasnya. Apakah ada kreatifitas dan inovatif serta tetap berpedoman SOP dalam menjalankan pendistribusian program

bantuan, apakah bantuan disesuaikan kondisi dan penyebab kemiskinan, berdasarkan wawancara:

“Maaf kita sebagai aktor pelaksana dalam mendistribusikan bantuan berdasarkan hukum SOP yang ada, sehingga tidak bisa ditafsirkan semau kita. Karena bantuan itu riskan, sehingga kita distribusikan apa adanya dan mampu mempertanggung jawabkan, pertumbuhan ekonomi tercapai yang diamanahkan propinsi, masalah masyarakat miskin berubah atau tidak bukan tanggung jawab kita. Harusnya masyarakat sadar diri diberi bantuan dan tujuan pemerintah hanya sekedar bantu melalui pembagian jenis bantuan”(hasil wawancara dengan NC pada tanggal 14 Desember 2022)

Pemerintah berperan sesuai dengan administrasi dan SOP yang dijalankan dalam program bantuan penanggulangan kemiskinan, dalam pemahaman aktor daerah jika laporan tidak sesuai dengan hukum yang berlaku, khawatir dianggap korupsi. Sehingga melaksanakan peran pemerintah daerah dalam menggunakan anggaran berorientasi penyerapan dan mampu dipertanggung jawabkan.

Dalam ekonomi Islam semua kebijakan publik yang dihasilkan oleh aktor pembuat kebijakan yakni pemerintah hendaknya memperhatikan beberapa prinsip:

- a. Prinsip ketauhidan (*Ilahiah*) adalah merupakan prinsip pondasi yang harus dipegang oleh aktor pemerintah dalam pembuatan kebijakan baik proses pembuatan, pelaksanaan serta evaluasi hingga perbaikan kebijakan harus berdasarkan prinsip

ketauhidan. Dalam penelitian ini prinsip ketauhidan hanya sekedar administrative, sehingga *falah* hakiki masih semu.

- b. Prinsip kemanusiaan (*Insaniah*) adalah prinsip yang dipegang oleh semua elemen, yang harus memperhatikan orang disekitarnya. Prinsip ini berorientasi pada kepedulian sesama tanpa membedakan satu dengan lainnya. Oleh karena itu jenis kebijakan untuk siapapun hendaknya berdasarkan kesejahteraan dan kenyamanan semua masyarakat sekarang hingga di masa depan. Prinsip ini diimplementasikan pada penanggulangan kemiskinan hendaknya memanusiakan yang diwujudkan orang miskin mampu berwirausaha, sebagainya penelitian Fahim Khan bahwa orang miskin hendaknya dipaksa berwirausaha melalui berbagai pemberdayaan potensi yang dimiliki masyarakat miskin.
- c. Prinsip keseimbangan (*Tawazun*) adalah prinsip yang menekankan adanya keseimbangan antara materi dan non materi, artinya aktor penentu kebijakan tidak hanya berorientasi harta tetapi bagaimana aktor pemerintah daerah untuk memotivasi tetap berusaha mengubah nasib dan tetap hidup nyaman mungkin walau kondisi serba pas-pasan. Hal ini akan berdampak pada kehidupan sosial yang romantis dan humanis, maka akan melahirkan kesejahteraan yang seimbang antara materi dan spiritual yang dimiliki masyarakat miskin. Di sinilah aktor pemerintah penentu kebijakan berorientasi pada

keseimbangan material dan non material serta keseimbangan pribadi dan sosial serta proposional.

- d. Prinsip keadilan (*Al- 'Adalah*) adalah prinsi ini merupakan dasar yang dipegang oleh siapaapaun baik pada posisi *up line* (tingkat atas) maupun *down line* (tingkat bawah) tetap menerapkan sifat keadilan dengan siapapun. Kebijakan harus sesuai dengan pedoman dan tepat sasaran serta merata tanpa membedakan. Kebijakan publik yang baik jika kebijakan sesuai dengan nilai ketauhidan, kemanusiaan, dan seimbang serta adil, maka kebijakan tersebut akan menghasilkan kemaslahatan umat manusia.
- e. Prinsip pelayanan (*Al-Khadimah*) adalah prinsip ini merupakan prinsip yang dijalankan oleh aktor pusat maupun daerah yang pemberi pelayanan yang baik yang disebut *servis excelen*. Karena aktor pemimpin/pegawai birokrasi sebagai pelayan masyarakat, oleh karena itu kebijakan yang dibuat juga berprinsip pelayanan terbaik kepada masyarakat. Masyarakat yang membutuhkan/memiliki masalah yang diberi pelayanan, bukan memberikan pelayanan karena unsur kepentingan atau orang yang berpengaruh pada kariernya. Dalam hal ini maka yang diutamakan adalah masyarakat miskin yang intens diberikan pelayanan hingga mereka mampu mandiri.
- f. Prinsip keteladanan (*Uswah Al-Hasanah*) adalah prinsip yang dimiliki bagi tingkatan *up line* karena orang atas yang disebut

pemimpin hendaknya sebagai abdi atau pelayan masyarakat dituntut sebagai contoh suri tauladan masyarakat. Oleh karena itu dalam membuat kebijakan juga mengisaratkan keteladannya. Aktor pemimpin mampu mengimplementasikan sifat kepemimpinan Nabi Muhammad Saw. Sebagaimana pernyataan “*Sayyid al-qawm khaadimuhum*”²⁶⁶ (pemimpin adalah pelayan bagi umat). Pemimpin mengatasi kemiskinan, maka memberikan pelayanan maksimal agar masyarakat miskin mampu melaksanakan kemandirian hingga kuat dalam mengembangkan pemberdayaan hingga si miskin mandiri.

Perumusan kebijakan publik harusnya tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut di atas dan sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945 yang merupakan dasar nilai agama. Oleh karena itu kebijakan publik di Indonesia menjadikan dasar pijakan pembuatan kebijakan. Kebijakan publik tidak berorientasi pada kepentingan dan keuntungan pribadi ataupun kelompoknya. Dengan demikian prinsip *maqasid syariah* tersebut seharusnya jadikan dasar negara membuat jenis kebijakan publik apapun sesuai ajaran Islam yang bertujuan untuk menghasilkan kesejahteraan bagi semua masyarakat, sehingga menghilangkan *pareto optimality*.

Maqashid syari'ah dalam praktek kehidupan dibagi menjadi tiga tahap, yaitu: Pertama, *dharuriyah* yakni kebutuhan

²⁶⁶Qisthi and Sosial, “Meningkatkan Kinerja Aparat Birokrasi.”

primer yang menjadi keinginan pokok manusia harus terpenuhi jika tidak terpenuhi menimbulkan penderitaan, kehancuran baik dunia dan akherat. Kebutuhan *dharuriyah* tersebut merupakan bagian dari lima prinsip *maqasid syariah* yang terjaganya prinsip agama (*hifzud-dien*), jiwa (*hifzun-nafs*), akal (*hifzul-'aql*), keturunan (*hifzun-nasb*), dan harta (*hifzul-maal*);

Kebutuhan kedua, *hajjiah* merupakan kebutuhan sekunder, yang mana sebagai pendukung kebutuhan primer misalnya kebijakan publik memerlukan badan pengawasan kebijakan publik agar tercapai tujuan kemaslahatan umat dan mengatasi kendala dan persoalan dalam menjalankan kebijakan publik. Kebutuhan ketiga, *tahsiniyyah*, merupakan kebutuhan tersier yang dapat memberikan daya tarik, kebahagiaan dan kenyamanan masyarakat. Pelaksanaan kebijakan publik menjalankan tahapan kebutuhan primer *dharuriyah* kebutuhan *hajjiah* dan *tahsiniyyah* sebagai pendukung agar kebutuhan *dharuriyah* sebagai kebutuhan pokok mudah tercapai tujuan kesejahteraan demi kemaslahatan umat bersama.²⁶⁷

Pemberdayaan masyarakat tidak bisa dihindari dari kemandirian, aspek kemandirian butuh intervensi pemerintah melalui program bantuan sosial. Selain intervensi pemerintah, masyarakat juga ikut mendukung dan meningkatkan kesadaran diri untuk berdaya dalam menghadapi persoalan hidupnya. Pemerintah

²⁶⁷Janah and Ghofur, "Maqashid As-Ayari'ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam."

wajib menganggarkan untuk mewujudkan pemberdayaan.²⁶⁸ Kemandirian daerah juga perlu mendukung pemberdayaan. Tanpa intervensi pemerintah dan dukungan masyarakat pemberdayaan tidak bisa diwujudkan.

Prinsip tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Wujud keimanan manusia kepada Allah dapat tercermin dengan cara bekerja keras dan menyadari bahwa Allah selalu mengawasi apa saja yang dilakukan di muka bumi dan menganggap bahwa bekerjapun bernilai ibadah kepada Allah. Prinsip ketauhidan yang dipraktekan pemerintah daerah dalam menjalankan semua program bantuan sudah berjalan dengan baik. Hal tersebut terlihat bahwa aparat pemerintah tugas pokoknya di bidang penanggulangan kemiskinan telah bekerja keras namun belum mampu memandirikan masyarakat miskin berdasarkan kutipan wawancara:

“Bantuan tunai sebelum dicairkan, diadakan pelatihan misalnya 30 KK tetapi yang berhasil 3 orang itu sudah baik sudah dikatakan berhasil. Kendalanya ada pada orangnya, sifat malas bahkan berpikir tidak bekerja tiap hari bisa makan dan masyarakat bersifat konsumtif”
(Hasil wawancara dengan T Pada tanggal 13 Desember 2022)

Di sinilah peran pemerintah sangat berat untuk melaksanakan *amar makruf nahi munkar* melalui peningkatan

²⁶⁸Mukhlis and Makhya, “Implikasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemandirian Daerah Pasca Pemekaran (Studi Di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, Dan Mesuji Lampung).”

kesejahteraan dan mendistribusikan berbagai bantuan untuk masyarakat miskin, selain memberikan bantuan juga memberikan berbagai pelatihan agar orang miskin sejahtera dan pendapatannya dapat memenuhi kebutuhan tanpa bergantung orang lain, sejalan dengan visi daerah semakin sejahtera, mandiri dan berakhlak bersama rakyat.

Prinsip khalifah yakni pemerintah mempunyai fungsi alokasi, distribusi dan stabilitas ekonomi yang dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan umat sebagaimana Umer Chapra bahwa Allah menciptakan manusia sebagai *khalifatullaah fil ardhi* artinya setiap manusia sebagai pemimpin dan manusia yang wajib memakmurkan bumi.²⁶⁹ Peran utama pemerintah menjaga keberaturan hidup manusia, sehingga keributan dunia dapat dihilangkan. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa manusia sebagai khalifah adalah pemerintah melalui program bantuan agar pertumbuhan dan IPM tercapai tujuan kemandirian ekonomi, berdasarkan hasil wawancara:

“Untuk mencegah kekacauan dan keributan terkait bantuan masyarakat miskin, maka kita membentuk koordinator lapangan/koorlap sebagai orang yang bertanggung jawab dilapangan untuk mendampingi pencairan program bantuan orang miskin mengurangi kekacauan/keributan di masyarakat, beda masa sebelum

²⁶⁹M. Quraish Shihab, *Khilafah: Peran Manusia di Bumi*, (Tangerang: PT Lentera Hati, 2020): 51.

otonomi daerah tanpa pendampingan lapangan”
(wawancara dengan W pada tanggal 13 Desember 2022)

Prinsip keadilan adalah sendi kehidupan dalam melaksanakan kesejahteraan dan bersifat merata semua orang bahkan mereka yang membutuhkan, sehingga harta itu harus berputar dan tidak berputar pada orang kaya saja. Berdasarkan hasil wawancara:

“Prinsip keadilan ditegakkan dalam penyaluran program bantuan masyarakat miskin, karena data by name dan by name itu terdaftar di DTKS di web dingsos berdasarkan data dari bawah dan ini merupakan indikator keadilan karena data itu mencerminkan pemerataan bagi yang berhak mendapatkan bantuan dan tidak ada diskriminatif. Kalau ada yang mengatakan tidak tepat sasaran, tidak merata dan diskriminatif itu bagi orang yang tidak mendapatkan bantuan dan orang mampu”(wawancara dengan T pada tanggal 13 Desember 2022)

Prinsip keadilan merupakan pendistribusian kekayaan pada semua kelompok, khususnya masyarakat miskin terpenuhi hak-haknya untuk hidup layak. Karena keadilan bukan sekedar berbuat baik saja misalnya memberikan bantuan belaka tetapi harus rata dan tepat sasaran, tidak sama rasa sama rata. Oleh karena itu pemerintah daerah sebagai khalifah mampu mengelola keuangan dan sumber daya yang dimiliki untuk melakukan program produksi dalam mengejar tercapainya kemaslahatan bersama,

B.Peran Masyarakat Sebagai Kontrol Kebijakan Pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah era otonomi Daerah Perspektif Ekonomi Islam

Indikator peran masyarakat dalam peberantasan kemiskinan, masyarakat sebagai pelaku utama kegiatan dalam mendukung keberhasilan pembangunan ekonomi dalam hal ini menanggulangi kemiskinan di suatu daerah. Masyarakat berperan untuk mewujudkan kemajuan, kesejahteraan melalui berbagai upaya untuk memberikan sumbangan sosial dan meningkatkan kebaikan dalam masyarakat. Masyarakat diajak untuk menyumbangkan ide tahap perencanaan pemberantasan kemiskinan. Masyarakat juga diajak untuk membuat keputusan dan pembentukan kepanitian dalam program penanggulangan kemiskinan. Peran masyarakat berkolaborasi dengan pemerintah sehingga strategi kuadran 1 berjalan dengan baik, jika pemerintah dan masyarakat berbagi bermain peran dalam penanggulangan kemiskinan, akan lebih cepat penurunan angka kemiskinan.

Masyarakat yang ditokohkan/kyai juga bisa memberikan kesadaran individu miskin melalui pengarahan dan penyuluhan diajak untuk berubah dengan cara pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat miskin diubah *mindsetnya* agar mulai bertanggung jawab terhadap kondisi sosial di lingkungannya, memiliki rasa simpati dan berempati serta mengajak masyarakat untuk berpikir kritis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat

yang penuh ketidakpastian dan derasnya globalisasi, berdasarkan wawancara:

“Bahwa saya berceramah sesuai pesan dan momen hajad tuan rumah, terus terang saya belum pernah memberikan ceramah ajakan untuk bekerja keras, mengubah mindset masyarakat untuk mandiri dan memotivasi untuk memberikan kesadaran masyarakat untuk meningkatkan etos kerja dan bekerja sungguh-sungguh merupakan suatu ibadah”(wawancara dengan SW pada tanggal 13 Desember 2022)

Bidang ekonomi dan politik tidak cukup menyelesaikan problem kemiskinan. Sebagaimana Muhammad Arif dalam buku *Agama, Filsafat dan Kemiskinan* menjelaskan bahwa memecahkan masalah miskin diperlukan bidang religiusitas masyarakat sebagai bagian yang tidak boleh diabaikan. Aspek religiusitas juga berperan dalam kehidupan manusia Jawa Tengah, namun ajaran Islam di Indonesia pada rutinitas ritual biasanya cenderung jauh dari persoalan kemiskinan. Oleh karena itu peran tokoh masyarakat agama yang mempunyai pengaruh besar di masyarakat berprinsip ajaran Islam dapat menjadi alat penanggulangan kemiskinan.

Peran masyarakat menjadi kontrol program penanggulangan kemiskinan dengan berbagai cara. Berdasarkan wawancara:

“Peran masyarakat sudah dilakukan terbukti melalui PKK, posyandu, RT dan RW ikut mendukung kegiatan-kegiatan kelurahan dan berpartisipasi dalam pembangunan. kontrol program bantuan yang digunakan untuk konsumtif, terus terang siapapun tidak ada yang

berani yang menegur agar bantuan untuk produktifitas bukan konsumtif belaka” (wawancara dengan M pada tanggal 15 desember 2022)

Pengendalian sosial atau kontrol sosial merupakan suatu tindakan baik direncanakan maupun tidak, yang bersifat mengajak, mengawasi, dan mencegah agar masyarakat di lingkungan dapat terkendali. Fungsi kontrol atau pengawasan yang dilakukan masyarakat melalui garis pemerintah desa yakni melalui RW/RT, PKK dan sejenisnya hanya memberikan pelayanan semata belum mampu berperan memberikan kesadaran individu miskin melalui pengarahan dan penyuluhan diajak untuk berubah dengan cara pemberdayaan masyarakat, sehingga masyarakat miskin akan dirubah mindsetnya agar mulai bertanggung jawab terhadap kondisi sosial di lingkungannya, memiliki rasa simpati dan berempati serta mengajak masyarakat untuk berpikir kritis terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat

Peran serta masyarakat dalam hal ini bersifat pasif karena dianggap program bantuan social itu tanggung jawabnya pemerintah, sehingga dalam hal ini peran tokoh masyarakat hanya berorientasi pada moral atau akhlak masyarakat setempat. Fungsi kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan merupakan hal yang penting dan dibutuhkan oleh setiap pemerintahan di berbagai negara, tidak terkecuali pengawasan kepada pemerintahan karena dengan adanya pengawasan yang dilakukan dapat mempengaruhi kinerja dari pemerintah guna menjalankan roda perekonomian.

Pengawasan masyarakat atas permasalahan di atas dapat dilakukan dengan cara melakukan teguran kepada perangkat desa atau dengan melaporkan tindakan tersebut kepada pihak kecamatan atau pihak kabupaten/kota. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, masyarakat tidak hanya sebagai penerima layanan publik, melainkan juga sebagai pengawas eksternal, kontrol bersama Ombudsman dan DPR/DPRD. Masyarakat berhak untuk mengawasi pelaksanaan standar pelayanan yang diselenggarakan oleh setiap penyelenggara pelayanan publik. Partisipasi masyarakat diperlukan sebagai aktor independen pengawasan untuk menjaga agar aset dan sumber daya alam daerah dikelola dengan semestinya. Bisa dikatakan sebagai bentuk transparansi karena dikelola dan diawasi oleh aktor yang terlibat dan terdampak secara langsung.

Peran masyarakat sebagai kontrol untuk menciptakan lingkungan yang lebih produktif, namun dalam tiga kabupaten masih pasif karena beranggapan bahwa persoalan kemiskinan merupakan tanggung jawab pemerintah semata. Padahal dalam mengentaskan kemiskinan diperlukan strategi kolaborasi antara pemerintah dengan tokoh masyarakat sebagaimana pernyataan Martino Sardi dalam bukunya Mutiullah dan Moch Nur Ichwan,²⁷⁰ bahwa tokoh masyarakat terutama tokoh agama tidak hanya pembangunan di bidang rohani tetapi juga bidang jasmani, ajakan

²⁷⁰Mutiullah dan Moch Nur Ichwan (ed., *Agama, Filsafat dan Kemiskinan*).

untuk beramal melalui kerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

C.Peran Orang Miskin dalam Mewujudkan Kemandirian Perspektif Ekonomi Islam.

Orang miskin punya potensi untuk bekerja dan mandiri karena manusia pada umumnya punya bakat dan minat yang perlu digali dan dikembangkan. Peran masyarakat miskin untuk meningkatkan kemandirian hidup melalui peminjam modal dari lembaga keuangan, penambah jam kerja, anggota keluarga ikut bekerja, merantau atau berhemat, tetap bekerja untuk menciptakan produktifitas, berusaha tetap kuat hilangkan rasa malas. memperbaiki kondisi kehidupan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, mengelola uang dengan baik, konsultasi dengan berbagai pihak, berdasarkan wawancara:

“Pemerintah bertanggung jawab terhadap rakyatnya, apalagi seperti saya yang hanya sebagai buruh tani dengan penghasilan tak menentu pengen mendapatkan bantuan pemerintah, bantuan social diberikan pada orang yang sudah mampu karena dekat dengan pejabat desa, orang sini dapat bantuan terus nyatanya masih tetap miskin, bahkan ada diajak bekerja tidak mau alasanya sudah cair bantuan dari pemerintah (hasil wawancara dengan W pada tanggal 13 Desember 2022)

Kemiskinan masih cukup tinggi di Indonesia khususnya di Jateng, sehingga berbagai pihak menaruh rasa prihatin. Tidak harus secara objektif dan sistematis untuk mengatasinya, kita hanya

perlu solidaritas dengan cara kita masing-masing secara unik, apakah itu secara individual maupun kolektif. Orang miskin memiliki potensi bakat dan minat yang bisa mengubah diri orang miskin, sehingga pemberdayaan/berwirausaha sejalan dengan bakat minat yang dimiliki untuk mengembangkan kemandirian melalui bekerja keras.

Kemiskinan dapat diatasi dengan bekerja keras yang merupakan kerja cerdas, bekerja sebaik mungkin dengan hasil yang lebih besar untuk usaha yang sama. Atau hasil yang sama dengan usaha yang lebih sedikit. Kerja ikhlas berarti kita harus bekerja dengan hati, dengan niat yang tulus semata-mata untuk ibadah dan mencari keridhaan Allah swt. sebagaimana hasil wawancara:

“Saya bisa membuka warung makan berkat bantuan dari pemerintah daerah dengan jumlah satu juta rupiah, namun lambat laun sekarang warung makan saya semakin ramai dan semakin besar bahkan saya mempekerjakan ibu rumah tangga sejumlah 6 orang. Orang yang malas bekerja tidak akan lepas dari kemlaratan, orang yang mau kmlawe mampu memenuhi kebutuhan hidup karena keberhasilan disertai niat ikhlas karena Allah semata” (wawancara dengan D pada tanggal 14 Desember 2022)

Peran orang miskin sendiri yang komitmen dan bertekad untuk bekerja keras nyatanya bisa terwujud, namun kalau *mindset* malas, tidak akan berhasil karena kerja merupakan kunci kemandirian dari kemlaratan. Sebagaimana Muhammad arif dalam buku Agama, Fiksafat dan kemiskinan menjelaskan bahwa memecahkan masalah miskin diperlukan bidang religiusitas

masyarakat sebagai bagian yang tidak boleh diabaikan. Aspek religiusitas juga berperan dalam kehidupan manusia rutinitas ritual bagi masyarakat miskin karena itu peran tokoh masyarakat agama mempunyai pengaruh besar di masyarakat.

Peran orang miskin sendiri sangat pasif dalam berdayakan dirinya berubah menjadi berdikari melalui program penanggulangan kemiskinan, sehingga dalam hal ini peran masyarakat miskin sendiri hanya sebagai sasaran kebijakan pemerintah semata tanpa berdampak pada perubahan kemandirian hidup. Masyarakat miskin menerima bantuan di gunakan konsumtif tidak digunakan untuk mengubah nasib lebih baik lagi. Fungsi masyarakat miskin juga sebagai kontrol kebijakan bantuan pemerintah dan juga mampu mengubah dirinya serta lapor diri bagi mereka yang sudah mampu berdikari.

Pengawasan masyarakat miskin antar kelompok miskin lainnya belum dilakukan, apakah program bantuan pemerintah yang diberikan digunakan sebagaimana mestinya. Padahal peran orang miskin selain memperdayakan dirinya juga melakukan kontrol/pengawasan terhadap masyarakat miskin yang mendapatkan bantuan sosial. Pengawasan orang miskin berguna agar visi misi pemerintah tercapai dan aset dan sumber daya alam daerah dikelola dengan semestinya.

Kemiskinan yang disebabkan pada tiga kabupaten berbagai factor, salah satu factor bidang pendidikan. Tingkat pendidikan

masyarakat sangat rendah, sebagaimana data rata-rata lama Pendidikan sebagai berikut:

Tabel 16. Rata-Rata Sekolah

Kab.	Usia Harapan Hidup saat Lahir			Harapan Lama Sekolah			Rata lama Sekolah		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Kebumen	73.40	73.55	73.70	13.34	13.35	13.36	7.54	7.55	7.85
Wonosobo	71.82	71.94	72.05	11.75	11.76	11.78	6.81	6.82	6.88
Brebes	69.33	69.54	69.74	12.04	12.05	12.15	6.21	6.22	6.35

Sumber BPS Jateng.

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa pada tahun 2022 rata-rata lama Pendidikan untuk kabupaten Kebumen SMP tidak lulus, kelas 1 SMP DO karena berbagai alasan kemiskinan dan dua kabupaten lulus tingkat sekolah dasar.

Bantuan pemerintah sering disalah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, bahkan individu miskin mendapatkan bantuan disalah artikan untuk konsumtif dan berharap setiap bulan mendapatkan bantuan. Padahal program bantuan itu sifatnya membantu dari ketidak mampuan masyarakat miskin. sejalan dengan ajakan Islam bahwa orang miskin tetap menjaga tujuh hal yang ada dalam hadist di bawah ini:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قَالَ أَمْرِي خَلِيلِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ أَمْرِي بِحَبِّ الْمَسْكِينِ وَالِدُنُوِّ مِنْهُمْ وَأَمْرِي أَنْ أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنْظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي وَأَمْرِي أَنْ أَصِلَ الرَّجْمَ وَإِنْ أَدْبَرْتُ وَأَمْرِي أَنْ لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا وَأَمْرِي أَنْ أَقُولَ بِالْحَقِّ وَإِنْ كَانَ مِرًّا وَأَمْرِي أَنْ لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ وَأَمْرِي أَنْ أَكْثِرَ مِنْ قَوْلِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُمْ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ

Artinya: Dari Abu Dzar berkata, "Kekasihku (Rasulullah) menyuruhku dengan tujuh hal: mencintai orang-orang miskin dan dekat dengan mereka, melihat kepada orang yang di bawah dan tidak melihat yang di atasku, menyambung silaturahmi walau dibenci, dan tidak memintaminta pada seorang pun. Dan beliau juga menyuruhku untuk berkata benar walau pahit rasanya, tidak takut cacian karena Allah, dan memperbanyak untuk mengucapkan Laa Haula Walaa Quwwata Illa Billahi (Tiada daya dan upaya kecuali karena Allah) ', sebab itu adalah simpanan dari simpanan surga."

Orang miskin memiliki potensi bakat dan minat yang bisa mengubah diri sendiri, sehingga pemberdayaan melalui kerja ikhlas berarti kita harus bekerja dengan hati, dengan niat yang tulus semata-mata untuk ibadah pada Allah, walaupun ada tokoh yang mengatakan bahwa keberadaan miskin merupakan *sunnatullah* tetapi Islam menyerukan untuk memberantas kemiskinan agar semua orang tercapai *falah*. Manusia tidak hanya berorientasi materi semata dan sebaliknya hidup tidak hanya untuk akhirat, tetapi perlu keseimbangan antara dunia dan akherat, sebagaimana pernyataan Ibrahim Ahmad Harun,²⁷¹ bahwa kebutuhan pokok meliputi seseorang mampu melaksanakan ibadah²⁷² dan terpenuhi kebutuhan pokok dasar serta hidupnya tidak mengalami

²⁷¹Harun, "Implementasi Konsep Maslahah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumbuh Ulama."

²⁷²Manusia diciptakan untuk ibadah dan tunduk pada aturan Allah dan Allah berikan rezeki sesuai dengan apa yang manusia perbuat bisa dilihat M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Hlm 359-360.,

kehawatiran atau was-was, maka ketiga hal tersebut bisa dikatakan orang tersebut sejahtera. Kesejahteraan tidak dialami dengan gratis tanpa adanya usaha yang disebut kerja keras yang mampu menggerakkan tubuh manusia yang masing-masing memiliki fungsi tubuh manusia, sejalan dengan surat ar-Ra'du ayat 11

إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

Sejalan dengan ahli tafsir bahwa ayat tersebut memberikan motivasi manusa untuk mengubah nasib hidup dengan cara usaha dan jerih payahnya sendiri dengan tujuan mencapai kesejahteraan yang bersifat *falah*.²⁷³ Penanggulangan kemiskinan dengan cara bekerja juga didukung adanya kerjasama berbagai pihak baik pemerintah, tokoh masyarakat maupun komitmen orang miskin sendiri.

Solusi penanggulangan kemiskinan menggunakan teori kuadran strategi penanggulangan kemiskinan sebagai berikut:

KUADRAN II	KUADRAN I
Kemiskinan	Sejahtera

²⁷³“<https://Islam.Nu.or.Id/Tafsir/Tafsir-Ar-Ra-d-Ayat-11-Motivasi-Mengubah-Nasib-OcXb8>,” n.d.

Material	
KUADRAN IV	KUADRAN III
Kemiskinan Absolut	Kemiskinan Spiritual

Teori kuadran strategi penanggulangan kemiskinan tersebut menjelaskan, kuadran 1 bahwa suatu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan pokok secara materi maupun spiritual artinya keluarga ini keluarga yang bekerja dan pendapatan cukup memenuhi kebutuhan dan menjalankan perintah dan larangan Allah serta hidupnya tenang dan tidak was-was. kuadran 1 ini merupakan keluarga masuk konsumsi total artinya selain konsumsi materi juga konsumsi ibadah melalui ZIS/ zakat infak sodaqah.

Kuadran II artinya keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan spiritual tetapi mereka miskin untuk memenuhi kebutuhan material dan sebaliknya pada kuadran III artinya bahwa keluarga mampu memenuhi kebutuhan materi dalam kehidupan namun miskin spiritualnya. Kuadran ke IV yang parah karena keluarga yang miskin materi juga miskin spiritual. Pada tiga kabupaten di Jawa Tengah yakni Kebumen, Wonosobo maupun Brebes keluarganya terdiri dari ke empat kuadran, dengan beberapa kondisi yang dialami, misalnya kuadran 1 jelas keluarga sejahtera, kuadran II yang mana keluarga yang agamanya sangat kuat tetapi miskin materi namun masih tetap bekerja keras untuk memenuhi

kebutuhan hidup keluarga, tetapi kuadran III keluarga yang mampu materi bahkan tergolong kaya tetapi miskin spiritual bahkan keluarga yang nakal suka buat onar dan yang lebih parah lagi kuadran IV keluarga miskin harta dan miskin spiritual artinya lebih parah karena keluarga miskin, nakal buat lingkungan tidak nyaman dan tidak taat aturan agama, berdasarkan kutipan wawancara:

“Kondisi masyarakat komplek, ada keluarga baik tapi miskin materi dan miskin spiritual, keluarga kaya dan ahli ibadah juga ada itu tidak perlu diperhatikan, yang lebih parah keluarga sudah miskin berperilaku nakal sering mengganggu masyarakat, ada keluarga kaya minta bantuan sosial, padahal mereka itu sarjana marah-marah ke kantor kelurahan protes tidak mendapatkan bantuan dan bahkan ada keluarga kerabat pejabat walaupun sudah pensiun, anaknya dapat bantuan padahal mampu” (wawancara dengan M sebagai tokoh masyarakat tanggal 15 Desember 2022)

Penanggulangan kemiskinan agar tercapai tingkat kesejahteraan yang *falah* diperlukan kerja keras, dalam hal ini diperlukan kelompok miskin diberdayakan melalui anggaran yang diberikan pemerintah. Oleh karena itu bantuan lebih berorientasi pada penguatan potensi yang dimiliki oleh si miskin. Penguatan potensi sebagai modal pemberdayaan si miskin, karena pemberdayaan akan berhasil jika disesuaikan dengan bakat dan minat yang dimiliki oleh si miskin, oleh karena itu si miskin yang belum mampu berdaya didorong dan dimotivasi agar bekerja keras

sesuai potensi keahlian si miskin²⁷⁴ Dorongan dan motivasi dari pihak lain, akan menciptakan perilaku optimis dan unggul hasilnya. Namun program bantuan penanggulangan kemiskinan belum mampu disesuaikan dengan kebutuhan dan masalah si miskin, sejalan dengan hasil kutipan wawancara:

“Maaf kita sebagai aktor pelaksana dalam mendistribusikan bantuan berdasarkan hukum SOP yang ada, sehingga tidak bisa ditafsirkan semau kita. Karena bantuan itu riskan, sehingga kita distribusikan apa adanya dan mampu mempertanggungjawabkan, pertumbuhan ekonomi tercapai yang diamanahkan propinsi, masalah masyarakat miskin berubah atau tidak bukan tanggung jawab kita. Harusnya masyarakat sadar diri diberi bantuan dan tujuan pemerintah hanya sekedar bantu melalui pembagian jenis bantuan serta mereka lapor diri kalau sudah mampu hidup layak ”(Hasil wawancara dengan NC pada tanggal 14 Desember 2022)

Prinsip ketauhidan merupakan modal utama yang wajib dilaksanakan oleh masyarakat miskin diimplementasikan dalam kehidupan, walaupun dalam kondisi miskin tetap usaha dan doa dan tetap baik-baik saja. Peran orang miskin mampu mengaktualisasikan potensi yang dimiliki dengan ikhlas merupakan suatu perbuatan ibadah, jika potensi orang miskin diberdayakan melalui kreatifitas dan inovasi dalam pekerjaan akan mendapatkan hasil. Potensi orang miskin dioptimalkan akan mengubah kondisi mereka menjadi berdaya. Pada umumnya masyarakat miskin di tiga kabupaten propinsi Jawa Tengah belum

²⁷⁴Kirom, “Etos Kerja Dalam Islam.”

mampu mengimplementasikan prinsip iman kepada Allah melalui kerja keras dan tidak bermalas-malasan, sebagaimana hasil wawancara dengan T sebagai koorlap nangkis mengadakan pelatihan 30 KK, namun yang berhasil 3 orang saja. Padahal Allah memerintah manusia semangat dan bekerja sungguh-sungguh.

Stakeholder dalam menanggulangi kemiskinan berdasarkan filosofi ekonomi Islam, dimana akidah dan akhlak sebagai pelaku manusia yang menghasilkan instrumen iman, zuhud, jujur, peduli, adil dan sebagainya sedangkan syariah merupakan system ekonomi yang instrumennya tidak ada unsur riba, maysir, dan sejenisnya. Semua instrumen itu akan menghasilkan distribusi kekayaan dan pendapatan yang mampu mengatasi kemiskinan, apabila kolaborasi *stakeholder* melalui tiga cara:

Pertama optimalisasi keterlibatan semua pihak baik pemerintah, masyarakat dan orang miskin sendiri. Ekonomi konvensional hanya berpihak pemodal, sehingga orang miskin tidak terlibat aktifitas pasar. System ekonomi Islam orang miskin dipaksa masuk yang disebut dengan ekonomi inclusion artinya orang miskin terlibat secara kontinyu.

Kedua kemanfaatan ekonomi artinya berapa banyak bisa bermanfaat bagi semua kelompok, tidak hanya kelompok kapital saja. Ekonomi Islam kemanfaatan ekonomi peduli pada kelompok miskin agar bermanfaat untuk mencapai *falah* tidak hanya kemanfaatan yang berorientasi materi semata.

Ketiga, volume ekonomi; menurut ekonomi konvensional bahwa volume ekonomi dilihat dari kepuasan ditentukan pendapatan, semakin puas seseorang semakin tinggi pendapatan yang diperoleh. Tetapi ekonomi Islam, volume ekonomi dilihat dari kepedulian pada orang lain. Masalah kemiskinan merupakan masalah kolektif bukan masalah individu.

Penanggulangan kemiskinan dalam ekonomi Islam merupakan prioritas utama dalam pembangunan ekonomi, sehingga pembangunan ekonomi Islam menempatkan kaum duhafa sebagai objek utama. Sedangkan ekonomi konvensional kalau ada anggaran, baru berorientasi subsidi. Sedangkan ekonomi Islam kaum miskin terpenuhi dahulu, akan berdampak pada ekonomi, misalnya orang miskin mendapatkan pendapatan, maka akan bertambah uang yang berputar dalam perekonomian menambah tingkat perekonomian secara luas. Oleh karena itu peran *stakeholder* bersama-sama menciptakan kewirausahaan di keluarga miskin melalui dana bantuan pemerintah yang diberikan masyarakat miskin lebih berorientasi pada kebutuhan dan masalah si miskin tidak berikan bantuan semua sama tanpa melihat kondisi miskin. Program bantuan melalui keterlibatan dalam kegiatan kewirausahaan dan penciptaan lapangan kerja dengan memperbadayakan potensi yang dimiliki oleh kelompok miskin, lebih bersifat maqasid Syariah dan tidak mengarah kegiatan yang bersifat *pareto optimality*.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis dapat menyimpulkan mengenai program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah Era Otonomi Daerah perspektif ekonomi Islam, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, Pentingnya program penanggulangan kemiskinan di Jawa tengah era Otonomi Daerah, karena persoalan kemiskinan berdampak pada pertumbuhan dan pembangunan ekonomi, dimana keduanya bertujuan untuk menaikkan pendapatan nasional. Namun arah program penanggulangan kemiskinan bergantung pada pusat dan pemerintah daerah dalam memecahkan masalah kemiskinan melalui program bantuan bersifat penyerapan anggaran belaka, sehingga program tersebut tidak memperhatikan kondisi dan penyebab mereka miskin hanya berdasarkan DTKS belaka. Penanggulangan kemiskinan pemerintah untuk mengurangi jumlah masyarakat miskin lamban,

Kedua, Peran stakeholder dalam program penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah era otonomi daerah perspektif ekonomi Islam, dalam hal ini pemerintah menjalankan program penanggulangan kemiskinan berorientasi pada peningkatan pendapatan daerah, sehingga berorientasi pada *pareto optimality* dan pemerintah mengabaikan keterlibatan masyarakat miskin

dalam kegiatan ekonomi. Fungsi kontrol atau pengawasan yang dilakukan masyarakat melalui desa, RT/RW, PKK dan sejenisnya hanya memberikan pelayanan semata belum mampu berperan memberikan kesadaran individu miskin melalui pengarahan dan penyuluhan diajak untuk berubah melalui program bantuan pemerintah. Peran masyarakat miskin yang bertanggung jawab dan termotivasi harusnya berorientasi produktifitas dalam menggunakan bantuan yang diterima dari pemerintah, namun masyarakat miskin masih berorientasi konsumtif dan tidak bisa bertanggung jawab melaporkan dirinya jika sudah mampu memenuhi kebutuhan hidupnya, karena sifat-sifat tersebut sangat sulit bagi orang miskin sendiri, karena *mindset* orang miskin menganggap tidak usah bekerja keras tetapi tetap bisa memenuhi kebutuhan hidup.

B. Saran

Berdasarkan penelitian tentang program bantuan penanggulangan kemiskinan pasca otonomi daerah perspektif ekonomi Islam di Jawa Tengah, maka penulis mengajukan rekomendasi untuk bahan evaluasi dan masukan baik secara teori pengetahuan maupun kebijakan praktis, sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah perlu kerjasama dengan perguruan tinggi melalui program KKN untuk mengkaji penanggulangan kemiskinan masih lambat dan belum mendapatkan hasil yang efektif, sebagaimana negara Brasil dan Amerika latin

menjalankan bantuan orang miskin berbentuk bantuan tunai di bidang kesehatan dan pendidikan dihentikan karena hasilnya tidak efektif.

2. Pemerintah harus mengevaluasi, memverifikasi dan memvalidasi DTKS sebagai wujud *amar makruf nahi munkar* yang termuat dalam prinsip ekonomi Islam yakni tauhid, khalifah dan keadilan. Agar data kemiskinan reliabel dan valid sehingga diketahui dampak program penanggulangan kemiskinan tahun berikutnya, dan agar program tidak salah sasaran., tidak sekedar penyerapan anggaran belaka.
3. Penyamaan program bantuan mengakibatkan ketimpangan, maka dikaji ulang kebijakan bantuan dalam penanggulangan masyarakat miskin, mengingat masyarakat memiliki kondisi dan penyebab kemiskinan berbeda-beda, sehingga otonomi daerah menerapkan jenis program beragam sesuai bakat minat akan mempercepat program penanggulangan kemiskinan.
4. Data kemiskinan lebih sederhana baik data *by name* dan bantuan satu pintu misalnya bank bantuan sosial. Tujuan data satu pintu agar setiap lembaga mendistribusikan tepat sasaran tidak terjadi *gap* di masyarakat yang menimbulkan gejala sosial.
5. Otonomi daerah dalam menaikan IPM dan PDRB perlu diimbangi gerakan melibatkan kegiatan kewirausahaan lingkungan miskin, karena pemerintah daerah memiliki

kewenangan menanggulangi kemiskinan sesuai dengan nilai-nilai kearifan lokal masing-masing kabupaten/kota agar cepat mereduksi masyarakat miskin. Tokoh masyarakat berperan memotivasi dan mengontrol masyarakat yang mendapatkan bantuan. Selain itu masyarakat miskin sendiri tetap bekerja untuk menciptakan produktifitas, berusaha tetap kuat hilangkan rasa malas. memperbaiki kondisi kehidupan memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, mengelola uang dengan baik, konsultasi dengan berbagai pihak

6. Tulisan ini tidak lepas dari kelemahan, dimana data yang digunakan adalah data primer, sehingga memiliki keterbatasan analisis secara mendalam. Oleh karena itu, peneliti lanjutan dapat menggunakan gabungan data sekunder primer dan pendekatan kualitatif kuantitatif.

C. Penutup

Demikianlah disertasi ini disusun guna memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar doktor dalam bidang Ekonomi Islam. Penulis bertanggung jawab atas isi disertasi ini. Disertasi ini tetap selalu terbuka bagi setiap jenis kritik dan masukan. Selain itu, masih banyak pertanyaan riset terkait program bantuan sosial dalam penanggulangan kemiskinan yang perlu diungkap melalui penelitian-penelitian lanjutan guna memberikan kontribusi lebih banyak lagi bagi bidang ilmu ekonomi Islam maupun bidang desentralisasi fiskal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Willya. "Corporate Social Responsibility and Zakat: A Model of Philanthropy in the Society Era 5.0." *Jurnal Scientia* 11, no. 01 (2022): 565–74. <http://seaninstitute.org/infor/index.php/pendidikan/article/view/579>.
- Achmad, Willya, and Muhammad Fedryansyah. "Implementing Social Capital in Poverty Reduction Efforts in Indonesia" 15, no. 3 (2022): 689–98. <https://doi.org/10.2478/bjlp-2022-002051>.
- Afandi, Muslim, and Syed Agung Afandi. "E-Government and Budget Transparency of Indragiri Hulu Government," no. ICoCSPA 2018 (2019): 75–79. <https://doi.org/10.5220/0008816900750079>.
- Affan, Ibnu. "Urgensi Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah." *DE LEGA LATA: Jurnal Lmu Hukum* 6, no. 1 (2020): 127–38. [http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata%0AVolume 6 N](http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata%0AVolume%206%20N).
- Ahmad, Sayed Fayaz, Muhammad Mansoor Alam, Mohd Khairil Rahmat, Muhammad Shujaat Mubarik, and Syed Irfan Hyder. "Academic and Administrative Role of Artificial Intelligence in Education." *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 3 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.3390/su14031101>.
- Aji, Dede, and Rifki Rosyad. "Religion and Economics : From the Transformation of the Human Capital Index (HCI) to the Economic Sovereignty of Islamic Boarding Schools in Indonesia." *Quantitative Economics and Management Studies* 1, no. 4 (2020): 249–59. <https://doi.org/10.35877/454ri.qems188>.
- Alit Ayu Meinarsari, Harsanto Nursadi. "Arah Baru Baru Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah :Sentralisasi Atau Desentralisasi." *Syntax Literate*:

Jurnal Ilmiah Indonesia 7, no. 8 (2022): 1–18.

- AM, Mirhan. “Refleksi Penciptaan Manusia Berbangsa-Bangsa Dan Bersuku-Suku (Telaah Surah Al-Hujurât Ayat 13).” *Jurnal Studia Insania* 3, no. 1 (2015): 1. <https://doi.org/10.18592/jsi.v3i1.1099>.
- Amalia, Ayu Diah. “Modal Sosial Dan Kemiskinan Social Capital and Poverty.” *Sosio Informa, Puslitbang Kemensos RI* 1, no. 3 (2015): 1–14. <https://ejournal.kemensos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/download/166/108>.
- Anggraeni, Rima Melati, Moh Khusaini, and Ferry Prasetyia. “Fiscal Decentralization and Per Capita Income Convergence between Regencies / Municipalities in Java Island.” *Journal of International Conference Proceedings (JICP)* 5, no. 4 (2022): 1–11.
- Ansyah, Marisa Ramadhani. “Monitoring Dan Evaluasi Dinas Sosial Kota Medan Dalam Penyelenggaraan Kebijakan Program Bantuan Sosial Tunai Kepada Masyarakat Yang Terdampak Pandemi Covid-19 Di Kelurahan Helvetia Timur” 9, no. 2 (2022): 255–60.
- Aprianto, Naerul Edwin Kiky. “Konsep Harta Dalam Tinjauan Maqashid Syariah.” *Journal of Islamic Economics Lariba* 3, no. 2 (2017): 65–74.
- Arief Maulana, Chumanidya Utami, Lukman Ikbal Hanafi. “The Progress Of Regional Autonomy Policy And Development Attainments:Indonesia’s Experence (1999-2021).” *Jurnal Ilmu Administrasi* 19, no. 1 (2022): 95–111.
- Arifin, Nur Rachmat, and Nida Laili Fitriyah. “Konsep Kesejahteraan Pandangan Ulama Kontemporer.” *IQTISADIE: Journal Of Islamic Banking and Shariah Economy* 1 (2021): 174–92.
- Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

- Arsjad, Fachri, Robby Hunawa, Nirmala A Sahi, Muten Nuna, and Universitas Gorontalo. “Peranan Pemerintah Desa Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Desa Buntulia Jaya Kecamatan Duhiyadaa.” *Economics and Digital Business Review* 3, no. 2 (2022): 379–96.
- Asiyah, Nur, and Abdul Ghofur. “Kontribusi Metode Masalah Mursalah Imam Malik Terhadap Pengembangan Hukum Ekonomi Syari’Ah Kontemporer.” *Al-Ahkam* 27, no. 1 (2017): 59. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2017.27.1.1349>.
- Astutik, Lilis Hidayati Yuli, Iffatin Nur, and Mashuri Mashuri. “Family Expectation and Poverty Alleviation Program: Approaches to Family Development Laws, Sustainable Development Goals, and Maqāṣid Sharīa.” *Justicia Islamica* 19, no. 1 (2022): 38–56. <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3227>.
- Azizah, Nur, Hendra Kusuma, and Zainal Arifin. “Economics Development Analysis Journal Does Fiscal Decentralization Increase the Economic Growth in Sulawesi Island? Article Information.” *Economics Development Analysis Journal*, no. 1 (2022). <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>.
- Azrak, Tawfik, and Hani Hazaa. “The Profit/Gain from Islamic Law of Contract Perspective and The Issue Of Ownership Risk (Daman Al-Milkiyyah).” *Journal of Islamic Finance* 10, no. 1 (2021): 111–16.
- Azwandi, Chablullah Wibisono, M. Gita Indrawan, Bambang Satriawan, and Muammar Khaddafi. “The Effect of Financial Performance on the Human Development Index Moderated Economic Growth in Regency/City in the Province of Riau Island.” *International Journal of Educational Review* 2, no. 5 (2022): 633–50.
- Bacq, Sophie, and Ruth V. Aguilera. “Stakeholder Governance for Responsible Innovation: A Theory of Value Creation, Appropriation, and Distribution.” *Journal of Management Studies* 59, no. 1 (2022): 29–60.

<https://doi.org/10.1111/joms.12746>.

- Bakar, Abu. "Nilai-Nilai Pendidikan Pada Ayat-Ayat Amsal Dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah." *SYAMIL: Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education)* 5, no. 1 (2017): 17–58. <https://doi.org/10.21093/sy.v5i1.911>.
- Baker, Regina S, David Brady, Zachary Parolin, and Deadric T Williams. "The Enduring Significance of Ethno-Racial Inequalities in Poverty in the U.S., 1993–2017." *Population Research and Policy Review* 41, no. 3 (2022): 1049–83. <https://doi.org/10.1007/s11113-021-09679-y>.
- Bambang Arwanto. "Pengentasan Patronase Kemiskinan Nelayan Punggawasawi." *Syntax Literate : Jurnal Ilmiah Indonesia* 7, no. 7 (2022): 2003–5.
- Basheer, Mohammed, Victor Nechifor, Alvaro Calzadilla, Claudia Ringler, David Hulme, and Julien J. Harou. "Balancing National Economic Policy Outcomes for Sustainable Development." *Nature Communications* 13, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.1038/s41467-022-32415-9>.
- Berradia, Hakim, Mehdi Abid, and Zouheyr Gheraia. "Renewable Energy Consumption-Economic Growth Nexus in Saudi Arabia : Evidence from a Bootstrap ARDL Bounds Testing Approach 1 Introduction and Literature Review." *Wseas Transaction on Environment and Development* 19 (2023): 33–44. <https://doi.org/10.37394/232015.2023.19.4>.
- Bittmann, Felix. "How Trust Makes a Difference: The Impact of the First Wave of the COVID-19 Pandemic on Life Satisfaction in Germany." *Applied Research in Quality of Life* 17, no. 3 (2022): 1389–1405. <https://doi.org/10.1007/s11482-021-09956-0>.
- Bruno Carrasco, Hanif A Rahemtulla, Rainer Rohdewohld. *IDecentralization Local Governance and Localizing the Sustainable Development Goals in Asia And The Pacific. Decentralization, Local Governance, and Localizing the*

Sustainable Development Goals in Asia and the Pacific, 2022.
<https://doi.org/10.4324/9781003282297-10>.

- Bustani, Bustani, Muammar Khaddafi, and Rico Nur Ilham. “Regional Financial Management System of Regency/City Regional Original Income In Aceh Province Period Year 2016-2020.” *International Journal of Educational Review, Law And Social Sciences (IJERLAS)* 2, no. 3 (2022): 459–68.
<http://radjapublika.com/index.php/IJERLAS/article/view/277>.
- Chairunnisa, Nurlaila Maysaroh, and Yuha Nadhirah Qintharah. “Pengaruh Kesehatan, Tingkat Pendidikan, Dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan Pada Provinsi Jawa Barat Tahun 2019-2020.” *Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi (PETA)* 7, no. 1 (2022): 147–61.
<https://doi.org/10.51289/peta.v7i1.530>.
- Chapra, Umer. *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Chaudhary, Deepak. “The Decentralization, Devolution and Local Governance Practices in Nepal: The Emerging Challenges and Concerns.” *Journal of Political Science* 19 (2019): 43–64.
<https://doi.org/10.3126/jps.v19i0.26698>.
- Chien, Nguyen Ba, and Nguyen Nghi Thanh. “The Impact of Good Governance on the People’s Satisfaction with Public Administrative Services in Vietnam.” *Administrative Sciences* 12, no. 1 (2022). <https://doi.org/10.3390/admsci12010035>.
- Chotim, Endah Ratnawaty. “Talcott Parsons’ Sociological Perspective In Viewing Social Change In Society In The New Normal Era.” *Ijd-Demos* 4, no. 1 (2022): 607–17.
<https://doi.org/10.37950/ijd.v4i1.238>.
- Christoph Luetge. *Handbook Of The Philosophical Foundation*. Springer. Vol. 4. Springer, 2013.
- Delgado, Odra Angélica Saucedo, Kadelbach, Vivian, Mata, Leovardo Mata. “Effects of Conditional Cash Transfers (CCT) in Anti-Poverty Programs. An Empirical Approach with Panel Data

- for the Mexican Case of PROSPERA_Oportunidades 2002–2012).” *Economies* 6, no. 29 (2018).
- Dörffel, Christoph, and Sebastian Schuhmann. *What Is Inclusive Development? Introducing the Multidimensional Inclusiveness Index. Social Indicators Research*. Vol. 162. Springer Netherlands, 2022. <https://doi.org/10.1007/s11205-021-02860-y>.
- Drencheva, Andreana, Ute Stephan, and Malcolm G. Patterson. “Whom to Ask for Feedback: Insights for Resource Mobilization From Social Entrepreneurship.” *Business and Society* 61, no. 7 (2022): 1725–72. <https://doi.org/10.1177/00076503211057497>.
- Dwi Fajri, Risanaldi, and U. Saepudin. “Implikasi Pedidikan Dari Quran Surat Ar-Ra’d Ayat 11 Tentang Perubahan Terhadap Upaya Pendidikan Dalam Mengembangkan Potensi Manusia.” *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 1 (2022): 100–106. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i1.2161>.
- Emzir. *Metodologi Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Fabiana Meijon Fadul. “Pengaruh Ketimpangan Distribusi Pendapatan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Propinsi Jawa Tengah Periode 2017-2021.” *Journal Ebismen* 1, no. 3 (2022): 176–89.
- Fadli Syahdiyono. “Sistem Demokrasi Indonesia Menurut Prespektif Islam.” *Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2022): 1–20.
- Fahik Folgentius Bere, Djaha Ajis Salim Adang, Nursalam. “Social Agencies Coordination and Supervision of Non Cash Food Social Assistance Distribution to Reduce Poverty Rate In Malaka Rgency of Indonesia.” *Eurasia: Economics & Business* 4, no. 4 (2022): 2003–5.
- Fahrial, Fahrial, Andrew Shandy Utama, and Sandra Dewi. “Pemanfaatan Corporate Social Responsibility (CSR) Terhadap Pembangunan Perekonomian Desa.” *Jurnal*

- Wawasan Yuridika* 3, no. 2 (2019): 251.
<https://doi.org/10.25072/jwy.v3i2.256>.
- Faisal fadhila Noorikhshan, Hendra Gunawan. “Mengkaji Konsep Kemiskinan Melalui Pendekatan Ekonomi Politik.” *Journal of Government and Politics (JGOP)* 2, no. 2022 (4AD).
- Fajriani, N, S Solahudin, and ... “Konsep Rezeki Menurut Al-Sa’Di.” ... *IAT: Prosiding Al ...*, 2019, 1–15.
<http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/piat/article/view/1615>.
- Farida, Nur. “Fiscal Decentralization, Economic Growth and Regional Development Inequality in Eastern Indonesia.” *Journal of Indonesian Applied Economics* 9, no. 2 (2021): 1–9.
<https://doi.org/10.21776/ub.jiae.2021.009.02.1>.
- Fikri, Ahmad Lutfi, Muaidy Yasin, and Akhmad Jupri. “Konsep Pengelolaan Koperasi Pesantren Untuk Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat: Telaah Surah Al-Hasyr Ayat 7.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 4, no. 02 (2018): 103.
<https://doi.org/10.29040/jiei.v4i2.249>.
- Firdaus, Muhammad Irkham, and Jaya Sahputra. “Prinsip Maqosid Ash-Shariah Dalam Konsep Kebutuhan Islam.” *Jurnal Tafaqquh STIS Darul Falah* 7, no. 1 (2022): 76–87.
- Firmansyah, Ardhi, Muhammad Daffa, Fajrul Falah, Muhammad Ridho, Dwi Ananda, Nurul Hidayah, Sistem Pendukung, and Pembobotan Aditif. “Pengelompokan Tingkat Kemiskinan Menggunakan Metode SAW.” *Scientia Sacra : Jurnal Sains , Teknologi Dan* 2, no. 1 (2022): 121–26.
- Fithri, Prima, Hanalde Andre, Cesar Welya Refdi, and Wenny Surya Murtius. “Peningkatan Kapasitas Pengelola UMKM Dari Sisi Manajemen Operasional Dan Pemasaran.” *Jurnal Andalas: Rekayasa Dan Penerapan Teknologi* 1 (2022): 12–15.
- Fuad, Anisul. “Poverty Reduction Strategy Based on Family Empowerment in the Perspective of Islamic Law.” *Prosperity: Journal of Society and Empowerment* 2, no. 1 (2022): 1–12.

<https://doi.org/10.21580/prosperity.2022.2.1.10164>.

Fuady, M Rafi Farrel, Mirza Fuady, and Fahmi Aulia. “Kemiskinan Multi Dimensi Dan Indeks Pembangunan Manusia Di Indonesia.” *Tataloka* 23, no. 4 (2022): 575–82. <https://doi.org/10.14710/tataloka.23.4.575-582>.

Furchan Ahmad. *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2004.

Gharib, Zahra, Reza Tavakkoli-Moghaddam, Ali Bozorgi-Amiri, and Maziar Yazdani. “Post-Disaster Temporary Shelters Distribution after a Large-Scale Disaster: An Integrated Model.” *Buildings* 12, no. 4 (2022). <https://doi.org/10.3390/buildings12040414>.

Ghozali, Mohammad, Norazzah Binti Kamri, and M. Ali Zi Khafid. “The Merger of Indonesian Islamic Banks: Impact on the Islamic Economy Development.” *Al-Iktisab: Journal of Islamic Economic Law* 6, no. 1 (2022): 23. <https://doi.org/10.21111/al-iktisab.v6i1.7551>.

Glaeser, E. L. “Should Transfer Payments Be Indexed to Local Price Levels?” *Regional Science and Urban Economics* 28, no. 1 (1998): 1–20. [https://doi.org/10.1016/S0166-0462\(97\)00022-7](https://doi.org/10.1016/S0166-0462(97)00022-7).

Goma, Edwardus Iwantri. “Dampak Covid-19 Terhadap Isu Kependudukan Di Indonesia.” *Geodika: Jurnal Kajian Ilmu Dan Pendidikan Geografi* 5, no. 1 (2021): 33–42. <https://doi.org/10.29408/geodika.v5i1.3180>.

Günzel-Jensen, Franziska, Nicole Siebold, Arne Kroeger, and Steffen Korsgaard. “Do the United Nations’ Sustainable Development Goals Matter for Social Entrepreneurial Ventures? A Bottom-up Perspective.” *Journal of Business Venturing Insights* 13, no. July 2019 (2020): e00162. <https://doi.org/10.1016/j.jbvi.2020.e00162>.

Guritno, Danur Condro, Bhimo Rizky Samudro, and Albertus Maqnu Soesilo. “The Paradox of Political Dynasties of Regeneration

- Type and Poverty in Regional Autonomy Era.” *International Journal of Ethics and Systems* 35, no. 2 (2019): 179–94. <https://doi.org/10.1108/IJOES-05-2018-0069>.
- Hakim, Lukman, and Ahmad Danu Syaputra. “Al-Qur’an Dan Pengentasan Kemiskinan.” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 3 (2020): 629. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1310>.
- Halimah, Halimah, Zuliaden Jayus, Ricky Muliawan Hansyar, and Munawir Munawir. “Pengaruh Kepemimpinan Keuchik Terhadap Efektifitas Pelayanan Masyarakat Gampong Kambuek Payapi Kunyet Kecamatan Padang Tiji.” *Jurnal Sosial Humaniora Sigli* 6, no. 1 (2023): 282–89. <https://doi.org/10.47647/jsh.v6i1.1661>.
- Han, Peng, Anne Violette Lavoit, Cesar Rodriguez-Saona, and Nicolas Desneux. “Bottom-Up Forces in Agroecosystems and Their Potential Impact on Arthropod Pest Management.” *Annual Review of Entomology* 67 (2022): 239–59. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-060121-060505>.
- Harun, Ibrahim Ahmad. “Implementasi Konsep Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam Menurut Tokoh Islam Dan Jumbuh Ulama.” *Jurnal Economina* 1, no. November (2022): 564–77.
- Hasimi, Diah Mukminatul. “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam* 1, no. 01 (2020): 61–72. <https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5762>.
- Hatu, Rauf A. “Pemberdayaan Dan Pendampingan Sosial Dalam Masyarakat (Suatu Kajian Teortis).” *Inovasi* 7, no. 4 (2010): 240–54.
- Hausmann, Ricardo, and Ulrich Schetter. “Horrible Trade-Offs in a Pandemic: Poverty, Fiscal Space, Policy, and Welfare.” *World Development* 153 (2022): 105819. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2022.105819>.
- Hendrie Anto. *Pengantar Ekonomika Mikro Islami*. Yogyakarta:

- Ekonisia, 2003.
<https://www.coursehero.com/file/p7apo87/Anto-M-B-Hendrie-2003-Pengantar-Ekonomika-Mikro-Islami-Yogyakarta-Ekonisia/>.
- Henry, OK, Yuanita FD, and Bambang Hermanto. “Kajian Faktor Natural Dan Kultural Terhadap Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Medan (Medan Utara).” *Potensi* 2, no. 2 (2022): 23–35.
- Herijal Putra, Nanda, and M. Anzaikhan. “Implementasi Kebijakan Program Jaring Pengaman Sosial (Jps) Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Era Pandemi Covid-19.” *Al-Ijtima`i: International Journal of Government and Social Science* 8, no. 1 (2022): 39–56.
<https://doi.org/10.22373/jai.v8i1.1757>.
- Heriyanto, Raden, and Tatik Mariyanti. “Poverty Alleviation Strategies Through Sharia Microfinance Institutions Politico-Economics Study With Tawhidi Approach.” *APTISI Transactions on Management (ATM)* 6, no. 2 (2022): 132–41.
<https://doi.org/10.33050/atm.v6i2.1794>.
- Heru M, Atikah R, and Nurlaila. “Kebijakan Fiskal Ekonomi Islam.” *Jurnal Ilmiah Simantek* 6, no. 2 (2022): 7–16.
- Hidayat, Anwar. “Analisis Hukum Islam Terhadap Pembentukan Daerah Otonom Baru Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat.” *Tahkim (Jurnal Peradaban Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2020).
<https://doi.org/10.29313/tahkim.v3i1.5660>.
- Hilafa Putri Rahayu. “Kinerja Pemerintahan Desa Untuk Meningkatkan Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Desa Wangun Kecamatan Palang-Tuban.” *Praja Observer, Jurnal Penelitian Administrasi Publik* 3, no. 1 (2023): 38–45.
- “<https://Islam.Nu.or.Id/Tafsir/Tafsir-Ar-Ra-d-Ayat-11-Motivasi-Mengubah-Nasib-OcXb8>,” n.d.
- “<https://Jateng.Bps.Go.Id/Indicator/12/1625/1/Persentase-Rumah->

Tangga-Yang-Menerima-Kartu-Perlindungan-Sosial-Kps-Kartu-Keluarga-Sejahtera-Kks-Menurut-Kabupaten-Kota.Html,” n.d.

“[Https://Jateng.Bps.Go.Id/Indicator/23/34/1/Kemiskinan.Html](https://Jateng.Bps.Go.Id/Indicator/23/34/1/Kemiskinan.Html) Diakses 26 Januari 2023 Pukul 13.00 WIB,” n.d.

“[Https://Jateng.Bps.Go.Id/Indicator/26/83/1/Indeks-Pembangunan-Manusia-Metode-Baru-.Html](https://Jateng.Bps.Go.Id/Indicator/26/83/1/Indeks-Pembangunan-Manusia-Metode-Baru-.Html),” n.d.

“[Https://Jateng.Bps.Go.Id/Statictable/2020/07/20/1885/Jumlah-Keluarga-Penerima-Manfaat-Kpm-Dan-Anggaran-Bantuan-Sosial-Pangan-Menurut-Kabupaten-Kota-Di-Provinsi-Jawa-Tengah-2019---2021.Html](https://Jateng.Bps.Go.Id/Statictable/2020/07/20/1885/Jumlah-Keluarga-Penerima-Manfaat-Kpm-Dan-Anggaran-Bantuan-Sosial-Pangan-Menurut-Kabupaten-Kota-Di-Provinsi-Jawa-Tengah-2019---2021.Html) Diakses 28 Januari 2023 Pukul 10.35 WIB,” n.d.

“[Https://Setkab.Go.Id/Presiden-Jokowi-Keluarkan-Inpres-4-2022-Tentang-Percepatan-Penghapusan-Kemiskinan-Ekstrem](https://Setkab.Go.Id/Presiden-Jokowi-Keluarkan-Inpres-4-2022-Tentang-Percepatan-Penghapusan-Kemiskinan-Ekstrem),” n.d.

“[Https://Tafsirweb.Com/4905-Surat-Al-Kahfi-Ayat-79.Html](https://Tafsirweb.Com/4905-Surat-Al-Kahfi-Ayat-79.Html),” n.d.

“[Https://Www.Bps.Go.Id/Indikator/Indikator/View_data_pub/3300/A_pi_pub/Mkt1SFdWbWdZa1hKZ2FtRU1NaHRsUT09/Da_04/1](https://Www.Bps.Go.Id/Indikator/Indikator/View_data_pub/3300/A_pi_pub/Mkt1SFdWbWdZa1hKZ2FtRU1NaHRsUT09/Da_04/1),” n.d.

“[Https://Www.Detik.Com/Hikmah/Khazanah/d-6510153/Surat-Ar-Rad-Ayat-11-Jelaskan-Nasib-Suatu-Kaum-Ditentukan-Oleh-Mereka-Sendiri](https://Www.Detik.Com/Hikmah/Khazanah/d-6510153/Surat-Ar-Rad-Ayat-11-Jelaskan-Nasib-Suatu-Kaum-Ditentukan-Oleh-Mereka-Sendiri),” n.d.

Humaidi, Muhamad Reza. “Rasionalisasi Laporan Bantuan Sosial Bulan Mei 2020 Kepada Masyarakat Terdampak Covid-19 Provinsi Kalimantan Tengah.” *Journal Riset Akuntansi Politala* 4, no. 1 (2021): 34–50.

Hutagalung, Juniar, Dicky Nofriansyah, and Mufthi Adi Syahdian. “Penerimaan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) Menggunakan Metode ARAS.” *Jurnal Media Informatika Budidarma* 6, no. 1 (2022): 198. <https://doi.org/10.30865/mib.v6i1.3478>.

Ihsan, M. “Gusjigang; Karakter Kemandirian Masyarakat Kudus Menghadapi Industrialisasi.” *Iqtishadia* 10, no. 2 (2018): 153.

<https://doi.org/10.21043/iqtishadia.v10i2.2862>.

“Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem,” n.d.

Irhamsyah, Fahmi. “Sustainable Development Goals (SDGs) Dan Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional Dampaknya Bagi Ketahanan Nasional.” *Jurnal Kajian LEMHANNAS RI* 38, no. 2 (2019): 45–54.

Ishlahi, Abdul Adzhim Al. *Mabadi Al Iqtisad Al Islami*. Riyadh Arab Saudi: Maktabatul Minhaj, n.d.

Islam, Riashat, Zafarali Ahmed, and Doina Precup. “Marginalized State Distribution Entropy Regularization in Policy Optimization.” *School of Computer Science* 1 (2019): 1–18. <http://arxiv.org/abs/1912.05128>.

Istiqomah Tri Handayani, Panji Kusuma Prasetyanto, Dinar Melani Hutajulu. “Analisis Pengaruh Jumlah UMKM, Jumlah Penyerapan Tenaga Kerja UMKM Dan Harapan Lama Sekolah Terhadap Jumlah Kemiskinan Di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2017.” *DINAMIC: Directory Journal of Economic* 3, no. 3 (2018): 182–94.

Jami, Deni Zam, and Asep Muharam. “Strategy for Improving the Quality of Islamic Religious Education Study Programs with Total Quality Management.” *Nidhomul Haq: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 7, no. 2 (2022): 267–83. <https://doi.org/10.31538/ndh.v7i2.2096>.

Janah, Nasitotul, and Abdul Ghofur. “Maqashid As-Ayari‘ah Sebagai Dasar Pengembangan Ekonomi Islam.” *International Journal Ihya’ Ulum Al-Din* 20, no. 2 (2018): 167–92. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4045>.

Johan Arifin. “Budaya Kemiskinan Dalam Penanggulangan Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Kesejahteraan Sosia* 6, no. 02 (2020). <https://doi.org/10.33007/inf.v6i2.2372>.

Kaukab, M Elfan. “Memetakan Pola Penguatan Ekonomi Untuk

- Masyarakat Dalam Kemiskinan Ekstrem Pasca Pandemi Di Kabupaten Wonosobo.” *Akuntansi, Jurnal Syariah, Perbankan* 2 (2022): 1–9.
- Kemiskinan, Determinan, and D I Indonesia. “Determinan Kemiskinan Di Indonesia Tahun 1982-2012.” *Economics Development Analysis Journal* 4, no. 1 (2017): 58–64.
- Khairi, Halilul. “Menakar Pengaruh Politik Dinasti Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Indonesia.” *JWP (Jurnal Wacana Politik)* 7, no. 1 (2022): 35. <https://doi.org/10.24198/jwp.v7i1.37770>.
- Khan, Maira, Mukaram Ali Khan, Syed Sohaib Zubair, and Aisha Rizwan. “How Transformational Leaders Are Engaged in Work Settings During Episode of Covid-19? Exploring Mediating Effects of Structural Empowerment and Process Innovation.” *SAGE Open* 12, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.1177/21582440221093354>.
- Kharisma, Bayu. “Desentralisasi Fiskal Dan Pertzumbuhan Ekonomi: Sebelum Dan Sesudah Era Desentralisasi Fiskal Di Indonesia.” *LEkonomi Dan Studi Pembangunan* 14 (2013): 101–19.
- Kirom, Cihwanul. “Etos Kerja Dalam Islam.” *TAWAZUN: Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 1 (2018): 57. <https://doi.org/10.21043/tawazun.v1i1.4697>.
- Kunjuraman, Velan. “Local Community Participation Challenges in Community-Based Ecotourism Development in Sabah, Malaysian Borneo.” *Community Development Journal* 57, no. 3 (2022): 487–508. <https://doi.org/10.1093/cdj/bsaa065>.
- Kusumayadi, Firmansyah, Kartin Aprianti, Muhammad Yusuf, Muhajirin, and Ismunandar. “Pelatihan Diversifikasi Olahan Bawang Merah Menjadi Bawang Goreng Varian Rasa Untuk Meningkatkan Produktivitas Ibu Rumah Tangga Di Desa Donggobolo Kabupaten Bima.” *Prima: Portal Riset Dan Inovasi Pengabdian Masyarakat* 1, no. 2 (2022): 45–52. <https://doi.org/10.55047/prima.v1i2.182>.

- Laoli, Victorinus. “Pengaruh Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Kinerja Anggaran Berkonsep Value of Money Pada Pemerintah Kabupaten Nias.” *Owner* 3, no. 1 (2019): 91. <https://doi.org/10.33395/owner.v3i1.108>.
- Latifah, Eny, and Lailiyah. “Sudut Pandang Ekonomi Islam Atas Pariwisata Buatan.” *Journal of Finance and Business Digital* 1, no. 3 (2022): 219–36. <https://doi.org/10.55927/jfbd.v1i3.1351>.
- Lehtonen, Pauliina. “Policy on the Move: The Enabling Settings of Participation in Participatory Budgeting.” *Policy Studies* 43, no. 5 (2022): 1036–54. <https://doi.org/10.1080/01442872.2021.1895981>.
- M. Quraish Shihab. *Khilafah: Peran Manusia Di Bumi*. Tangerang: PT Lentera Hati, 2020.
- “M.Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah (Jakarta : Lentera Hati, 2002), Hlm 359-360.” n.d.
- Maggetti, Martino, and Philipp Trein. “Multilevel Governance and Problem-Solving: Towards a Dynamic Theory of Multilevel Policy-Making?” *Public Administration* 97, no. 2 (2019): 355–69. <https://doi.org/10.1111/padm.12573>.
- Maknolia, Yuliana, and Dasrun Hidayat. “Respon Masyarakat Terhadap Bantuan Pemerintah Selama Covid-19 Di Kota Bandung.” *Jurnal Mutakallimin : Jurnal Ilmu Komunikasi* 3, no. 2 (2020): 1–7. <https://doi.org/10.31602/jm.v3i2.3694>.
- Mamarasulovich, Absattorov Bakhtiyor. “Religious And Philosophical Foundations Of Human Moral Development.” *American Journal of Interdisciplinary Research and Development* 11, no. 12 (2022): 154–63. <https://doi.org/www.ajird.journalspark.org> Volume 11, Dec., 2022 RELIGIOUS.
- Mannan, Abdul. *Teori Dan Praktek Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Dana Bakti Prima Yasa, 1997.

- Mardalis. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: bumi aksara, 2004.
- Mardhatillah, Muntaha. “Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) Untuk Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Padang Panjang.” *Jurnal Ilmiah Ekotrans Dan Erudisi* 1, no. 1 (2021): 76–87. <https://ejournal-unespadang.ac.id/index.php/JIEE/article/view/313>.
- Masood, Ayesha, and Muhammad Azfar Nisar. “Repairing the State: Policy Repair in the Frontline Bureaucracy.” *Public Administration Review* 82, no. 2 (2022): 256–68. <https://doi.org/10.1111/puar.13414>.
- Masuda, Hiromi, Shun Kawakubo, Mahesti Okitasari, and Kanako Morita. “Exploring the Role of Local Governments as Intermediaries to Facilitate Partnerships for the Sustainable Development Goals.” *Sustainable Cities and Society* 82, no. September 2021 (2022): 103883. <https://doi.org/10.1016/j.scs.2022.103883>.
- Matala, Andi. “Reviewing the Performance Of Local Governments In Managing Corporate Social Responsibility Program” 2, no. 2 (2022): 55–63.
- Maun, Carly Erfly Fernando. “Efektivitas Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Bagi Masyarakat Miskin Terkena Dampak Covid-19 Di Desa Talaitad Kecamatan Suluun Tareran Kabupaten Minahasa Selatan.” *Jurnal Politico* 9, no. 2 (2020): 1–16.
- “Menelaah Al-Quran Dan Hadist Filantropi Islam ‘Perbandingan Tafsir Ibnu Kastir Dan Tafsir Fi Zhilalil Quran.’” *Al-Munir: Jurnal Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir* 4, no. 2 (2022): 300–334. <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Moch Alfi RidhoTanu Jaya, Lilis Karwati, Ahmad Hamdan. “Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Badan Usaha Milik Desa (BUMdes) Dalam Meningkatkan Ekonomi

- Keluarga.” *Jurnal Obor Penmas* 5, no. 1 (2021): 22–32.
- Mohamed Addulkadir Ali. “The Effect Of Budgeting Process On Organizational Performance In Selected Firms In Mogadishu Somalia.” *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR)-Peer Reviewed Journal* 8, no. 2 (2022): 198–210. <https://doi.org/10.36713/epra2013>.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: :PT Remaja Rosdakarya, 2000.
- Monzer Kahf. “Ayat Dan Hadits Tentang Ekonomi,” 2022, 1–1114.
- Moonti, Roy Marthen. “Regional Autonomy in Realizing Good Governance.” *Substantive Justice International Journal of Law* 2, no. 1 (2019): 43. <https://doi.org/10.33096/substantivejustice.v2i1.31>.
- Mufidah, Nisa`ul. “Efektivitas Bantuan Sosial Tunai Di Kelurahan Purwosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.” *Jurnal Sosial Dan Sains (SOSAINS)* 1, no. 2 (2021): 82–92.
- Muhamad Nurois Amin. “Strategi Bisnis Yang Tersirat Dalam Surat Al-Quraisy Ayat 1 – 4.” *Taqorrub: Jurnal Bimbingan Konseling Dan Dakwah* 1, no. 1 (2020): 1–12. <https://doi.org/10.55380/taqorrub.v1i1.40>.
- Muhammad Iqbal Latief, Rabina Yunus, Hasbi sultan. “Problematika Akselerasi Penanganan Kemiskinan Nelayan Di Masa Pandemi Covid-19 Di Kota Makassar.” *Jurnal Pembangunan Manusia* 3, no. 1 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.7454/jpm.v3i1.1026>.
- Muhammad, Mahmuda Mulia. “Social Entrepreneurship Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Berdasarkan Prinsip-Prinsip Ekonomi Syariah.” *El-Iqthisadi: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum* 2, no. 2 (2020): 68. <https://doi.org/10.24252/el-iqthisadi.v2i2.18352>.
- Mukhlis, Maulana, and Syarif Makhya. “Implikasi Desentralisasi Fiskal Terhadap Kemandirian Daerah Pasca Pemekaran (Studi

- Di Kabupaten Tulang Bawang, Tuba Barat, Dan Mesuji Lampung).” *CosmoGov* 5, no. 2 (2019): 147. <https://doi.org/10.24198/cosmogov.v5i2.22803>.
- Munadi, Muhammad. “Community Participation In The Public Policy Making In Education Sector In Surakarta Municipality.” *Jurnal Penelitian Dan Evaluasi Pendidikan* 12, no. 2 (2013): 268–84. <https://doi.org/10.21831/pep.v12i2.1431>.
- Murtadho, Ali. “Arah Pengembangan Kajian Ekonomi Islam Berbasis Kesatuan Ilmu Pengetahuan Di Iain Walisongo.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 5, no. 1 (2014): 21–36. <https://doi.org/10.21580/economica.2014.5.1.761>.
- . “Konsep Fiskal Islam Dalam Perspektif Historis.” *Economica: Jurnal Ekonomi Islam* 4, no. 1 (2013): 33–50. <https://doi.org/10.21580/economica.2013.4.1.759>.
- . “Strategi Pembangunan Ekonomi Yang Islami.” *Economica* VII, no. 2 (2016): 1–22.
- Mustafakulov, Sherzod Igamberdievich, International Educational, Dilshadbek Abdumalikovich Karimov, Nuriddin Nasriddinovich Murodullaev, International Educational, Nazirjon Razzoqovich Rajabov, International Educational, et al. “Poverty: Basic Principles Of The State At Its Reduction.” *International Journal of Scientific & Engineering Research* 11, no. 9 (2020): 1501–8.
- Mutiullah dan Moch Nur Ichwan (ed. *Agama, Filsafat Dan Kemiskinan*. ISBN:97E-. Yogyakarta: Progarq Studi Agama dan Filsafat Pascasarjatra UIN Sutran Kalijaga Y, 2015.
- Muyassarah, Muyassarah. “Nilai Budaya Walimah Perkawinan (Walimatul ‘Urusy) Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Di Kelurahan Gondorio Ngaliyan Semarang).” *INFERENSI* 10, no. 2 (December 1, 2016): 539. <https://doi.org/10.18326/infs13.v10i2.539-558>.
- Nabilah, Rima, and Dani Sugiri. “Apakah Bantuan Sosial Dan Belanja Modal Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan Daerah Di

- Provinsi Sumatera Selatan?” *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi* 21, no. 1 (2022): 85–98. <https://doi.org/10.32639/fokbis.v21i1.115>.
- Naciti, Valeria. “Corporate Governance and Board of Directors: The Effect of a Board Composition on Firm Sustainability Performance.” *Journal of Cleaner Production* 237 (2019): 117727. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2019.117727>.
- Nada, Alfi Qodrun. “Pengelolaan Desa Mandiri Pangan Berbasis Ekonomi Lokal Untuk Mewujudkan Ketahanan Pangan Kota Batu.” *GOVERNMENT: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 13 (2020): 76–84. <https://doi.org/10.31947/jgov.v13i2.9350>.
- Nany, Magdalena, and Trisni Suryarini. “Does Balancing Fund Affect Economic Growth and Poverty Level in Central Java?” *Jurnal Kajian Akuntansi* 6, no. 1 (2022): 1. <https://doi.org/10.33603/jka.v6i1.5078>.
- Nashar, Abdul. “Pengelolaan Organisasi Dalam Pengentasan Kemiskinan DiKota Kenduri.” *Journal of Political Science* 1, no. April (2019): 1–12.
- Nguyen, Canh Phuc, and Thanh Dinh Su. “The Influences of Government Spending on Energy Poverty: Evidence from Developing Countries.” *Energy* 238 (2022): 121785. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.121785>.
- Nirwana Br. Bangun, Teja Rinanda. “Pengaruh Oligarki Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia.” *Journal All Fields of Science* 1, no. 1 (2021): 44–53.
- Norma K. Denzim Yvona S. Lincoln. *Handbook of Qualitative Research. Synthese*. Vol. 195. New Delhi: Thousand oaks,CA, 2018. <https://doi.org/10.1007/s11229-017-1319-x>.
- Novi, Cinzia Di, Massimiliano Piacenza, Silvana Robone, and Gilberto Turati. “Does Fiscal Decentralization Affect Regional Disparities in Health? Quasi-Experimental Evidence from Italy.” *Regional Science and Urban Economics* 78, no. July (2019): 103465.

<https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2019.103465>.

- Novita, Yeyen, Reni Indriani Agustine, and Abdul Aziz Nugraha Pratama. "Analisis Desentralisasi Fiskal Dalam Pandangan Ekonomi Islam." *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah* 2, no. 2 (2023): 206–15. <https://doi.org/10.56799/jceki.v2i2.1402>.
- Octaviana, Rully Noor. "Impact of Corporate Social Responsibility (CSR) on Community Welfare in Central Java Province." *Literatus: Literature for Social Impact and Cultural Studies*, no. e-ISSN: 2686-5009 (2022): 1–10.
- Oleh, Kabupaten, Dinas Perumahan, Rakyat Dan, Permukiman Di, Kabupaten Magelang, and Rima Atikal Kafa. "Manajemen Program Bantuan Sosial Penanganan Rumah Tidak Layak Huni Apbd Kabupaten (Bansos-Rtlh Apbd" 6, no. 1 (2022): 1–18.
- Onilla, Saraswati Rizqi, and Retno Suryawati. "Responsivitas Dinas Sosial Kabupaten Sleman Dalam Menangani Penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) (Studi Kasus Di Desa Sidoarum)." *Jurnal Administrasi Publik* 13, no. 1 (2022): 61–76. <https://doi.org/10.31506/jap.v13i1.13275>.
- Paranata, Ade. "The Miracle of Anti-Corruption Efforts and Regional Fiscal Independence in Plugging Budget Leakage: Evidence from Western and Eastern Indonesia." *Heliyon* 8, no. 10 (2022): e11153. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e11153>.
- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. "Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.60 Tahun 2019 Tentang Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Jawa Tengah 2019-2023." *Gubernur Jawa Tengah*, 2019. https://jdih.jatengprov.go.id/downloads/produk_hukum/pergub/pergub_tahun_2019/pergub_60_th_2019.pdf.
- Pemerintahan, Jurnal Dinamika. "Implementasi Program Keluarga Harapan /PKH Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kabupaten Indragiri Hilir 2016-2020." *Jurnal Dinamika Pemerintahan* 1,

no. 1 (2022): 124–37.

Peraturan Presiden RI. “Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 63 Tahun 2017, Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai.” *Peraturan Presiden*, 2017.

Pramanik, Nuniek Dewi. “Dampak Bantuan Paket Sembako Dan Bantuan Langsung Tunai Terhadap Kelangsungan Hidup Masyarakat Padalarang Pada Masa Pandemi Covid 19.” *Jurnal Ekonomi, Sosial Dan Humaniora* 01, no. 12 (2020): 113–20.
<https://www.jurnalintelektiva.com/index.php/jurnal/article/view/209/149>.

Pratama, Bayu Indra, Azizun Kurnia Ilahi, and Diyah Ayu Amalia Avina. “Political Branding : Content Analysis Of Debate Of Candidates For Vice Governor Of East Java Session I In Poverty Reduction.” *Komunika* 5, no. 1 (2022): 01–20.
<https://doi.org/10.24042/komunika.v5i1.11367>.

Pratiwi, Intan Putri, FX Ferdinandus, and Arthur Daniel Limantara. “Sistem Pendukung Keputusan Penerima Program Keluarga Harapan (PKH) Menggunakan Metode Simple Additive Weighting.” *Cahaya Tech* 8, no. 2 (2019): 182–95.

Puasa, Flayer, Jantje J. TinangonHendrik Manossoh. “Analisis Akuntabilitas Belanja Bantuan Sosial Pada Pemerintah Kota Manado.” *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing “GOODWILL”* 12, no. 2 (2021): 264–75.

Purwanti, Endang, and Elien Noviyanti. “Analisis Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Kota Salatiga Tahun 2014-2018.” *Among Makarti* 14, no. 2 (2022): 1–12.
<https://doi.org/10.52353/ama.v14i2.213>.

Putera, Roni Ekha. “Analisis Terhadap Program Penanggulangan Kemiskinan Dan Partisipasi Masyarakat Di Indonesia.” *Demokrasi* VI, no. 1 (2017): 1–25.

Putra, Haris Maiza, and Ending Solehudin. “Fundamentals of Economic and Monetary Policy in Islam.” *AL-FALAH*:

- Journal of Islamic Economics* 7, no. 1 (2022): 89.
<https://doi.org/10.29240/alfalah.v7i1.4302>.
- Qadri, Abdul. “Bencana Dan Tindakan Kepedulian Sosial Dalam Keberagaman: Studi Komparasi Kitab Suci Al-Qur’an Dan Alkitab.” *Khazanah Theologia* 3, no. 2 (2021): 105–16.
<https://doi.org/10.15575/kt.v3i2.11667>.
- Qisthi, Al, and Jurnal Sosial. “Meningkatkan Kinerja Aparat Birokrasi,” 2023, 18–33.
- Rahayu, Sri Endang Hastina Febriaty. “Analisis Perkembangan Dana Otonomi Khusus Sebagai Implementasi Desentralisasi Fiskal Di Propinsi Aceh.” *Proceding Seminar Nasional Kewirausahaan* 2, no. 1 (2021): 360–67.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30596%2Fsnk.v2i1.8284>.
- Rahman, Alfian Izzat El. “Empowerment Of Quality Development Of Student Human Resource Assets In The Siti Khadijah Student Community Of Al-Qodiri Islamic Boarding School Jember In Developing The Creativity And Productivity Of Students In 2021.” *Al-Ijtima: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2022): 185–95.
<https://doi.org/10.53515/aijpkm.v2i2.44>.
- Ratnasari, Siwi Dyah, and Akhmad Saikhu. “Peran Pelembagaan Dalam Program One Village One Product Melalui Empowerment Masyarakat.” *Journal JIMMU* 7, no. September (2022): 226–42.
- Rimawan, M., and Fenny Aryani. “Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan Di Kabupaten Bima.” *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika* 9, no. 3 (2019): 287–95.
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJA/article/view/22539>.
- Rizki, Muhammad, and Keisha Dinya Solihati Politeknik STIA LAN Jakarta. “The Impact of Corruption, Inflation and Unemployment Towards Poverty in Indonesia.” *Journal of*

- Business Administration Economic & Entrepreneurship* 4, no. 1 (2022): 47–56.
- Robert Bogdanand Steven J.Taylor. *Introduction to Qualitative Research Methods*. Wiley. New York, 1975.
- Saharuddin, Saharuddin, and Syarifuddin Syarifuddin. “Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Miskin Dengan Kualitas Pendamping Dan Kualitas Program Keluarga Harapan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Kota Makassar.” *Jurnal Sosial Sains* 2, no. 7 (2022): 832–42. <https://doi.org/10.36418/sosains.v1i7.441>.
- Said, Abdul Rauf Alauddin. “Pembagian Kewenangan Pemerintah Pusat - Pemerintah Daerah Dalam Otonomi Seluas - Luasnya Menurut UUD 1945.” *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 4 (2015): 505–30. <http://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/viewFile/613/552>.
- Santori, Paolo. “Is Relationality Always Other-Oriented? Adam Smith, Catholic Social Teaching, and Civil Economy.” *Philosophy of Management* 21, no. 1 (2022): 49–68. <https://doi.org/10.1007/s40926-021-00175-z>.
- Saputra, Rian, and Silaas Oghenemaro Emovwodo. “Indonesia as Legal Welfare State: The Policy of Indonesian National Economic Law.” *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 2, no. 1 (2022): 1–13. <https://doi.org/10.53955/jhcls.v2i1.21>.
- Saragih, Panglima. “Kebijakan Pengentasan Kemiskinan Di Daerah Istimewa Yogyakarta.” *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik* 6 (2015): 58.
- Sari Wuladari, Alma Azahra, Novita Sari, Amalia Nasution, Faizatun Nisa’. “Kesenjangan Pendapatan Yang Memicu Kemiskinan Di Indonesia.” *Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen (JIKEM)* 1, no. 1 (2022): 238–51.
- Satibi, I, and U Sudrajat. “Strategi Implementasi Kebijakan

- Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Tasikmalaya.” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik (JISPO)* 9, no. 2 (2019): 362–81.
- Satori, Djama’an, and Aan Komariah. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- Sciences, Health. “Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah” 4, no. 1 (2018): 1–23.
- Siregar, Iskandarsyah, and Zulkarnain. “The Relationship between Conflict and Social Change in the Perspective of Expert Theory: A Literature Review.” *International Journal of Arts and Humanities Studies* 2, no. 1 (2022): 09–16. <https://doi.org/10.32996/bjahs.2022.2.1.2>.
- Sosial, Hingga, Ekonomi Studi, Kasus Di, and Desa Wonorejo. “Bunuh Diri Sosiopathik Sebuah Fenomena Sosial Keagamaan Hingga Sosial Ekonomi (Studi Kasus Di Desa Wonorejo, Srengat, Blitar).” *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama* 5, no. 2 (2022): 102–19.
- Stumpf, Klara, and Bernd Sommer. “The Economy for the Common Good: A European Countermovement against the Destructive Impacts of Laissez-Faire Capitalism?” *Culture, Practice & Europeanization* 4, no. 1 (2019): 103–15. <https://doi.org/10.5771/2566-7742-2019-1-103>.
- Subiyakto, Bambang, Jumriani Jumriani, Ersis Warmansyah Abbas, Muhammad Muhaimin, and Rusmaniah Rusmaniah. “Community Economic Empowerment Through The Existence of Thematic Village.” *The Innovation of Social Studies Journal* 4, no. 1 (2022): 01. <https://doi.org/10.20527/iis.v4i1.6368>.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif: Untuk Penelitian Yang Bersifat Eksploratif, Enterpretif, Interaktif Dan Konstruktif*. Ke 3. Bandung: Alfabeta, 2022.
- . *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian Yang Bersifat:*

- Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, Dan Konstruktif*. Bandung: Alfabeta, 2017.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2010.
- . *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R Dan D*. Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sulistiyani, Ambar Teguh, and Yulia Wulandari. “Proses Pemberdayaan Masyarakat Desa Sitimulyo Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul Dalam Pembentukan Kelompok Pengelola Sampah Mandiri (KPSM).” *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat (Indonesian Journal of Community Engagement)* 2, no. 2 (2017): 146. <https://doi.org/10.22146/jpkm.27024>.
- Suprih Handayani, Suharno Suharno, Lilis Siti Badriah. “The Effectiveness of Local Government Spending on Poverty Rate Reduction in Central Java, Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Ekonomi Wilayah* 17, no. 101–120 (2022).
- Supriyatno, Yanto, and Andi Maulana. “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Untuk Menanggulangi Kemiskinan Di Kabupaten Bekasi.” *Governance* 10, no. 2 (2022): 34–48. <https://doi.org/10.33558/governance.v10i2.5638>.
- Suryahadi, Asep, Ridho Al Izzati, and Daniel Suryadarma. “The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia (Draft).” *SMERU Working Paper* April, no. April (2020): 1–20. <http://smeru.or.id/en/content/impact-covid-19-outbreak-poverty-estimation-indonesia>.
- Sushmita, Chelin Indra. “Benarkah Biaya Hidup Di Jawa Tengah Termurah?” diakses 25 November 2022: <http://bit.ly/AppsBisniscomPS> iOS: <http://bit.ly/A>, n.d.
- Syahputra, H W. “Proses Integrasi Dan Implementasi Sustainable Development Goals (SDGs) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Provinsi Riau.” *Jurnal Sumber Daya Manusia Unggul ...*

- 2, no. 1 (2021).
<https://jsdmu.ejournal.unri.ac.id/index.php/JSDMU/article/view/33%0Ahttps://jsdmu.ejournal.unri.ac.id/index.php/JSDMU/article/download/33/24>.
- Syarifuddin, M. Syahrul, and Amir Sahidin. “Filantropi Islam Menjawab Problem Kesenjangan Ekonomi.” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2021): 101–9.
<http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/medag/article/view/11506>.
- Syauket, Amalia. “Nepotistic Corruption Breeding For The Establishment Of A Political Dynasty.” *Devotion : Journal of Community Service* 3, no. 2 (2021): 98–105.
<https://doi.org/10.36418/dev.v3i2.99>.
- Szarowska, Irena. “Does Fiscal Decentralization Matter for Economic Development? Case of the Czechia.” *Journal of Eastern Europe Research in Business and Economics* 2022 (2022): 1–11. <https://doi.org/10.5171/2022.856279>.
- Tahawa, Taufik Hidayat B. “Relationship Of Regional Financial Ability Levels And Poverty Percentage To Economic Growth Of West Sulawesi Province, 2013 - 2018.” *Journal of Economic, Public, and Accounting (JEPA)* 3, no. 2 (2021): 139–48.
- Tahir, Ibrahim Nuhu. “The Neglected Approach to Poverty Alleviation.” *International Journal of Economics, Management and Accounting* 27, no. 1 (2019): 41–82.
- Tang, Peng, Yue Feng, Min Li, and Yanyan Zhang. “Can the Performance Evaluation Change from Central Government Suppress Illegal Land Use in Local Governments? A New Interpretation of Chinese Decentralisation.” *Land Use Policy* 108, no. May (2021): 105578.
<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2021.105578>.
- Tiwari, Siddhartha Paul. “The Potential Impact of COVID-19 on the Asian Rural Economy: A Study Based on Asian Countries.” *Journal of Education, Management and Development Studies*

- 2, no. 3 (2022): 1–7. <https://doi.org/10.52631/jemds.v2i3.116>.
- Tribuwana, Dyah, Tungga Dewi, Hikmat Zakky Almubaroq, and Susilo Adi Purwantoro. “Implementation of Good Governance in the Defense Sector To Improve the Quality of Human Capital of Indonesia Government.” *International Journal of Arts and Social Science* 5, no. 7 (2022): 28–34.
- Tuychieva Nodira, Nizomiddinov Kudratbek. “Development Anti-Monopolism And Competition Essentially, Its Role in The Development Of The Country’s Economy.” *Wb Of Scientist:International Scientific Research Journal* 3, no. 11 (2022): 2003–5.
- Umanailo, M Chairul Basrun. “Integration of Community Empowerment Models [Pengintegrasian Model Pemberdayaan Masyarakat].” *Proceeding of Community Development* 2 (2019): 268. <https://doi.org/10.30874/comdev.2018.319>.
- Umar Chapra. *Islam Dan Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani, 2010.
- Wan Mohd Khairul Firdaus, Wan Khairuldin, and Mohammad Mahadi. “The Philosophy and Elasticity of Zakah Distribution in Islam.” *International Journal of Education and Research* 1, no. 8 (2013): 1–12.
- Wang, Yuhan, Zenghui Huo, Dongpo Li, and Mei Zhang. “Evaluation of Common Prosperity Level and Regional Difference Analysis along the Yangtze River Economic Belt.” *International Journal of Environmental Research and Public Health* 19, no. 19 (2022). <https://doi.org/10.3390/ijerph191911851>.
- Wardoyo, Sapto, Ahmad Mukhlisin, and Abdullah Ridlo. “Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Kepada Kaum DhuF (Perspektif Al-Qur’an Surat An-Nisa Ayat 36 Tafsir Al-Maraghi).” *QALAM: Jurnal Pendidikan Islam* 01, no. 2 (2020): 92–108.
- Widyastuti, Ariyani, and Agung Nusantara. “Does Fiscal Decentralization Affect Poverty? An Empirical Study Article

- Information.” *Economics Development Analysis Journal* 1, no. 3 (2022): 305–12. <http://journal.unnes.ac.id/sju/index.php/edaj>.
- Wilson, R. *Economic Development in the Middle East. Economic Development in the Middle East*. Francis: Taylor & Francis, 2022. <https://doi.org/10.2307/40201175>.
- Winarta, I Wayan Tagel, Anak Agung, Gede Raka, I Made, and Universitas Warmadewa. “Evaluasi Kebijakan Penyaluran Dana Bantuan Sosial Di Pemerintah Kabupaten Gianyar.” *Public Inspiration: Jurnal Administrasi Publik* 5, no. 1 (2020): 28–42.
- Winong, Kecamatan, and Kabupaten Pati. “Pemberdayaan Usaha Mikro Kerajinan Rajut Di Desa Godo Kecamatan Winong Kabupaten Pati” 1, no. 2 (2021): 119–34.
- Yang, Di, Weixin Luan, Jun Yang, Bing Xue, Xiaoling Zhang, Hui Wang, and Feng Pian. “The Contribution of Data-Driven Poverty Alleviation Funds in Achieving Mid-21st-Century Multidimensional Poverty Alleviation Planning.” *Humanities and Social Sciences Communications* 9, no. 1 (2022): 1–9. <https://doi.org/10.1057/s41599-022-01180-x>.
- Yang, Yuanyuan, Alex de Sherbinin, and Yansui Liu. “China’s Poverty Alleviation Resettlement: Progress, Problems and Solutions.” *Habitat International* 98 (April 1, 2020): 102135. <https://doi.org/10.1016/J.HABITATINT.2020.102135>.
- Yanyi K . Djamba and W. Lawrence Neuman. “Social Research Methods:Qualitative Approaches.” *Iteaching Sociology* 3, no. 3 (2002): 380. <https://doi.org/10.2307/3211488>.
- Yasmansyah, Yasmansyah, and Abdul Aziz. “Pendidikan Ekonomi Menurut Perspektif Al-Quran.” *JKIP: Jurnal Kajian Ilmu Pendidikan* 2, no. 1 (2021): 36–49. <https://doi.org/10.55583/jkip.v2i1.186>.
- Yulianti, Lia, Fitroh Hayati, and Ayi Sobarna. “Nilai-Nilai Pendidikan

- Islam Berdasarkan Al-Qur'an Surat Al-Ma'idah Ayat 8." *Bandung Conference Series: Islamic Education* 2, no. 1 (2022): 13–20. <https://doi.org/10.29313/bcsied.v2i1.1657>.
- Yustikasari, Yusi, and Husni Mubarak. "Comparative Analysis Performance of K-Nearest Neighbor Algorithm and Adaptive Boosting on the Prediction of Non-Cash Food Aid Recipients" 6, no. 1 (2019): 1–18. <https://doi.org/10.15294/sji.v9i2.32369>.
- Yusuf, Muhammad Afrizal, and Arif Afendi. "The Effect of Transfer Funds to Regions and Village Funds on Human Development Index in Districts of West Java Province in 2015-2018." *Journal of Islamic Accounting and Finance Research* 2, no. 2 (2020): 153–68. <https://doi.org/10.21580/jiafr.2020.2.2.6360>.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.
- Yvona S .Lincoln Egon Guba. *Naturalistic Inquiry*. London new delhi: sage publications Beverly hills, 1984.
- Zallé, Oumarou. "Natural Resources and Economic Growth in Africa: The Role of Institutional Quality and Human Capital." *Resources Policy* 62, no. October (2019): 616–24. <https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2018.11.009>.
- Zameer, Hashim, Muhammad Shahbaz, and Xuan Vinh Vo. "Reinforcing Poverty Alleviation Efficiency through Technological Innovation, Globalization, and Financial Development." *Technological Forecasting and Social Change* 161 (December 1, 2020): 120326. <https://doi.org/10.1016/J.TECHFORE.2020.120326>.
- Zehri, . Mir Sadaat Baloch2Dr. Abdul Wahid, and Afi Ullah. "Understanding Social Theory Creation: A Perspective from Pierre Bourdieu and Talcott Parsons." *Research Paper*36-46 3, no. 3 (2022).
- Zhou, Yang, Liying Guo, and Yansui Liu. "Land Consolidation Boosting Poverty Alleviation in China: Theory and Practice." *Land Use Policy* 82, no. August 2018 (2019): 339–48.

<https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2018.12.024>.

Zhu, Yongming, Xiaoyu Zhou, Junjie Li, and Fan Wang. “Technological Innovation, Fiscal Decentralization, Green Development Efficiency: Based on Spatial Effect and Moderating Effect.” *Sustainability (Switzerland)* 14, no. 7 (2022). <https://doi.org/10.3390/su14074316>.

LAMPIRAN

Mall Publik di Brebes





Dinsos Brebes



Dinsos Kebumen



Dinsos Wonosobo





BPKAD Kebumen



BAPPEDA Kebumen



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama lengkap : Muyassarah
Tempat & Tanggal lahir : Rembang, 29 April 1971
Alamat Rumah : Pulutan 3/2 Sidorejo Salatiga
Suami : Mansur
Anak : Muhammad Abdurrahman Rois
Muhammad Burhanudin Absullah
Menantu : Nadia Kusumaningrum

B. Riwayat Pendidikan

- SDN Kragan Rembang, lulus tahun 1985
- SMPN Kragan Rembang, lulus tahun 1988
- PGAN Lasem Rembang, lulus tahun 1991
- S1: IAIN Walisongo Semarang, lulus tahun 1995
- S2: Ekonomi Islam, UII Yogyakarta, lulus tahun 2004

C. Karya Ilmiah

- a. Nilai budaya walimah perkawinan (*walimatul 'urusy*) dalam pemerdayaan ekonomi masyarakat (studi kasus kelurahan Gondorio, Ngaliyan, Semarang), Inferensi IAIN Salatiga, Vol 10 No 2/ 2016
- b. Menilik Perempuan sebagai social climber dalam pandangan ekonomi Islam, SAWWA UIN Walisongo: Vol 12 No 2/2017
- c. Potensi dan *self satisfaction* perempuan dalam pengembangan pemberdayaan ekonomi Islam kreatif, At-Taqaddum UIN walisongo : vol 11 No 1/ 2019

- d. Study Ekonomi syariah tentang konsep syukur Barat dalam kesederhanaan dan perilaku ZIS, *Equilibrium STAIN Kudus* : Vol 7 no 2 /2019
- e. Analisis SWOT pada strategi pemasaran produk simpanan kurban di KSPPS BMT NU Sejahtera Cabang Jepara, Serambi Vol 1 No 3/2019
- f. Pengaruh perkembangan teknologi terhadap cara mendidik anak dan dampaknya terhadap *budget* keuangan keluarga muslim, *Berdaya* : Vol 1 No 1 /2019.
- g. Implementasi etika bisnis Islam pedagang dalam menjamin kestabilan harga dan daya beli masyarakat dimasa new normal, *I N O V A S I* -17 (2), 2021
- h. Pelatihan Bisnis Online Ibu Rumah Tangga dalam Mengatasi kemiskinan Masa Pandemi COVID -19, *JMM Jurnal Masyarakat Mandiri* vol 5, No 6 2021.
- i. Buku ISBN *Diskursus Fiskal dan Monoter Islam di Indonesia*, RaSAIL Media Group, Semarang, 2014
- j. Buku ISBN *The Living Walisongo: Historisitas, Kontekstualitas dan Spiritualitas*, [SeAP \(Southeast Asian Publishing\) bekerjasama UIN Walisongo Semarang Anggota IKAPI . Semarang , 2022](#)
- k. Pentahelix Movement Through Ecopreneurship-Based Waste Management DIMAS: *Jurnal Pemikiran Agama dan Pemberdayaan* Volume 22 Nomor 2, October 2022 DOI: 10.21580/dms.2022.222.1298

Semarang, 10 November 2023


Muryassarrah